



# Indeks

## Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 2025

**Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media  
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia**

**Indeks Komunikasi Pembangunan  
dan Informasi Publik Tahun 2025**



# Tim Redaksi

**Pengarah** : Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media

**Penanggung Jawab** : Direktur Komunikasi Publik

**Ketua Tim Penyusun** : Kunto Adi Wibowo, Ph.D

**Tim Penyusun** :

1. Hardy Kembar Pribadi
2. Norvantry Bayu Akbar
3. Sheila
4. Dimas Tri Hadyanto
5. Dhika Rifansyah
6. Citra Agustin Tanjung
7. Lukman Taufiq
8. Abdul Basith Bardan
9. Nurtsalitsa Wahyu Alfiati

**Mitra Akademik** :

1. Dr. Gema Nusantara, M.I.Kom
2. Syauqy Lukman, S.Sos., M.S.M., Ph.D
3. Ikhsan Fuady, S.IP.,M.Si
4. Azizul Rahman, M.I.Kom

**Desain Sampul dan Isi** :

1. M. Fathan Insanukamil
2. Iwan
3. Najma Rafifah Putri Syallya

**Disusun dan diterbitkan pada tahun 2025**

**Penerbit** :

Direktorat Komunikasi Publik  
Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media  
Kementerian Komunikasi dan Digital

**Alamat Redaksi** :

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110  
Telp/Fax 021-3459191  
[www.Komdigi.go.id](http://www.Komdigi.go.id)

# Daftar Isi

<b>Tim Redaksi</b>	i	Kapasitas Institusi	12
<b>Daftar Isi</b>	ii	Pengantar Dimensi Proses	22
<b>Kata Pengantar</b>	iv	Capaian Indeks Dimensi Proses K/L/D	22
<b>Sambutan</b>	vi	Komunikasi Strategis	22
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	vii	Hak Publik	27
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1	Cakupan Kerja	32
Latar Belakang	1	Prinsip Komunikasi Publik	52
Tujuan dan Kegunaan	3	Pelibatan Pemangku Kepentingan	57
Tujuan Pengukuran Indeks	3	Informasi Terpercaya	66
Kegunaan Pengukuran Indeks	3	Capaian Indeks Agregat K/L/D	71
Konsep dan Definisi	4	<b>BAB 3 PEMBAHASAN INDEKS KPIP KATEGORI PUBLIK KUNCI TAHUN 2025</b>	78
Metodologi	6	Gambaran Umum	79
Pendekatan Penelitian	6	Pengantar Dimensi Output	87
Variabel Pengukuran	6	Capaian Indeks Dimensi Output Publik Kunci	87
Instrumen Penelitian	9	Prinsip Komunikasi Publik	87
Uji Validitas dan Reliabilitas	9	Pelibatan Pemangku Kepentingan	90
Limitasi	9	Informasi Terpercaya	93
<b>BAB 2 PEMBAHASAN INDEKS KPIP KATEGORI K/L/D TAHUN 2025</b>	10	Pengantar Dimensi Outcome	96
Gambaran Umum	11	Capaian Indeks Dimensi Outcome Publik Kunci	97
Pengantar Dimensi Input	12		
Capaian Indeks Dimensi Input K/L/D	12		

Kepercayaan Publik	97	Rekomendasi	122
Partisipasi Publik	99	Daftar Pustaka	125
Hak Publik	100		
<b>BAB 4 PEMBAHASAN</b>	106	<b>LAMPIRAN</b>	126
<b>INDEKS KPIP TAHUN 2025</b>		Lampiran 1. Informasi Sumber Data Primer	126
Perbandingan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 2021-2025	107	Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	132
Analisis Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik untuk Daerah Otonomi Baru (DOB)	110	Lampiran 3. Perhitungan Indeks KPIP Tahun 2025	170
Variabel Agregat Indeks KPIP Untuk Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan	112	Lampiran 4. Item Pertanyaan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah	172
Analisis Gap Dimensi Output dan Outcome	114	Lampiran 5. Item Pertanyaan Publik Kunci	187
GAP Dinas Kominfo & Publik Dimensi Output	114		
GAP Dinas Kominfo & Publik Dimensi Outcome	116		
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	120		
Analisis Capaian dan Pembobotan Indeks KPIP 2025	121		
Kesimpulan	121		

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kegiatan pengukuran Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) 2025 dapat diselesaikan dengan baik setiap prosesnya. Pengukuran Indeks ini merupakan bagian dari tugas pokok dan menjadi salah satu Program Kerja tahun 2025 dari Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital. Tahun 2025 ini menandai pelaksanaan pengukuran Indeks KPIP yang pertama kali, sebelumnya bernama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). Sebagaimana pada kegiatan sebelumnya, pengukuran Indeks KPIP Tahun 2025 dilaksanakan dengan tujuan estimasi nasional, menggunakan pendekatan sistem (Input-Proses-Output-Outcome), dengan data kuantitatif sebagai basis penghitungan Indeks. Data untuk dimensi Input dan Proses berasal dari hasil survei terhadap unit-unit kerja pelaksana fungsi informasi dan komunikasi publik di tingkat pemerintah pusat (total sampling 93 K/L, dan dari jumlah tersebut 91 Kementerian dan Lembaga Non kementerian bersedia berpartisipasi), dan Dinas Komunikasi dan Informatika di tingkat Provinsi (total sampling 38 Provinsi dan yang berpartisipasi 36 Provinsi) dengan instrumen *self-administered questionnaire*.

Data untuk dimensi Output dan Outcome berasal dari hasil survei publik kunci dari berbagai stakeholder seperti akademisi, pelaku usaha, anggota profesi, organisasi non pemerintah, media serta unsur masyarakat (termasuk penyandang disabilitas) di 38 Provinsi, dengan pendekatan *cluster sampling* berdasarkan kelompok publik kunci. Target populasi yaitu penduduk berusia 17-64 tahun (termasuk penyandang disabilitas) dengan sampel sebanyak 1.140 orang.



**Marroli Jeni Indarto S.Sos., M.Si**

Pt. Direktur Komunikasi Publik

Pengumpulan data dari responden dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner sebagai pedoman wawancara oleh tim enumerator yang terdiri dari para peneliti bidang komunikasi dan mitra dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Hasil *piloting* terhadap instrumen survei publik kunci menunjukkan angka reliabilitas rata-rata di atas 0,80.

Dengan selesainya kegiatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para ahli, pembuat kebijakan, dan praktisi informasi dan komunikasi publik yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta memberikan sumbang saran serta gagasan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga perlu kami sampaikan kepada Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital serta ketua peneliti Universitas Padjadjaran yang telah memberikan dukungannya, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan atensinya, bersama seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya.

Akhir kata, kami berharap hasil pengukuran Indeks KPIP Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat nyata dalam memperkuat kualitas tata kelola komunikasi pembangunan dan informasi publik di Indonesia. Temuan dan rekomendasi yang tersaji di dalam laporan ini diharapkan mampu menjadi rujukan strategis bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi, memperluas jangkauan komunikasi publik, serta memastikan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan

nasional. Pelaksanaan pengukuran Indeks KPIP perdana ini juga menjadi fondasi penting bagi penyempurnaan pengukuran pada tahun-tahun berikutnya, baik dari sisi metodologi, cakupan, maupun implementasi hasilnya. Kami menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap masukan konstruktif demi penguatan kegiatan serupa di masa mendatang.

Semoga kerja kolaboratif yang telah terbangun antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, pelaku usaha, media, serta seluruh publik kunci yang terlibat dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Besar harapan kami agar laporan ini dapat menjadi kontribusi berarti dalam mendukung terwujudnya praktik komunikasi publik yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk memajukan kualitas komunikasi publik di Indonesia



**Fifi Aleyda Yahya S.E**

Direktur Jenderal Komunikasi  
Publik dan Media

# Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan *pengukuran Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik* (Indeks KPIP) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan penuh apresiasi, kami menyambut publikasi laporan ini karena kami meyakini bahwa Indeks KPIP merupakan instrumen strategis bagi badan publik pemerintah dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan komunikasi pembangunan dan informasi publik, yang merupakan bagian integral dari tugas pokok dan fungsi setiap instansi.

Pengukuran Indeks KPIP merupakan wujud komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik nasional, sekaligus melanjutkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Instruksi tersebut menugaskan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengoordinasikan pelaksanaan komunikasi publik, termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja komunikasi publik Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, serta memastikan diseminasi informasi publik melalui narasi tunggal kebijakan dan program pemerintah.

Tahun 2025 menandai pengukuran perdana Indeks KPIP, yang sebelumnya dikenal sebagai Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP). Transformasi ini mencerminkan upaya penguatan kerangka evaluasi agar lebih responsif terhadap dinamika komunikasi pembangunan, perkembangan ekosistem digital, serta kebutuhan publik yang semakin kompleks. Dalam konteks demokrasi, komunikasi pembangunan dan informasi publik memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Namun, percepatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin disruptif menimbulkan tantangan baru, termasuk kaburnya batas antara ruang privat dan publik, meningkatnya disinformasi, serta tuntutan terhadap pelayanan informasi yang cepat dan akurat.

Situasi ini menegaskan pentingnya pembaruan, penyesuaian, dan penguatan kapasitas pemerintah dalam mengelola komunikasi pembangunan dan informasi publik. Evaluasi berbasis data yang objektif, seperti Indeks KPIP, menjadi sangat diperlukan untuk memantau perkembangan, mengidentifikasi celah perbaikan, dan mendorong peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Indeks KPIP disusun melalui koordinasi dan kolaborasi antara kementerian/

lembaga dan pemerintah daerah, dengan empat dimensi utama pengukuran: Input, Proses, Output, dan Outcome. Kami berharap hasil pengukuran Indeks KPIP Tahun 2025 mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja komunikasi pembangunan dan informasi publik nasional. Hasil ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi setiap instansi dalam mengoptimalkan strategi komunikasi publik, meningkatkan efektivitas pelayanan informasi, serta memastikan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas dapat terus dipenuhi.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, para ahli, peneliti, pembuat kebijakan, mitra akademik, pelaksana fungsi komunikasi publik pusat dan daerah, serta seluruh publik kunci yang telah berpartisipasi. Semoga hasil pengukuran Indeks KPIP Tahun 2025 dapat memberikan manfaat yang besar bagi penguatan tata kelola komunikasi publik dan pembangunan di Indonesia.

# Ringkasan Eksekutif


Capaian Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Nasional Tahun 2025 yang berada pada angka 77,58 (baik) menjadi indikator krusial bagi peta jalan tata kelola komunikasi pemerintah. Angka ini tidak hanya merefleksikan kinerja tahun berjalan, tetapi juga menandai transisi metodologis dari indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP), di mana terjadi pergeseran fokus pengukuran dari aspek administratif menuju aspek substansial seperti kepercayaan dan hak publik. Struktur nilai saat ini mengindikasikan bahwa pola kinerja komunikasi pemerintah masih cenderung terjebak pada tataran normatif pemenuhan tanggung jawab prosedural, namun belum sepenuhnya berhasil menyentuh aspek efektivitas dampak.

Hal ini terkonfirmasi secara empiris dari tingginya skor dimensi Input (87,27) dan Proses (85,59) yang menunjukkan bahwa dari sisi regulasi dan ketersediaan sumber daya, kewajiban negara telah tunai dilaksanakan dengan sangat baik. Namun, tingginya kepatuhan prosedur tersebut tidak serta-merta berbanding lurus dengan dimensi Output (75,61) dan Outcome (75,13) yang justru mengalami penurunan. Fenomena ini menegaskan bahwa kinerja yang sekadar “menggugurkan kewajiban” tidak lagi relevan; tantangan komunikasi negara telah bergeser dari isu kelengkapan fasilitas menuju kualitas dampak yang dirasakan langsung oleh publik.

Jika dibedah lebih dalam, terdapat disparitas kualitas kinerja yang nyata antar-pemangku kepentingan. Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat berhasil menjadi tolak ukur

(*benchmark*) dengan capaian persepsi 88,70, mengungguli Pemerintah Daerah yang berada di angka 82,95. Keunggulan K/L didorong oleh kematangan tata kelola yang profesional, terutama pada dimensi Informasi Terpercaya (92,06) dan Komunikasi Strategis (90,98). Sebaliknya, meskipun Pemerintah Daerah memiliki kinerja baik dalam aspek Hak Publik (87,67), mereka menghadapi kendala struktural pada dimensi Pelibatan Pemangku Kepentingan (74,46) dan Komunikasi Strategis (80,45). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi di daerah masih didominasi pendekatan formalitas birokrasi, minim mekanisme dialog, dan belum memiliki jejaring kolaborasi yang kuat dibandingkan pusat yang didukung infrastruktur lebih mapan.

Tantangan yang paling mendesak sesungguhnya datang dari persepsi Publik Kunci yang memberikan skor indeks survei nasional sebesar 75,75. Angka ini menyingkap “paradoks informasi” dalam ekosistem digital kita: media sosial (seperti Instagram) menjadi rujukan utama konsumsi informasi masyarakat, namun justru memiliki tingkat kepercayaan (kredibilitas) terendah. Publik masih menaruh kepercayaan tertinggi pada situs resmi pemerintah dan siaran berita, namun pola konsumsi mereka telah bergeser ke konten visual cepat. Selain itu, partisipasi publik mencatatkan skor moderat (73,32); masyarakat menyadari adanya ruang pelibatan secara normatif, namun pengalaman riil mereka dalam berpartisipasi masih minim. Hal ini diperkuat dengan temuan bahwa entitas partisipatif seperti Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) hanya dikenal oleh 20% responden, menandakan bahwa kanal pelibatan akar



rumpun belum berfungsi optimal. Laporan ini juga menyoroti kesenjangan (gap) persepsi yang tajam antara penilaian mandiri pemerintah daerah dan realitas publik.

Data menunjukkan tendensi *overconfidence* di kalangan Dinas Kominfo daerah terutama di provinsi seperti Aceh, Bali, dan Banten di mana pemerintah merasa layanan mereka sudah prima, namun publik menilai akses dan pelibatan masih sangat minim. Lebih jauh lagi, daerah dengan kinerja administratif tinggi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat pun tidak luput dari kritikan publik, yang menunjukkan bahwa keberhasilan teknis tidak otomatis menghasilkan kepuasan masyarakat. Gap terbesar terletak pada variabel Pelibatan Stakeholder, yang mengonfirmasi bahwa komunikasi daerah masih bersifat satu arah (*top-down*). Masalah struktural juga terlihat dari ketidaklengkapan data ekstrem di Bengkulu dan Papua Tengah, yang mencerminkan lemahnya fungsi monitoring kinerja. Sebaliknya, provinsi dengan struktur sosial komunal seperti Maluku dan Kalimantan Tengah justru menunjukkan efektivitas output dan outcome yang lebih baik,

memberikan pelajaran bahwa pendekatan kultural bisa lebih efektif dibanding pendekatan teknokratis semata.

Berdasarkan temuan komprehensif tersebut, arah kebijakan komunikasi nasional ke depan mutlak memerlukan reformasi paradigma dari kinerja normatif menuju kinerja substantif dan berorientasi hasil (*outcome-based*). Fokus intervensi tidak lagi cukup hanya pada pengadaan infrastruktur, melainkan harus pada harmonisasi standar kualitas antara pusat dan daerah. Direkomendasikan adanya asistensi teknis intensif untuk mentransfer kapasitas strategis K/L ke daerah, serta revitalisasi peran kanal partisipasi seperti KIM agar lebih inklusif merangkul kelompok rentan. Strategi komunikasi juga harus beradaptasi dengan lanskap digital melalui penguatan literasi digital untuk menjembatani paradoks kepercayaan di media sosial. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya hadir sebagai pelengkap administrasi, tetapi bertransformasi menjadi layanan publik yang inklusif, transparan, dan benar-benar memberdayakan masyarakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media  
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

# Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan terencana yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, besaran anggaran, maupun kecanggihan teknologinya, melainkan juga oleh bagaimana pembangunan tersebut dikomunikasikan kepada publik (Kabir & Beryl, 2021). Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, di mana partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan, komunikasi pembangunan dan keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat utama terciptanya pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan (Susanti et al., 2025). Oleh karena itu, pengukuran Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) menjadi kebutuhan strategis yang tidak bisa diabaikan.

Komunikasi pembangunan bukan sekadar proses penyampaian informasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi pembangunan merupakan proses dialog yang memungkinkan masyarakat memahami, merespons, dan berpartisipasi dalam kebijakan dan program Pembangunan (Ibuot et al., 2021). Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan yang baik sekalipun cenderung tidak mencapai dampak maksimal karena masyarakat tidak memahami tujuan, manfaat, maupun mekanisme pelaksanaannya. Dalam kondisi seperti ini, pengukuran KPIP menjadi penting untuk memastikan bahwa komunikasi pembangunan benar-benar berjalan efektif, bukan hanya sekadar formalitas administratif.

Pentingnya mengukur KPIP sangat erat berkaitan erat dengan dinamika komunikasi di era digital. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses dan memproduksi informasi. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi

publik; masyarakat kini terpapar pada beragam sumber informasi melalui media sosial, platform digital, dan jejaring komunitas (Susanti & Anom, 2023). Di tengah banjir informasi ini, kualitas komunikasi pemerintah diuji: apakah pesan pembangunan yang disampaikan mampu menembus kebisingan informasi, dipercaya, dan dipahami oleh masyarakat? Pengukuran KPIP menjadi alat penting untuk menjawab pertanyaan ini secara empiris, bukan berdasarkan persepsi subjektif semata.

Selain itu, pengukuran KPIP berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, keterbukaan informasi tidak cukup hanya diukur dari keberadaan website atau ketersediaan dokumen. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat merasakan kemudahan akses, kejelasan isi informasi, dan kebermanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. KPIP menjembatani kesenjangan ini dengan mengukur dimensi kualitas, bukan sekadar kuantitas informasi.

Komunikasi pembangunan, yang secara substansial beririsan erat dengan komunikasi publik, memegang peranan fundamental dalam ekosistem negara demokrasi. Urgensi ini memiliki landasan konstitusional yang kuat merujuk pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap individu untuk berkomunikasi serta mengakses informasi, sekaligus mewajibkan seluruh entitas pemerintahan untuk mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi. Lebih lanjut, dalam kerangka Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, komunikasi publik diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mengakselerasi partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi ini mencakup keterlibatan dalam formulasi kebijakan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan, yang

diwujudkan melalui penguatan ruang sipil guna menjamin keberlangsungan fungsi advokasi, pemberdayaan, serta kontrol sosial oleh masyarakat sipil.

Pengukuran KPIP menjadi instrumen untuk mengidentifikasi kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di banyak wilayah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih terdapat hambatan besar dalam akses informasi publik, baik karena keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital, maupun faktor bahasa dan budaya lokal (Husna & Budiman, 2023; Ibo et al., 2025). Jika tidak diukur secara sistematis, kesenjangan ini berpotensi memperdalam ketimpangan pembangunan. Dengan adanya KPIP, pemerintah dapat memetakan wilayah-wilayah dengan kualitas komunikasi publik yang masih rendah dan merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Urgensi pengukuran KPIP tidak dapat dilepaskan dari konteks penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Merujuk pada pandangan Mappisabbi (2024), prinsip transparansi dan akuntabilitas hanya dapat terealisasi secara optimal apabila komunikasi publik berjalan efektif. Perspektif ini sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menargetkan terciptanya ekosistem komunikasi, kebebasan pers, dan media massa yang berintegritas. Guna mencapai tujuan tersebut, strategi kebijakan difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan (level meso), peningkatan kompetensi dan etika insan pers (level mikro), penyehatan media arus utama, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital.

Melalui KPIP, pemerintah dapat mengukur sejauh mana prinsip transparansi tersebut diimplementasikan dalam praktik komunikasi sehari-hari: seberapa jelas informasi

kebijakan disampaikan, seberapa responsif pemerintah terhadap pertanyaan dan keluhan publik, serta seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi pemerintah. Dengan kata lain, KPIP menjadi indikator kinerja tata kelola komunikasi pemerintah yang dapat diintegrasikan dalam sistem evaluasi kinerja lembaga pemerintah.

Dalam perspektif sosial-politik, pengukuran KPIP juga memiliki implikasi penting bagi stabilitas sosial dan kualitas demokrasi. Di tengah meningkatnya polarisasi politik, penyebaran hoaks, dan krisis kepercayaan terhadap institusi publik, komunikasi pemerintah yang kredibel dan terukur menjadi sangat krusial (Pananrangi et al., 2025). Tanpa pengukuran yang objektif, pemerintah sulit mengevaluasi apakah strategi komunikasinya justru meredam atau memperburuk fragmentasi sosial. KPIP membantu pemerintah membaca dinamika persepsi publik secara lebih sistematis, sehingga dapat merancang strategi komunikasi yang lebih konstruktif, dialogis, dan meredam konflik.

Pentingnya pengukuran KPIP juga terlihat dalam konteks pembangunan berbasis partisipasi. Pembangunan yang partisipatif hanya mungkin terwujud jika masyarakat memiliki akses informasi yang memadai dan saluran komunikasi yang terbuka (Ibuot et al., 2021). Pengukuran KPIP dapat menunjukkan sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan, merasa didengar aspirasinya, dan memahami arah kebijakan pemerintah. Dengan demikian, KPIP menjadi indikator penting dalam menilai kualitas relasi komunikasi antara negara dan warga negara.

Selain itu, pengukuran KPIP berperan sebagai instrumen pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*). Hasil pengukuran KPIP tidak hanya berfungsi sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai bahan refleksi dan perbaikan berkelanjutan bagi lembaga pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan data KPIP untuk mengidentifikasi kelemahan dalam strategi

komunikasi mereka, seperti pemilihan kanal komunikasi yang tidak efektif, pesan yang sulit dipahami, atau kurangnya respon terhadap umpan balik publik. Dengan demikian, KPIP menjadi dasar dalam merancang program peningkatan kapasitas SDM komunikasi pemerintah, penguatan kelembagaan humas pemerintah, serta inovasi dalam strategi komunikasi publik.

Dalam konteks pembangunan daerah, pengukuran KPIP juga mendukung terciptanya persaingan sehat antar daerah dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik. Daerah dapat menjadikan hasil KPIP sebagai cermin kinerja komunikasi publiknya sekaligus sebagai sarana *benchmarking* dengan daerah lain. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengelola fungsi komunikasi publik, tidak lagi memandangnya sebagai fungsi marginal, tetapi sebagai elemen strategis pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) bukan hanya aktivitas administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pembangunan itu sendiri. KPIP menjadi alat untuk memastikan bahwa pembangunan tidak berjalan dalam ruang hampa komunikasi, tetapi didukung oleh proses dialogis yang transparan, inklusif, dan berbasis kepercayaan. Oleh karena itu, penguatan metodologi, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil pengukuran KPIP secara berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini bertujuan untuk mengetahui indeks komunikasi pembangunan dan informasi publik baik pada kementerian, lembaga, ataupun dinas dinas provinsi serta mengukur indeks KPIP pada publik kunci dalam hal ini masyarakat umum pada periode Januari-September 2025.

## Tujuan dan Kegunaan

### Tujuan Pengukuran Indeks

Mengukur Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik merupakan hal penting sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dalam hal pembangunan masyarakat. Indeks KPIP yang baik merupakan parameter praktik *good governance* yang baik. Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan kajian ini adalah:

Mengukur Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik yang dilakukan di lingkup Kementerian (K), Lembaga Non Kementerian (L), dan Pemerintah Daerah (D) pada seluruh provinsi;

Mengidentifikasi hambatan dan potensi penguatan koordinasi komunikasi publik lintas sektor, termasuk antara Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, guna memperkuat prinsip *meaningful participation* dan meningkatkan kualitas diseminasi informasi pembangunan;

Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi komunikasi publik yang komprehensif, berbasis data hasil pengukuran KPIP, untuk mendukung integrasi fungsi komunikasi publik nasional dan pencapaian sasaran pembangunan demokratis, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

### Kegunaan Pengukuran Indeks

Secara garis besar, kegunaan pengukuran indeks ini adalah sebagai instrumen vital untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam hal Komunikasi Pembangunan dan keterbukaan informasi publik. Hasil pengukuran ini berfungsi sebagai parameter nyata (tolak ukur) untuk menilai apakah tata kelola pemerintahan (*good governance*) dalam aspek komunikasi pembangunan

sudah berjalan dengan baik atau belum. Adapun tiga kegunaan spesifiknya adalah:

1. Sebagai Alat Pemetaan Kinerja Komunikasi Pemerintah, hasil indeks berguna untuk memetakan dan mengevaluasi performa komunikasi publik secara menyeluruh, baik di tingkat Kementerian, Lembaga Non-Kementerian, hingga Pemerintah Daerah di seluruh provinsi.

2. Sebagai Diagnosa untuk Perbaikan Koordinasi, pengukuran ini berguna untuk menemukan letak masalah (hambatan) dan peluang dalam koordinasi lintas sektor. Hasil diagnosa ini dipakai untuk memperbaiki kualitas penyebaran informasi dan menjamin partisipasi publik yang lebih bermakna (*meaningful participation*).

3. Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Berbasis Data (*Evidence-Based*), data hasil pengukuran digunakan sebagai landasan valid untuk merumuskan strategi dan kebijakan komunikasi baru yang lebih komprehensif, inklusif, serta adaptif terhadap perkembangan

## Konsep dan Definisi

Komunikasi Pembangunan berperan fundamental sebagai landasan utama dalam penyediaan informasi publik dan mendorong keterbukaan informasi. Melalui pendekatan strategis, partisipatif, dan adaptif, komunikasi pembangunan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Komunikasi pembangunan yang efektif, baik melalui media konvensional maupun digital, memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik, mempersempit kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik.

Komunikasi pembangunan mendorong masyarakat untuk aktif mencari, memahami, dan memanfaatkan informasi publik, sehingga partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengukuran secara khusus apakah komunikasi pembangunan dan keterbukaan informasi publik telah diterapkan

dengan baik oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Dinas Kominfo) kepada masyarakat. Pada pelaksanaan penelitian untuk mengukur Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik Tahun 2025, digunakan 4 dimensi utama yang tentunya diadaptasikan dari pengukuran indeks pada tahun-tahun sebelumnya, meliputi:

### 1. Dimensi Input

Merupakan sumber daya yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang tercakup dalam kapasitas institusi. Di dalamnya terdapat sumber daya manusia, mandat resmi, dan struktur organisasi yang menunjang proses komunikasi.

### 2. Dimensi Proses

Merupakan serangkaian tindakan, langkah-langkah atau kegiatan untuk mencapai tujuan KPIP, yang mencakup: komunikasi strategis, cakupan kerja, prinsip komunikasi publik, pelibatan pemangku kepentingan, informasi terpercaya, dan hak publik.

### 3. Dimensi Output

Merupakan hasil, produk akhir, konsekuen atau hasil akhir dari proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dimensi Output diukur dari variabel-variabel reflektif dari dimensi proses, meliputi: prinsip komunikasi publik, pelibatan pemangku kepentingan, dan informasi terpercaya.

### 4. Dimensi Outcome

Merupakan hasil, konsekuensi, produk akhir atau efek dari luaran pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dimensi Outcome diukur dari hak publik, partisipasi publik, dan kepercayaan publik.

Penyusunan indikator-indikator dalam setiap dimensi tentunya mengalami penyesuaian setiap tahunnya. Pada tahun 2025, terdapat perubahan nama dari Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) menjadi Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) yang tentunya menjadi lebih komprehensif dalam pengukuran indeks. Perbedaan indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Variabel Pengukuran Berdasarkan Dimensi

NO	DIMENSI	TAHUN			
		2021	2022	2023 & 2024	2025
1	INPUT	Variabel Anggaran	Variabel Anggaran	Variabel Anggaran	
		Variabel Bahan Informasi	Variabel Bahan Informasi	Variabel Bahan Informasi	
		Variabel Sarana dan Prasarana	Variabel Sarana dan Prasarana	Variabel Sarana dan Prasarana	Variabel Kapasitas Institusi
		Variabel Media dan Saluran Komunikasi	Variabel Media dan Saluran Komunikasi	Variabel Media dan Saluran Komunikasi	
2	PROCESS	Variabel Pengumpulan Data dan Informasi	Variabel Pengumpulan Data dan Informasi	Variabel Pengumpulan Data dan Informasi	Variabel Komunikasi Strategis
		Variabel Perencanaan	Variabel Perencanaan	Variabel Perencanaan	Variabel Cakupan Kerja
		Variabel Pelaksanaan	Variabel Pelaksanaan	Variabel Pelaksanaan	Variabel Prinsip Komunikasi Publik
		Variabel Monitoring dan Evaluasi	Variabel Monitoring dan Evaluasi	Variabel Monitoring dan Evaluasi	Variabel Pelibatan Pemangku Kepentingan Variabel Informasi Terpercaya Variabel Hak Publik
3	OUTPUT	Variabel Agenda Publik	Variabel Agenda Publik	Variabel Penerimaan Informasi	Variabel Prinsip Komunikasi Publik (Reflektif)
		Variabel Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik	Variabel Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik	Variabel Penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik	Variabel Pelibatan Pemangku Kepentingan (Reflektif)
			Variabel Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik	Variabel Penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik	Variabel Informasi Terpercaya (Reflektif)
4	OUTCOME	Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	Variabel Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	Variabel Hak Publik (Reflektif)
		Variabel Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah	Variabel Partisipasi Publik	Variabel Partisipasi Publik	Variabel Partisipasi Publik
		Variabel Keadilan Informasi	Variabel Pemerataan Informasi	Variabel Pemerataan Informasi	Variabel Kepercayaan Publik

# Metodologi

## Pendekatan Penelitian

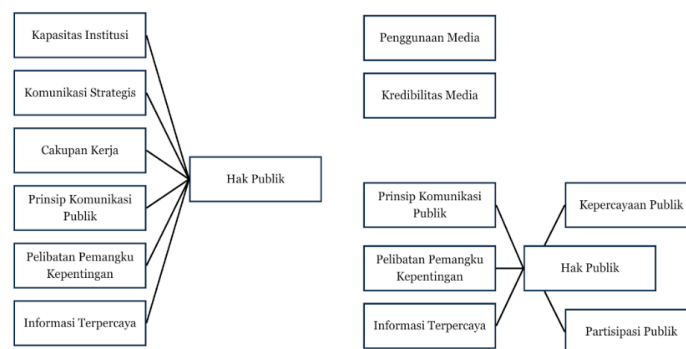
Pendekatan kuantitatif evaluatif berbasis survei, dengan dua kelompok responden:

1. K/L/D: seluruh kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah tingkat provinsi.
2. Publik Kunci: tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat umum dengan kriteria tertentu.

## Variabel Pengukuran

Untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam Survei K/L/D dan Survei Publik Kunci, kami merancang kerangka konseptual yang disesuaikan dengan Rancangan Metodologi Pengukuran Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik Tahun 2025.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dipaparkan sebelumnya, pengukuran Indeks KPIP ini diturunkan ke dalam beberapa variabel penelitian. Penentuan variabel ini bertujuan untuk menerjemahkan konstruksi teoretis komunikasi pembangunan ke dalam elemen-elemen yang

lebih spesifik dan terukur. Variabel-variabel ini akan menjadi komponen utama dalam menilai kinerja komunikasi publik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Tabel 1.2 Variabel Kementerian, Lembaga, dan Daerah

SURVEI K/L/D	
VARIABEL	DEFINISI
Kapasitas Institusi	Kapasitas institusi, sebagaimana didefinisikan Stoker (2002), merupakan fondasi sumber daya dan keterampilan untuk mendukung tata kelola ( <i>governance</i> ) komunikasi publik yang terintegrasi dan melampaui batas administrasi pemerintahan tradisional. Mengingat kompleksitas dan risiko kegagalan dalam tata kelola, K/L/D perlu mengoptimalkan kapasitas institusinya sebagai prasyarat efektivitas komunikasi publik berdasarkan kerangka kerja OECD, yang secara operasional ditentukan oleh ketersediaan input sumber daya vital meliputi aspek Manusia ( <i>Man</i> ) dari sisi kualitas dan kuantitas, Anggaran ( <i>Money</i> ), kemampuan produksi Materi ( <i>Materials</i> ), Metode kerja ( <i>Methods</i> ) seperti SOP dan mandat, Mesin ( <i>Machines</i> ) sebagai sarana pendukung, serta berbagai jenis Media yang digunakan.

Komunikasi Strategis	Komunikasi strategis merupakan elemen kunci efektivitas pengelolaan komunikasi publik yang didefinisikan sebagai praktik terencana oleh agen komunikasi dengan sasaran yang jelas (Holtzhausen et al., 2021). Penerapannya di lingkungan K/L/D menuntut pembuktian melalui tahapan komprehensif yang dimulai dari basis data melalui riset (formatif dan empirik) serta analisis (situasi dan pemangku kepentingan) untuk mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan. Proses ini kemudian diterjemahkan ke dalam penyusunan strategi pesan, perencanaan media, penugasan personel, dan koordinasi internal, yang dikawal melalui mekanisme pemantauan serta evaluasi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan secara terukur dan berbasis bukti.
Prinsip Komunikasi Publik	Prinsip komunikasi publik mencakup enam landasan utama, yaitu transparansi, integritas, dan akuntabilitas (OECD, 2021), serta partisipatif, kritis, dan berbasis pembelajaran (Lennie & Tacchi, 2013). Transparansi diukur melalui diseminasi proaktif informasi, integritas melalui prioritas kepentingan publik, dan akuntabilitas melalui penyediaan data terkait kampanye, anggaran, serta dampaknya. Sementara itu, prinsip partisipatif dan kritis memastikan pelibatan pemangku kepentingan dan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan wilayah 3T) dalam seluruh tahapan evaluasi, sedangkan prinsip berbasis pembelajaran menekankan respons terhadap masukan masyarakat dan refleksi internal. Efektivitas penerapan prinsip-prinsip ini dinilai dengan membandingkan ( <i>mirroring</i> ) penilaian internal K/L/D dengan persepsi publik untuk mengidentifikasi konsistensi atau kesenjangan dalam pelaksanaannya.
Pelibatan Pemangku Kepentingan	Pelibatan pemangku kepentingan ( <i>stakeholder engagement</i> ) didefinisikan sebagai praktik inklusif menyertakan berbagai pihak dalam kebijakan pemerintah, yang menandai pergeseran paradigma menuju tata kelola ( <i>governance</i> ) yang lebih horizontal dan kooperatif. Mengacu pada Alemanno (2015) dan kerangka OECD (2021), efektivitas pelibatan ini mensyaratkan tiga komponen interaksi, seperti penyampaian informasi satu arah, penerimaan umpan balik, dan dialog dua arah, yang harus diterapkan secara menyeluruh pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi sesuai Inpres No. 9/2015. Sinergi ini mencakup identifikasi aktor yang luas, meliputi elemen pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media) serta aktor ekosistem baru seperti platform digital, influencer, tokoh masyarakat, dan tokoh agama guna menciptakan komunikasi publik yang berpusat pada masyarakat ( <i>citizen-centric</i> ).
Informasi Terpercaya	Informasi tepercaya ( <i>trustworthy information</i> ) didefinisikan sebagai tingkat kredibilitas pesan yang mencerminkan kepercayaan publik terhadap kebenaran substansi kebijakan dan program pemerintah. Sebagai variabel evaluasi, aspek ini mengukur sejauh mana K/L/D mematuhi mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang selaras dengan konsep <i>message credibility</i> dalam literatur akademik. Oleh karena itu, indikator operasionalnya menuntut K/L/D untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diproduksi dan disebarluaskan memenuhi kualifikasi akurat, benar, tidak menyesatkan, mudah dipahami, serta disampaikan secara tepat waktu sebagai prasyarat mutlak kredibilitas komunikasi publik.
Hak Publik	Hak publik didefinisikan sebagai hak dasar warga negara yang dilindungi hukum, yang operasionalisasinya dalam evaluasi K/L/D diturunkan dari empat landasan regulasi utama mencakup UUD 1945 Pasal 28F terkait akses dan pengelolaan informasi, UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat, UU No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan rencana hingga alasan keputusan publik, serta UU No. 12 Tahun 2011 tentang partisipasi dalam pembentukan regulasi. Tingkat pemenuhan indikator-indikator tersebut diukur melalui analisis komparatif antara penilaian internal K/L/D dan persepsi publik kunci, di mana identifikasi kesenjangan ( <i>gap</i> ) skor antar kedua perspektif berfungsi sebagai dasar evaluasi konsistensi dan optimalisasi jaminan hak-hak publik tersebut.

Tabel 1.3 Variabel Publik Kunci

SURVEI PUBLIK KUNCI	
VARIABEL	DEFINISI
Penggunaan Media	Penggunaan media didefinisikan sebagai variabel pemetaan pola konsumsi informasi publik secara umum yang mencakup akses terhadap media sosial, televisi, radio, dan media cetak. Selain merekam kebiasaan umum, variabel ini secara spesifik mengidentifikasi saluran utama yang diandalkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah, yang bertujuan menyediakan data komparatif strategis untuk menyelaraskan kanal komunikasi yang digunakan oleh K/L/D dengan preferensi media audiens sasarannya.

Kredibilitas Media	Kredibilitas media didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan publik terhadap media sebagai saluran utama penyebaran informasi kebijakan dan program pemerintah, sebagaimana dirumuskan oleh Shah & Wei (2022). Berbeda dengan variabel pelibatan pemangku kepentingan, variabel ini secara spesifik mengukur aspek kepercayaan terhadap fungsi media sebagai kanal distribusi informasi yang mencakup keseluruhan spektrum model PESO ( <i>Paid, Earned, Shared, Owned</i> ).
Prinsip Komunikasi Publik	Dimensi prinsip komunikasi publik pada survei publik kunci dirancang menggunakan mekanisme <i>mirroring</i> terhadap penilaian internal K/L/D untuk mengukur pengalaman masyarakat berdasarkan enam landasan utama, yaitu transparansi, integritas, akuntabilitas, partisipatif, kritis, dan berbasis pembelajaran. Dalam implementasinya, publik menilai kinerja pemerintah terkait penyediaan informasi yang proaktif, pengutamaan kepentingan publik di atas golongan, serta kejelasan akuntabilitas program, anggaran, dan dampaknya, di samping kemampuan pemerintah beradaptasi melalui pembelajaran dari krisis. Secara spesifik, dimensi partisipatif dan kritis dievaluasi melalui pelibatan aktif pemangku kepentingan strategis serta kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat 3T) dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Pelibatan Pemangku Kepentingan	Dalam ekosistem komunikasi publik yang menempatkan pemangku kepentingan sebagai mitra strategis penyebaran informasi kebijakan, pengukuran <i>source credibility</i> atau kredibilitas sumber menjadi esensial untuk memvalidasi integritas pesan yang diterima publik. Mengacu pada kerangka Shah & Wei (2022), variabel ini didefinisikan sebagai tingkat kejujuran entitas pembuat pesan yang operasionalisasinya dinilai melalui tiga komponen fundamental, yakni <i>trustworthiness</i> (kejujuran), <i>expertise</i> (keahlian), dan <i>credibility</i> (kepercayaan), guna menjamin efektivitas dan legitimasi diseminasi program pemerintah.
Informasi Terpercaya	Pengukuran informasi tepercaya pada ranah publik bertujuan mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap validitas substansi yang didiseminasi oleh K/L/D, yang secara konseptual dibedakan dari variabel kredibilitas media maupun kredibilitas sumber ( <i>source credibility</i> ). Menggunakan mekanisme pencerminan ( <i>mirroring</i> ) terhadap indikator internal, variabel ini menilai kualitas informasi kebijakan dan program pemerintah yang diterima publik berdasarkan parameter akurasi, kebenaran, sifat yang tidak menyesatkan, kemudahan untuk dipahami, serta ketepatan waktu penyampaian sesuai standar Inpres No. 9 Tahun 2015.
Hak Publik	Dimensi hak publik dalam survei publik kunci menerapkan mekanisme <i>mirroring</i> terhadap penilaian K/L/D untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai kemudahan akses terhadap hak-hak dasar yang dijamin oleh empat regulasi utama. Evaluasi ini mencakup penilaian atas kebebasan pengelolaan informasi mulai dari pencarian hingga penyampaian (UUD 1945 Pasal 28F), jaminan kemerdekaan berpendapat di muka umum (UU No. 9 Tahun 1998), akses terhadap transparansi rencana dan alasan pengambilan keputusan (UU No. 14 Tahun 2008), serta partisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011).
Kepercayaan Publik	Kepercayaan publik diposisikan sebagai variabel outcome strategis dalam Indeks KPIP yang merujuk pada Canel & Luoma-aho (2019), didefinisikan sebagai kapasitas organisasi mengelola sumber daya publik di tengah ketidakpastian demi pelayanan yang efektif. Sebagai konsep multidimensional, variabel ini dievaluasi melalui dimensi kepercayaan terhadap institusi pemerintah pusat dan daerah, kualitas pelayanan serta integritas pelayan publik, hingga proses administrasi dalam kemitraan pemerintah-swasta ( <i>public-private partnership</i> ). Pengukuran ini kemudian dilengkapi dengan indikator dukungan publik terhadap program dan kebijakan pemerintah guna memotret dampak komprehensif dari keberhasilan pengelolaan komunikasi publik.
Partisipasi Publik	Partisipasi publik, yang berlandaskan pada visi RPJPN 2025–2045, didefinisikan sebagai keterlibatan bermakna masyarakat dalam seluruh mata rantai pembangunan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Operasionalisasi dimensi ini diukur melalui pendekatan ganda, yakni penilaian persepsi publik kunci terhadap pelibatan masyarakat di lingkungan sekitarnya serta penelusuran pengalaman langsung mereka dalam berkontribusi nyata pada ketiga tahapan strategis program pemerintah tersebut.

Sebagai catatan, terdapat beberapa variabel yang tidak termasuk ke dalam nilai komposit Indeks KPIP karena tidak sesuai dengan tujuan pengukuran. Dua variabel dalam survei publik kunci seperti Penggunaan Media (*Media Use*) dan Kredibilitas Media (*Media Credibility*) tidak termasuk dalam perhitungan Indeks KPIP karena lebih bertujuan untuk memotret pola konsumsi media publik kunci dan tidak terkait langsung dengan upaya pengelolaan komunikasi pembangunan, komunikasi publik, maupun informasi publik.

## Instrumen Penelitian

Penelitian survei kuantitatif berbasis kuesioner untuk mengukur Indeks KPIP dengan pedoman kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan kerangka konseptual dan variabel pengukuran. Kuesioner untuk Indeks KPIP memiliki 2 (dua) jenis level atau tingkat pengukuran, yaitu skala rasio (jawaban pertanyaan terkait jumlah atau nominal) dan skala interval (rentang pilihan 1-6). Demi konsistensi perhitungan indeks maka skala yang digunakan merupakan skala interval. Dengan demikian jawaban yang menggunakan skala rasio atau angka mutlak dapat diubah menjadi skala interval.

## Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa indikator dan variabel dalam Indeks KPIP benar-benar mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan Rasch Model dan Asesmen Formatif untuk mendapatkan evaluasi yang lebih mendalam mengenai kualitas setiap item. Identifikasi ini didasarkan pada nilai *Fit Statistic Mean Square* (MNSQ). Item yang tidak reliabel direkomendasikan untuk dihapus atau digunakan di luar perhitungan indeks sebagai informasi tambahan jika memang item tersebut dinilai penting. Dalam menentukan validitas dan reliabilitas instrumen, beberapa parameter dianalisis, meliputi nilai Mean Square (MNSQ), Reliabilitas Orang (Person Reliability), Reliabilitas Butir (Item Reliability), dan Analisis Separasi. Instrumen penelitian dengan nilai MNSQ di luar standar mengindikasikan adanya lompatan tak terduga skor dan jawaban yang terdeteksi sebagai jawaban acak. Misalnya, ketika responden yang secara konsisten menilai suatu variabel tinggi tiba-tiba memberikan skor yang sangat rendah pada item tertentu.

Tabel 1.4 Kriteria Penilaian MNSQ

Kriteria Penilaian	
Nilai MNSQ berada pada rentang 0,5 - 1,5	Boone et al., 2014

## Limitasi

Studi Indeks KPIP 2025 menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk memotret kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui empat dimensi utama, yakni Input, Proses, Output, dan Outcome. Namun, perlu digarisbawahi bahwa studi ini memiliki batasan analitis di mana pengukuran hanya berfokus pada penyajian indeks capaian deskriptif dan tidak dirancang untuk menguji hubungan kausalitas maupun signifikansi pengaruh variabel dimensi Input dan Proses terhadap Output dan Outcome. Selain itu, terdapat batasan operasional pada segmen Kementerian, Lembaga, dan

Pemerintah Daerah (K/L/D) di mana data survei tidak mencapai representasi populasi penuh (sensus) akibat kendala non-response, baik karena penolakan partisipasi, kendala komunikasi, maupun keterlambatan pengumpulan data. Keterbatasan serupa juga ditemukan secara spesifik pada segmen Publik Kunci di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) meliputi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya yang belum sepenuhnya mampu memenuhi standar indikator yang ditetapkan akibat status pemerintahan yang baru terbentuk, sehingga menghasilkan kesenjangan (gap) capaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan daerah lain yang lebih mapan.

# BAB II

## PEMBAHASAN INDEKS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN INFORMASI PUBLIK KATEGORI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media  
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

# Gambaran Umum



Pelaksanaan survei Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) ini diselenggarakan pada periode 13 Oktober hingga 28 Oktober 2025. Responden survei mencakup berbagai entitas pemerintahan, mulai dari Kementerian dan Lembaga (K/L) di tingkat pusat hingga Pemerintah Daerah (Diskominfo) di tingkat daerah yang disimbolkan dengan huruf D. Dalam pelaksanaannya, survei ini berhasil menghimpun sampel sebanyak 127 responden dengan tingkat respons (*response rate*) yang sangat signifikan, yakni mencapai 96,9%. Tingginya partisipasi ini merefleksikan komitmen instansi pemerintah dalam upaya evaluasi dan peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik.

Tabel 2.1 Respons K/L/D

Kriteria	Sub Total	Persentase Respons
Kementerian	48	97,8%
Lembaga	43	95,5%
Pemerintah Daerah	36	94,7%
<b>TOTAL</b>	<b>127</b>	<b>96,9%</b>

Dinas kominfo yang tidak berpartisipasi dalam survei ini adalah Dinas Kominfo Bengkulu dan Papua Tengah. Sedangkan untuk kategori Kementerian dan Lembaga, DPR RI dan Komnas HAM adalah dua instansi yang tidak berpartisipasi dalam survei KPIP ini.

Secara agregat nasional, persepsi indeks KPIP K/L/D adalah sebesar 85,83 (dapat dilihat pada bagian akhir bab ini). Jika ditelaah berdasarkan Klasifikasi instansi, terdapat perbedaan capaian antara instansi pusat dan daerah. Kelompok Kementerian dan Lembaga secara agregat menunjukkan performa yang lebih unggul dengan indeks agregat mencapai 88,70, sedangkan kelompok dinas kominfo (Total D) mencatatkan skor sebesar 82,95. Selisih skor ini mengindikasikan bahwa kapasitas dan kualitas pengelolaan informasi di tingkat pusat relatif lebih matang dibandingkan dengan tingkat daerah, meskipun kedua kelompok tersebut sama-sama berada dalam kategori kinerja yang baik.

Analisis lebih mendalam terhadap tujuh dimensi pengukuran memperlihatkan pola kekuatan dan kelemahan yang spesifik. Indikator Informasi Terpercaya dan Indikator Hak Publik menjadi aspek yang paling menonjol, terutama pada kelompok Kementerian dan Lembaga yang mencatatkan skor 92,06 untuk aspek kepercayaan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi yang akurat dan pemenuhan hak publik untuk tahu (*right to know*) telah menjadi prioritas utama dalam tata kelola komunikasi pemerintah saat ini.

Meskipun demikian, evaluasi terhadap Indikator Pelibatan Pemangku Kepentingan memerlukan perhatian khusus. Dimensi ini mencatatkan skor terendah secara nasional, yaitu 76,82, dengan rincian 79,18 untuk

K/L dan 74,46 untuk Pemerintah Daerah. Rendahnya angka ini dibandingkan dimensi lainnya mengisyaratkan bahwa meskipun diseminasi informasi sudah berjalan baik, aspek partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan secara aktif masih menyisakan ruang yang cukup besar untuk optimalisasi dan perbaikan di masa mendatang. Uraian lebih komprehensif mengenai dinamika setiap indikator serta implikasi strategis dari temuan ini akan dibahas secara mendalam pada bagian selanjutnya. Bedahan analisis lanjutan akan disajikan secara komprehensif pada bab ini dengan analisis mendetail pada tiap indikator, dengan analisis terpisah antar K/L dengan D.

## Pengantar Dimensi Input

Dimensi input dalam pengukuran indeks KPIP ini merujuk pada prasyarat fundamental yang mendukung pelaksanaan kebijakan transformasi digital nasional dengan fokus utama pada kapasitas institusi sebagai variabel awal. Kapasitas ini mencakup elemen-elemen kunci seperti mandat resmi, kepastian hukum, struktur organisasi, ketersediaan SDM dan anggaran, serta kemampuan koordinasi antarinstansi, yang semuanya menjadi *enabler* bagi proses kebijakan selanjutnya. Secara keseluruhan, indeks dimensi input nasional mencapai 87,79, menunjukkan persepsi tinggi dari responden Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dinas Kominfo Provinsi (D) terhadap kesiapan internal mereka.

Indeks KPIP menyoroti variasi capaian antar tingkat pemerintahan, di mana K/L mencatat indeks 90,32 lebih tinggi dibandingkan D dengan 85,25, mencerminkan kekuatan sumber daya pusat yang lebih solid. Indikator terkuat meliputi mandat resmi (94,47), kepastian hukum (91,78), dan struktur organisasi (93,91), sementara tantangan utama terletak pada anggaran (75,49) dan SDM (85,07). Perbedaan ini menegaskan perlunya penguatan di daerah untuk memastikan eksekusi kebijakan Komdigi yang efektif dan merata.

Selain kapasitas institusi, dimensi input juga mencakup kemampuan memproduksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan indeks gabungan 86,74, di mana K/L unggul (89,38) dibandingkan D (84,10), terutama pada aspek

memicu respons positif dan kebebasan dari kepentingan pribadi atau golongan. Dukungan anggaran KPIP menunjukkan proporsi nasional 77,17, dengan K/L lebih siap (82,42) daripada D (63,9), yang menjadi isu struktural krusial. Input kuat ini diharapkan meningkatkan kualitas proses, *output*, dan *outcome* komunikasi publik.

Analisis lebih lanjut mengungkap variasi signifikan di tingkat K/L, dengan rata-rata 89,85 dan banyak mencapai 100 seperti BIN, BRIN, dan Kemenkeu, sementara beberapa seperti Lemhannas (48,81) memerlukan intervensi. Di daerah, rata-rata 84,68 dengan provinsi *top* seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat mencapai 100, kontras dengan Papua Pegunungan (19,05) yang menghadapi keterbatasan geografis dan fiskal. Temuan ini menekankan dimensi input sebagai faktor penentu keberhasilan rantai nilai Komdigi.

Pengantar dimensi input ini menjadi dasar untuk memahami capaian survei KPIP Komdigi, yang mencatat tidak partisipasinya Dinas Bengkulu, Papua Tengah, Komnas HAM, dan DPR-RI. Dokumen menawarkan *insight* berharga untuk strategi penguatan, termasuk peningkatan anggaran, SDM digital, dan kolaborasi lintas instansi, guna mewujudkan transformasi digital yang inklusif. Pendekatan ini memastikan input tidak hanya sebagai kondisi awal, tetapi pendorong utama pencapaian tujuan nasional.

## Capaian Indeks Dimensi Input K/L/D

### Kapasitas Institusi

Kapasitas institusi diposisikan sebagai variabel *input* karena merupakan prasyarat fundamental bagi setiap proses pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam ekosistem pengukuran indeks KPIP. Seluruh elemen yang membentuk kapasitas institusi, mulai dari mandat resmi, kepastian hukum, struktur organisasi, ketersediaan anggaran, hingga kompetensi SDM. Elemen-elemen tersebut adalah kondisi awal yang harus ada sebelum suatu instansi dapat menjalankan fungsi koordinasi maupun implementasi transformasi digital nasional.

Tanpa landasan legal yang kuat, struktur birokrasi yang jelas, dan sumber daya yang memadai, institusi tidak memiliki modal dasar untuk mengeksekusi kebijakan secara efektif. Oleh karena itu, kapasitas institusi berfungsi sebagai enabler yang memastikan bahwa instansi memiliki kesiapan internal yang cukup untuk memasuki tahap proses kebijakan, baik dalam perencanaan, penyusunan regulasi, pengembangan standar, maupun integrasi sistem digital.

Kapasitas institusi juga merupakan variabel yang memengaruhi kemampuan suatu instansi dalam menyerap dan mengeksekusi kebijakan KPIP secara efektif. Variabel ini kemudian memengaruhi kualitas proses pelaksanaan pengukuran indeks KPIP, yang diwakili dengan variabel penelitian lain yang dijelaskan dalam subbab pembahasan proses. Dengan demikian, input yang kuat pada tahap awal akan meningkatkan kualitas proses dan pada akhirnya menghasilkan output dan outcome yang lebih baik dalam bentuk layanan KPIP yang efektif, kolaborasi yang lebih solid, serta pencapaian tujuan komunikasi. Kapasitas institusi, dengan demikian, tidak hanya menjadi kondisi awal, tetapi juga faktor penentu keberhasilan keseluruhan rantai nilai indeks KPIP.

Seperti yang telah disampaikan pada gambaran umum respons, terdapat Dinas provinsi yang tidak berpartisipasi dalam survei ini: Dinas kominfo Bengkulu dan Papua Tengah. Sedangkan untuk Satker K/L yang tidak berpartisipasi adalah Komnas HAM dan DPR-RI.

## A. Variabel Kapasitas Institusi

Tabel 2.2. Kapasitas Institusi

INDIKATOR	INDEKS K/L	INDEKS DAERAH	INDEKS NASIONAL
Mandat Resmi	95,42	93,52	94,47
Kepastian Hukum	95,60	87,96	91,78
Struktur Organisasi yang Mendukung Proses Kerja	97,07	90,74	93,91

Sumber Daya Manusia yang Memadai	86,81	83,33	85,07
Anggaran yang Memadai	78,75	72,22	75,49
Kemudahan berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah lain	89,56	87,50	88,53
Integrasi dengan Instansi Pemerintah Lainnya	89,01	81,48	85,25
<b>Indeks Total</b>	<b>90,32</b>	<b>85,25</b>	<b>87,79</b>

Secara umum, kapasitas institusi dalam nilai indeks KPIP dipersepsikan tinggi oleh para responden K/L/D dengan proporsi gabungan 87,79. Ini menunjukkan bahwa baik Dinas kominfo (D) maupun Kementerian/Lembaga (K/L) merasa telah memiliki kapasitas kelembagaan yang cukup kuat untuk mendukung implementasi agenda KPIP nasional. Indikator dengan nilai tertinggi adalah Mandat Resmi (94,47), Kepastian Hukum (91,78), dan Struktur Organisasi yang Mendukung Proses Kerja (93,91). Hal ini menegaskan bahwa secara formal, dasar hukum dan struktur birokrasi di bawah Komdigi sudah relatif solid, sehingga institusi-institusi terkait memiliki legitimasi, kejelasan peran, dan proses kerja dalam menjalankan mandat Komunikasi Publik disatkernya masing-masing.

Jika dianalisis berdasarkan tingkat institusi, K/L secara konsisten mencatat skor lebih tinggi daripada Dinas kominfo, dengan total kapasitas 90,32 berbanding 85,25 di daerah. Perbedaan ini mencerminkan bahwa K/L umumnya memiliki sumber daya, struktur, dan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk melaksanakan inisiatif Komdigi. Tantangan terbesar bagi kedua level pemerintahan tampak pada aspek anggaran (K/L = 78,75; Daerah = 72,22), yang menjadi indikator dengan capaian terendah. Ini mengindikasikan bahwa keterbatasan pendanaan menjadi isu utama yang dapat menghambat efektivitas program KPIP, terutama di daerah yang seringkali menghadapi keterbatasan fiskal dan ketergantungan pada transfer pusat. Indikator

SDM yang memadai (85,07) juga belum mencapai tingkat optimal, yang menunjukkan bahwa penguatan kapasitas teknis dan kompetensi digital aparatur masih diperlukan.

Indikator terkait sinergi, yaitu kemudahan berkoordinasi (88,53) dan integrasi dengan instansi pemerintah lainnya (85,25), menunjukkan bahwa ekosistem Komdigi sudah relatif kolaboratif, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Nilai yang tidak setinggi indikator legal dan struktural mengindikasikan bahwa kolaborasi horizontal, baik antar K/L maupun antara pusat dan daerah, masih menghadapi tantangan seperti perbedaan prioritas dan keterbatasan interoperabilitas sistem. Dalam konteks KPIP Komdigi yang sangat bergantung pada pengelolaan lintas instansi, temuan ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme koordinasi, harmonisasi program, serta integrasi layanan digital agar transformasi digital dapat berjalan lebih kohesif dan merata di seluruh tingkat pemerintahan.

## B. Memproduksi ILM

Tabel 2.3. Kapasitas Institusi Memproduksi ILM

INDIKATOR	INDEKS K/L	INDEKS D	INDEKS K/L/D
Memacu respon positif	88,10	81,94	85,02
Bebas dari kepentingan pribadi	90,48	84,72	87,60
Bebas dari kepentingan golongan	89,56	85,65	87,60
Total	89,38	84,10	86,74

Variabel kedua yang membangun dimensi input adalah kemampuan memproduksi iklan layanan masyarakat. Data menunjukkan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) mempersepsikan satkernya memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam memproduksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dibandingkan pemerintah daerah. Indikator Memacu Respon Positif (88,10) menunjukkan bahwa ILM yang diproduksi oleh K/L dinilai lebih mampu menarik perhatian dan mendorong respons dari publik. Hal ini dapat disebabkan oleh kualitas produksi yang lebih baik, penggunaan pendekatan kreatif yang

lebih variatif, atau kemampuan K/L mengakses tenaga profesional dalam bidang komunikasi dan periklanan di pusat. Selain itu, K/L juga menunjukkan skor yang kuat dalam memastikan bahwa ILM yang mereka produksi bebas dari kepentingan pribadi (90,48) dan bebas dari kepentingan golongan (89,56). Capaian tinggi ini menandakan bahwa ILM tingkat pusat cenderung lebih objektif dan berorientasi pelayanan publik, serta tidak terpengaruh oleh dinamika politik internal maupun eksternal.

Sebaliknya, indeks di tingkat Dinas Kominfo Provinsi (D) berada pada kategori baik namun lebih rendah, dengan rentang nilai 81–85. ILM daerah dinilai kurang mampu memicu respons positif (81,94) dibandingkan ILM K/L, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan kemampuan teknis, minimnya akses terhadap sumber daya kreatif, atau keterbatasan anggaran untuk produksi konten audio dan visual yang berkualitas. Indikator bebas dari kepentingan pribadi (84,72) dan bebas dari kepentingan golongan (85,65) juga menggambarkan bahwa meskipun ILM daerah umumnya netral, potensi pengaruh kepentingan lokal, baik politik maupun birokratis, masih lebih besar daripada di tingkat pusat. Kondisi ini dapat memengaruhi persepsi objektivitas dan efektivitas pesan yang disampaikan dalam ILM di daerah.

Secara keseluruhan, nilai gabungan indeks K/L/D sebesar 86,74 mengindikasikan bahwa kapasitas nasional dalam memproduksi ILM dipersepsikan berada pada kategori tinggi. Namun, perbedaan kapasitas antara pusat dan daerah menunjukkan perlunya upaya penguatan di tingkat daerah, terutama dalam hal peningkatan kompetensi kreatif, penjaminan objektivitas konten, serta peningkatan kualitas produksi.

Efektivitas ILM sangat bergantung pada kemampuannya menarik perhatian, membangun empati, dan menyampaikan pesan yang kredibel. Oleh karena itu, dukungan pelatihan produksi konten, penyediaan standar nasional ILM, serta mekanisme kolaborasi kreatif antara K/L dan daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa ILM yang diproduksi di seluruh Indonesia memiliki kualitas yang sebanding dan berdampak positif bagi publik.

### C. Mendapatkan Anggaran KPIP

Data menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok antara tingkat provinsi (D) dan kementerian/lembaga (K/L) dalam hal dukungan anggaran untuk pengelolaan komunikasi publik dalam konteks KPIP Komdigi. Proporsi K/L yang memiliki anggaran mencapai 82,42, yang berarti sebagian besar instansi pusat telah menyiapkan alokasi anggaran khusus atau relevan untuk mendukung fungsi komunikasi publik. Sebaliknya, hanya 63,9 Dinas Kominfo yang menyatakan memiliki anggaran, mencerminkan keterbatasan anggaran yang jauh lebih besar di tingkat daerah dibandingkan pusat. Gap hampir 20 poin ini menunjukkan bahwa daerah menghadapi tantangan struktural dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan komunikasi publik, terutama dalam menghadapi tuntutan digitalisasi layanan.

Jika dilihat secara gabungan, proporsi nasional berada pada 77,17, menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan mayoritas instansi memiliki anggaran, kapasitas ini masih belum merata antar wilayah dan antar level pemerintahan. Daerah yang belum memiliki anggaran mungkin akan mengandalkan kebijakan *ad-hoc* atau dukungan insidental dari pimpinan daerah, sehingga kegiatan komunikasi publik tidak dapat berjalan secara sistematis dan terencana. Kondisi ini memperkuat temuan kualitatif bahwa beberapa daerah masih mengalami minimnya dukungan anggaran, kurangnya SDM yang relevan, serta keterbatasan sarana teknologi yang pada akhirnya membatasi kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi komunikasi publik secara efektif, terlebih di era digital yang menuntut respons cepat, kehadiran multikanal, dan pengelolaan narasi yang konsisten.

Perbedaan yang cukup besar antara pusat dan daerah mengindikasikan perlunya strategi penguatan yang lebih terarah dari KPIP Komdigi, baik berupa alokasi anggaran yang lebih jelas, mekanisme hibah atau dana matching, maupun dukungan kebijakan untuk memastikan bahwa fungsi komunikasi publik tidak hanya berjalan kuat di pusat, tetapi juga mampu menjadi penggerak koordinasi dan

layanan informasi di daerah. Anggaran yang tidak memadai berpotensi menimbulkan dampak berantai berupa lemahnya kapasitas SDM, kurangnya infrastruktur komunikasi digital, serta tingginya kerentanan terhadap misinformasi. Oleh sebab itu, penguatan dukungan pendanaan menjadi salah satu komponen paling kritis untuk menciptakan kesiapan kelembagaan yang setara dan merata di seluruh instansi pemerintah.

Tabel 2.4 Proporsi Satker Mendapatkan Anggaran KPIP

INDIKATOR	PROPORSI D	PROPORSI K/L	PROPORSI K/L/D
Anggaran	63,9	82,42	77,17

Selain temuan pada tabel 2.4, hasil pertanyaan terbuka menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi publik di daerah dan pusat masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang bersifat struktural maupun operasional. Salah satu isu yang paling sering disebut oleh responden adalah minimnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan komunikasi publik. Kondisi ini membuat banyak instansi kesulitan membangun strategi komunikasi yang berkelanjutan, mengembangkan konten berkualitas, atau melakukan kegiatan diseminasi informasi secara proaktif. Di beberapa daerah, alokasi anggaran sering kali bersifat insidental dan tidak menjadi prioritas, sehingga kegiatan komunikasi publik jauh dari optimal dan bergantung pada kreativitas aparatur dalam memanfaatkan sumber daya terbatas.

Responden juga menyoroti kurangnya dukungan dari pimpinan daerah sebagai hambatan signifikan. Tanpa komitmen politik (*political will*) dan arahan strategis dari pimpinan, komunikasi publik tidak memperoleh posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan. Banyak dinas ditempatkan hanya sebagai pelaksana teknis tanpa ruang untuk menyusun strategi komunikasi yang terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya komunikasi publik sebagai alat mitigasi risiko, edukasi masyarakat, dan peningkatan kepercayaan publik menyebabkan fungsi ini tidak mendapatkan perhatian memadai. Tantangan lain yang muncul adalah ketidaksesuaian kompetensi SDM, baik dari sisi kapasitas

maupun jumlah personel. Banyak instansi mengandalkan pegawai yang tidak memiliki latar belakang komunikasi, digital, atau humas, sehingga adaptasi terhadap strategi komunikasi modern menjadi terhambat. Kebutuhan peningkatan kapasitas dalam literasi digital, manajemen isu, analisis media, dan produksi konten menjadi sangat mendesak. Selain itu, fenomena misinformasi dan disinformasi dari media daring menjadi tantangan baru yang membutuhkan kemampuan manajemen narasi dan respons cepat, hal yang sulit dilakukan bila SDM terbatas.

Di sisi pendukung, responden menekankan perlunya penyediaan sarana teknologi yang memadai, meliputi perangkat untuk produksi konten, sistem pemantauan isu digital, serta platform komunikasi yang lebih terintegrasi. Tanpa dukungan teknologi, komunikasi publik akan tertinggal dari dinamika informasi yang sangat cepat di ruang digital. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang proporsional, komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan infrastruktur teknologi menjadi empat pilar utama yang diperlukan agar pengelolaan komunikasi publik dapat berjalan efektif, responsif, dan adaptif terhadap tantangan informasi masa kini.

## D. Membuat dan Menyediakan Konten

Distribusi frekuensi pada indikator “Membuat sendiri konten/bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional” dan “Menyediakan konten/bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Renstra K/L/D” menunjukkan pola kategori yang relatif merata pada enam tingkatan, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Meskipun demikian,

penggunaan kategori proporsional ini lebih tepat dibandingkan penyajian jumlah absolut karena data memperlihatkan variasi nilai minimum dan maksimum yang sangat besar antarinstansi. Kondisi tersebut menyebabkan skala jumlah menjadi tidak representatif untuk dianalisis secara agregat. Oleh karena itu, penyajian kategori persentase berdasarkan sebaran data yang dibagi menjadi sextil, menjadi pendekatan yang lebih stabil, sedangkan nilai median (20 untuk pembuatan konten dan 30 untuk penyediaan konten) memberikan gambaran titik tengah yang menggambarkan kecenderungan perilaku institusi dalam menjalankan fungsi produksi dan penyediaan konten.

Ketidakseimbangan antara nilai minimum dan maksimum dalam data mentah membuat interpretasi jumlah frekuensi tidak hanya kurang informatif, tetapi berpotensi menyesatkan. Misalnya, beberapa instansi dapat memiliki volume konten yang sangat tinggi, sementara instansi lain hampir tidak memproduksi konten sama sekali. Diskrepansi ini menghasilkan penyebaran data yang ekstrem (*highly skewed*), sehingga angka total tidak mampu mencerminkan kondisi umum di lapangan.

Dengan demikian, penggunaan kategori persentase dan median menjadi strategi analitis yang tepat untuk menggambarkan kemampuan institusi dalam membuat dan menyediakan konten secara lebih proporsional dan seimbang, tanpa dipengaruhi oleh outlier atau perbedaan kapasitas struktural antar instansi. Untuk selanjutnya, pada variabel penelitian dengan indikator frekuensi, pengolahan dan penyajian datanya akan disamakan dengan yang tersaji pada tabel di bawah ini

Tabel 2.5 Indikator membuat dan menyediakan konten

INDIKATOR	SANGAT RENDAH	RENDAH	CUKUP RENDAH	CUKUP TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI	MEDIAN
Membuat sendiri konten/bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional	17,32	18,9	17,32	13,39	16,54	16,54	20
Menyediakan konten/bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis K/L/D	18,9	15,75	16,54	15,75	16,54	16,54	30

“Membuat sendiri konten/bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional” menunjukkan pola penyebaran yang relatif seimbang di seluruh kategori. Proporsi sangat rendah (17,32), rendah (18,9), dan cukup rendah (17,32) berada pada tingkat yang hampir sama, menunjukkan bahwa sebagian instansi masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas produksi konten. Namun demikian, kategori tinggi dan sangat tinggi juga memiliki proporsi cukup besar (masing-masing 16,54), yang mengindikasikan adanya kelompok instansi yang sudah cukup matang dalam memproduksi konten secara mandiri.

Dengan median 20, kemampuan institusi secara umum berada pada tingkat menengah, menandakan bahwa secara tipikal institusi membuat konten dalam volume moderat, tidak terlalu rendah, tetapi juga belum konsisten pada tingkat tinggi. Median ini memberikan gambaran realistis mengenai kapasitas umum, mengingat adanya kemungkinan variasi ekstrem antara instansi yang sangat aktif dan yang minim menghasilkan konten.

Pada indikator “Menyediakan konten/bahan informasi tentang Program Kebijakan dalam Rencana Strategis K/L/D”, distribusi proporsinya juga menunjukkan pola yang relatif merata, namun dengan kecenderungan sedikit lebih tinggi pada kategori sangat rendah (18,9). Meski demikian, proporsi kategori tinggi dan sangat tinggi (masing-masing 16,54) tetap menunjukkan bahwa sebagian instansi telah menyediakan konten kebijakan yang tertuang dalam Renstra secara konsisten.

Perbedaan yang paling mencolok terlihat pada nilai median 30, yang lebih tinggi dibandingkan indikator pembuatan konten. Hal ini mengindikasikan bahwa institusi lebih banyak menyediakan konten Renstra dibandingkan membuat konten baru terkait Program Prioritas Nasional. Artinya, instansi lebih siap dalam mendistribusikan atau mempublikasikan informasi yang sudah tersedia dalam dokumen formal, tetapi masih menghadapi tantangan dalam memproduksi konten baru secara proaktif. Median yang lebih tinggi ini mencerminkan kecenderungan umum bahwa menyediakan konten merupakan kegiatan yang lebih stabil dan lebih rutin dilakukan

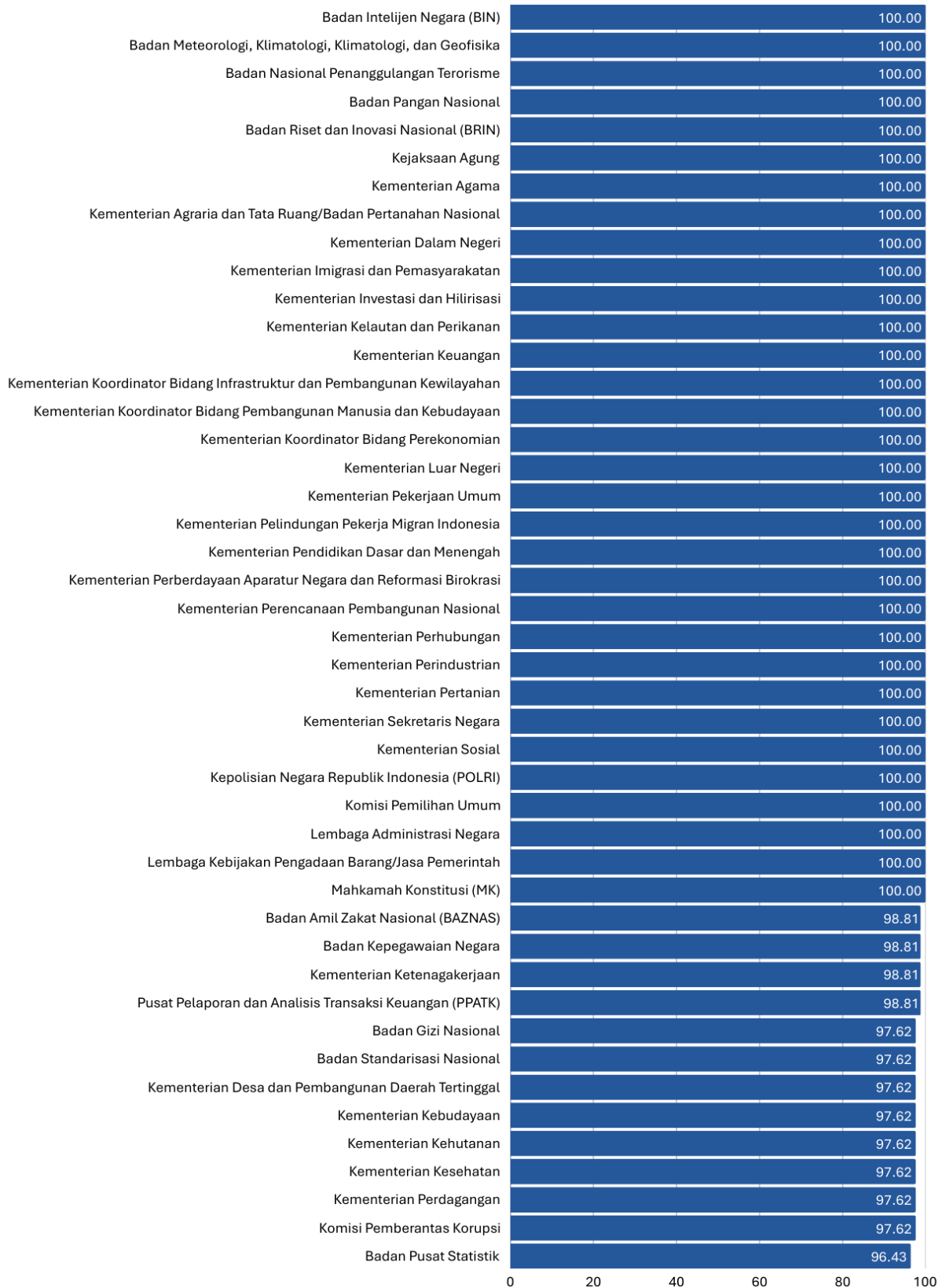
dibandingkan produksi konten yang memerlukan kapasitas teknis lebih besar.

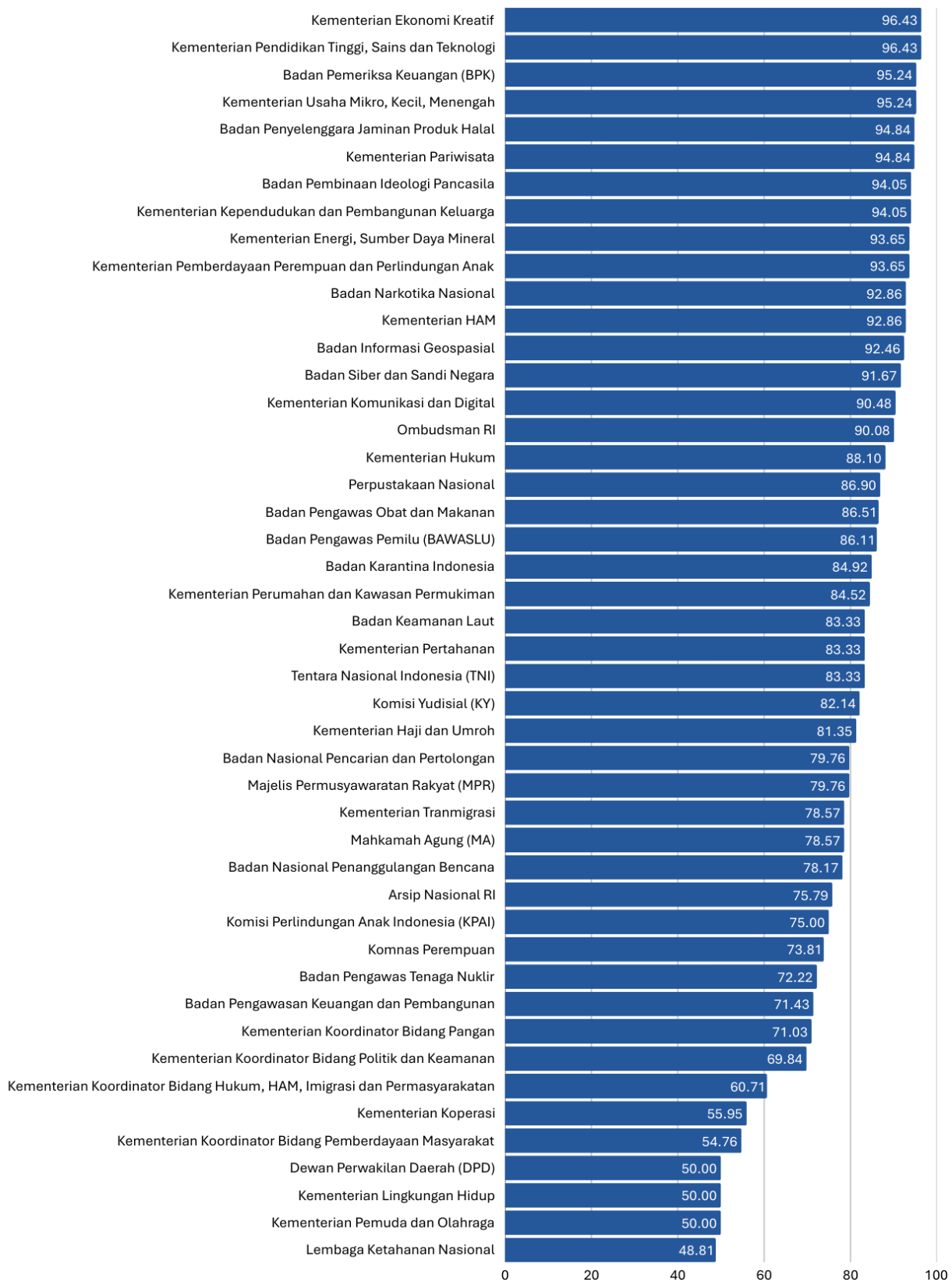
## E. Kapasitas Institusi Kementerian dan Lembaga

Secara keseluruhan, kapasitas institusi yang dibangun oleh indikator pengelolaan komunikasi publik dilengkapi dengan indikator aktivitas produksi dan pengelolaan konten, di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) menunjukkan performa yang sangat kuat dengan skor rata-rata 89,85. Banyak K/L mencapai skor 100, mencerminkan kapasitas kelembagaan yang sangat solid dalam memenuhi unsur-unsur penting seperti mandat resmi, kepastian hukum, struktur organisasi, SDM, anggaran, serta koordinasi lintas instansi. K/L yang berada pada kelompok dengan indeks sempurna mencakup institusi strategis seperti Badan Intelijen Negara (BIN), BRIN, Kementerian Keuangan, Kemenlu, Kemenko Perekonomian, POLRI, dan sejumlah kementerian teknis lainnya. Capaian ini menegaskan bahwa di tingkat pusat, sebagian besar institusi sudah memiliki kesiapan struktural dan sumber daya yang sangat memadai untuk mendukung agenda transformasi digital nasional. Tingginya indeks pada kelompok ini juga menunjukkan bahwa unit-unit yang berperan sebagai regulator, koordinator kebijakan, dan pelaksana teknis utama memiliki fondasi kelembagaan yang kokoh untuk mengimplementasikan mandat Komdigi.

Di sisi lain, terdapat variasi kapasitas yang cukup signifikan antar-K/L yang menunjukkan bahwa tidak semua lembaga memiliki kesiapan yang merata. K/L dengan skor menengah-tinggi, seperti BNN (92.86), KemenHAM (92.86), BIG (92.46), BSSN (91.67), hingga BPOM (86.51), menunjukkan bahwa meskipun kapasitas sudah cukup unggul, masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek koordinasi lintas sektor, kecukupan anggaran, atau pemenuhan SDM digital. Lebih jauh, kelompok K/L dengan skor lebih rendah, misalnya Kementerian Koperasi (55,95), Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (54,76), DPD (50,00), Kemenpora (50,00), KLHK (50,00), hingga yang terendah seperti Lemhannas (48,81), mengindikasikan adanya kesenjangan

Diagram 2.1. Indeks Kapasitas Institusi Kementerian dan Lembaga





**Total**

**89.85**

kapasitas yang cukup besar dalam ekosistem Komdigi. Variasi ini mencerminkan tantangan struktural dan sumber daya yang tidak merata, terutama pada lembaga-lembaga yang memiliki mandat lebih spesifik atau terbatas, serta berpotensi menghadapi hambatan dalam adaptasi dan integrasi digital. Kondisi ini menekankan pentingnya strategi intervensi yang lebih terarah dari KPIP Komdigi untuk memastikan kesiapan kelembagaan yang lebih merata di seluruh K/L, mengingat kolaborasi lintas instansi merupakan elemen krusial dalam mencapai keberhasilan transformasi digital nasional. lintas sektor, kecukupan anggaran, atau pemenuhan SDM digital. Lebih jauh, kelompok K/L dengan skor lebih rendah, misalnya Kemenkop (55,95), Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (54,76), DPD (50,00), Kemenpora (50,00), K/LHK (50,00), hingga yang terendah seperti Lemhannas (48,81), mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas yang cukup besar dalam ekosistem Komdigi. Variasi ini mencerminkan tantangan struktural dan sumber daya yang tidak merata, terutama pada lembaga-lembaga yang memiliki mandat lebih spesifik atau terbatas, serta berpotensi menghadapi hambatan dalam adaptasi dan integrasi digital. Kondisi ini menekankan pentingnya strategi intervensi yang lebih terarah dari KPIP Komdigi untuk memastikan kesiapan kelembagaan yang lebih merata di seluruh K/L, mengingat kolaborasi lintas instansi merupakan elemen krusial dalam mencapai keberhasilan transformasi digital nasional.

## F. Kapasitas Institusi Dinas Kominfo

Kapasitas institusi di tingkat daerah menunjukkan persepsi performa yang cukup tinggi dengan rata-rata nasional 84,68, meskipun masih berada di bawah rata-rata K/L. Beberapa provinsi menonjol dengan capaian 100, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jambi, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Provinsi-provinsi ini umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih mapan, SDM yang relatif memadai, serta dukungan fiskal dan infrastruktur yang lebih kuat sehingga mampu memenuhi seluruh indikator kapasitas institusi yang diukur oleh KPIP Komdigi. Kehadiran provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat di kelompok teratas mencerminkan bahwa

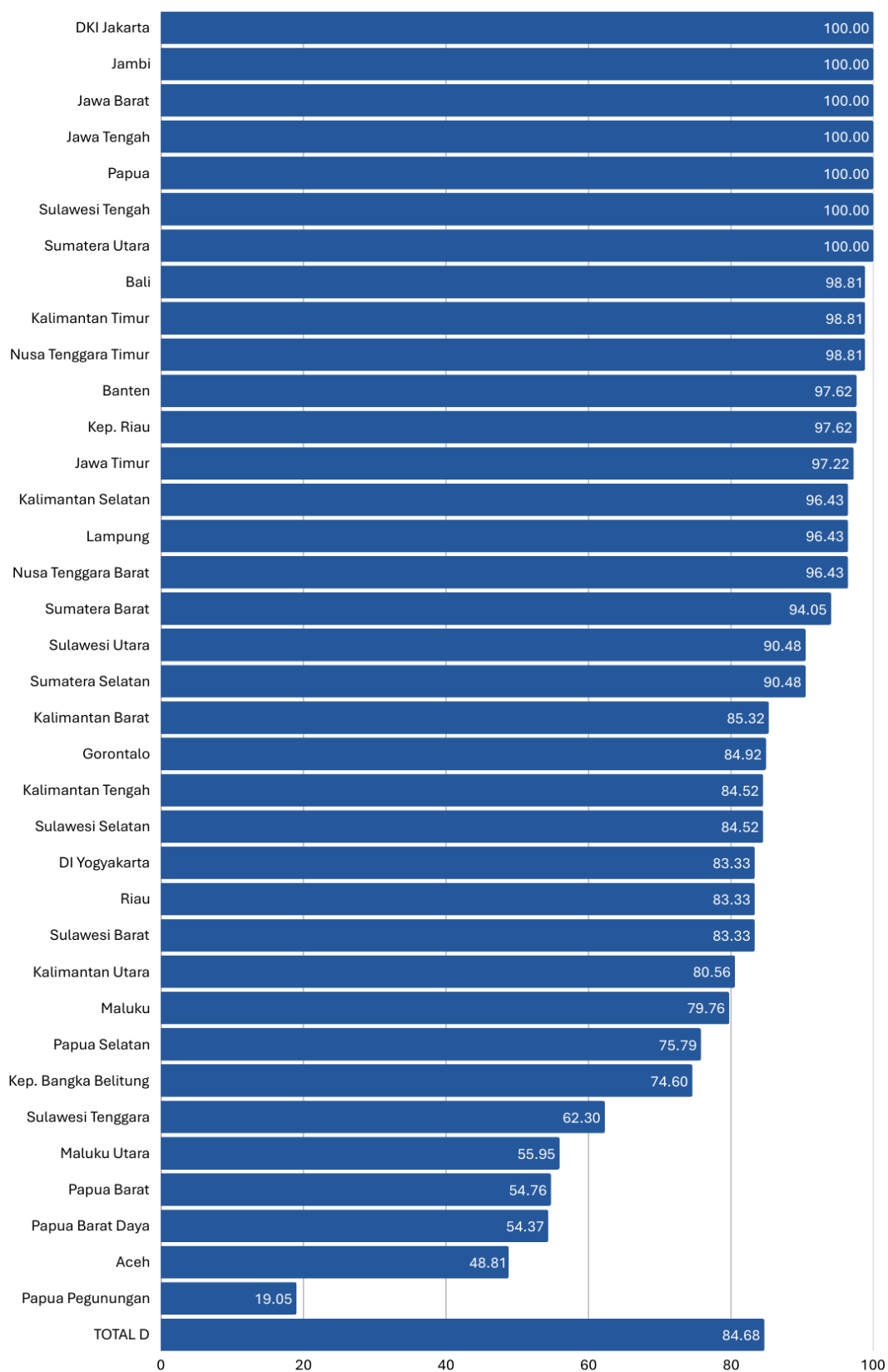
daerah dengan kapasitas fiskal besar dan kematangan birokrasi cenderung lebih siap dalam mengadopsi agenda transformasi digital.

Di lapisan menengah, sejumlah daerah memiliki indeks antara 90–98, seperti Bali, Kalimantan Timur, NTT, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Lampung, NTB, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan. Kelompok ini menunjukkan kesiapan yang cukup kuat namun belum sepenuhnya optimal, terutama terkait aspek anggaran, SDM teknis digital, maupun integrasi lintas-instansi daerah. Walaupun daerah-daerah ini memiliki komitmen yang baik terhadap inisiatif Komdigi, masih terdapat variasi dalam stabilitas dukungan regulasi daerah, kualitas koordinasi antar perangkat daerah, hingga perbedaan kapasitas fiskal yang memengaruhi kecepatan implementasi program digital. Dengan performa yang relatif tinggi, kelompok daerah menengah ini memiliki potensi besar untuk mencapai kesiapan penuh melalui intervensi yang bersifat penguatan kapasitas teknis dan tata kelola digital.

Namun demikian, variasi kapasitas yang signifikan terlihat pada daerah dengan skor rendah hingga sangat rendah. Provinsi seperti Sulawesi Tenggara (62,30), Maluku Utara (55,95), Papua Barat (54,76), Papua Barat Daya (54,37), Aceh (48,81), dan terutama Papua Pegunungan (19,05) memperlihatkan tantangan struktural yang besar. Indeks yang rendah ini dapat mencerminkan keterbatasan anggaran, SDM, infrastruktur digital, tingkat koordinasi antar-perangkat daerah, serta kondisi geografis yang kompleks, terutama di wilayah timur Indonesia.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan agenda Komdigi sangat bergantung pada intervensi diferensial: daerah dengan skor sangat rendah membutuhkan dukungan intensif melalui pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, pengembangan kompetensi SDM, serta peningkatan infrastruktur dasar. Variasi besar antar daerah menegaskan bahwa pencapaian transformasi digital nasional tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pusat, tetapi juga oleh kemampuan daerah untuk menjalankan reformasi digital secara merata dan terkoordinasi.

Diagram 2.2 Indeks Kapasitas Institusi Dinas Kominfo



## Dimensi Input = Kapasitas Institusi

Pada prinsipnya, dimensi input KPIP dibangun hanya oleh satu variabel utama, yaitu kapasitas institusi, sehingga capaian pada variabel ini secara langsung merepresentasikan indeks persepsi dimensi input bagi setiap Kementerian/ Lembaga (K/L) maupun dinas daerah. Dengan konstruksi seperti ini, tidak terdapat variabel lain yang berfungsi sebagai penyeimbang atau pembanding dalam dimensi input, sehingga kekuatan atau kelemahan kapasitas institusional akan tercermin secara utuh dalam nilai indeks yang dihasilkan. Artinya, perbedaan skor antar kementerian, lembaga, dan dinas sepenuhnya mencerminkan Tingkat persepsi atas kesiapan organisasi masing-masing dalam mendukung pelaksanaan KPIP, baik dari sisi mandat, struktur organisasi, sumber daya manusia, anggaran, maupun kemampuan koordinasi lintas instansi. Konsekuensinya, interpretasi terhadap dimensi input perlu dilakukan dengan kehati-hatian dan konteks yang memadai.

Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa suatu K/L atau dinas, mempersepsikan telah memiliki fondasi kelembagaan yang relatif kuat untuk menjalankan fungsi komunikasi publik, sementara nilai yang rendah mengindikasikan adanya persepsi keterbatasan struktural yang berpotensi menghambat kinerja pada dimensi proses dan output. Karena variabel kapasitas institusi bersifat mendasar, capaian pada dimensi input ini juga berfungsi sebagai prasyarat bagi keberhasilan dimensi-dimensi KPIP lainnya. Dengan demikian, penguatan kapasitas institusi, melalui peningkatan kualitas SDM, kejelasan mandat, dukungan anggaran, dan penguatan sistem koordinasi, menjadi langkah strategis untuk memastikan peningkatan kinerja KPIP secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## Pengantar Dimensi Proses

Dalam membangun indeks proses komunikasi Pembangunan dan informasi publik, ditentukan 6 (enam) variabel yang membangunnya, yaitu variabel Komunikasi Strategis, Hak Publik, Cakupan Pekerjaan, Prinsip Komunikasi Publik, Pelibatan Stakeholder, dan Informasi Terpercaya. Variabel-variabel tersebut membangun fondasi dimensi proses KPIP didasarkan pada pemahaman bahwa komunikasi publik yang efektif bukan hanya tentang penyampaian pesan, tetapi tentang bagaimana pemerintah mampu merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi fungsi komunikasi secara komprehensif. Komunikasi strategis, menjadi kerangka utama yang memastikan bahwa pesan pemerintah tidak berjalan sporadis, tetapi terarah dan selaras dengan agenda pembangunan nasional dan daerah. Tanpa perencanaan strategis, komunikasi pemerintah berpotensi menjadi reaktif, tidak terukur, dan gagal membangun kepercayaan publik. Dengan memasukkan aspek ini ke dalam indeks KPIP, penelitian dapat mengukur sejauh mana institusi mampu menempatkan komunikasi sebagai fungsi manajerial yang terintegrasi, bukan sekadar fungsi teknis.

Aspek Hak Publik juga merupakan dimensi yang sangat relevan karena komunikasi publik pada hakikatnya berbasis pada pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan mudah diakses. Pengukuran terhadap pemenuhan hak publik memungkinkan penilaian apakah instansi pemerintah menyediakan informasi secara proaktif, terbuka, dan nondiskriminatif. Dalam ekosistem demokrasi modern, pemenuhan hak publik bukan hanya kewajiban moral, tetapi mandat hukum yang menentukan

legitimasi pemerintah. Tanpa pemenuhan prinsip ini, komunikasi publik dapat berfungsi hanya sebagai propaganda atau instrumen promosi kebijakan, bukan sebagai mekanisme akuntabilitas yang menjadi ciri pemerintahan modern. Variabel Cakupan Pekerjaan dan Prinsip Komunikasi Publik memberikan dimensi operasional yang penting dalam penilaian proses KPIP. Cakupan pekerjaan mengukur apakah fungsi komunikasi publik telah dilaksanakan secara lengkap. Tanpa cakupan pekerjaan yang memadai, proses komunikasi publik berpotensi hanya bersifat parsial dan tidak mampu menjawab kompleksitas kebutuhan informasi masyarakat. Di sisi lain, Prinsip Komunikasi Publik, memastikan bahwa tata kelola komunikasi dijalankan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Memasukkan prinsip-prinsip ini memungkinkan indeks KPIP menilai tidak hanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi bagaimana kualitas proses tersebut dijalankan.

Variabel Pelibatan Stakeholder dan Informasi Terpercaya berperan penting dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang adaptif dan kredibel. Pelibatan stakeholder memastikan bahwa komunikasi publik tidak berjalan satu arah, melainkan melibatkan aktor-aktor penting seperti masyarakat, media, akademisi, dunia usaha, hingga kelompok Masyarakat tertentu dalam mengkomunikasikan kebijakan. Proses ini penting untuk mengurangi resistensi, memperkuat dukungan, dan mendapatkan masukan berbasis bukti. Sementara itu, keberadaan informasi terpercaya menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan misinformasi dan disinformasi yang semakin marak di era digital. Mengukur kualitas, akurasi, dan keandalan informasi yang disampaikan pemerintah memungkinkan penelitian KPIP untuk menilai secara lebih objektif kapasitas pemerintah dalam mempertahankan

integritas informasi publik. Dengan demikian, seluruh variabel tersebut membentuk kerangka proses yang komprehensif, relevan, dan sangat strategis dalam penilaian kinerja komunikasi publik pemerintah.

## Capaian Indeks Dimensi Proses K/L/D

### Komunikasi Strategis

Data menunjukkan bahwa kapasitas proses komunikasi publik pada aspek komunikasi strategis di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) secara konsisten berada pada tingkat yang sangat tinggi, dengan hampir seluruh indikator berada pada rentang 90–92. Indikator seperti Koordinasi Internal (92,31), Pengumpulan Informasi dari Pemangku Kepentingan (92,31), Perencanaan Media (92,12), dan Identifikasi Masalah (91,94) menunjukkan bahwa K/L telah memiliki proses manajerial yang mapan dan terstruktur. Hal ini mencerminkan kemampuan institusi pusat dalam mengelola proses komunikasi secara komprehensif, mulai dari analisis situasi, perancangan pesan, manajemen anggaran, hingga monitoring dan evaluasi. Pola ini sejalan dengan karakteristik K/L yang umumnya memiliki SDM lebih besar, akses sumber daya yang lebih kuat, serta fungsi koordinatif antar-instansi yang lebih formal.

Tabel 2.5 Komunikasi Strategis

INDIKATOR	INDEKS D	INDEKS K/L	INDEKS NASIONAL
Pengumpulan Informasi dari Pemangku Kepentingan	81,94	92,31	87,13
Analisis terhadap Situasi Terkini	74,54	90,66	82,60
Analisis Pemangku Kepentingan	75,00	90,48	82,74
Identifikasi Masalah	74,07	91,94	83,01
Penetapan Tujuan/Sasaran	76,85	90,66	83,76
Penyusunan Linimasa (timeline)	75,46	91,39	83,43
Penyusunan Anggaran	86,57	89,74	88,16
Perancangan Pesan	76,85	91,03	83,94
Perencanaan media (baik media sosial maupun media daring) yang akan digunakan	82,87	92,12	87,50
Penugasan Staf/Orang	86,57	91,94	89,26
Koordinasi Internal	89,35	92,31	90,83
Monitoring (Sebelum Pelaksanaan Berakhir)	84,26	87,73	85,99
Evaluasi (Sesudah Pelaksanaan Berakhir)	81,48	90,48	85,98
<b>TOTAL</b>	<b>80,45</b>	<b>90,98</b>	<b>85,72</b>

Sebaliknya, indeks di tingkat Dinas Kominfo Provinsi (D) menunjukkan variasi kapasitas yang lebih lebar, dengan nilai rata-rata lebih rendah pada hampir seluruh indikator. Beberapa aspek seperti Analisis Situasi (74,54), Identifikasi Masalah (74,07), dan Penetapan Tujuan (76,85) memperlihatkan bahwa perencanaan komunikasi di daerah belum sekuat di pusat, terutama pada tahap analitis dan konseptual. Namun, beberapa indikator, seperti Koordinasi Internal (89,35), Penugasan Staf (86,57), dan Penyusunan Anggaran (86,57), menunjukkan bahwa daerah relatif lebih kuat dalam aspek operasional pelaksanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas daerah lebih condong pada pelaksanaan teknis, tetapi belum sepenuhnya pada perencanaan strategis yang memerlukan analisis mendalam, data yang memadai, dan dukungan manajerial. Indeks gabungan K/L/D menunjukkan nilai rata-rata 85,72, mengindikasikan kapasitas proses perencanaan komunikasi publik yang tergolong baik secara nasional. Meskipun demikian, perbedaan signifikan antara pusat (90,98) dan daerah (80,45) menandakan

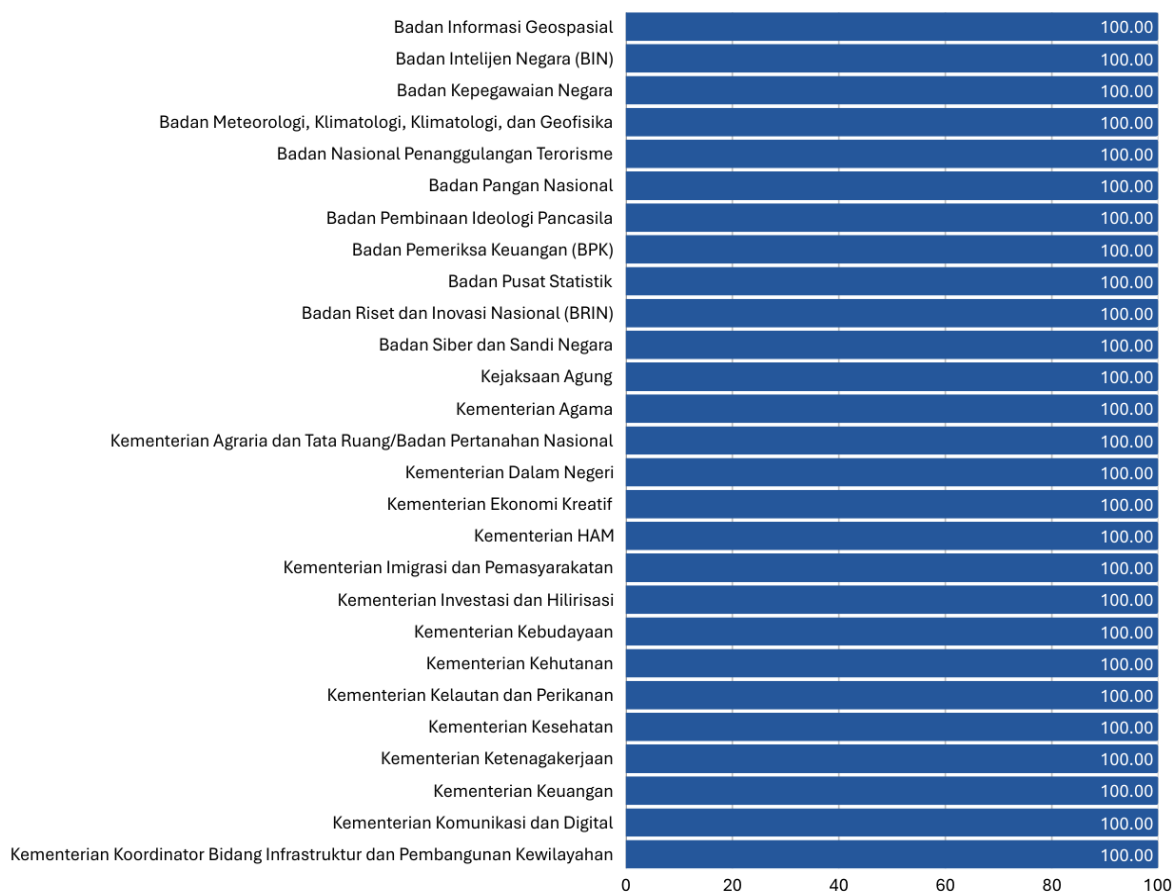
adanya kesenjangan yang perlu diperhatikan dalam implementasi agenda komunikasi publik pemerintah. Kesenjangan ini dapat berdampak pada ketidakselarasan kualitas komunikasi publik antara pusat dan daerah, terutama pada konteks kebijakan prioritas nasional yang menuntut konsistensi narasi dan efektivitas diseminasi informasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas strategis di daerah, khususnya pada aspek analisis, perancangan pesan, dan perencanaan media menjadi prioritas penting untuk memastikan tercapainya tata kelola komunikasi publik yang lebih terintegrasi, merata, dan responsif di seluruh tingkatan pemerintahan. Masih terdapat variasi persepsi kapasitas yang signifikan di antara K/L lainnya, terutama pada kelompok dengan skor menengah hingga rendah (30–70), seperti Kemenhan, Kemenko Polhukam, Komnas Perempuan, Kemenkumham, BAWASLU, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Arsip Nasional RI. K/L dalam kategori ini kemungkinan menghadapi keterbatasan struktural, minimnya kapasitas SDM komunikasi, koordinasi lintas sektor yang belum

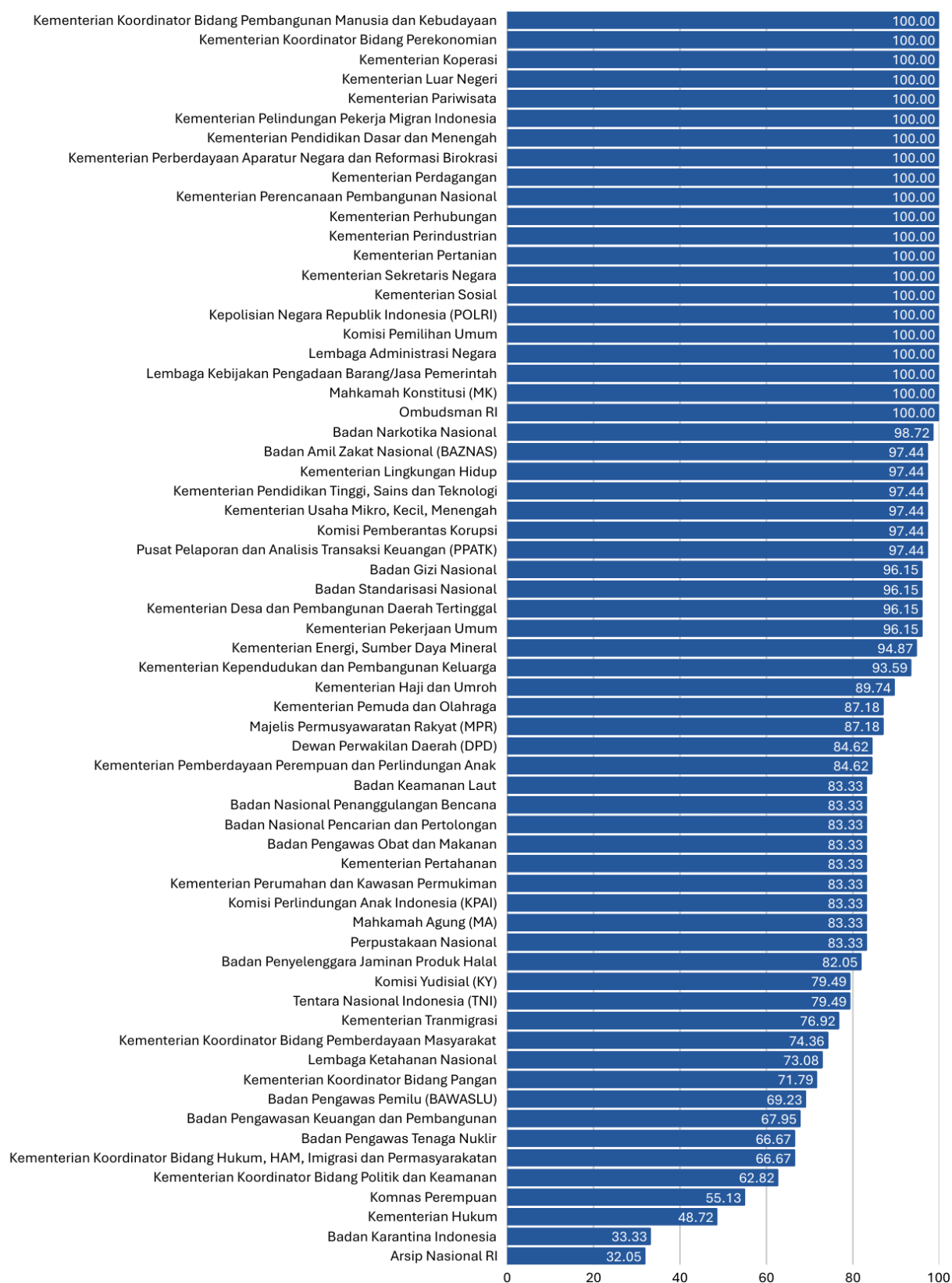
optimal, atau dukungan anggaran yang lebih terbatas. Rendahnya kapasitas pada sebagian institusi ini menunjukkan adanya kesenjangan kesiapan dalam melaksanakan fungsi komunikasi publik nasional secara seragam. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas yang lebih terarah diperlukan agar seluruh K/L dapat menyamai standar institusi yang sudah sangat kuat, sehingga keseluruhan ekosistem komunikasi publik pemerintah dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan responsif. Indeks total kapasitas K/L mencapai 90,98, yang menunjukkan bahwa persepsi kapasitas komunikasi publik pemerintah di tingkat pusat berada pada kategori sangat kuat. Nilai ini mencerminkan kesiapan kelembagaan yang

tinggi dalam menangani fungsi komunikasi publik, termasuk perencanaan, penyediaan informasi, koordinasi lintas sektor, dan penguatan transparansi kebijakan. Namun, kesenjangan yang muncul antara institusi berkategori sangat tinggi dan institusi dengan kapasitas menengah menunjukkan perlunya intervensi adaptif. Peningkatan kapasitas yang lebih terarah pada K/L dengan skor rendah akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh institusi pusat dapat berkontribusi secara merata terhadap standar komunikasi publik nasional yang terintegrasi, profesional, dan responsif sesuai mandat KPIP.

## A. Komunikasi Strategis K/L

Diagram 2.3. Indeks Komunikasi Strategis K/L

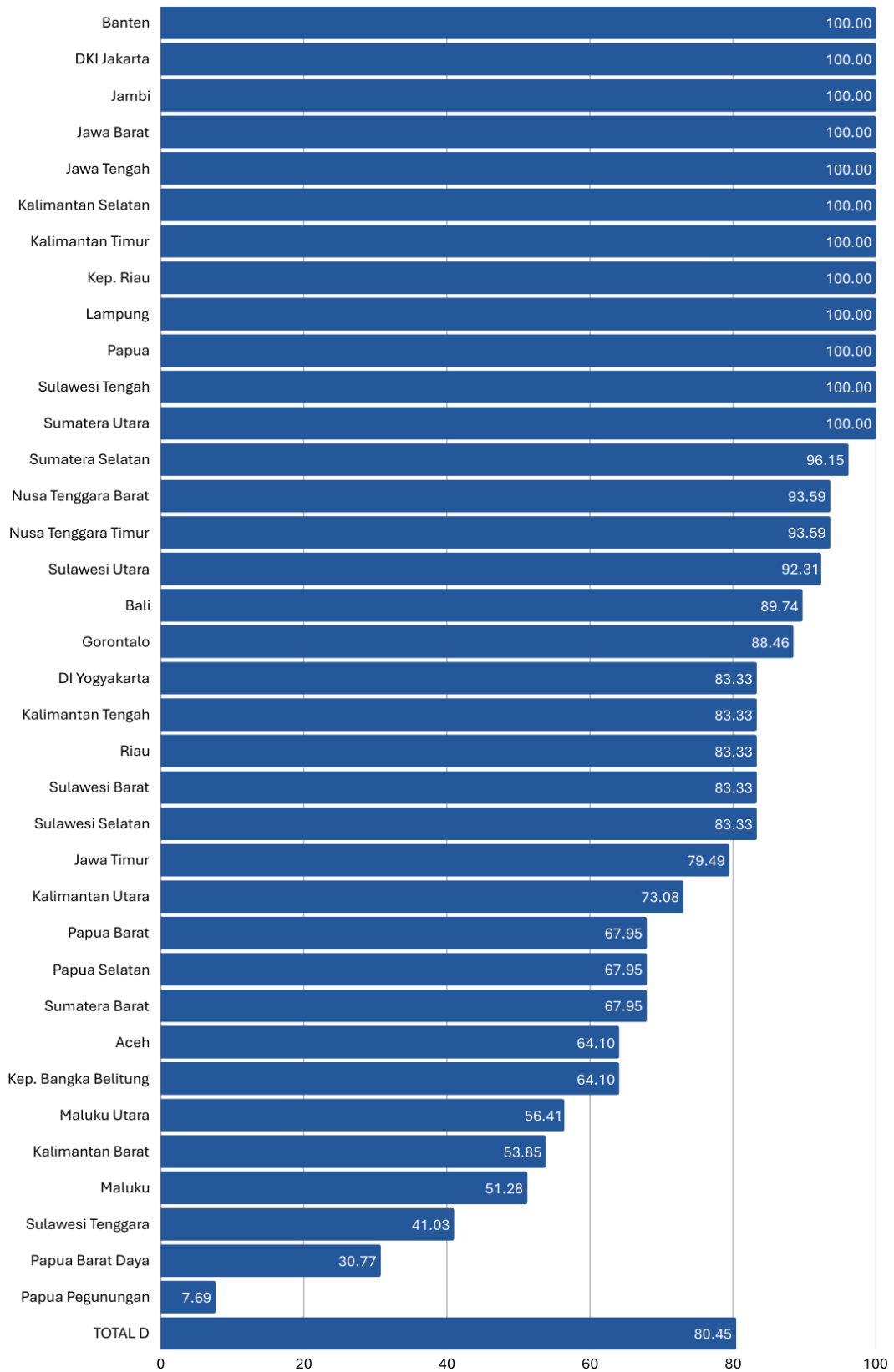




**Total**

**90.98**

Diagram 2.4. Indeks Komunikasi Strategis Daerah



Data menunjukkan bahwa sejumlah provinsi memiliki kapasitas yang sangat tinggi dalam menjalankan fungsi strategis komunikasi publik, dengan perolehan indeks 100. Provinsi-provinsi ini mencakup Banten, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Daerah-daerah ini umumnya memiliki infrastruktur kelembagaan yang lebih kuat, tersedianya SDM komunikasi yang lebih kompeten, serta dukungan anggaran yang lebih stabil. Provinsi besar seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah yang memiliki kapasitas fiskal dan birokrasi lebih matang, memperlihatkan kesiapan tinggi dalam menjalankan seluruh tahapan proses komunikasi publik, mulai dari analisis situasi hingga monitoring dan evaluasi. Hal ini mengindikasikan bahwa provinsi berindeks tinggi telah mampu mengintegrasikan fungsi komunikasi publik sebagai bagian yang inheren dalam manajemen pemerintahan.

Di sisi lain, terdapat sejumlah provinsi dengan kemampuan komunikasi strategis menengah hingga rendah, terutama di wilayah yang secara geografis maupun institusional menghadapi tantangan lebih besar. Kelompok provinsi dengan indeks rendah meliputi Sulawesi Tenggara (41,03), Kalimantan Barat (53,85), Maluku (51,28), Maluku Utara (56,41), serta Papua Barat Daya (30,77). Provinsi dengan kapasitas paling rendah adalah Papua Pegunungan (7,69), yang mengindikasikan adanya hambatan struktural yang sangat signifikan, termasuk keterbatasan SDM, minimnya infrastruktur komunikasi, serta tantangan geopolitik dan aksesibilitas wilayah. Perbedaan yang mencolok antara provinsi berindeks tinggi dan rendah menunjukkan adanya ketimpangan tata kelola komunikasi publik yang cukup tajam di tingkat daerah. Kondisi ini dapat berdampak pada ketidakmerataan efektivitas penyebaran informasi kebijakan nasional dan menimbulkan tantangan dalam membangun narasi pemerintah yang konsisten di seluruh wilayah.

Secara keseluruhan, total indeks provinsi berada pada angka 80,45, yang menunjukkan kapasitas komunikasi publik daerah berada pada kategori baik, namun belum optimal dan

belum merata. Nilai ini menggambarkan bahwa secara agregat, daerah mampu melaksanakan fungsi komunikasi publik strategis dengan cukup memadai, tetapi kesenjangan kapasitas antarwilayah masih signifikan. Dengan dominasi provinsi berindeks tinggi di bagian barat Indonesia dan konsentrasi nilai rendah di kawasan timur, terutama Papua dan beberapa provinsi kepulauan, diperlukan intervensi kapasitas yang lebih terarah. Peningkatan SDM, penguatan koordinasi, serta dukungan teknologi dan anggaran menjadi kunci utama agar seluruh provinsi dapat mencapai standar minimal yang konsisten, sehingga pelaksanaan komunikasi publik dalam kerangka KPIP dapat berjalan secara lebih efektif, inklusif, dan merata di seluruh Indonesia.

## Hak Publik

Kapasitas pemenuhan Hak Publik dalam konteks komunikasi publik pemerintah dipersepsikan pada kategori tinggi, baik di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Dinas Kominfo (D). K/L secara konsisten mencatat indeks lebih tinggi pada hampir seluruh indikator, dengan nilai di kisaran 87–94, yang mencerminkan kematangan tata kelola informasi di tingkat pusat. Indikator seperti Mencari Informasi Publik (94,32) dan Memperoleh Informasi Publik (93,96) berada pada posisi tertinggi, mengindikasikan bahwa K/L mampu menyediakan kanal informasi yang cukup mudah diakses dan responsif. Selain itu, indikator Menyampaikan Informasi kepada Lembaga (93,41) menunjukkan bahwa mekanisme internal dalam penyampaian informasi dan pelaporan juga berjalan efektif, memungkinkan perputaran informasi yang lebih cepat dalam proses birokrasi.

Tabel 2.6. Tabel Indikator Hak Publik

INDIKATOR	K/L	D	NASIONAL
Mencari informasi publik	94,32	91,67	92,99
Memperoleh informasi publik	93,96	91,2	92,58
Menyampaikan informasi kepada lembaga tempat saya bekerja	93,41	89,81	91,61

Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik sebelum kebijakan tersebut disahkan	88,1	84,72	86,41
Mengetahui informasi mengenai program kebijakan publik yang sedang dijalankan	91,21	87,04	89,12
Mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan publik oleh pemerintah dilakukan	87,55	87,04	87,29
Mengetahui alasan di balik pengambilan keputusan publik oleh pemerintah	86,81	85,65	86,23
Memberikan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan program pemerintah	89,93	84,26	87,09
<b>TOTAL</b>	<b>90,66</b>	<b>87,67</b>	<b>89,17</b>

Pada tingkat Kominfo provinsi (D), capaian juga berada pada kategori tinggi namun lebih rendah dibanding pusat, dengan indeks rata-rata 87,67. Meskipun demikian, beberapa indikator menunjukkan kesenjangan kapasitas yang perlu diperhatikan, terutama pada kemampuan Memberikan Masukan dalam Penyusunan Kebijakan (84,26) dan Mengetahui Rencana Pembuatan Kebijakan sebelum Disahkan (84,72). Perbedaan ini dapat mencerminkan terbatasnya kanal partisipasi publik di daerah, keterbatasan sosialisasi kebijakan, atau rendahnya transparansi dalam tahapan perencanaan kebijakan. Meski demikian, indikator Mengetahui Proses Pengambilan Keputusan Publik (87,04) dan Mengetahui Informasi mengenai Program Kebijakan Publik (87,04) menunjukkan bahwa daerah relatif konsisten dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat, meskipun tidak

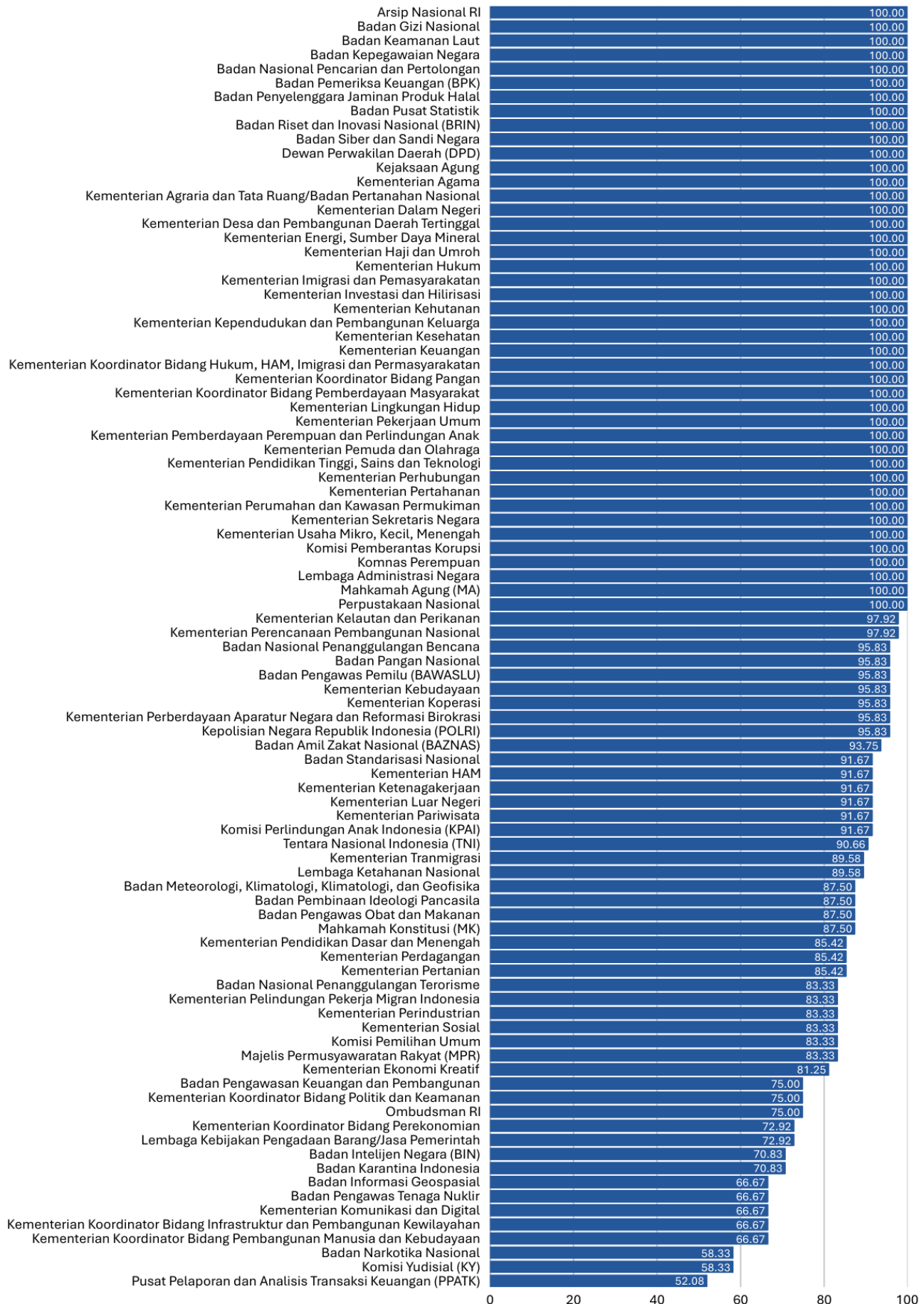
seoptimal tingkat pusat.

Secara nasional, nilai gabungan 89,17 menunjukkan bahwa secara umum pemerintah sudah berada pada tingkat yang baik dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, menyampaikan masukan, serta memahami proses pengambilan keputusan. Namun, kesenjangan antara K/L pusat dan daerah tetap menjadi perhatian penting, terutama dalam aspek partisipasi publik dan transparansi awal kebijakan. Untuk memperkuat pemenuhan hak publik secara merata, diperlukan penguatan kapasitas di daerah melalui peningkatan aksesibilitas kanal informasi, pengembangan mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif, serta penyederhanaan proses komunikasi kebijakan. Hal ini penting agar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh hak informasi secara setara dan dapat berperan aktif dalam siklus kebijakan publik, sesuai prinsip komunikasi publik yang partisipatif dan transparan.

## A. Indikator Hak Publik K/L

Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar Kementerian/Lembaga (K/L) membersepsikan satkernya memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi, terbukti dari banyaknya institusi yang mencapai skor 100. Kelompok ini mencakup K/L strategis seperti BPK, BPS, BRIN, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kemenag, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, hingga lembaga layanan publik seperti PPID nasional (Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional), dan lembaga pengawasan seperti KPK. Capaian sempurna ini menunjukkan bahwa institusi tersebut telah menjalankan fungsi keterbukaan informasi publik secara optimal, baik dalam menyediakan akses informasi, menyampaikan data kebijakan, maupun membuka ruang partisipasi publik. Dominasi skor maksimal ini juga menunjukkan bahwa pusat pemerintahan memiliki tata kelola komunikasi publik yang kuat, sesuai standar transparansi dan pelayanan informasi yang baik.

Diagram 2.5. Indikator Hak Publik K/L



Total

89.17

Di sisi lain, terdapat kelompok K/L dengan kapasitas menengah hingga tinggi (70–97), seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (97,92), BNPT (95,83), BAWASLU (95,83), Kementerian Koperasi (95,83), serta institusi lainnya yang berada pada kisaran 85–90. Kelompok ini tetap menunjukkan performa baik, namun terdapat ruang peningkatan terutama dalam penyediaan informasi awal kebijakan, partisipasi publik, serta konsistensi penyampaian informasi kebijakan lintas kanal. Pada lapisan bawah, beberapa K/L mencatat indeks di bawah 70, seperti BIN (70,83), Kemenkomdigi (66,67), BIG (66,67), Batan (66,67), hingga PPATK yang mencapai nilai terendah (52,08). Variasi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dan operasional dalam hal keterbukaan informasi, seperti keterbatasan sistem internal, sensitivitas data strategis, atau minimnya integrasi kanal informasi publik. Rendahnya nilai pada lembaga tertentu menunjukkan kebutuhan

akan penguatan kapasitas PPID, standarisasi penyampaian informasi, dan peningkatan kompetensi SDM komunikasi publik.

Secara keseluruhan, nilai Total K/L sebesar 89,17 menegaskan bahwa pada tingkat nasional K/L telah berada dalam kategori sangat baik dalam memenuhi hak publik akan informasi. Namun, kesenjangan antar-institusi menunjukkan bahwa keberhasilan ini belum sepenuhnya merata. Untuk memastikan hak publik terpenuhi secara konsisten di seluruh K/L, diperlukan pendekatan diferensial: lembaga berindeks rendah memerlukan dukungan penguatan sistem informasi, peningkatan SDM PPID, serta penyederhanaan mekanisme penyampaian informasi publik. Konsistensi dalam keterbukaan informasi merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai amanat UU KIP dan standar komunikasi publik nasional.

## B. Indikator Hak Publik Daerah

Tabel 2.7 Indikator Hak Publik Daerah

Provinsi	Indeks
Bali	100
Banten	100
DKI Jakarta	100
Gorontalo	100
Jambi	100
Jawa Barat	100
Jawa Tengah	100
Jawa Timur	100
Kalimantan Barat	100
Kalimantan Timur	100
Kep. Riau	100
Lampung	100
Nusa Tenggara Timur	100
Papua	100
Papua Barat	100
Sulawesi Tengah	100
Sumatera Utara	100
Kalimantan Selatan	95,83

Papua Selatan	89,58
Sumatera Barat	89,58
Aceh	87,50
Nusa Tenggara Barat	87,50
Sulawesi Barat	85,42
Sulawesi Tenggara	85,42
DI Yogyakarta	83,33
Kalimantan Tengah	83,33
Kalimantan Utara	83,33
Riau	83,33
Kep. Bangka Belitung	81,25
Sulawesi Selatan	79,17
Sulawesi Utara	77,08
Papua Pegunungan	62,50
Sumatera Selatan	62,50
Maluku Utara	58,33
Maluku	41,67
Papua Barat Daya	39,58
<b>TOTAL D</b>	<b>87,67</b>

Sebagian besar dinas kominfo memiliki persepsi yang sangat tinggi terhadap kemampuan dalam memenuhi Hak Publik, tercermin dari banyaknya daerah yang memperoleh skor 100. Provinsi seperti Bali, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara semuanya menilai bahwa hak publik termasuk akses terhadap informasi, pemahaman terhadap proses kebijakan, kemampuan memperoleh informasi, dan ruang partisipasi telah terpenuhi dengan sangat baik. Tingginya skor di provinsi-provinsi tersebut menunjukkan adanya sistem komunikasi publik yang lebih matang, kanal informasi yang lebih mudah dijangkau, serta mekanisme keterbukaan informasi yang berjalan secara konsisten. Provinsi-provinsi besar dan lebih maju secara kelembagaan cenderung memiliki regulasi, kapasitas SDM, dan infrastruktur informasi yang lebih kuat, sehingga persepsi pemenuhan hak publik menjadi lebih positif. Namun, variasi kapasitas antarwilayah terlihat cukup signifikan. Provinsi dengan

skor menengah, seperti Kalimantan Selatan (95,83), Papua Selatan (89,58), Sumatera Barat (89,58), Aceh (87,50), dan NTB (87,50), masih menunjukkan kinerja yang baik, namun belum optimal. Kondisi ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam konsistensi penyediaan informasi, keterbukaan proses kebijakan, atau akses publik terhadap kanal informasi resmi. Provinsi lain seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, DIY, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung berada pada rentang 81–85, menunjukkan bahwa pemenuhan hak publik sudah berjalan, tetapi kanal komunikasi publik kemungkinan masih belum terdistribusi secara merata atau belum sepenuhnya digunakan secara optimal.

Kelompok provinsi dengan nilai rendah menggambarkan tantangan paling besar dalam pemenuhan hak publik. Provinsi seperti Sulawesi Selatan (79,17), Sulawesi Utara (77,08), Papua Pegunungan (62,50), Sumatera Selatan (62,50), Maluku Utara (58,33), Maluku (41,67), dan Papua Barat Daya (39,58) menunjukkan persepsi bahwa masyarakat belum sepenuhnya menerima akses

yang baik terhadap informasi publik. Secara keseluruhan, indeks total daerah sebesar 87,67 menunjukkan bahwa pemenuhan hak publik pada tingkat nasional berada pada kategori baik, namun belum sepenuhnya merata antarprovinsi. Sementara banyak daerah sudah sangat siap dan kuat dalam menyediakan akses informasi dan partisipasi publik, sebagian provinsi lainnya masih

memerlukan penguatan kapasitas komunikasi publik, perbaikan sistem informasi, serta peningkatan kualitas transparansi kebijakan. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan berbeda sesuai kebutuhan wilayah agar hak publik dapat dipenuhi secara lebih setara di seluruh Indonesia.

## Cakupan Kerja

### A. Koordinasi dan Kolaborasi dengan Ditjen KPM

Tabel 2.8. Indikator Koordinasi dan Kolaborasi Satker dengan Ditjen KPM

INDIKATOR	INDEKS D	INDEKS K/L	INDEKS K/L/D
Melakukan Koordinasi	81,48	85,53	83,51
Mendapatkan Bimbingan Teknis	75,00	83,52	79,26
Mendapatkan Pemantauan	72,69	77,29	74,99
Mendapatkan Evaluasi	73,15	75,46	74,30
Melaporkan data dan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah	75,93	79,49	77,71
Memperoleh bahan informasi publik tentang kebijakan dan program pemerintah	82,87	82,05	82,46
Menyebarkan informasi dari Ditjen KPM tentang kebijakan dan program pemerintah kepada publik	78,24	79,30	78,77
<b>TOTAL</b>	<b>77,05</b>	<b>80,38</b>	<b>78,71</b>

Data menunjukkan bahwa persepsi kapasitas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam melakukan koordinasi dengan Ditjen KPM komunikasi publik berada pada kategori cukup tinggi, dengan nilai total 80,38. Indikator tertinggi adalah Melakukan Koordinasi (85,53), menunjukkan bahwa K/L relatif kuat dalam menjaga arus koordinasi lintas instansi. Namun, beberapa aspek lain seperti Mendapatkan Pemantauan (77,29) dan Mendapatkan Evaluasi (75,46) masih menunjukkan ruang perbaikan, yang mengindikasikan bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi komunikasi publik di tingkat pusat belum berjalan secara optimal atau belum terstandarisasi di seluruh K/L.

Kemampuan K/L dalam melaporkan data dan informasi kebijakan (79,49) serta menyebarkan informasi dari Ditjen

KPM (79,30) juga berada pada kategori baik, mencerminkan fungsi diseminasi informasi yang berjalan namun belum sepenuhnya maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun K/L memiliki kapasitas struktural yang lebih mapan, sistem dukungan teknis dan evaluasi masih dapat diperkuat agar koordinasi nasional berjalan lebih efektif. Di sisi lain, kapasitas Dinas Kominfo (D) berada pada tingkat yang lebih rendah dengan nilai total 77,05, menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas antara pusat dan daerah (D dan K/L). Indikator Mendapatkan Bimbingan Teknis (75,00), Mendapatkan Pemantauan (72,69), dan Mendapatkan Evaluasi (73,15) menunjukkan bahwa daerah masih membutuhkan dukungan yang lebih intensif dari Komdigi Pusat. Hal ini menggambarkan bahwa alur pendampingan, supervisi, dan evaluasi komunikasi publik di daerah belum

terdistribusi secara merata, baik dari sisi frekuensi maupun kualitas dukungan yang diterima. Meskipun indikator Melakukan Koordinasi (81,48) dan Memperoleh Informasi Publik (82,87) relatif tinggi, kemampuan daerah dalam melaporkan dan menyebarkan informasi kebijakan masih berada pada kategori menengah (sekitar 76–78). Nilai gabungan

K/L/D sebesar 78,71 mengindikasikan bahwa secara nasional kapasitas koordinasi dan dukungan komunikasi publik berada pada level cukup baik, namun sinergi antara pusat dan daerah masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi yang lebih sistematis dan berkesinambungan.

## B. Penyampaian informasi Publik

Tabel 2.9. Penyampaian Informasi Publik

INDIKATOR	SANGAT RENDAH	RENDAH	CUKUP RENDAH	CUKUP TINGGI	TINGGI	SANGAT TINGGI	MEDIAN
Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	17,32	18,11	17,32	14,17	16,54	16,54	36,00
Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta	33,07	5,51	12,60	16,54	15,75	16,54	5,00
Pembaruan atau update Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	17,32	16,54	18,11	16,54	14,96	16,54	30,00
Penyampaian Pengumuman tentang Layanan Informasi Publik	26,77	10,24	13,39	16,54	18,11	14,96	8,00
Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	18,11	16,54	15,75	16,54	16,54	16,54	50,00
Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi SDM Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik	17,32	36,22	0,00	14,17	16,54	15,75	1,00
Sosialisasi tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas	36,22	0,00	43,31	0,00	9,45	11,02	1,00
Bimbingan Teknis Bidang Komunikasi Publik	22,05	34,65	0,00	10,24	18,90	14,17	1,00

Data menunjukkan bahwa pada indikator-indikator yang terkait langsung dengan kewajiban penyampaian informasi publik, distribusi kategori berada pada pola yang relatif merata, menandakan variasi kapasitas antarinstansi dalam memenuhi standar keterbukaan informasi. Indikator Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala memiliki median 36, tertinggi di antara semua indikator, menunjukkan bahwa instansi lebih konsisten dalam menyediakan informasi rutin dibandingkan jenis informasi lainnya. Demikian pula, indikator Pembaruan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat memiliki median 30, yang menunjukkan kecenderungan sedang dalam kemampuan melakukan pembaruan konten secara berkala. Sebaliknya, penyampaian informasi yang bersifat mendesak (serta-merta) memiliki median 5, menandakan bahwa kapasitas respons cepat terhadap situasi darurat atau informasi prioritas masih lemah di banyak instansi.

Indikator yang berhubungan dengan layanan informasi publik, seperti Penyampaian Pengumuman tentang Layanan Informasi Publik (median 8) dan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID (median 50), menunjukkan variasi kapasitas yang signifikan. Median 50 untuk PPID menunjukkan bahwa beberapa instansi memiliki performa layanan yang jauh lebih tinggi dibanding indikator lainnya, menandakan bahwa fungsi PPID sebagai pintu layanan keterbukaan informasi relatif kuat. Namun, indikator pengumuman layanan informasi publik yang median-nya hanya 8 menunjukkan bahwa publikasi mengenai alur, prosedur, dan hak akses informasi masih belum merata. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun PPID bekerja cukup baik dalam aspek pelayanan, sisi komunikasi proaktif mengenai keberadaan dan mekanisme layanan tersebut masih perlu diperkuat.

Kelompok indikator yang berkaitan dengan penguatan kapasitas SDM, seperti Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (median 1), Sosialisasi Jabatan Fungsional Pranata Humas (median 1), dan Bimbingan Teknis Bidang Komunikasi Publik (median 1) menunjukkan nilai median yang sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi pada peningkatan kompetensi SDM komunikasi publik

masih sangat minim dan belum menjadi prioritas di banyak instansi. Besarnya nilai kategori “rendah” dan “cukup rendah” pada indikator-indikator ini menegaskan bahwa pelatihan, sosialisasi jabatan fungsional, dan pengembangan kompetensi masih jarang dilakukan secara sistematis.

Kesenjangan ini menimbulkan implikasi penting: tanpa penguatan kapasitas SDM, kemampuan instansi dalam menyampaikan informasi publik secara efektif, responsif, dan sesuai standar keterbukaan informasi akan sulit meningkat meskipun sistem dan struktur kelembagaan telah tersedia.

### **C. Jumlah Penyampaian Info Melalui Kanal Komunikasi Tertentu**

Sebagian besar instansi belum secara intensif menggunakan kanal-kanal berbayar dan kanal tradisional dalam penyampaian informasi publik. Hal ini terlihat dari indeks pada kategori sangat rendah dengan proporsi tinggi untuk beberapa kanal seperti Konten berbayar dari influencer (61,42), Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media massa (39,37), dan ILM berbasis internet/situs web (33,07). Median untuk indikator-indikator tersebut sangat rendah (0–1), menunjukkan bahwa penggunaan kanal berbiaya atau berbasis kerja sama komersial belum menjadi strategi umum.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran, minimnya kompetensi produksi konten berbayar, atau preferensi instansi terhadap kanal organik. Dengan demikian, pola ini menunjukkan bahwa pendekatan paid media belum menjadi arus utama dalam penyebaran informasi publik pemerintah. Sebaliknya, kanal komunikasi berbasis media massa non-berbayar dan kanal digital organik menunjukkan tingkat penggunaan yang jauh lebih tinggi. Indikator Berita media massa memiliki median 241, yang merupakan nilai tertinggi dari seluruh indikator, menandakan bahwa instansi satker sangat mengandalkan jangkauan media massa untuk menyebarkan informasi. Kanal seperti Akun Media Sosial Pemerintah (median 5), Situs Web Pemerintah (median 3), dan Informasi dari sesama warganet (median 2) juga menunjukkan penggunaan yang relatif intensif. Tingginya kategorisasi cukup tinggi dan tinggi pada kanal-kanal ini mencerminkan pergeseran

Tabel 2.10. Jumlah Penyampaian Informasi melalui kanal komunikasi tertentu

Indikator	Sangat Rendah	Rendah	Cukup Rendah	Cukup Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Median
Iklan layanan masyarakat di media massa (media cetak, media daring, televisi, radio)	39,37	0,00	11,02	16,54	17,32	15,75	1,00
Iklan layanan masyarakat di media sosial (berbagai platform media sosial)	21,26	12,60	17,32	16,54	15,75	16,54	8,00
Iklan layanan masyarakat di internet atau situs web	33,07	18,90	0,00	15,75	15,75	16,54	1,00
Konten berbayar dari influencer (pemengaruh)	61,42	0,00	0,00	9,45	13,39	15,75	0,00
Berita media massa (media cetak, media daring, televisi, radio)	18,90	14,96	16,54	16,54	16,54	16,54	241,00
Tokoh masyarakat	36,22	0,00	18,90	13,39	16,54	14,96	2,00
Tokoh agama	36,22	0,00	43,31	0,00	9,45	11,02	1,00
Informasi dari sesama warganet atau pengguna media sosial	41,73	0,00	11,02	14,17	16,54	16,54	2,00
Situs web pemerintah	44,88	0,00	7,09	14,96	16,54	16,54	3,00
Aplikasi pemerintah	33,07	26,77	0,00	8,66	14,96	16,54	1,00
Akun media sosial pemerintah (berbagai platform media sosial)	18,11	33,07	0,00	15,75	16,54	16,54	5,00
Lembaga penyiaran publik (TVRI, RRI)	34,65	0,00	23,62	8,66	16,54	16,54	2,00

strategi komunikasi pemerintah menuju model digital yang lebih partisipatif dan tidak berbiaya besar. Hal ini sesuai dengan tren komunikasi modern yang mengedepankan keterjangkauan, kecepatan distribusi, dan interaktivitas. Kanal komunikasi yang mengandalkan tokoh masyarakat dan tokoh agama menunjukkan pola penggunaan menengah hingga rendah, dengan median masing-masing 2 dan 1. Meskipun peran tokoh dalam membangun kepercayaan publik cukup penting, rendahnya

frekuensi penggunaan kanal ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dengan tokoh lokal atau pemimpin komunitas belum terstruktur secara sistematis. Selain itu, kanal pemerintah seperti Aplikasi Pemerintah (median 1) juga menunjukkan tingkat penggunaan rendah, yang mengindikasikan bahwa integrasi aplikasi sebagai sarana penyebaran informasi belum optimal. Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan bahwa pemerintah cenderung mengandalkan kanal gratis dan media organik daripada kanal

berbayar atau kolaboratif. Untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik, strategi multikanal yang lebih seimbang, termasuk memanfaatkan ILM berbayar,

influencer, dan kolaborasi masyarakat, perlu diperkuat, terutama untuk menjangkau segmen publik yang tidak aktif di media sosial pemerintah.

## D. Penyampaian Kebijakan dan Program Pemerintah

Tabel 2.11. Penyampaian Program dan Kebijakan Pemerintah

Indikator	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Lintas sektoral	87,04	89,56	88,30
Lintas daerah	87,04	88,28	87,66
Cepat	84,26	88,46	86,36
Tepat	83,80	90,29	87,04
Objektif (tidak memihak atau dipengaruhi pendapat/kepentingan pihak tertentu)	81,94	91,21	86,58
Berkualitas baik	82,41	91,39	86,90
Berwawasan nasional (menjunjung persatuan, kesatuan dan kepentingan nasional)	85,19	90,48	87,83
<b>TOTAL</b>	<b>84,52</b>	<b>89,95</b>	<b>87,24</b>

Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki persepsi tingkat kualitas penyampaian informasi publik yang sangat tinggi, dengan skor konsisten berada pada rentang 88–91 di hampir seluruh indikator. Nilai tertinggi terlihat pada indikator Tepat (90,29), Objektif (91,21), dan Berkualitas Baik (91,39), yang mencerminkan kemampuan K/L dalam menyampaikan informasi secara presisi, faktual, dan bebas kepentingan. K/L juga unggul dalam indikator Berwawasan Nasional (90,48) dan Lintas Sektoral (89,56), menandakan bahwa institusi pusat lebih mampu memproduksi dan mendiseminasi informasi yang selaras dengan konteks kebijakan nasional dan lintas instansi. Secara keseluruhan, total indeks 89,95 memperlihatkan bahwa kualitas komunikasi publik di tingkat pusat telah berada pada level sangat matang, baik dari sisi kecepatan respons, ketepatan konten, maupun objektivitas pesan. Di sisi lain, Dinas Kominfo (D) menunjukkan capaian yang kuat namun lebih rendah dengan total indeks 84,52.

Indikator penyampaian informasi secara Cepat (84,26) dan Objektif (81,94) menjadi nilai terendah di daerah, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam merespons isu secara cepat dan menjaga netralitas informasi, terutama dalam konteks dinamika politik lokal atau keterbatasan SDM komunikasi. Meskipun demikian, indikator Lintas Sektoral dan Lintas Daerah keduanya memiliki skor 87,04, menunjukkan bahwa daerah cukup mampu menjalin koordinasi dan berbagi informasi antar-instansi maupun antarwilayah. Nilai gabungan nasional (87,24) mengindikasikan bahwa kualitas penyampaian informasi publik berada pada kategori tinggi, namun dengan kesenjangan yang masih perlu dijematani. Untuk memastikan konsistensi pesan pemerintah secara nasional, peningkatan kapasitas daerah dalam kecepatan respons, produksi konten berkualitas, serta penguatan prinsip objektivitas menjadi prioritas strategis yang perlu diperkuat dalam implementasi KPIP.

## E. Keterlibatan Komdigi dalam KPIP Satuan Kerja

Tabel 2.12. Keterlibatan Komdigi dalam KPIP Satker

Indikator	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Perencanaan Komunikasi Publik	82,41	81,32	81,86
Pelaksanaan Komunikasi Publik	86,57	84,07	85,32
Pemantauan atau monitoring Komunikasi Publik	82,41	81,50	81,95
Evaluasi Komunikasi Publik	81,02	80,04	80,53
Perumusan materi informasi publik tentang kebijakan dan program pemerintah yang akan disebarkan ke pemangku kepentingan	82,87	81,32	82,09
<b>TOTAL</b>	<b>83,06</b>	<b>81,65</b>	<b>82,35</b>

Tingkat keterlibatan Komdigi dalam aktivitas komunikasi publik satker, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi, dipersepsikan berada pada kategori baik, meskipun terdapat variasi antara Dinas Kominfo (D) dan Kementerian/ Lembaga (K/L). Dinas Kominfo memiliki indeks yang sedikit lebih tinggi pada beberapa aspek, terutama pada indikator Pelaksanaan Komunikasi Publik (86,57), yang menjadi nilai tertinggi di seluruh tabel. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah relatif lebih aktif dalam tahap operasional, terutama ketika komunikasi publik memerlukan aksi langsung dan keterhubungan dengan masyarakat lokal. Sementara itu, indikator Evaluasi Komunikasi Publik (81,02) dan Monitoring (82,41) menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan cukup kuat, proses pengukuran dampak dan evaluasi belum sepenuhnya optimal di daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan perangkat evaluasi, kurangnya SDM analitis, atau tidak adanya mekanisme pelaporan yang terstruktur.

Di tingkat K/L, seluruh indikator berada pada rentang 80–84, menunjukkan konsistensi kapasitas yang stabil, meskipun sedikit lebih rendah dari daerah dalam aspek pelaksanaan. Indikator Perencanaan Komunikasi Publik (81,32) dan Pemantauan (81,50) mencerminkan bahwa K/L telah memiliki kerangka kerja yang cukup baik, namun masih terdapat ruang penguatan terutama dalam harmonisasi rencana dan pemantauan lintas unit. Nilai gabungan nasional 82,35 menunjukkan bahwa secara keseluruhan keterlibatan Komdigi dalam KPIP di tingkat Satker berada pada kategori baik, tetapi belum mencapai optimal. Perbedaan antara pusat dan daerah juga mengindikasikan perlunya penguatan fungsi koordinasi, pembakuan SOP komunikasi publik, dan peningkatan alat monitoring–evaluasi agar seluruh siklus komunikasi publik dapat berjalan lebih terintegrasi. Penguatan di area evaluasi menjadi krusial karena menjadi penentu efektivitas komunikasi publik dan dasar perbaikan berkelanjutan di seluruh unit pemerintahan.

## F. Pesan Komunikasi Publik

Tabel 2.13. Pesan Komunikasi Publik

Indikator	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Komunikasi tematik daerah atau Kementerian/Lembaga	79,17	83,15	81,16
Prioritas daerah atau Kementerian/Lembaga	80,56	85,16	82,86
Penanganan komunikasi krisis (mencakup penyiapan atau mitigasi, pengelolaan, dan evaluasi)	76,39	85,35	80,87
<b>TOTAL</b>	<b>78,7</b>	<b>84,55</b>	<b>81,63</b>

Survei persepsi menunjukkan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki cakupan pesan komunikasi publik yang lebih kuat dibandingkan Dinas Kominfo (D), yang terlihat dari konsistensi nilai indeks K/L pada rentang 83–85, lebih tinggi daripada indeks daerah yang berada pada rentang 76–80. Pada indikator Komunikasi Tematik dan Prioritas K/L, nilai K/L masing-masing sebesar 83,15 dan 85,16 menunjukkan bahwa pesan komunikasi di tingkat pusat lebih terstruktur dan selaras dengan agenda prioritas nasional. Hal ini dapat terjadi karena K/L memiliki kapasitas SDM, anggaran, dan sistem manajemen komunikasi yang lebih matang dibandingkan daerah. Sebaliknya, daerah masih menghadapi keterbatasan dalam memastikan konsistensi pesan tematik dan penjabaran prioritas lokal, meskipun nilainya tetap tergolong baik (sekitar 79–81). Perbedaan ini menunjukkan adanya gap kapasitas strategis yang memengaruhi

kualitas penyusunan dan penyampaian pesan komunikasi di berbagai level pemerintahan. Indikator Penanganan Komunikasi Krisis memperlihatkan kesenjangan paling nyata, dengan daerah mencatat nilai 76,39, lebih rendah dibandingkan K/L yang mencapai 85,35. Artinya, kemampuan daerah dalam menyiapkan, mengelola, dan mengevaluasi komunikasi saat krisis masih belum optimal, kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan SDM khusus, infrastruktur monitoring informasi, serta kelemahan koordinasi dalam situasi tinggi tekanan. Secara keseluruhan, nilai gabungan K/L/D sebesar 81,63 menunjukkan bahwa cakupan pesan komunikasi publik nasional berada pada kategori baik, namun masih memerlukan penguatan terutama di daerah agar respons komunikasi publik, baik dalam konteks rutin maupun krisis, dapat berjalan lebih seragam, responsif, dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

## G. Aktivitas Penyusunan Konten

Tabel 2.14. Aktivitas Penyusunan Konten

Indikator	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Membentuk tim penyusun konten	90,74	94,32	92,53
Menyusun konten terkait kebijakan dan program pemerintah	91,67	91,39	91,53
Mengemas ulang konten yang berasal dari Pemerintah Pusat	80,56	88,28	84,42
<b>TOTAL</b>	<b>87,65</b>	<b>91,33</b>	<b>89,49</b>

Cakupan kerja Dinas Kominfo (D) dan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam aktivitas penyusunan konten dipersepsikan berada pada kategori tinggi, meskipun terdapat perbedaan tingkat kekuatan pada tiap indikator. Dinas Kominfo memiliki capaian tertinggi pada indikator Menyusun konten terkait kebijakan dan program pemerintah (91,67) dan Membentuk tim penyusun konten (90,74).

Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah telah memiliki struktur internal dan mekanisme kerja yang cukup baik dalam memproduksi konten informasi kebijakan. Namun, indikator Mengemas ulang konten dari Pemerintah Pusat (80,56) berada jauh lebih rendah, mengindikasikan bahwa daerah masih mengalami tantangan dalam melakukan adaptasi pesan pusat menjadi materi komunikasi yang relevan secara lokal. Tantangan tersebut dapat terkait dengan kapasitas teknis, pemahaman kebijakan, atau keterbatasan SDM kreatif yang dapat melakukan interpretasi dan penyesuaian

konten secara efektif. Sementara itu, K/L menunjukkan performa yang sangat kuat dengan nilai indeks di atas 91 pada dua indikator utama, yaitu pembentukan tim penyusun konten (94,32) dan penyusunan konten kebijakan (91,39). Hal ini menegaskan bahwa pusat memiliki struktur kelembagaan yang lebih mapan, dukungan SDM yang lebih tinggi, serta proses kerja yang lebih standar dalam memproduksi konten kebijakan publik. Indikator pengemasan ulang konten pusat (88,28) juga relatif tinggi, menunjukkan bahwa K/L mampu menyiapkan materi komunikasi yang telah diformat untuk kebutuhan lintas instansi dan publik luas.

Nilai total K/L/D sebesar 89,49 menegaskan bahwa secara nasional kapasitas penyusunan konten sudah baik, namun kesenjangan antara pusat dan daerah dalam kemampuan contextualizing atau adaptasi konten tetap memerlukan perhatian, terutama agar pesan kebijakan dapat tersampaikan secara konsisten dan efektif kepada masyarakat di berbagai wilayah.

## H. Diseminasi informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik

Tabel 2.15 Diseminasi Informasi dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Menyelenggarakan diseminasi informasi melalui media yang dimiliki instansi	93,06	95,79	94,42
Menyelenggarakan evaluasi pemanfaatan media yang dimiliki instansi	92,13	93,41	92,77
<b>TOTAL</b>	<b>92,59</b>	<b>94,60</b>	<b>93,59</b>

Opini Publik (89,19), yang mencerminkan bahwa K/L memiliki sistem pemantauan isu yang lebih matang, baik melalui media monitoring, analisis percakapan digital, maupun pemetaan persepsi publik melalui kanal formal dan informal. Demikian pula, pemantauan Informasi Kebijakan (88,28) dan Aspirasi Publik (88,28) menunjukkan bahwa K/L mampu menjaga keterhubungan antara kebijakan yang diambil dan respons masyarakat.

Hal ini penting mengingat institusi pusat memegang peran strategis dalam menjaga konsistensi narasi pemerintah dan mengantisipasi isu-isu yang berpotensi berkembang menjadi krisis komunikasi. Tingkat monitoring di Dinas Kominfo (D) berada pada kategori cukup baik namun lebih rendah dibandingkan pusat, dengan total proporsi 79,63. Meskipun indikator Aspirasi Publik (80,09) menjadi nilai tertinggi di daerah, angka tersebut masih menunjukkan bahwa

pemantauan persepsi publik di daerah belum sepenuhnya optimal.

Keterbatasan pada aspek Informasi Kebijakan (79,17) dan Opini Publik (79,63) dapat mencerminkan minimnya infrastruktur monitoring digital, kurangnya SDM analisis media, atau belum meratanya penggunaan tools pemantauan isu di lingkungan pemerintah daerah. Perbedaan antara pusat dan daerah menegaskan pentingnya penguatan kapasitas monitoring di daerah, karena keberhasilan komunikasi publik nasional tidak hanya bergantung pada produksi konten, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk memahami, mengantisipasi, dan merespons dinamika opini publik secara cepat dan akurat di semua wilayah. opini publik secara cepat dan akurat di semua wilayah.

## I. Gambaran Pelayanan Publik

Tabel 2.16 Gambaran Pelayanan Informasi Publik

Gambaran Pelayanan Informasi Publik	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	91,20	95,97	93,59
Merencanakan prosedur pengaduan masyarakat	89,35	94,87	92,11
Menyiapkan sarana pengaduan masyarakat	89,81	95,24	92,53
Menyiapkan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat	86,57	94,51	90,54
Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat	88,89	94,69	91,79
Melaksanakan monitoring pengelolaan pengaduan masyarakat	84,26	93,41	88,83
Melaksanakan pelaporan pengelolaan pengaduan masyarakat	85,19	94,51	89,85
Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat	84,72	91,94	88,33
<b>TOTAL</b>	<b>87,50</b>	<b>94,39</b>	<b>90,95</b>

Dinas Kominfo Provinsi (D) maupun Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki persepsi yang sangat positif terkait penyediaan layanan informasi publik, dengan proporsi nasional yang tinggi pada hampir seluruh indikator. K/L konsisten mencatat nilai lebih tinggi dengan rata-rata 94,39 yang mengindikasikan kesiapan institusional yang kuat dalam memenuhi standar layanan publik, terutama terkait keberadaan PPID (95,97), penyiapan sarana dan sumber daya pengaduan, serta pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan pengaduan masyarakat. Tingginya capaian ini mencerminkan bahwa struktur organisasi, proses kerja, dan kapasitas SDM pada tingkat pusat telah mapan, sehingga mampu memberikan layanan informasi yang lebih terstandar, responsif, dan selaras dengan prinsip transparansi pemerintahan. Sementara itu, Dinas Kominfo juga mencatat proporsi yang cukup tinggi (87,50), namun masih menunjukkan variasi dalam aspek monitoring (84,26) dan evaluasi pengelolaan pengaduan (84,72), yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam praktik pengawasan dan

perbaikan layanan secara berkelanjutan. Perbedaan angka antara pusat dan daerah menegaskan bahwa persepsi pelayanan publik di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan struktural maupun operasional. Meskipun mayoritas daerah telah memiliki PPID (91,20) dan prosedur pengaduan masyarakat (89,35), efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, kapasitas teknologi, dan konsistensi proses kerja internal. Proporsi yang lebih rendah pada indikator monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian daerah belum sepenuhnya menjalankan siklus manajemen layanan publik secara utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengukuran kualitas layanan. Secara nasional, total proporsi 90,95 menggambarkan bahwa persepsi terhadap pelayanan informasi publik relatif baik; namun peningkatan di tingkat daerah, terutama dalam aspek pemantauan, evaluasi berkelanjutan, dan penguatan sarana pengaduan, akan menjadi kunci untuk mewujudkan layanan informasi publik yang lebih merata, akuntabel, dan responsif di seluruh Indonesia.

## J. Relasi Media

Tabel 2.17 Relasi Media

Indikator	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Konferensi pers ( <i>press conference</i> )	82,87	95,05	88,96
Kunjungan (oleh) pers ( <i>site visit</i> )	83,33	91,76	87,55
Kunjungan ke media ( <i>media visit</i> )	80,56	85,53	83,04
Pertemuan dengan pemimpin redaksi ( <i>editor's meeting</i> )	81,94	86,26	84,10
Liputan media	91,20	94,87	93,04
Klarifikasi pemberitaan	81,94	91,39	86,67
<b>TOTAL</b>	<b>83,64</b>	<b>90,81</b>	<b>87,23</b>

Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki persepsi kapasitas relasi media yang lebih kuat dibandingkan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari tingginya proporsi pada seluruh indikator, terutama pada konferensi pers (95,05), liputan media (94,87), dan Klarifikasi pemberitaan (91,39). Indikator-indikator ini menggambarkan bahwa K/L lebih siap dan aktif dalam berinteraksi dengan media arus utama, baik dalam konteks diseminasi informasi proaktif maupun respons terhadap isu yang berkembang. Selain itu, nilai tinggi pada site visit, media visit, dan editor's meeting menunjukkan bahwa K/L memiliki jaringan relasi media yang lebih mapan, didukung oleh kapasitas sumber daya, struktur humas yang lebih besar, dan akses terhadap media nasional. Hal ini membuat upaya K/L dalam memastikan akurasi pemberitaan dan menjaga citra kelembagaan lebih efektif.

Sebaliknya, Dinas Kominfo (D) menunjukkan proporsi yang lebih rendah pada sebagian besar indikator, meskipun tetap berada pada kategori cukup baik. Nilai pada konferensi pers (82,87), liputan media (91,20), dan klarifikasi pemberitaan (81,94) menunjukkan bahwa daerah tetap memiliki keterlibatan dengan media, tetapi tidak seintensif pusat. Potensi penyebabnya meliputi keterbatasan SDM humas, rendahnya kapasitas produksi konten berita, serta akses yang lebih terbatas terhadap media nasional sehingga hubungan media sering bersifat lokal dan reaktif. Dengan total indeks K/L/D sebesar 87,23, secara nasional relasi media pemerintah sudah berada pada kategori kuat, namun kesenjangan antara K/L dan daerah menunjukkan perlunya penguatan kompetensi humas daerah, peningkatan jejaring media, dan penguatan kemampuan manajemen isu digital untuk memastikan konsistensi narasi pemerintah dari pusat hingga daerah.

## K. Kemitraan Komunikasi Komunitas Informasi Masyarakat dan Lainnya

Tabel 2.18 Kemitraan Komunikasi Komunitas Informasi Masyarakat

Indikator	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Melaksanakan pemetaan komunitas	75,46	81,14	78,3
Melaksanakan koordinasi antar instansi	77,31	87,73	82,52
Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	73,15	84,07	78,61
Menyelenggarakan/memfasilitasi pengembangan kapasitas (bimbingan teknis/ workshop/ lokakarya/ sarasehan/ forum/ kegiatan peningkatan literasi informasi)	72,69	84,62	78,65
Menyediakan bahan informasi bersama	71,76	84,8	78,28
Merancang bahan informasi bersama	68,06	84,62	76,34
Melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki komunitas/kelompok lainnya	75,93	83,33	79,63
Melaksanakan monitoring dan evaluasi	68,06	76,92	72,49
<b>TOTAL</b>	<b>72,8</b>	<b>83,4</b>	<b>78,1</b>

Persepsi Cakupan Pekerjaan Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam membangun kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan kelompok lainnya berada pada kategori tinggi, dengan total proporsi 83,40. Hampir seluruh indikator K/L berada pada rentang 81–85, menandakan bahwa institusi pusat secara aktif melakukan pemetaan komunitas, koordinasi antarinstansi, penyediaan bahan informasi bersama, serta penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas seperti bimbingan teknis dan lokakarya. K/L juga unggul dalam aspek strategis seperti merancang bahan informasi bersama (84,62) dan mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM (84,07), mencerminkan peran kuat mereka sebagai pengarah kebijakan dan pusat sumber daya. Tingginya proporsi K/L menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki kemampuan lebih besar dalam mengembangkan kemitraan kolaboratif berbasis komunitas dan memanfaatkan jejaring sosial masyarakat untuk memperluas jangkauan komunikasi publik.

Sebaliknya, kapasitas Dinas Kominfo (D) berada pada tingkat sedang dengan total proporsi 72,80, menunjukkan adanya kesenjangan cukup lebar antara pusat dan daerah. Indikator seperti melaksanakan pemetaan komunitas (75,46), koordinasi antarinstansi (77,31), dan diseminasi melalui media komunitas (75,93) menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan operasional, tetapi masih tertinggal dalam aspek strategis seperti merancang materi bersama (68,06) dan monitoring evaluasi (68,06). Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitasi dari pusat, serta terbatasnya infrastruktur dan jejaring komunitas yang dapat dimobilisasi di beberapa daerah. Indeks nasional K/L/D sebesar 78,10 mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, kemitraan pemerintah dengan komunitas sudah berjalan cukup baik, namun memerlukan penguatan terutama di daerah agar kolaborasi berbasis komunitas dapat lebih efektif mendukung diseminasi informasi publik dan peningkatan literasi informasi masyarakat.

## L. Penguatan SDM Komunikasi Publik

Tabel 2.19. Penguatan SDM Komunikasi Publik

Indikator	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Melaksanakan workshop/lokakarya/ bimbingan teknis	79,63	86,63	83,13
Memfasilitasi pengembangan kapasitas	81,48	89,19	85,34
Melakukan evaluasi hasil pengembangan kapasitas	75,46	84,43	79,95
<b>TOTAL</b>	<b>78,86</b>	<b>86,75</b>	<b>82,81</b>

Terkait penguatan SDM Komunikasi Publik, data menunjukkan bahwa persepsi kapasitas Kementerian/Lembaga (K/L) berada pada kategori tinggi, dengan proporsi yang konsisten berada pada kisaran 84–89 dan total indeks mencapai 86,75. Indikator Memfasilitasi Pengembangan Kapasitas (89,19) dan Melaksanakan Workshop/Lokakarya/Bimtek (86,63) menandakan bahwa K/L memiliki ekosistem pengembangan kompetensi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dukungan kelembagaan yang lebih kuat, ketersediaan anggaran, serta akses terhadap tenaga ahli dan pelatih profesional memungkinkan K/L untuk menerapkan program peningkatan kapasitas secara rutin dan terarah. Selain itu, kemampuan K/L dalam melakukan evaluasi hasil pengembangan kapasitas (84,43) mengindikasikan adanya mekanisme penilaian yang sudah terbentuk, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan agar hasil pelatihan dapat lebih diinternalisasi ke dalam praktik kerja sehari-hari.

Di sisi lain, Dinas Kominfo (D) menunjukkan capaian yang baik namun lebih rendah, dengan total proporsi 78,86. Indikator yang paling kuat di tingkat daerah adalah Memfasilitasi Pengembangan Kapasitas (81,48), sementara aspek Evaluasi Hasil Pengembangan Kapasitas menjadi yang terendah (75,46). Ini menunjukkan bahwa meskipun daerah aktif melakukan berbagai bentuk pelatihan, proses evaluasi dan tindak lanjut pascapelatihan masih belum optimal. Perbedaan ini mencerminkan tantangan struktural yang sering muncul di daerah, seperti keterbatasan anggaran pelatihan, minimnya akses ke pelatih profesional, serta kurangnya sistem dokumentasi dan evaluasi yang baku. Secara nasional, total proporsi 82,81 menunjukkan bahwa penguatan SDM komunikasi publik berada pada level baik, namun peningkatan kapasitas berkelanjutan di daerah tetap menjadi prioritas utama agar kompetensi komunikasi publik di seluruh Indonesia dapat terbangun secara merata dan berdaya saing.

## M. Kegiatan Monitoring Komunikasi Publik

Tabel 2.20 Kegiatan Monitoring Komunikasi Publik

Indikator Monitoring	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Informasi kebijakan	79,17	88,28	83,72
Opini publik	79,63	89,19	84,41
Aspirasi publik	80,09	88,28	84,19
<b>TOTAL</b>	<b>79,63</b>	<b>88,58</b>	<b>84,11</b>

Kapasitas monitoring komunikasi publik di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) dipersepsikan berada pada kategori tinggi dengan total proporsi 88,58, mengindikasikan bahwa institusi pusat memiliki kemampuan yang kuat dalam memantau dinamika informasi, opini, dan aspirasi publik. Nilai tertinggi terlihat pada indikator Opini Publik (89,19), yang mencerminkan bahwa K/L memiliki sistem pemantauan isu yang lebih matang, baik melalui media monitoring, analisis percakapan digital, maupun pemetaan persepsi publik melalui kanal formal dan informal. Demikian pula, pemantauan Informasi Kebijakan (88,28) dan Aspirasi Publik (88,28) menunjukkan bahwa K/L mampu menjaga keterhubungan antara kebijakan yang diambil dan respons masyarakat. Hal ini penting mengingat institusi pusat memegang peran strategis dalam menjaga konsistensi narasi pemerintah dan mengantisipasi isu-isu yang berpotensi berkembang menjadi krisis komunikasi.

Tingkat monitoring di Dinas Kominfo (D) berada pada kategori cukup baik namun lebih rendah dibandingkan pusat, dengan total proporsi 79,63. Meskipun indikator Aspirasi Publik (80,09) menjadi nilai tertinggi di daerah, angka tersebut masih menunjukkan bahwa pemantauan persepsi publik di daerah belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan pada aspek Informasi Kebijakan (79,17) dan Opini Publik (79,63) dapat mencerminkan minimnya infrastruktur monitoring digital, kurangnya SDM analisis media, atau belum meratanya penggunaan tools pemantauan isu di lingkungan pemerintah daerah. Perbedaan antara pusat dan daerah menegaskan pentingnya penguatan kapasitas monitoring di daerah, karena keberhasilan komunikasi publik nasional tidak hanya bergantung pada produksi konten, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk memahami, mengantisipasi, dan merespons dinamika opini publik secara cepat dan akurat di semua wilayah.

## N. Standard Operating Procedure Komunikasi Krisis

Tabel 2.21 SOP Komunikasi Krisis

Indikator	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Kepemilikan SOP Komunikasi Krisis	62,10	81,32	61,10
Bagaimana organisasi Anda menangani situasi krisis yang pernah terjadi?	Media monitoring dan <i>press relations</i> /patroli informasi/analisis opini publik, membuat tim khusus, update situasi terkini, penanganan terukur berdasarkan data		
Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam melaksanakan lingkup kerja yang telah ditetapkan?	SDM (jumlah, kompetensi), Data, Anggaran, Koordinasi antara Lembaga, sarana prasarana, karakteristik <i>public sensitive</i>		
Berikan masukan tentang hal-hal yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan dalam melaksanakan lingkup kerja yang telah berjalan selama ini.	penguatan SDM (jumlah dan kapasitas), penambahan anggaran, penyediaan teknologi seperti <i>monitoring tools</i> Penguatan koordinasi internal, lintas unit, menyederhanakan birokrasi dan koordinasi vertikal dan horizontal		

Data mengenai kepemilikan SOP Komunikasi Krisis menunjukkan adanya disparitas signifikan antara pusat dan daerah. Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki tingkat kepemilikan SOP sebesar 81,32, menandakan bahwa sebagian besar instansi pusat telah memiliki panduan formal dalam menangani situasi krisis. Namun pada tingkat Dinas Kominfo (D), angka ini turun jauh menjadi 61,1, sehingga secara nasional indeks gabungan hanya mencapai 75,59. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan untuk menghadapi krisis belum merata di seluruh tingkat pemerintahan. Pada daerah, absennya SOP dapat membuat penanganan krisis menjadi kurang terstruktur, bergantung pada pengalaman personal, dan rawan terhadap respons yang tidak konsisten. Hal ini berimplikasi langsung pada kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik di saat situasi kritis terjadi.

Dalam praktiknya, organisasi menangani krisis dengan mengandalkan beberapa strategi inti, seperti media monitoring, *press relations*, patroli informasi, dan analisis opini publik untuk mendeteksi dinamika yang berkembang. Selain itu, banyak instansi membentuk tim khusus krisis, melakukan update situasi secara berkala, serta memastikan penanganan berjalan berbasis data agar respons yang diambil terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa

krisis membutuhkan orkestrasi informasi yang cepat, presisi pesan yang tinggi, serta koordinasi lintas unit yang solid. Meskipun strategi ini sudah berjalan, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan SDM, prosedur kerja yang jelas, dan ketersediaan sarana teknologi pendukung seperti tools monitoring digital. Respons terbuka dari daerah dan pusat menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan mendasar yang masih menghambat efektivitas komunikasi krisis: keterbatasan SDM (baik jumlah maupun kompetensi), keterbatasan anggaran, sistem data yang belum terintegrasi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta karakteristik publik yang sensitif sehingga membutuhkan pengelolaan narasi yang hati-hati. Untuk memperkuat sistem komunikasi krisis ke depan, masukan yang diberikan responden menekankan pentingnya penguatan SDM (melalui peningkatan kapasitas dan tambahan personel), penambahan anggaran, penyediaan teknologi pendukung seperti aplikasi dan *tools monitoring*, serta penguatan koordinasi internal, lintas unit, dan lintas tingkat pemerintahan. Simplifikasi birokrasi juga sangat dibutuhkan agar respons krisis dapat berjalan cepat dan tidak terhambat proses administratif. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, pemerintah dapat membangun sistem komunikasi krisis yang lebih adaptif, responsif, dan kredibel, serta lebih mampu menjaga kepercayaan publik ketika krisis terjadi.

## O. Indeks Cakupan Kerja K/L

Survey menunjukkan bahwa sebagian besar Kementerian/Lembaga (K/L) mempersepsikan cakupan kerja yang sangat tinggi, ditunjukkan oleh banyaknya institusi yang memperoleh indeks mendekati atau mencapai 100. Lembaga-lembaga strategis seperti BIN, BNN, BNPT, BRIN, BPS, Kemenkes, Kemenag, Kemendagri, POLRI, dan LAN menunjukkan performa unggul. Tingginya indeks di kelompok

ini menandakan bahwa fungsi komunikasi publik telah diarusutamakan secara kuat dan terintegrasi dalam proses manajemen internal. Mereka tidak hanya menjalankan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi secara konsisten, tetapi juga menunjukkan ketepatan fungsi dalam merumuskan materi informasi, berkoordinasi lintas sektor, serta menyampaikan kebijakan secara sistematis.

Tabel 2.22 Indeks Cakupan Kerja K/L

Kementerian/Lembaga	Indeks
Badan Intelijen Negara (BIN)	100,00
Badan Narkotika Nasional	100,00
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100,00
Badan Pusat Statistik	100,00
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	100,00
Kementerian Agama	100,00
Kementerian Investasi dan Hilirisasi	100,00
Kementerian Kelautan dan Perikanan	100,00
Kementerian Kesehatan	100,00
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100,00
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	100,00
Lembaga Administrasi Negara	100,00
Kementerian Keuangan	99,81
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	99,70
Kementerian Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	99,35
Kementerian Kehutanan	99,24
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	99,24
Badan Gizi Nasional	99,19
Badan Pangan Nasional	99,13
Kementerian Perdagangan	99,06
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	99,05
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	99,05
Kementerian Pertanian	99,05
Kejaksaan Agung	98,92
Kementerian Perhubungan	98,80

Kementerian Dalam Negeri	98,48
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	98,22
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	98,04
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	97,59
Kementerian HAM	97,47
Kementerian Kebudayaan	97,47
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	97,07
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah	96,61
Badan Informasi Geospasial	96,32
Kementerian Pekerjaan Umum	95,96
Kementerian Sosial	95,77
Kementerian Ekonomi Kreatif	95,59
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	95,50
Komisi Pemilihan Umum	95,44
Badan Standarisasi Nasional	94,95
Kementerian Perindustrian	94,95
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	94,27
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	94,19
Kementerian Sekretaris Negara	93,72
Kementerian Luar Negeri	93,37
Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral	93,16
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	93,07
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	91,35
Kementerian Haji dan Umroh	91,31
Badan Pengawas Obat dan Makanan	90,82
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	90,70
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	89,57
Kementerian Komunikasi dan Digital	89,39
Komisi Pemberantas Korupsi	88,91
Kementerian Ketenagakerjaan	88,74
Badan Kepegawaian Negara	87,83
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,17
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	85,35

Mahkamah Konstitusi (MK)	83,59
Kementerian Pertahanan	83,33
Ombudsman RI	83,18
Kementerian Perumahan dan Kawasan Per- mukiman	83,08
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	82,67
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	82,41
Kementerian Tranmigrasi	81,95
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	81,88
Kementerian Lingkungan Hidup	81,79
Kementerian Koperasi	81,53
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	81,17
Kementerian Hukum	80,55
Perpustakaan Nasional	80,35
Kementerian Pemuda dan Olahraga	79,00
Lembaga Ketahanan Nasional	77,14
Komisi Yudisial (KY)	76,50
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	76,31
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	74,67
Badan Keamanan Laut	73,79
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	72,82
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	72,56
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangu- nan	71,65
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	71,53
Badan Siber dan Sandi Negara	71,22
Mahkamah Agung (MA)	69,44
Kementerian Koordinator Bidang Pangan	68,51
Badan Karantina Indonesia	68,43
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Per masyarakatan	65,34
Kementerian Pariwisata	62,65
Komnas Perempuan	53,56
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	52,34
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	52,17
Arsip Nasional RI	40,65
<b>TOTAL K/L</b>	<b>87,85</b>

Sejumlah dinas provinsi berada pada kategori sangat tinggi dalam mempersepsikan cakupan kerja komunikasi publik, dengan skor sempurna 100 pada Banten, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Provinsi-provinsi ini memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam melaksanakan seluruh lingkup kerja komunikasi publik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan materi informasi publik. Pemerintah daerah di wilayah ini umumnya memiliki struktur komunikasi publik yang lebih matang, dukungan SDM terlatih, serta kualitas koordinasi lintas unit yang lebih stabil. Posisi tinggi juga terlihat pada provinsi besar seperti Jawa Timur (98,74), DKI Jakarta (99,05), serta Lampung (99,06), yang menandakan bahwa pusat-pusat pemerintahan daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat cenderung lebih mampu menjalankan cakupan kerja komunikasi publik secara lebih menyeluruh.

Kelompok provinsi dengan skor menengah hingga tinggi, seperti Kalimantan Timur (97,98), NTT (97,73), Bali (95,06), Papua (89,39), DI Yogyakarta (85,67), serta Sumatera Barat (85,55), menunjukkan bahwa secara umum mereka telah mampu menjalankan sebagian besar fungsi komunikasi publik dengan cukup baik. Namun, nilai-nilai ini juga mencerminkan bahwa masih terdapat aspek tertentu yang memerlukan penguatan, seperti koordinasi antar-level pemerintahan, penyusunan materi informasi publik yang

konsisten, atau monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis. Variasi skor di kelompok ini mencerminkan keragaman kondisi geografis, kapasitas fiskal, serta perbedaan kualitas manajemen komunikasi publik di berbagai daerah. Meski sebagian besar berada dalam kategori baik, ketidaksempurnaan skor menunjukkan adanya potensi peningkatan untuk mencapai kesetaraan dengan provinsi berindeks tertinggi.

Beberapa provinsi berada dalam kategori rendah hingga sangat rendah, menandakan adanya tantangan substansial dalam pelaksanaan cakupan kerja komunikasi publik. Papua Pegunungan (26,53), Maluku (41,16), Papua Barat Daya (50,42), Maluku Utara (51,66), dan Kalimantan Barat (70,22) berada pada kelompok terbawah. Rendahnya skor pada provinsi-provinsi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan SDM komunikasi publik, minimnya sarana teknologi informasi, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta kondisi geografis yang menantang. Selain itu, daerah seperti Aceh (75,97) dan Sulawesi Tenggara (61,46) juga memperlihatkan bahwa tantangan tata kelola komunikasi publik di beberapa wilayah masih signifikan. Variasi skor yang besar antarprovinsi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas lintas daerah merupakan agenda kritis dalam memastikan pelaksanaan komunikasi publik yang lebih merata dan mendukung efektivitas kebijakan nasional.

## P. Indeks Cakupan Kerja Daerah

Tabel 2.23 Indeks Cakupan Kerja Daerah

Provinsi	Indeks
Banten	100
Jambi	100
Jawa Barat	100
Jawa Tengah	100
Sumatera Utara	100
Kalimantan Selatan	99,78
Lampung	99,06
DKI Jakarta	99,05
Jawa Timur	98,74
Sulawesi Selatan	98,48
Kalimantan Timur	97,98
Nusa Tenggara Timur	97,73

Bali	95,06
Kalimantan Utara	90,40
Papua	89,39
DI Yogyakarta	85,67
Sumatera Barat	85,55
Sulawesi Tengah	84,79
Sulawesi Barat	84,13
Kalimantan Tengah	83,33
Riau	83,33
Nusa Tenggara Barat	82,24
Kep. Bangka Belitung	81,78
Papua Barat	79,18
Gorontalo	78,79
Sulawesi Utara	78,34
Kep. Riau	76,98
Aceh	75,97
Sumatera Selatan	73,68
Kalimantan Barat	70,22
Papua Selatan	64,21
Sulawesi Tenggara	61,46
Maluku Utara	51,66
Papua Barat Daya	50,42
Maluku	41,16
Papua Pegunungan	26,53

Sejumlah dinas provinsi berada pada kategori sangat tinggi dalam mempersepsikan cakupan kerja komunikasi publik, dengan skor sempurna 100 pada Banten, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Provinsi-provinsi ini memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam melaksanakan seluruh lingkup kerja komunikasi publik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan materi informasi publik. Pemerintah daerah di wilayah ini umumnya memiliki struktur komunikasi publik yang lebih matang, dukungan SDM terlatih, serta kualitas koordinasi lintas unit yang lebih stabil. Posisi tinggi juga terlihat pada provinsi besar seperti Jawa Timur (98,74), DKI Jakarta (99,05), serta Lampung (99,06), yang menandakan bahwa pusat-pusat pemerintahan daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat cenderung lebih mampu menjalankan cakupan kerja komunikasi publik secara lebih menyeluruh. Kelompok provinsi dengan skor menengah hingga tinggi, seperti Kalimantan Timur

(97,98), NTT (97,73), Bali (95,06), Papua (89,39), DI Yogyakarta (85,67), serta Sumatera Barat (85,55), menunjukkan bahwa secara umum mereka telah mampu menjalankan sebagian besar fungsi komunikasi publik dengan cukup baik. Namun, nilai-nilai ini juga mencerminkan bahwa masih terdapat aspek tertentu yang memerlukan penguatan, seperti koordinasi antar-level pemerintahan, penyusunan materi informasi publik yang konsisten, atau monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis. Variasi skor di kelompok ini mencerminkan keragaman kondisi geografis, kapasitas fiskal, serta perbedaan kualitas manajemen komunikasi publik di berbagai daerah. Meski sebagian besar berada dalam kategori baik, ketidaksempurnaan skor menunjukkan adanya potensi peningkatan untuk mencapai kesetaraan dengan provinsi berindeks tertinggi. Beberapa provinsi berada dalam kategori rendah hingga sangat rendah, menandakan adanya tantangan substansial dalam pelaksanaan cakupan kerja komunikasi

publik. Papua Pegunungan (26,53), Maluku (41,16), Papua Barat Daya (50,42), Maluku Utara (51,66), dan Kalimantan Barat (70,22) berada pada kelompok terbawah. Rendahnya skor pada provinsi-provinsi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan SDM komunikasi publik, minimnya sarana teknologi informasi, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta kondisi geografis yang menantang. Selain itu, daerah seperti Aceh (75,97) dan Sulawesi

Tenggara (61,46) juga memperlihatkan bahwa tantangan tata kelola komunikasi publik di beberapa wilayah masih signifikan. Variasi skor yang besar antarprovinsi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas lintas daerah merupakan agenda kritis dalam memastikan pelaksanaan komunikasi publik yang lebih merata dan mendukung efektivitas kebijakan nasional.

## Prinsip Komunikasi Publik

### A. Indikator Prinsip Komunikasi Publik K/L

Tabel 2.24 Prinsip Komunikasi Publik

Kementerian / Lembaga	Indeks
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	100
Badan Informasi Geospasial	100
Badan Intelijen Negara (BIN)	100
Badan Karantina Indonesia	100
Badan Kepegawaian Negara	100
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	100
Badan Narkotika Nasional	100
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100
Badan Pangan Nasional	100
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	100
Badan Pusat Statistik	100
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	100
Badan Siber dan Sandi Negara	100
Badan Standarisasi Nasional	100
Kejaksaan Agung	100
Kementerian Agama	100
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	100
Kementerian Dalam Negeri	100
Kementerian Ekonomi Kreatif	100
Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral	100
Kementerian Haji dan Umroh	100
Kementerian HAM	100
Kementerian Hukum	100
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	100
Kementerian Investasi dan Hilirisasi	100
Kementerian Kelautan dan Perikanan	100

Kementerian Kesehatan	100
Kementerian Ketenagakerjaan	100
Kementerian Keuangan	100
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	100
Kementerian Koperasi	100
Kementerian Luar Negeri	100
Kementerian Pekerjaan Umum	100
Kementerian Pemuda dan Olahraga	100
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100
Kementerian Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100
Kementerian Perdagangan	100
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	100
Kementerian Perhubungan	100
Kementerian Perindustrian	100
Kementerian Pertanian	100
Kementerian Sekretaris Negara	100
Kementerian Sosial	100
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	100
Komisi Pemilihan Umum	100
Lembaga Administrasi Negara	100
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100
Mahkamah Agung (MA)	100
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	100
Badan Gizi Nasional	97,62
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	97,62
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	95,24
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	95,24
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah	95,24
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	92,86
Kementerian Kebudayaan	90,48
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	90,48
Kementerian Kehutanan	85,71
Kementerian Komunikasi dan Digital	85,71
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	85,71
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	83,33

Badan Pengawas Obat dan Makanan	83,33
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83,33
Kementerian Pertahanan	83,33
Kementerian Transmigrasi	83,33
Komisi Pemberantasan Korupsi	83,33
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	83,33
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	80,95
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	80,95
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	80,95
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	80,95
Ombudsman RI	80,95
Arsip Nasional RI	76,19
Badan Keamanan Laut	76,19
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	76,19
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	73,81
Kementerian Lingkungan Hidup	73,81
Komnas Perempuan	73,81
Perpustakaan Nasional	73,81
Komisi Yudisial (KY)	71,43
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	66,67
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	66,67
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasalahan	66,67
Kementerian Koordinator Bidang Pangan	66,67
Mahkamah Konstitusi (MK)	66,67
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	64,29
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	64,29
Lembaga Ketahanan Nasional	59,52
Kementerian Pariwisata	57,14
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	42,86
<b>TOTAL</b>	<b>90,29</b>

Survei persepsi menunjukkan bahwa sebagian besar Kementerian dan Lembaga (K/L) mengklaim skor sempurna 100 dalam indikator Prinsip Komunikasi Publik, mencerminkan tingkat kepatuhan dan integritas yang sangat tinggi terhadap prinsip dasar komunikasi pemerintah. Kelompok ini mencakup berbagai lembaga strategis seperti BRIN, BPS, BIN, POLRI, BNN, BPK, serta seluruh

kementerian utama mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa K/L telah menjalankan prinsip komunikasi publik secara konsisten. Dominasi nilai 100 pada banyak K/L ini memperlihatkan kematangan tata kelola komunikasi publik di tingkat pusat, didukung oleh struktur birokrasi

yang kuat, SDM komunikasi yang lebih kompeten, serta mekanisme internal yang lebih stabil. Di luar kelompok nilai sempurna, terdapat sejumlah K/L dengan indeks 90–97 yang tetap berada pada kategori sangat tinggi, seperti Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian UMKM, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Meski berada sedikit di bawah nilai maksimal, capaian ini tetap menunjukkan bahwa institusi-institusi tersebut memiliki standar komunikasi publik yang solid. Perbedaan kecil dalam nilai kemungkinan berasal dari variasi kapasitas implementasi teknis, frekuensi diseminasi, atau konsistensi penyediaan informasi mengenai kampanye komunikasi publik, khususnya informasi terkait anggaran dan dampak kebijakan, yang biasanya membutuhkan koordinasi lintas unit dan kualitas data yang baik. Namun demikian, secara substantif kelompok ini tetap sejalan dengan prinsip komunikasi publik yang berorientasi kepentingan publik dan akuntabilitas. Kelompok nilai menengah (70–85) mencakup lembaga-lembaga seperti TNI,

Kementerian Pertahanan, KPAI, Ombudsman RI, KemenLH, Perpustakaan Nasional, dan sejumlah badan/biro lain. Skor pada rentang ini mencerminkan bahwa meskipun prinsip komunikasi publik telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam konsistensi penyampaian informasi, kedalaman pelaporan kampanye, maupun transparansi dalam proses komunikasi.

Bahkan terdapat beberapa K/L dengan nilai persepsi di bawah 70, seperti Kemenparekraf (57,14), Kemenko Polhukam (64,29), dan Lembaga Ketahanan Nasional (59,52). Kelompok ini mengindikasikan adanya kesenjangan struktural atau teknis yang berdampak pada prioritas komunikasi publik. Secara agregat, nilai total 90,29 tetap menunjukkan bahwa penerapan prinsip komunikasi publik di tingkat pusat sangat kuat, namun disparitas antar-K/L menggarisbawahi perlunya penguatan kapabilitas komunikasi publik yang lebih merata, terutama bagi lembaga yang memiliki mandat kritis namun skor pemenuhannya masih rendah.

## B. Indikator Prinsip Komunikasi Daerah

Tabel 2.25 Prinsip Komunikasi Publik Daerah

Provinsi	Indeks
Banten	100
DKI Jakarta	100
Jawa Barat	100
Jawa Tengah	100
Jawa Timur	100
Kalimantan Selatan	100
Kalimantan Timur	100
Kalimantan Utara	100
Lampung	100
Nusa Tenggara Timur	100
Papua	100
Papua Barat	100
Papua Selatan	100
Sulawesi Selatan	100
Sulawesi Tengah	100
Sumatera Utara	100
DI Yogyakarta	92,86

Sumatera Selatan	92,86
Bali	90,48
Kalimantan Tengah	90,48
Sulawesi Utara	90,48
Sumatera Barat	88,10
Gorontalo	85,71
Sulawesi Barat	85,71
Kep. Bangka Belitung	83,33
Nusa Tenggara Barat	83,33
Riau	83,33
Aceh	80,95
Kep. Riau	78,57
Kalimantan Barat	66,67
Sulawesi Tenggara	66,67
Jambi	64,29
Maluku Utara	64,29
Papua Pegunungan	52,38
Papua Barat Daya	50,00
Maluku	45,24
<b>TOTAL</b>	<b>87,10</b>

Data menunjukkan bahwa sejumlah provinsi mempersepsikan berada pada kategori sangat tinggi dalam persepsi cakupan kerja komunikasi publik, dengan skor sempurna 100. Kelompok provinsi dengan skor menengah hingga tinggi, seperti Kalimantan Timur (97,98), NTT (97,73), Bali (95,06), Papua (89,39), DI Yogyakarta (85,67), serta Sumatera Barat (85,55) menunjukkan bahwa secara umum mereka telah mampu menjalankan sebagian besar fungsi komunikasi publik dengan cukup baik.

Namun, nilai-nilai ini juga mencerminkan bahwa masih terdapat aspek tertentu yang memerlukan penguatan. Sepertinya, variasi skor di kelompok ini mencerminkan keragaman kondisi geografis, kapasitas fiskal, serta perbedaan kualitas manajemen komunikasi publik di berbagai daerah. Meski sebagian besar berada dalam kategori baik, ketidaksempurnaan skor menunjukkan adanya potensi peningkatan untuk mencapai kesetaraan dengan provinsi berindeks tertinggi. Beberapa provinsi

berada dalam kategori rendah hingga sangat rendah, hal ini menandakan adanya tantangan substansial dalam pelaksanaan cakupan kerja komunikasi publik. Papua Pegunungan (26,53), Maluku (41,16), Papua Barat Daya (50,42), Maluku Utara (51,66), dan Kalimantan Barat (70,22) berada pada kelompok dengan indeks persepsi terbawah.

Rendahnya skor pada provinsi-provinsi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan SDM komunikasi publik, minimnya sarana teknologi informasi, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta kondisi geografis yang menantang. Selain itu, daerah seperti Aceh (75,97) dan Sulawesi Tenggara (61,46) juga memperlihatkan bahwa tantangan tata kelola komunikasi publik di beberapa wilayah masih signifikan. Variasi skor yang besar antarprovinsi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas lintas daerah merupakan agenda kritis dalam memastikan pelaksanaan komunikasi publik yang lebih merata dan mendukung efektivitas kebijakan nasional.

# Pelibatan Pemangku Kepentingan

Tabel 2.26. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Akademisi	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Menyampaikan Informasi	85,19	91,21	88,20
Menerima informasi atau umpan balik	86,57	89,93	88,25
Bertukar informasi untuk membangun dialog	86,57	90,11	88,34
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	86,11	88,64	87,38
Melibatkan dalam pelaksanaan	85,65	89,19	87,42
Melibatkan dalam pemantauan/ monitoring	81,94	86,81	84,38
Melibatkan dalam evaluasi	80,09	86,45	83,27
<b>TOTAL</b>	<b>84,59</b>	<b>88,91</b>	<b>86,75</b>

Pelaku Bisnis	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Menyampaikan Informasi	78,24	85,71	81,98
Menerima informasi atau umpan balik	78,24	85,9	82,07
Bertukar informasi untuk membangun dialog	81,02	85,16	83,09
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	77,31	80,77	79,04
Melibatkan dalam pelaksanaan	79,63	83,52	81,57
Melibatkan dalam pemantauan/ monitoring	69,91	80,22	75,06
Melibatkan dalam evaluasi	69,91	79,85	74,88
<b>TOTAL</b>	<b>77,39</b>	<b>83,55</b>	<b>80,47</b>

Pemerintah Lain	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Menyampaikan Informasi	91,20	92,49	91,85
Menerima informasi atau umpan balik	91,20	92,49	91,85
Bertukar informasi untuk membangun dialog	90,28	91,76	91,02
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	86,11	88,83	87,47
Melibatkan dalam pelaksanaan	88,43	89,93	89,18
Melibatkan dalam pemantauan/ monitoring	83,80	87,36	85,58
Melibatkan dalam evaluasi	83,33	87,55	85,44
<b>TOTAL</b>	<b>85,53</b>	<b>88,78</b>	<b>87,16</b>

Media	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Menyampaikan Informasi	89,81	93,77	91,79
Menerima informasi atau umpan balik	90,28	92,67	91,48
Bertukar informasi untuk membangun dialog	89,35	92,86	91,10
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	85,19	86,63	85,91
Melibatkan dalam pelaksanaan	89,35	91,21	90,28
Melibatkan dalam pemantauan/ monitoring	84,72	87,00	85,86
Melibatkan dalam evaluasi	84,26	86,08	85,17
<b>TOTAL</b>	<b>87,57</b>	<b>90,03</b>	<b>88,80</b>

Platform Digital	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Menyampaikan Informasi	89,81	93,96	91,89
Menerima informasi atau umpan balik	90,28	93,41	91,84
Bertukar informasi untuk membangun dialog	88,89	92,67	90,78
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	84,26	89,56	86,91
Melibatkan dalam pelaksanaan	87,96	91,21	89,59
Melibatkan dalam pemantauan/ monitoring	85,65	89,38	87,51
Melibatkan dalam evaluasi	84,26	87,91	86,09
<b>TOTAL</b>	<b>87,3</b>	<b>91,16</b>	<b>89,23</b>

Influencer	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Menyampaikan Informasi	70,37	72,53	71,45
Menerima informasi atau umpan balik	67,59	71,98	69,79
Bertukar informasi untuk membangun dialog	68,98	72,34	70,66
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	66,2	70,88	68,54
Melibatkan dalam pelaksanaan	68,98	73,08	71,03
Melibatkan dalam pemantauan/ monitoring	63,89	67,95	65,92
Melibatkan dalam evaluasi	62,04	67,95	64,99
<b>TOTAL</b>	<b>66,87</b>	<b>70,96</b>	<b>68,91</b>

Tokoh Masyarakat	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Menyampaikan Informasi	79,17	78,21	78,69
Menerima informasi atau umpan balik	78,70	76,56	77,63
Bertukar informasi untuk membangun dialog	79,63	76,56	78,09
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	71,30	74,91	73,10
Melibatkan dalam pelaksanaan	77,31	77,47	77,39
Melibatkan dalam pemantauan/ monitoring	70,83	71,98	71,41
Melibatkan dalam evaluasi	69,44	72,34	70,89
<b>TOTAL</b>	<b>75,2</b>	<b>75,43</b>	<b>75,32</b>

Tokoh Agama	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Menyampaikan Informasi	75,46	71,79	73,63
Menerima informasi atau umpan balik	75,46	71,06	73,26
Bertukar informasi untuk membangun dialog	75,00	71,61	73,31
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	68,06	69,78	68,92
Melibatkan dalam pelaksanaan	75,00	72,16	73,58
Melibatkan dalam pemantauan/ monitoring	67,13	67,22	67,17
Melibatkan dalam evaluasi	68,06	67,40	67,73
<b>TOTAL</b>	<b>72,02</b>	<b>70,15</b>	<b>71,09</b>

KIM	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Menyampaikan Informasi	78,70	82,78	80,74
Menerima informasi atau umpan balik	76,85	82,05	79,45
Bertukar informasi untuk membangun dialog	78,24	82,97	80,60
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	71,76	78,94	75,35
Melibatkan dalam pelaksanaan	77,31	83,52	80,42
Melibatkan dalam pemantauan/ monitoring	68,52	78,39	73,45
Melibatkan dalam evaluasi	69,91	78,02	73,96
<b>TOTAL</b>	<b>74,47</b>	<b>80,95</b>	<b>77,71</b>

Perempuan	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	76,85	80,22	78,54
Melibatkan dalam pelaksanaan	78,70	81,68	80,19
Melibatkan dalam evaluasi	77,31	78,57	77,94
<b>TOTAL</b>	<b>77,62</b>	<b>80,16</b>	<b>78,89</b>

Anak	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	59,72	70,51	65,12
Melibatkan dalam pelaksanaan	63,43	73,26	68,34
Melibatkan dalam evaluasi	59,72	70,33	65,03
<b>TOTAL</b>	<b>60,96</b>	<b>71,37</b>	<b>66,16</b>

Lansia	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	58,80	66,85	62,82
Melibatkan dalam pelaksanaan	61,11	68,68	64,90
Melibatkan dalam evaluasi	59,26	66,48	62,87
<b>TOTAL</b>	<b>59,72</b>	<b>67,34</b>	<b>63,53</b>

Disabilitas	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan	65,28	73,81	69,54
Melibatkan dalam pelaksanaan	69,91	75,46	72,68
Melibatkan dalam evaluasi	65,28	73,08	69,18
<b>TOTAL</b>	<b>66,82</b>	<b>74,11</b>	<b>70,47</b>

Data pelibatan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa K/L umumnya mempersepsikan memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan Dinas Kominfo, terutama pada kelompok-kelompok strategis seperti akademisi, bisnis, pemerintah lain, media, dan platform digital. Kelompok akademisi mencatat indeks nasional 86,75, dengan kontribusi K/L sebesar 88,91, menandakan bahwa pemerintah pusat lebih sistematis dalam membuka ruang diskusi, menerimamasukan, dan melibatkan akademisi dalam berbagai siklus komunikasi publik. Hal ini mengindikasikan keberlanjutan hubungan pemerintah dengan komunitas ilmiah, yang sangat penting untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Di sisi daerah, keterlibatan akademisi tetap tinggi tetapi belum sekuat pusat, menunjukkan adanya potensi peningkatan kemitraan pengetahuan di tingkat lokal.

Kelompok bisnis memperlihatkan pola yang serupa, dengan indeks nasional 80,47. Keterlibatan bisnis di K/L berada pada 83,55, jauh lebih tinggi dibanding Dinas Kominfo (77,39). Pusat cenderung memiliki struktur kolaborasi yang lebih formal dan ekosistem kerja sama yang lebih matang, baik melalui regulasi, forum konsultasi, maupun kemitraan program. Sementara itu, daerah tampak menghadapi tantangan dalam membangun dialog yang berkesinambungan, khususnya pada aspek monitoring dan evaluasi, yang skornya paling rendah. Kekurangan ini dapat berimplikasi pada rendahnya kualitas umpan balik dari pelaku usaha lokal yang sebenarnya krusial dalam memastikan keberhasilan komunikasi mengenai program pembangunan ekonomi. Hubungan antarinstansi pemerintah menunjukkan konsistensi tinggi, dengan indeks nasional 87,16. Nilai yang kuat pada indikator menyampaikan informasi, bertukar informasi, dan keterlibatan pelaksanaan mencerminkan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah relatif solid. K/L memiliki skor lebih tinggi (88,78) daripada daerah (85,53), tetapi kesenjangannya tidak sebesar

kelompok lain, menandakan bahwa koordinasi pemerintahan telah menjadi praktik rutin baik di pusat maupun daerah. Perbedaan mulai terlihat pada proses monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi titik lemah terutama pada tingkat lokal. Media dan platform digital merupakan dua kelompok pemangku kepentingan dengan indeks tinggi secara nasional, masing-masing 88,80 dan 89,23. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah secara umum telah membangun hubungan yang cukup baik dengan ekosistem informasi publik. K/L kembali mempersepsikan unggul, terutama dalam aspek bertukar informasi, pelaksanaan, dan pemantauan. Namun, nilai daerah juga relatif kuat, memperlihatkan bahwa media tetap menjadi kanal strategis untuk penyebaran informasi publik di seluruh wilayah. Relasi dengan platform digital bahkan menunjukkan tren penguatan, sejalan dengan meningkatnya ketergantungan publik terhadap kanal digital dalam mengakses informasi pemerintah.

Kelompok dengan tingkat keterlibatan paling rendah adalah influencer, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Indeks nasional pada kelompok influencer hanya 68,91, mengindikasikan pemanfaatan yang terbatas dan belum sistematis, baik di pusat maupun daerah. Kelompok rentan juga menunjukkan indeks moderat hingga rendah, terutama anak (66,16) dan lansia (63,53), menandakan bahwa prinsip inklusivitas belum sepenuhnya terintegrasi dalam strategi pelibatan pemangku kepentingan. Meski K/L selalu lebih tinggi dibanding daerah, kedua level pemerintahan masih memiliki ruang besar untuk memperkuat keberpihakan pada kelompok-kelompok dengan kebutuhan komunikasi yang lebih sensitif dan spesifik. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan berjalan baik, tetapi inklusivitas sosial dalam komunikasi publik perlu menjadi agenda prioritas berikutnya.

Tabel 2.27 Jumlah Mitra yang dilibatkan

Mitra di luar Pemerintahan	Sangat Rendah	Rendah	Cukup Rendah	Cukup Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Median
Jumlah mitra yang dilibatkan	20,47	14,17	16,54	17,32	18,11	13,39	14,00
Jumlah kegiatan kolaborasi	23,62	13,39	23,62	6,30	18,90	14,17	10,00
Jumlah media organisasi (owned media)	26,77	11,02	12,60	20,47	12,60	16,54	5,00

Distribusi kategori pada variabel jumlah mitra yang dilibatkan satker menunjukkan pola yang relatif seimbang di seluruh tingkatan, dengan median 14, yang menandakan bahwa sebagian besar instansi berada pada tingkat pelibatan mitra yang moderat. Proporsi kategori “sangat rendah” (20,47) dan “cukup rendah” (16,54) masih cukup dominan, menandakan bahwa tidak semua instansi secara aktif memperluas jejaring kemitraan di luar pemerintah. Namun, keberadaan proporsi “tinggi” (18,11) dan “cukup tinggi” (17,32) juga menunjukkan bahwa terdapat kelompok instansi yang mampu membangun kemitraan yang lebih luas. Pola ini mencerminkan bahwa kemampuan membangun jejaring eksternal belum merata dan masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas, relevansi isu, serta ekosistem komunikasi di tiap daerah atau instansi pusat.

Variabel jumlah kegiatan kolaborasi memiliki median 10, lebih rendah dibanding jumlah mitra yang dilibatkan, yang menandakan bahwa meskipun instansi memiliki mitra, tidak semuanya terlibat secara aktif dalam menghasilkan kegiatan bersama. Tingginya proporsi kategori “sangat rendah” (23,62) dan “cukup rendah” (23,62) memperlihatkan bahwa banyak instansi yang belum mengoptimalkan kemitraan menjadi bentuk kolaborasi yang konkret. Distribusi ini juga menunjukkan bahwa kemitraan yang dibangun

masih cenderung bersifat formal atau nominal, bukan berbasis program yang berkelanjutan. Proporsi kategori “tinggi” (18,9) menawarkan gambaran kontras bahwa sebagian instansi mampu mengembangkan kolaborasi substantif, namun jumlahnya belum cukup besar untuk mendorong kolaborasi lintas-sektor pada tingkat nasional.

Pada indikator jumlah media organisasi (*owned media*), nilai median 5 menggambarkan kapasitas komunikasi institusi yang relatif cukup baik dalam menyediakan saluran mandiri untuk menyampaikan informasi publik. Dominasi kategori “sangat rendah” (26,77) mengonfirmasi tantangan besar dalam pengembangan media organisasi, baik dari segi sumber daya maupun strategi komunikasi. Proporsi kategori “cukup tinggi” (20,47) dan “sangat tinggi” (16,54) menunjukkan bahwa sebagian instansi telah memiliki ekosistem media mandiri yang lebih mapan, tetapi jumlahnya masih terbatas dan tidak mewakili kondisi keseluruhan. Kesenjangan antarinstansi dalam jumlah media yang dimiliki memperlihatkan pentingnya investasi yang lebih besar pada *owned media* sebagai kanal strategis dalam komunikasi publik modern, terutama untuk memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara langsung dan konsisten kepada masyarakat.

## A. Indikator Pelibatan Pemangku Kepentingan K/L

Tabel 2.28 Pelibatan Pemangku Kepentingan K/L

K/L	Indeks
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	100,00
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	100,00
Kejaksaan Agung	100,00
Kementerian Agama	100,00
Kementerian Dalam Negeri	100,00
Kementerian HAM	100,00
Kementerian Investasi dan Hilirisasi	100,00
Kementerian Kehutanan	100,00
Kementerian Kelautan dan Perikanan	100,00
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100,00
Kementerian Pekerjaan Umum	100,00
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100,00
Kementerian Pertanian	100,00
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	100,00
Lembaga Administrasi Negara	100,00
Kementerian Keuangan	99,83
Kementerian Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	99,80
Badan Narkotika Nasional	98,47
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	98,13
Komisi Pemilihan Umum	97,47
Kementerian Luar Negeri	97,13
Kementerian Kesehatan	96,85
Badan Pengawas Obat dan Makanan	96,43
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	96,43
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	95,24
Badan Kepegawaian Negara	94,90
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	94,45
Badan Gizi Nasional	93,20
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	92,86
Kementerian Perhubungan	91,84
Kementerian Sosial	88,03

Kementerian Ekonomi Kreatif	85,71
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	85,71
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah	84,65
Kementerian Haji dan Umroh	84,52
Kementerian Pemuda dan Olahraga	84,38
Komisi Pemberantas Korupsi	84,35
Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral	83,45
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	83,33
Kementerian Ketenagakerjaan	83,33
Kementerian Lingkungan Hidup	83,33
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83,33
Kementerian Pertahanan	83,33
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	83,33
Badan Informasi Geospasial	82,14
Kementerian Kebudayaan	79,07
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	79,02
Badan Pusat Statistik	78,91
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	78,59
Kementerian Perdagangan	78,37
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	78,23
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	78,04
Kementerian Komunikasi dan Digital	77,38
Mahkamah Konstitusi (MK)	77,38
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	77,27
Perpustakaan Nasional	76,02
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	74,62
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	74,23
Komnas Perempuan	73,53
Kementerian Sekretaris Negara	73,41
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	73,36
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	73,05
Kementerian Transmigrasi	72,62
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	71,83
Badan Intelijen Negara (BIN)	71,66
Ombudsman RI	71,64
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	71,45
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	71,37
Kementerian Hukum	71,24
Badan Pangan Nasional	70,13
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	69,90

Badan Nasional Penanggulangan Bencana	69,83
Kementerian Perindustrian	69,30
Kementerian Koperasi	67,69
Badan Siber dan Sandi Negara	64,29
Badan Standarisasi Nasional	60,57
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	60,39
Komisi Yudisial (KY)	60,27
Mahkamah Agung (MA)	59,97
Kementerian Koordinator Bidang Pangan	58,33
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	56,22
Badan Keamanan Laut	54,31
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	53,87
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permayarakatan	53,76
Lembaga Ketahanan Nasional	47,45
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	46,43
Badan Karantina Indonesia	44,87
Arsip Nasional RI	42,99
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	30,51
Kementerian Pariwisata	30,49
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	25,23
<b>TOTAL</b>	<b>76,82</b>

Hasil indeks persepsi menunjukkan bahwa sebagian besar Kementerian/Lembaga berada pada tingkat yang sangat tinggi dalam pelibatan pemangku kepentingan, dengan banyak instansi mengklaim skor 100. K/L yang berada pada kelompok ini meliputi BAZNAS, BRIN, Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta POLRI. Capaian sempurna ini menggambarkan bahwa instansi-instansi tersebut merasa telah memiliki proses yang lebih matang dalam menjalin komunikasi, membangun dialog, serta melibatkan aktor eksternal pada berbagai tahap kebijakan. Selain struktur organisasi yang lebih kuat, K/L pada kelompok ini cenderung memiliki mandat strategis yang menuntut koordinasi lintas sektor, sehingga mekanisme pelibatan stakeholder sudah lebih terstandarisasi dan menjadi bagian dari budaya kerja institusional.

Mencermati kelompok dengan persepsi menengah, dengan skor 70–95, terdapat cukup banyak K/L yang mengklaim performa kuat namun masih menyisakan peluang perbaikan dalam pelibatan pemangku kepentingan. Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, PPAK, dan beberapa lembaga teknis seperti BMKG serta BKKBN berada pada rentang 85–97. Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem koordinasi dan konsultasi publik berjalan, masih ada variabilitas dalam praktik, terutama pada tahap monitoring dan evaluasi atau dalam pelibatan kelompok rentan dan sektor non-pemerintah. Pada rentang bawah kelompok menengah (73–85), K/L seperti Kemendikbudristek, Kemenkop UKM, Kemenparekraf, Kemensos, dan Kemenaker menunjukkan bahwa kebutuhan operasi yang luas serta keterbatasan SDM di unit komunikasi publik dapat menyebabkan implementasi pelibatan stakeholder tidak seragam di seluruh wilayah kerja atau program.

Rentang skor di bawah 70 menunjukkan kelompok K/L yang menghadapi tantangan paling besar dalam pelibatan pemangku kepentingan. Instansi seperti Badan Standarisasi Nasional, BPK, Kemenko Polhukam, Kemenparekraf, Lembaga Ketahanan Nasional, serta beberapa lembaga pengawas berada pada titik terendah, bahkan mencapai 25 untuk Kemenko Polhukam. Tantangan ini kemungkinan berasal dari beberapa faktor, seperti struktur birokrasi yang sangat teknis atau rigid, ruang lingkup kerja yang sensitif secara politik dan keamanan untuk pelibatan pemangku kepentingan, keterbatasan kanal partisipatif, serta lemahnya mekanisme dialog publik. Beberapa lembaga juga memegang mandat khusus yang membuat interaksi publik lebih terbatas, sehingga pelibatan stakeholder mungkin diposisikan sebagai aktivitas non-prioritas. Secara umum, variabilitas yang lebar ini menandakan bahwa meskipun banyak K/L telah mengembangkan praktik pelibatan pemangku kepentingan yang kuat, masih terdapat kebutuhan besar untuk standarisasi, peningkatan kapasitas SDM komunikasi publik, serta integrasi tata kelola partisipasi yang lebih komprehensif di seluruh instansi pemerintah.

## B. Indikator Pelibatan Pemangku Kepentingan Daerah

Tabel 2.29 Pelibatan Pemangku Kepentingan Daerah

Provinsi	Indeks
Jawa Barat	100,00
Kalimantan Utara	100,00
Sulawesi Selatan	100,00
Sulawesi Tengah	100,00
Sumatera Utara	96,83
Lampung	94,37
Sulawesi Utara	93,88
Jawa Tengah	93,52
Kalimantan Selatan	93,39
DI Yogyakarta	93,24
Banten	88,10
Jawa Timur	87,63
Sumatera Barat	86,76
Kalimantan Tengah	83,33

Papua	82,14
Nusa Tenggara Timur	81,48
Kep. Bangka Belitung	80,95
Jambi	79,76
Riau	79,76
Nusa Tenggara Barat	77,27
Bali	76,64
Sulawesi Barat	75,76
Kep. Riau	72,62
Kalimantan Timur	70,24
Sulawesi Tenggara	66,33
Gorontalo	62,80
Aceh	62,44
DKI Jakarta	56,85
Kalimantan Barat	56,55
Papua Pegunungan	50,02
Sumatera Selatan	47,72
Papua Barat Daya	46,94
Papua Barat	42,04
Papua Selatan	38,88
Maluku Utara	36,87
Maluku	25,43
<b>TOTAL</b>	<b>74,46</b>

Data survei persepsi menunjukkan variasi yang sangat lebar dalam kapasitas pelibatan pemangku kepentingan di tingkat daerah, dengan beberapa provinsi berada pada kategori sangat tinggi, sementara provinsi lain tertinggal cukup signifikan. Provinsi dengan skor sempurna 100, seperti Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa daerah-daerah ini memiliki ekosistem kolaborasi yang matang, baik dari sisi koordinasi lintas sektor maupun kematangan struktur komunikasi publik. Nilai yang tinggi ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjalin komunikasi dua arah, membuka ruang partisipasi, serta memanfaatkan berbagai mitra strategis, akademisi, media, bisnis, hingga komunitas digital, sebagai bagian dari proses kebijakan publik. Selain itu, provinsi seperti Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi Utara juga mencatat skor lebih dari 90, menggambarkan struktur kemitraan yang relatif kuat dan konsisten.

Kelompok provinsi dengan skor menengah, seperti Jawa Tengah (93,52), DI Yogyakarta (93,24), Banten (88,10), Jawa Timur (87,63), Sumatera Barat (86,76), hingga Kepulauan Bangka Belitung (80,95), menunjukkan pola pelibatan stakeholder yang sudah berjalan baik namun masih belum stabil pada semua dimensi. Pada kategori terendah, tampak adanya tantangan serius dalam pelibatan pemangku kepentingan, terutama di provinsi-provinsi seperti Papua Selatan (38,88), Papua Barat (42,04), Papua Barat Daya (46,94), Sumatera Selatan (47,72), Papua Pegunungan (50,02), dan Maluku (25,43). Skor yang rendah ini mencerminkan keterbatasan infrastruktur komunikasi, kondisi geografis, tantangan mobilitas, hingga minimnya kanal partisipasi publik yang terstruktur. Selain itu, bagi beberapa provinsi daerah otonomi baru, tentunya masih terkendala melakukan sejumlah aktivitas KPIP, termasuk pelibatan stakeholder. Daerah-daerah ini juga sering dihadapkan pada minimnya SDM komunikasi publik, keterbatasan anggaran, dan kesenjangan digital, yang semuanya berdampak pada lemahnya pelibatan stakeholder dalam proses komunikasi publik.

Dengan nilai nasional 74,46, terlihat bahwa kesenjangan antarwilayah masih cukup besar, sehingga penguatan sistem komunikasi publik perlu difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks rendah melalui peningkatan kapasitas, pendampingan teknis yang lebih intensif, serta penyediaan sarana komunikasi yang lebih memadai agar proses kebijakan publik lebih inklusif dan partisipatif di seluruh Indonesia.

## Informasi Terpercaya

Tabel 2.30 Informasi Terpercaya

Indikator	Indeks D	Indeks K/L	Indeks K/L/D
Akurat	82,87	92,31	87,59
Benar	84,72	91,76	88,24
Mudah dipahami	84,26	92,12	88,19
<b>TOTAL</b>	<b>83,95</b>	<b>92,06</b>	<b>88,01</b>

Data menunjukkan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki tingkat persepsi yang sangat tinggi dalam menyampaikan informasi yang dianggap akurat, benar, dan mudah dipahami, dengan indeks total mencapai 92,06. Ketiga indikator tersebut berada pada rentang 91–92, mencerminkan bahwa satker di tingkat pusat memiliki standar pengelolaan informasi yang relatif lebih mapan, baik dalam aspek verifikasi fakta, pengendalian kualitas konten, maupun penyusunan pesan agar mudah dipahami publik. Konsistensi antarindikator ini menunjukkan bahwa K/L telah memiliki mekanisme komunikasi publik yang stabil dan terstruktur, yang memungkinkan informasi publik didistribusikan secara lebih presisi dan kredibel.

Pada tingkat Dinas Kominfo (D), persepsi terhadap kualitas informasi berada dalam kategori tinggi namun lebih rendah bila dibandingkan pusat, dengan indeks total 83,95. Selisih sekitar 8–9 poin antara D dan K/L menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas dalam memastikan akurasi dan kejelasan informasi, yang dapat disebabkan oleh beberapa hal, sehingga mutu informasi terpercaya belum sebaik K/L.

Hasil ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola informasi di daerah, khususnya pada aspek verifikasi sebelum publikasi dan penyederhanaan pesan untuk memastikan informasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Secara nasional, nilai gabungan 88,01 merepresentasikan persepsi tingkat kepercayaan terhadap informasi publik yang sudah disampaikan dengan baik, namun tetap menyimpan peluang peningkatan terutama di wilayah yang beroperasi jauh dari pusat koordinasi informasi.

## A. Indikator Informasi Terpercaya K/L

Tabel 2.31 Informasi Terpercaya

Indikator	Indeks
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	100,00
Badan Gizi Nasional	100,00
Badan Informasi Geospasial	100,00
Badan Intelijen Negara (BIN)	100,00
Badan Karantina Indonesia	100,00
Badan Kepegawaian Negara	100,00
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	100,00
Badan Narkotika Nasional	100,00
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100,00
Badan Pangan Nasional	100,00
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	100,00
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100,00
Badan Pengawas Obat dan Makanan	100,00
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	100,00
Badan Pusat Statistik	100,00
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	100,00
Badan Siber dan Sandi Negara	100,00
Badan Standarisasi Nasional	100,00
Kejaksaan Agung	100,00
Kementerian Agama	100,00
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	100,00
Kementerian Dalam Negeri	100,00
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	100,00
Kementerian Ekonomi Kreatif	100,00
Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral	100,00
Kementerian HAM	100,00
Kementerian Hukum	100,00
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	100,00
Kementerian Investasi dan Hilirisasi	100,00
Kementerian Kebudayaan	100,00
Kementerian Kehutanan	100,00
Kementerian Kelautan dan Perikanan	100,00
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	100,00
Kementerian Kesehatan	100,00
Kementerian Keuangan	100,00
Kementerian Komunikasi dan Digital	100,00
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100,00
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100,00

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100,00
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	100,00
Kementerian Koperasi	100,00
Kementerian Luar Negeri	100,00
Kementerian Pekerjaan Umum	100,00
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	100,00
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	100,00
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	100,00
Kementerian Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100,00
Kementerian Perdagangan	100,00
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	100,00
Kementerian Perhubungan	100,00
Kementerian Perindustrian	100,00
Kementerian Pertanian	100,00
Kementerian Sekretaris Negara	100,00
Kementerian Sosial	100,00
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	100,00
Komisi Pemilihan Umum	100,00
Lembaga Administrasi Negara	100,00
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100,00
Lembaga Ketahanan Nasional	100,00
Mahkamah Konstitusi (MK)	100,00
Ombudsman RI	100,00
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	100,00
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94,44
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah	94,44
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	88,89
Kementerian Tranmigrasi	88,89
Badan Keamanan Laut	83,33
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	83,33
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	83,33
Kementerian Haji dan Umroh	83,33
Kementerian Ketenagakerjaan	83,33
Kementerian Lingkungan Hidup	83,33
Kementerian Pertahanan	83,33
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	83,33
Komisi Pemberantas Korupsi	83,33
Komisi Yudisial (KY)	83,33
Mahkamah Agung (MA)	83,33
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	83,33
Perpustakaan Nasional	83,33

Tentara Nasional Indonesia (TNI)	83,33
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	72,22
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	66,67
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasalahan	66,67
Kementerian Koordinator Bidang Pangan	66,67
Kementerian Pariwisata	66,67
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	66,67
Komnas Perempuan	66,67
Arsip Nasional RI	50,00
Kementerian Pemuda dan Olahraga	50,00
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	38,89
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	33,33
<b>TOTAL K/L</b>	<b>92,06</b>

Data menunjukkan bahwa sebagian besar kementerian dan lembaga pemerintah pusat mengklaim skor sempurna (100) dalam dimensi Informasi Terpercaya. Capaian ini menegaskan bahwa K/L memiliki kemampuan kuat dalam memastikan akurasi, kebenaran, dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada publik. Instansi seperti BAZNAS, BRIN, Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kemendagri, POLRI, Kemenkeu, Kemenkes, Kemenhub, dan berbagai lembaga strategis lainnya menunjukkan konsistensi tinggi dalam menjaga standar transparansi dan kualitas informasi. Hal ini dapat berkaitan dengan infrastruktur komunikasi yang lebih matang, standar operasional yang mapan, serta kapasitas SDM komunikasi yang lebih besar dan terlatih dalam tata kelola informasi publik.

Terdapat juga kelompok K/L dengan persepsi nilai sedang (66–94) seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kemenaker, KemenPPPA, Perpustakaan Nasional, Kemen LHK, serta beberapa lembaga pengawas dan otoritas lainnya. Kinerja mereka menunjukkan bahwa meskipun kualitas informasi masih kuat, terdapat area yang perlu diperkuat, seperti konsistensi pembaruan data, mekanisme verifikasi informasi, atau ketersediaan bukti dan dokumentasi pendukung. Kelompok ini umumnya berada pada sektor-sektor yang menghadapi tantangan operasional

lebih besar, seperti penanganan bencana, pelayanan publik yang luas, atau koordinasi lintas unit yang kompleks, sehingga kualitas informasi bisa terpengaruh oleh dinamika lapangan dan keterbatasan proses internal.

Di sisi lain, sejumlah kecil K/L mencatat persepsi indeks relatif rendah, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kemenparekraf, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kemen Koordinator Politik dan Keamanan, serta lembaga yang secara struktural memiliki peran koordinatif atau pengawasan lintas sektor. Rendahnya skor bukan semata-mata mencerminkan kelemahan kinerja, tetapi bisa juga disebabkan oleh keterbatasan dokumentasi, ketidakteraturan dalam penyediaan bukti informasi, atau proses internal yang belum terstandarisasi secara penuh. Selain itu, sifat kerja yang sensitif, terutama untuk lembaga keamanan dan pengawasan, dapat membuat beberapa informasi tidak dapat dibuka sepenuhnya kepada publik sehingga berdampak pada persepsi informasi terpercaya. Secara keseluruhan, capaian rata-rata 92,06 menunjukkan bahwa K/L memiliki fondasi kuat dalam menjaga kredibilitas informasi publik, namun tetap perlu penguatan standar komunikasi dan dokumentasi secara lebih konsisten antar-instansi untuk memastikan kualitas yang merata.

## B. Indikator Informasi Terpercaya Daerah

Tabel 2.31 Indikator Informasi Terpercaya

Provinsi	Indeks
Banten	100,00
DKI Jakarta	100,00
Gorontalo	100,00
Jambi	100,00
Jawa Barat	100,00
Jawa Tengah	100,00
Jawa Timur	100,00
Kalimantan Selatan	100,00
Kalimantan Timur	100,00
Kep. Riau	100,00
Lampung	100,00
Nusa Tenggara Timur	100,00
Papua	100,00
Papua Selatan	100,00
Sulawesi Selatan	100,00
Sulawesi Tengah	100,00
Sumatera Barat	100,00
Sumatera Selatan	100,00
Sumatera Utara	100,00
Bali	94,44
Sulawesi Utara	94,44
Aceh	88,89
DI Yogyakarta	83,33
Kalimantan Tengah	83,33
Kep. Bangka Belitung	83,33
Maluku	83,33
Nusa Tenggara Barat	83,33
Riau	83,33
Sulawesi Barat	77,78
Kalimantan Utara	66,67
Maluku Utara	66,67
Kalimantan Barat	61,11
Sulawesi Tenggara	38,89
Papua Barat	16,67
Papua Barat Daya	16,67
Papua Pegunungan	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>83,95</b>

Secara umum, sebagian besar provinsi mempersepsikan memiliki kinerja yang sangat baik dalam memastikan penyebaran informasi yang akurat, benar, dan mudah dipahami. Provinsi-provinsi besar dan berpengalaman dalam tata kelola pemerintahan, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Timur, mengklaim skor 100, menandakan bahwa mereka mampu menyajikan bukti, dokumentasi, serta materi verifikasi yang kuat terkait informasi publik yang mereka keluarkan. Hal ini konsisten dengan kapasitas kelembagaan yang relatif mapan, ketersediaan SDM komunikasi publik yang lebih memadai, serta infrastruktur birokrasi yang lebih siap dalam mendukung proses validasi dan penjaminan mutu informasi. Provinsi seperti NTT, Papua, Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Riau juga menunjukkan performa optimal, yang menegaskan bahwa persepsi informasi terpercaya tidak hanya dominan di wilayah maju tetapi juga bisa dicapai di daerah dengan tantangan geografis yang lebih beragam.

Beberapa provinsi mempersepsikan memiliki kinerja sedang hingga rendah, seperti Sulawesi Barat (77,78), Kalimantan Utara (66,67), Maluku Utara (66,67), dan Kalimantan Barat (61,11). Skor ini biasanya mencerminkan adanya kendala pada aspek dokumentasi, keterbatasan sistem validasi informasi, atau kurang optimalnya koordinasi internal untuk menghadirkan bukti pendukung. Selain itu, daerah-daerah ini umumnya memiliki tantangan geografis, kapasitas kelembagaan, maupun sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan provinsi besar. Kendala dalam digitalisasi dokumen serta rendahnya intensitas pembaruan informasi publik juga berpotensi memperlemah persepsi masyarakat dan instansi lain terhadap akurasi serta kredibilitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Catatan penting muncul pada provinsi dengan indeks sangat rendah, terutama Sulawesi Tenggara (38,89), Papua Barat (16,67), Papua Barat Daya (16,67), dan Papua Pegunungan (0). Indeks 0 pada Papua Pegunungan sangat signifikan karena daerah ini merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih berada dalam tahap awal pembentukan struktur pemerintahan.

Kondisi ini menjelaskan mengapa provinsi tersebut belum dapat menyampaikan bukti pendukung atau dokumentasi terkait informasi publik, baik karena struktur organisasi belum lengkap, mekanisme komunikasi publik belum berjalan, maupun sistem pelaporan belum terbangun. Dua DOB lain, yaitu Papua Barat Daya dan Papua Selatan (uniknya memiliki skor 100 namun kemungkinan karena lingkup bukti yang minimal), juga menunjukkan pola yang konsisten bahwa kedewasaan

kelembagaan berpengaruh langsung terhadap kemampuan menyediakan informasi yang dapat diverifikasi. Secara nasional, nilai total 83,95 menunjukkan bahwa persepsi informasi terpercaya dari daerah berada pada kategori tinggi, tetapi kesenjangan antara provinsi mapan dan daerah dengan geografis tertentu, juga DOB perlu menjadi perhatian utama dalam penguatan KPIP di masa mendatang.

## Indeks Agregat Dimensi Proses KPIP K/L

Indeks agregat persepsi Dimensi Proses KPIP Kementerian/Lembaga (K/L) menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah pusat mampu mengelola komunikasi publik secara komprehensif dalam satu siklus kebijakan, dari perencanaan hingga penyampaian informasi yang terpercaya. Dimensi ini meliputi aspek Komunikasi Strategis, Hak Publik, Cakupan Pekerjaan, Prinsip Komunikasi Publik, Pelibatan Pemangku Kepentingan, dan Informasi Terpercaya.

Oleh karena itu, indeks yang dihasilkan mencerminkan persepsi atas kualitas tata kelola proses komunikasi publik secara substantif, bukan hanya keberadaan struktur atau sumber daya. Capaian indeks pada dimensi proses menjadi indikator penting untuk menilai kematangan praktik komunikasi publik K/L dalam mendukung transparansi, partisipasi, dan kepercayaan publik.

Tabel 2.32 Indeks Agregat Dimensi Proses KPIP K/L

KL	INDEKS
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	100,00
Kementerian Agama	100,00
Kementerian Investasi dan Hilirisasi	100,00
Kementerian Kelautan dan Perikanan	100,00
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100,00
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	100,00
Lembaga Administrasi Negara	100,00
Kementerian Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	99,86
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	99,84
Kementerian Pertanian	99,84
Kejaksaan Agung	99,82
Kementerian Dalam Negeri	99,75
Kementerian HAM	99,58
Kementerian Kesehatan	99,47
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	99,28
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	99,16
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	98,99
Komisi Pemilihan Umum	98,82

Kementerian Keuangan	98,55
Kementerian Luar Negeri	98,42
Kementerian Perhubungan	98,09
Kementerian Kehutanan	97,49
Badan Narkotika Nasional	97,45
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	97,43
Kementerian Pekerjaan Umum	97,30
Kementerian Sosial	97,30
Badan Kepegawaian Negara	97,12
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	97,07
Kementerian Ekonomi Kreatif	96,88
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	96,84
Badan Gizi Nasional	96,65
Badan Pusat Statistik	96,49
Badan Informasi Geospasial	96,41
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	95,95
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	95,88
Kementerian Perdagangan	95,54
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	95,07
Badan Pangan Nasional	94,88
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	94,67
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	94,58
Kementerian Sekretaris Negara	94,52
Kementerian Perindustrian	94,04
Kementerian Kebudayaan	93,81
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	93,64
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	93,03
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah	92,99
Kementerian Ketenagakerjaan	92,57
Badan Pengawas Obat dan Makanan	92,32
Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral	92,12
Kementerian Komunikasi dan Digital	92,08
Badan Standarisasi Nasional	91,94
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	91,58
Kementerian Haji dan Umroh	91,49
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	90,05
Badan Intelijen Negara (BIN)	89,72
Badan Siber dan Sandi Negara	89,25
Komisi Pemberantas Korupsi	88,87
Mahkamah Konstitusi (MK)	87,94
Kementerian Koperasi	87,37
Ombudsman RI	86,52
Kementerian Lingkungan Hidup	85,92

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85,87
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	83,94
Kementerian Pemuda dan Olahraga	83,42
Kementerian Pertahanan	83,33
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	82,97
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	82,45
Kementerian Hukum	82,03
Kementerian Transmigrasi	81,18
Mahkamah Agung (MA)	80,94
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	80,74
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	79,64
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	79,27
Perpustakaan Nasional	78,64
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	77,89
Komisi Yudisial (KY)	77,11
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	76,67
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	74,50
Badan Keamanan Laut	73,63
Lembaga Ketahanan Nasional	71,68
Tentara Nasional Indonesia (TNI)	70,82
Badan Karantina Indonesia	69,58
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	69,05
Kementerian Pariwisata	68,10
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	67,47
Kementerian Koordinator Bidang Pangan	66,44
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Perasyarakatan	64,30
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	63,75
Komnas Perempuan	63,51
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	52,75
Arsip Nasional RI	50,04
<b>Total KL</b>	<b>88,51</b>

Indeks persepsi dimensi proses KPIP K/L secara keseluruhan berada pada angka 88,51%, menunjukkan bahwa proses komunikasi publik di tingkat kementerian dan lembaga telah dipersepsikan berjalan relatif kuat dan konsisten. Banyak K/L mencatatkan skor sangat tinggi, bahkan mencapai 100%, seperti BRIN, Kementerian Agama, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, POLRI, LAN, serta beberapa kementerian koordinator. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar K/L telah mampu mengelola siklus komunikasi publik secara utuh, mulai

dari perencanaan strategis, pemenuhan hak publik, pelaksanaan komunikasi, hingga penyampaian informasi yang terpercaya, dengan dukungan struktur organisasi yang mapan, SOP yang jelas, dan kapasitas SDM yang relatif stabil. Namun demikian, variasi indeks antarlembaga masih cukup lebar, terutama pada K/L dengan fungsi koordinatif, pengawasan, atau sektor yang bersifat sensitif. Beberapa instansi seperti Arsip Nasional RI, Kemenko Polhukam, Kemenko, DPD, serta Badan Karantina Indonesia mencatatkan skor di bawah 70%. Nilai yang lebih rendah ini tentunya tidak selalu mencerminkan

lemahnya komitmen komunikasi publik, tetapi lebih menunjukkan tantangan struktural dalam dimensi proses, seperti kompleksitas koordinasi lintas sektor, keterbatasan ruang partisipasi publik, atau keterbatasan dalam mendokumentasikan dan menyajikan bukti proses komunikasi secara lengkap. Pada lembaga pengawasan dan keamanan, pembatasan akses informasi juga berpotensi mempengaruhi persepsi atas keterbukaan dan pelibatan stakeholder. Secara substantif, dimensi proses KPIP ini menegaskan bahwa kekuatan utama K/L terletak pada Prinsip Komunikasi Publik, Informasi Terpercaya, dan Hak Publik, sementara tantangan terbesar masih berada pada pelibatan stakeholder dan

konsistensi implementasi lintas unit kerja.

Perbedaan indeks skor persepsi antar K/L menunjukkan bahwa standar proses komunikasi publik belum sepenuhnya dijalankan seragam, meskipun kerangka kebijakan nasional sudah tersedia. Oleh karena itu, penguatan dimensi proses ke depan perlu difokuskan pada standarisasi mekanisme pelibatan pemangku kepentingan, penguatan dokumentasi proses komunikasi, serta peningkatan kapasitas koordinasi lintas kementerian/lembaga. Dengan perbaikan tersebut, indeks persepsi dimensi proses KPIP K/L berpotensi meningkat lebih merata dan mencerminkan kualitas komunikasi publik pemerintah yang semakin baik.

## Agregat Indeks Dimensi Proses Dinas Kominfo

Indeks agregat persepsi Dimensi Proses KPIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah melalui Diskominfo melaksanakan fungsi komunikasi publik secara terpadu dalam keseluruhan tahapan kebijakan, mulai dari perumusan rencana komunikasi, pelaksanaan diseminasi informasi, hingga penyediaan informasi yang dinilai akurat dan dapat dipercaya oleh publik. Dimensi ini mencakup unsur Komunikasi Strategis, Pemenuhan Hak Publik, Cakupan Pelaksanaan Komunikasi, Penerapan Prinsip Komunikasi Publik, Pelibatan Pemangku Kepentingan, serta Penyediaan Informasi Terpercaya, yang secara bersama-sama merefleksikan kualitas proses kerja komunikasi publik di tingkat daerah. Rincian indeks agregat tiap daerah tersaji pada table indeks agregat dimensi proses untuk Diskominfo.

Menyimak indeks persepsi dimensi proses KPIP pada dinas komunikasi dan informatika daerah, dapat dilihat variasi persepsi kinerja proses yang cukup lebar antardaerah, dengan nilai total daerah berada pada 82,67%. Sejumlah provinsi mencatat capaian sangat tinggi, bahkan mendekati atau mencapai skor maksimal, seperti Jawa Barat (100%), Sumatera Utara (99,47%), Jawa Tengah (98,92%), dan Lampung (98,90%). Capaian ini mencerminkan persepsi kematangan proses komunikasi publik di daerah-daerah tersebut, yang ditandai oleh perencanaan komunikasi yang kuat, pemenuhan hak

publik yang konsisten, cakupan pekerjaan yang luas, serta kemampuan menjaga prinsip komunikasi publik dan kualitas informasi yang disampaikan. Daerah-daerah dengan nilai tinggi umumnya memiliki struktur kelembagaan yang stabil, SDM komunikasi yang relatif siap, serta pengalaman panjang dalam mengelola komunikasi pemerintahan.

Pada kelompok dengan persepsi indeks menengah, berada di kisaran 84–92%, terdapat provinsi seperti DKI Jakarta, Bali, Jambi, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Kelompok ini menunjukkan bahwa proses komunikasi publik umumnya telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal di seluruh aspek dimensi. Tantangan yang lazim muncul pada kelompok ini biasanya terkait konsistensi pelibatan pemangku kepentingan, kedalaman monitoring dan evaluasi, serta variasi kualitas implementasi antarprogram. Meskipun demikian, nilai pada kelompok ini tetap menunjukkan bahwa praktik komunikasi publik daerah telah melewati tahap dasar dan bergerak menuju penguatan sistemik.

Sebaliknya, provinsi dengan indeks proses rendah, seperti Papua Barat Daya (39,06%), Papua Pegunungan (33,19%), Maluku (48,02%), dan Maluku Utara (55,70%), menunjukkan adanya tantangan struktural yang signifikan. Rendahnya skor pada kelompok ini mungkin berkaitan dengan karakteristik daerah otonom baru (DOB), keterbatasan SDM dan anggaran,

belum matangnya mekanisme koordinasi lintas aktor, serta belum lengkapnya dokumentasi proses komunikasi publik sebagai bukti kinerja. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan dimensi proses di daerah tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan memerlukan pendekatan afirmatif,

pendampingan intensif, dan penyesuaian kebijakan yang kontekstual agar kesenjangan kinerja komunikasi publik antardaerah dapat dikurangi secara berkelanjutan, khususnya di DOB yang semuanya merupakan daerah Indonesia Timur.

Tabel 2.33 Agregat Indeks Dimensi Proses Dinas Kominfo

Daerah	DIMENSI PROSES
Jawa Barat	100,00
Sumatera Utara	99,47
Jawa Tengah	98,92
Lampung	98,90
Kalimantan Selatan	98,17
Banten	98,02
Sulawesi Tengah	97,46
Nusa Tenggara Timur	95,47
Papua	95,26
Kalimantan Timur	94,70
Jawa Timur	94,31
Sulawesi Selatan	93,50
DKI Jakarta	92,65
Bali	91,06
Jambi	90,67
Kep. Riau	88,03
Sulawesi Utara	87,75
DI Yogyakarta	86,96
Sumatera Barat	86,32
Gorontalo	85,96
Kalimantan Utara	85,58
Nusa Tenggara Barat	84,54
Kalimantan Tengah	84,52
Riau	82,74
Sulawesi Barat	82,02
Kep. Bangka Belitung	79,13
Sumatera Selatan	78,82
Papua Selatan	76,77
Aceh	76,64
Kalimantan Barat	68,07
Papua Barat	67,64
Sulawesi Tenggara	59,96
Maluku Utara	55,70
Maluku	48,02
Papua Barat Daya	39,06
Papua Pegunungan	33,19
TOTAL D	82,67

# Capaian Indeks Agregat K/L/D

K/L/D	Kapasitas Institusi	Komunikasi Strategis	Hak Publik	Cakupan Kerja	Prinsip Komunikasi Publik	Pelibatan Pemangku Kepentingan	Informasi Terpercaya
Total D	84,68	80,45	87,67	82,36	87,10	74,46	83,95
Total K/L	89,85	90,98	90,66	87,85	90,29	79,18	92,06
Total Nasional	87,26	85,72	89,17	85,11	88,70	76,82	88,01

## Indeks KPIP Agregat

**82,95 (Daerah)**

**88,70 (K/L)**

**85,83 (Nasional)**

Data agregat KPIP menunjukkan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki persepsi tingkat kinerja komunikasi publik yang lebih tinggi dibandingkan Dinas Kominfo (D) pada seluruh dimensi. Nilai total K/L sebesar 88,70, jauh di atas rata-rata daerah yang mencapai 82,95, menunjukkan konsistensi tata kelola, kapasitas birokrasi, dan infrastruktur komunikasi publik yang lebih mapan di tingkat pusat. Dimensi dengan performa tertinggi di K/L adalah Informasi Terpercaya (92,06), Komunikasi Strategis (90,98), dan Prinsip Komunikasi Publik (90,29), menandakan bahwa instansi pusat memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga akurasi informasi, merencanakan komunikasi secara menyeluruh, serta memastikan integritas dan objektivitas pesan publik. Hal ini selaras dengan struktur organisasi yang lebih besar, SDM yang lebih profesional, dan standar komunikasi yang lebih terinstitusionalisasi di tingkat pusat dibanding daerah. Sementara itu, capaian daerah memperlihatkan dinamika yang lebih beragam. Beberapa dimensi menunjukkan kinerja kuat, misalnya Hak Publik (87,67) dan Prinsip Komunikasi Publik (87,10) yang menandakan bahwa banyak pemerintah daerah sudah cukup baik dalam menjaga transparansi dan mengedepankan kepentingan publik dalam pesan komunikasi mereka. Namun, dimensi seperti Pelibatan Stakeholder (74,46) dan Kapabilitas Komunikasi Strategis (80,45) terlihat semakin tertinggal. Rendahnya pelibatan pemangku

kepentingan mencerminkan tantangan berulang di daerah, seperti keterbatasan jejaring, minimnya mekanisme konsultasi publik, dan kurangnya kapasitas koordinasi lintas sektor. Demikian pula, kelemahan pada cakupan pekerjaan dan kapasitas kelembagaan menunjukkan adanya disparitas keterampilan, sumber daya, dan kesiapan organisasi yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan ekosistem komunikasi publik daerah. Secara nasional, indeks agregat KPIP berada pada angka 85,83, mencerminkan bahwa secara umum Indonesia memiliki fondasi komunikasi publik yang cukup kuat, namun tetap menghadapi ketimpangan antara pusat dan daerah. Dimensi dengan capaian tertinggi adalah Hak Publik (89,17) dan Prinsip Komunikasi Publik (88,70), menunjukkan bahwa kerangka normatif dan komitmen terhadap prinsip keterbukaan telah berjalan baik. Namun, dimensi Pelibatan Stakeholder (76,82) menjadi titik lemah utama secara nasional, menandakan perlunya strategi yang lebih sistematis untuk membangun kolaborasi lintas aktor, termasuk masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan kelompok rentan. Untuk meningkatkan kinerja KPIP secara keseluruhan, penguatan kapasitas daerah, peningkatan kualitas SDM komunikasi publik, serta harmonisasi standar komunikasi antara pusat dan daerah menjadi prioritas strategis guna memastikan konsistensi dan efektivitas komunikasi publik di seluruh Indonesia.

# BAB III

## INDEKS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN INFORMASI PUBLIK KATEGORI PUBLIK KUNCI TAHUN 2025

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media  
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

# Gambaran Umum

Survei Indeks KPIP dilakukan pada 15 Oktober – 9 November 2025 dengan cakupan 38 provinsi dan melibatkan 1.140 responden melalui metode tatap muka berbasis kuesioner CTO. Riset ini menilai komunikasi publik pemerintah, tingkat kepercayaan publik, partisipasi, keterlibatan pemangku kepentingan, hingga persepsi terhadap transparansi dan hak publik atas informasi. Untuk menjamin kualitas data, survei ini menyasar responden “Publik Kunci” yang telah memenuhi kriteria umum dan khusus, dimulai dari kelompok peneliti atau akademisi, pelaku usaha berbadan hukum yang telah beroperasi minimal 5 tahun dengan komposisi proporsional antara usaha kecil, menengah, dan besar. Selain itu, responden mencakup pimpinan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) yang fokus pada advokasi hukum atau lingkungan dan tidak berafiliasi dengan partai politik, perwakilan asosiasi media atau influencer lokal yang relevan, serta pimpinan organisasi profesi strategis. Kelompok terakhir adalah representasi masyarakat yang terdiri dari pimpinan serikat pekerja, organisasi keagamaan, dan kepemudaan, serta menyertakan perwakilan Ombudsman daerah dan penyandang disabilitas sebagai bagian dari inklusivitas survei.

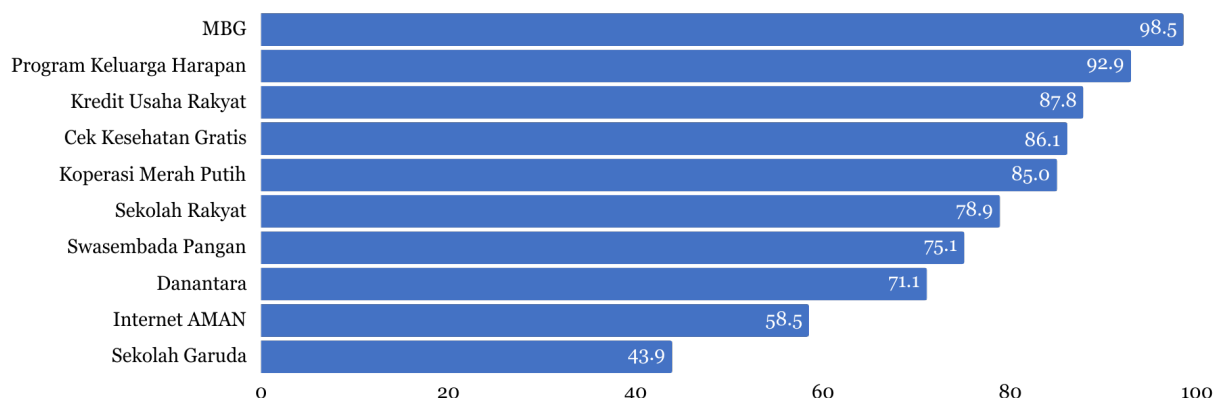
Survei Indeks KPIP 2025 menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah berada pada tingkat “baik”, tetapi masih menghadapi tantangan struktural dalam hal keterlibatan, transparansi, dan efektivitas penyampaian informasi. Meskipun media sosial menjadi kanal informasi yang paling dominan digunakan masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap platform ini tidak setara dengan frekuensi penggunaannya. Hal ini menciptakan paradoks: publik banyak bergantung pada media yang dianggap kurang kredibel, sementara media yang lebih dipercaya seperti televisi memiliki jangkauan yang relatif menurun dalam mempengaruhi preferensi informasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa arsitektur komunikasi publik pemerintah belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan ekosistem informasi digital yang cepat, terfragmentasi, dan sangat bergantung pada algoritma. Selain itu, persepsi publik terhadap komunikasi pemerintah, walaupun positif dalam hal aksesibilitas masih dipengaruhi oleh kesenjangan antara informasi yang disampaikan secara formal dengan pengalaman nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan. Dengan kata lain, kepercayaan publik bersifat provisional: cukup tinggi sebagai institusi, tetapi belum stabil ketika bersinggungan dengan isu-isu sensitif atau implementasi kebijakan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, tingkat partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan menunjukkan pola komunikasi yang cenderung *top-down*, di mana pemerintah masih dipersepsikan sebagai aktor utama yang menentukan arah kebijakan, sementara masyarakat dan aktor non-pemerintah lebih sering berada pada posisi sebagai penerima, bukan mitra dialogis. Indeks partisipasi publik yang berada pada kisaran 75,63 mengindikasikan bahwa masyarakat merasa dilibatkan pada tingkat deklaratif, namun belum pada tingkat deliberatif. Temuan ini sejalan dengan persepsi terkait hak publik, di mana informasi memang tersedia, tetapi tidak selalu mudah, operasional, atau relevan bagi kebutuhan masyarakat luas. Sementara itu, kredibilitas informasi pemerintah dinilai cukup baik, tetapi belum mampu meningkatkan partisipasi secara signifikan karena publik menginginkan proses komunikasi yang lebih responsif dan kolaboratif. Secara keseluruhan, Indeks KPIP nasional sebesar 75,75 mencerminkan fondasi komunikasi publik yang solid, namun menandakan adanya kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk memperkuat ruang partisipasi, memperbaiki rantai transparansi, dan mengoptimalkan penggunaan media digital agar komunikasi publik tidak hanya informatif,

## A. Program Pemerintah

Gambar 3.1. Program Pemerintah



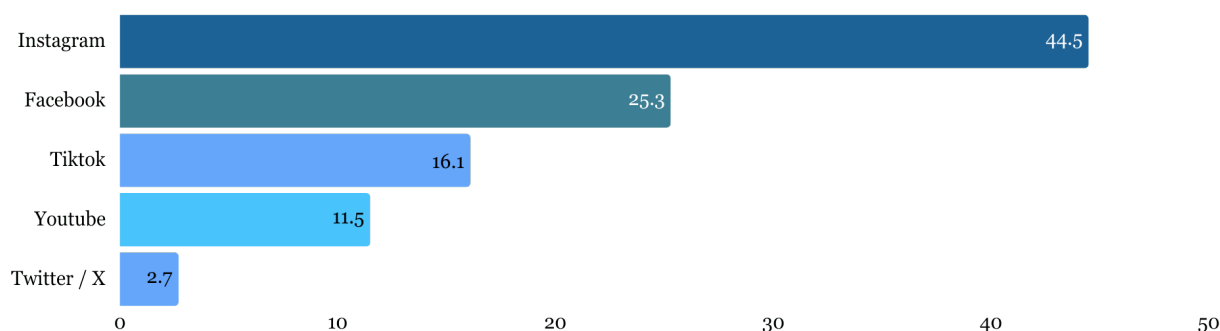
Grafik menunjukkan bahwa informasi mengenai Makan Bergizi Gratis (98,5) merupakan jenis informasi yang paling diminati dan sering didengar oleh publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa publik sangat memperhatikan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga, terutama dalam kondisi sosial-ekonomi yang masih fluktuatif. Tingginya perhatian terhadap informasi pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial lainnya juga menunjukkan

bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam pencarian informasi publik. Secara kualitatif, hal ini mencerminkan preferensi masyarakat terhadap informasi yang konkret, relevan, dan dapat segera dirasakan manfaatnya, bukan sekadar informasi tentang kebijakan jangka panjang atau narasi pembangunan yang bersifat makro. Pemerintah, dengan demikian, perlu memastikan penyampaian informasi terkait layanan dasar dilakukan secara konsisten, transparan, dan mudah dipahami.

## B. Penggunaan Media: Preferensi Dan Implikasi

### 1. Media Sosial Sebagai Informasi Utama

Gambar 3.2. Media Sosial yang Paling Sering Digunakan



tetapi juga transformatif dan memberdayakan masyarakat. Dominasi media sosial sebagai sumber informasi utama masyarakat tidak hanya menunjukkan perubahan preferensi, tetapi juga

transformasi mendalam dalam struktur otoritas informasi di Indonesia. Jika sebelumnya arus informasi dikendalikan oleh institusi media yang memiliki standar verifikasi tertentu, kini algoritma platform menjadi filter utama dalam

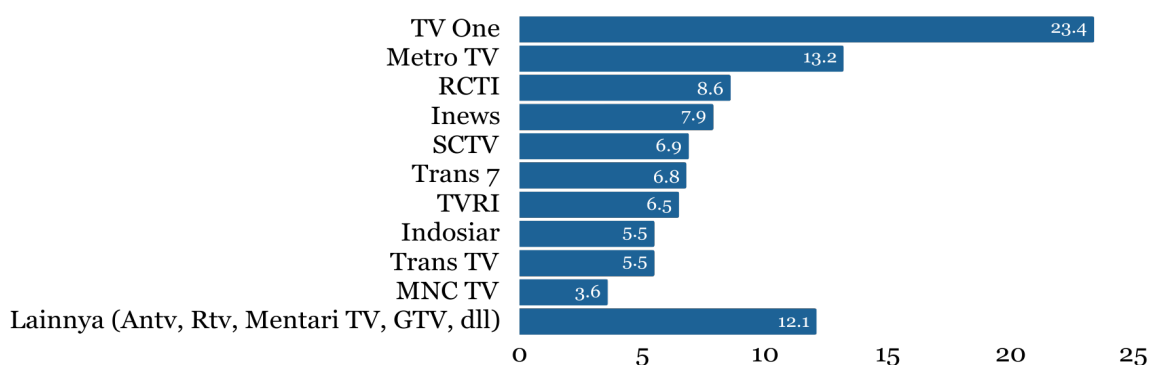
menentukan apa yang dilihat publik. Artinya, masyarakat menerima informasi berdasarkan pola klik, viralitas, dan kesesuaian dengan preferensi sebelumnya (*echo chamber*), bukan berdasarkan kredibilitas sumber. Pergeseran ini menggeser pusat kendali dari aktor profesional seperti jurnalis dan editor ke platform digital yang bekerja secara otomatis. Kondisi ini memperluas akses informasi, tetapi sekaligus memperbesar potensi distorsi persepsi publik terhadap kebijakan.

Dalam konteks ini, penggunaan media sosial tidak dapat dibaca sekadar sebagai kanal informasi yang populer, tetapi sebagai indikator penting tentang bagaimana publik membangun opini dan kepercayaan terhadap pemerintah. Meski media sosial paling sering diakses, data survei menunjukkan masyarakat tidak selalu menganggapnya sebagai media paling kredibel. Lebih jauh, dominasi media sosial menunjukkan bahwa masyarakat semakin menginginkan komunikasi yang lebih personal, interaktif, dan langsung. Ini menjelaskan mengapa format formal seperti siaran pers atau pidato seringkali kurang efektif dalam menjangkau publik digital. Masyarakat memandang pemerintah bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi sebagai aktor

yang harus hadir dan responsif dalam ruang percakapan daring. Keterlambatan respons, inkonsistensi pesan, atau absennya kehadiran pejabat kunci dalam diskursus digital dapat dengan cepat memengaruhi persepsi publik, seringkali lebih kuat daripada informasi yang dipublikasikan secara resmi. Dengan demikian, tantangan terbesar pemerintah adalah membangun engagement yang bukan hanya informatif, tetapi juga dialogis dan adaptif terhadap dinamika percakapan di platform. Selain itu, variasi tingkat literasi media di berbagai segmen masyarakat membuat interpretasi terhadap informasi pemerintah sangat bergantung pada bagaimana konten tersebut dikemas. Bagi kelompok berpendidikan tinggi, media sosial menjadi ruang verifikasi silang; bagi mereka yang akses informasinya terbatas, media sosial dapat menjadi satu-satunya sumber rujukan. Ketidakteraturan ini berpotensi menciptakan kesenjangan pemahaman kebijakan, di mana kelompok tertentu mudah dipengaruhi oleh misinformasi atau narasi populis. Karena itu, strategi komunikasi publik tidak bisa bersifat seragam. Pemerintah membutuhkan pendekatan diferensial mengadaptasi pesan, format, dan platform sesuai karakteristik

## 2. Televisi Menjadi Preferensi Publik Dalam Informasi Kebijakan Pemerintah

Gambar 3.3. Stasiun TV yang paling sering di akses



demografis dan geografis agar informasi kebijakan dapat diterima secara proporsional. Meskipun penggunaan media sosial sangat dominan, televisi masih memiliki posisi penting dalam penyebaran informasi pemerintah, terutama bagi kelompok usia lebih tua dan masyarakat yang tinggal di daerah luar perkotaan. Kelompok ini

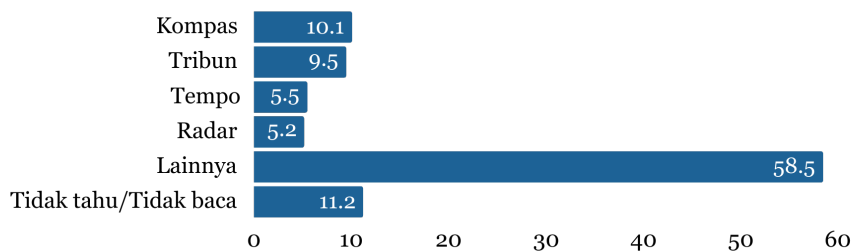
cenderung mengandalkan media yang sudah lama mereka kenal dan percaya. Selain itu, akses internet yang tidak merata membuat televisi tetap menjadi pilihan yang stabil dan mudah dijangkau. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada platform digital, melainkan juga perlu memperkuat

informasi melalui saluran televisi agar tidak meninggalkan segmen masyarakat tertentu. Berdasarkan hasil survei terhadap publik kunci, terlihat bahwa TV One menjadi stasiun televisi yang paling banyak dipilih sebagai sumber informasi utama dengan persentase 23,4 persen. Posisi berikutnya ditempati Metro TV dengan 13,2 persen, disusul RCTI dengan 8,6 persen. Pola ini menunjukkan bahwa publik kunci masih mengandalkan stasiun televisi

berita dan televisi dengan cakupan nasional untuk memperoleh informasi penting, terutama terkait isu politik, kebijakan pemerintah, dan perkembangan aktual. Dominasi TV One dan Metro TV juga mengindikasikan bahwa publik kunci cenderung memilih saluran yang memberikan informasi mendalam dan fokus pada berita, bukan sekadar hiburan, sehingga saluran-saluran ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk persepsi

### 3. Keterbatasan Penggunaan Media Cetak dan Radio

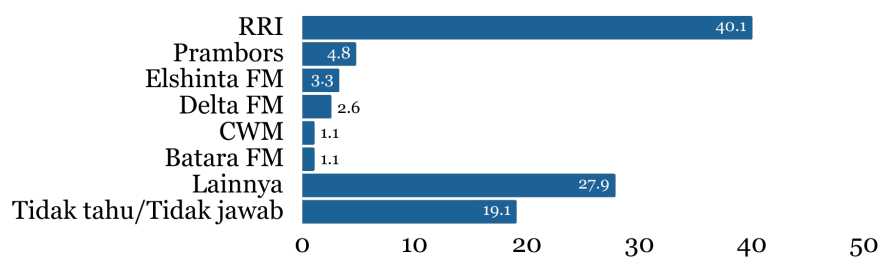
Gambar 3.4. Televisi yang paling sering ditonton



Media cetak mengalami penurunan relevansi karena perubahan pola konsumsi informasi yang semakin mengandalkan perangkat digital. Masyarakat kini lebih memilih informasi yang cepat diakses melalui ponsel, sehingga format berita cetak yang terbit harian atau mingguan menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan aktual mereka. Selain itu, biaya produksi

dan distribusi media cetak yang lebih tinggi membuat jangkauannya semakin terbatas. Dalam konteks komunikasi pemerintah, hal ini berarti pesan yang disampaikan melalui koran atau majalah berpotensi tidak mencapai kelompok masyarakat yang lebih muda atau tinggal di daerah yang tidak memiliki akses reguler terhadap media cetak.

Gambar 3.5. Radio yang Paling Sering Digunakan

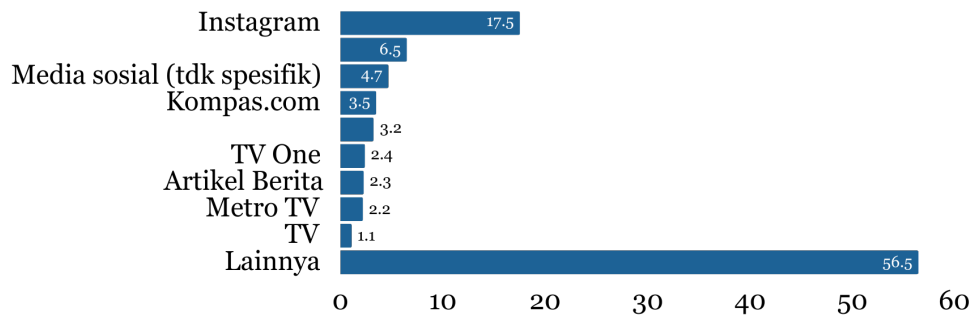


Radio juga menghadapi tantangan serupa terkait pola konsumsi informasi. Meskipun radio masih digunakan di beberapa wilayah, terutama yang memiliki keterbatasan akses internet, intensitas penggunaannya jauh lebih rendah dibanding media digital dan televisi. Publik yang menggunakan radio umumnya mendengarkan dalam konteks kegiatan tertentu, misalnya saat berkendara sehingga perhatian mereka terhadap pesan pemerintah

tidak sekuat ketika mengakses media visual. Radio memiliki kelebihan dalam jangkauan cepat dan fleksibilitas waktu, tetapi tidak cukup kuat dalam memberikan penjelasan detail mengenai kebijakan publik karena keterbatasan format audio. RRI adalah stasiun radio yang masih didengar oleh publik kunci atau sekitar 40,1, sedangkan yang sudah tidak menggunakan radio sebesar 19,1.

## 4. Dominasi Instagram Sebagai Medium Informasi Publik

Gambar 3.6. Platform Media yang Digunakan Untuk Akses Informasi Program dan Kebijakan Pemerintah

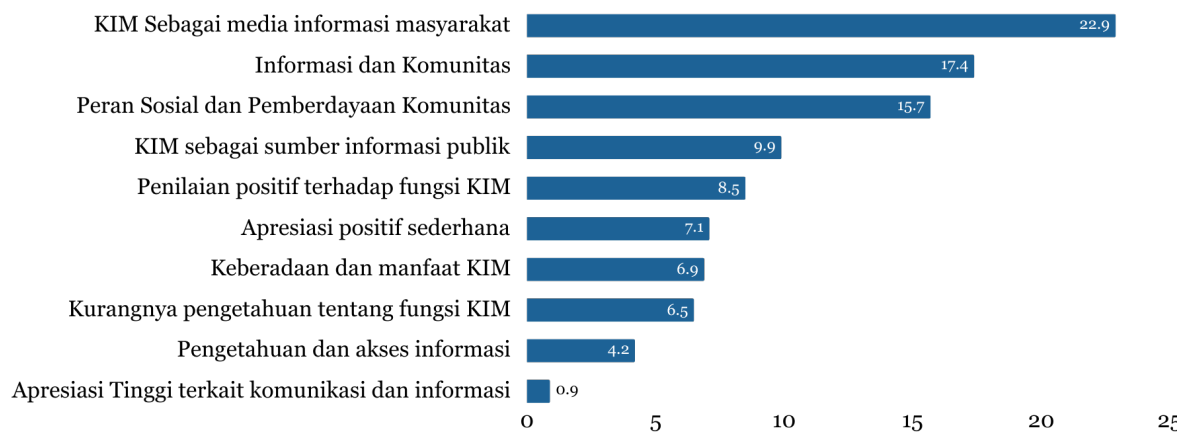


Grafik menunjukkan bahwa Instagram menjadi platform yang paling sering digunakan oleh responden dengan angka yang sangat menonjol dibandingkan media sosial lain. Dominasi Instagram ini mengindikasikan bahwa pola konsumsi informasi publik telah bergeser ke arah platform visual yang mengandalkan konten singkat, menarik, dan mudah dibagikan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin mengutamakan

kecepatan dan estetika informasi, di mana visualisasi, infografis, dan video pendek menjadi bentuk komunikasi yang paling efektif dalam mempengaruhi persepsi publik. Kecenderungan ini menjadi sinyal kuat bahwa strategi komunikasi pemerintah harus lebih adaptif terhadap format visual, ritme konten yang cepat, serta gaya bahasa yang ringkas dan relevan dengan kultur digital anak muda yang menjadi pengguna dominan.

## 5. Komunitas Informasi Masyarakat

Gambar 3.7. Komentar Tentang Komunitas Informasi Masyarakat



Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) merupakan wadah partisipatif yang dibentuk untuk mendorong keterlibatan aktif warga dalam mengelola, menyebarkan, dan memanfaatkan informasi publik, khususnya terkait program dan kebijakan pemerintah di tingkat lokal (Sani, 2025). KIM berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa informasi yang penting, akurat, dan relevan dapat diakses dengan

mudah serta dipahami oleh berbagai lapisan komunitas (Mukti & Winanta, 2021).

Berdasarkan hasil survei, mayoritas publik tidak mengenal KIM, hanya sebesar 20,2 responden yang tahu/pernah dengar KIM sedangkan 79,8 publik belum pernah mendengar KIM atau Komunitas Informasi Masyarakat. Rendahnya tingkat pengetahuan publik terhadap KIM terutama disebabkan oleh minimnya eksposur dan visibilitas KIM

dalam ekosistem informasi publik, baik di ruang digital maupun kanal komunikasi formal pemerintah. Selama ini, KIM lebih banyak beroperasi pada level komunitas atau desa dan tidak memiliki strategi komunikasi yang kuat untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Selain itu, branding KIM sebagai lembaga informasi masyarakat belum kuat; publik jauh lebih mengenal kanal komunikasi lain seperti media sosial resmi pemerintah, situs kementerian, atau layanan informasi publik berbasis aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa KIM belum mendapatkan ruang yang cukup dalam strategi komunikasi pemerintah maupun dalam percakapan publik di media digital.

Di sisi lain, rendahnya *awareness* terhadap KIM juga berkaitan dengan persepsi publik bahwa fungsi penyebaran informasi sudah dipenuhi oleh media sosial dan media arus utama, sehingga keberadaan KIM dianggap tidak terlalu menonjol atau relevan dalam rutinitas konsumsi informasi masyarakat. Publik kini lebih banyak bergantung pada kanal digital yang cepat, mudah, dan populer, sementara KIM masih identik dengan model komunikasi komunitas yang bersifat lokal dan konvensional. Ketiadaan kampanye edukasi skala nasional, lemahnya integrasi KIM dengan kanal digital pemerintah, serta belum adanya insentif partisipasi yang menarik dari sisi masyarakat turut memperkuat rendahnya tingkat pengenalan publik terhadap KIM. Secara keseluruhan, data ini menegaskan perlunya revitalisasi peran KIM agar lebih adaptif terhadap lanskap komunikasi digital dan lebih dikenal sebagai kanal informasi publik yang kredibel dan relevan. Mayoritas responden yang mengetahui KIM menilai bahwa fungsi utama KIM adalah sebagai sumber

informasi bagi masyarakat, sebagaimana terlihat dari proporsi tertinggi pada aspek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa publik yang mengenal KIM sudah memahami peran dasarnya sebagai penyedia informasi terkait program pemerintah, kegiatan lokal, maupun isu-isu penting di tingkat komunitas.

Tingginya penilaian pada aspek “menyebarkan informasi” dan “penyambung aspirasi masyarakat” menegaskan bahwa KIM dipersepsikan berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah, baik dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya. Dengan kata lain, bagi responden yang mengenalnya, KIM dilihat sebagai institusi yang menjalankan mandat komunikasi publik secara relevan dan operasional, meskipun skalanya masih terbatas.

Namun, terlihat bahwa aspek-aspek strategis seperti “mengatasi hoaks”, “media literasi”, atau “pemberdayaan masyarakat” memperoleh persentase yang lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun KIM dikenal sebagai penyedia informasi, fungsinya belum dipahami sebagai agen literasi digital atau pencegah disinformasi, padahal peran tersebut semakin penting dalam ekosistem media yang terfragmentasi. Rendahnya persepsi pada peran pemberdayaan juga menunjukkan bahwa publik belum melihat KIM sebagai aktor yang secara aktif meningkatkan kapasitas atau partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa di mata mereka yang mengenal KIM, lembaga ini memiliki fondasi fungsi yang kuat sebagai sumber informasi, tetapi masih memiliki ruang besar untuk memperluas persepsi publik terhadap perannya yang lebih strategis, khususnya dalam literasi digital, mitigasi hoaks, dan pemberdayaan komunitas.

## C. Kredibilitas Media

### 1. Media yang memberikan informasi tentang Program dan Kebijakan Pemerintah

Tabel 3.8. Indeks Media yang memberikan Informasi Kebijakan Pemerintah

NO	MEDIA	MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	MEDIA YANG DAPAT DIPERCAYA
1	Lembaga Penyiaran Publik (RRI, TVRI, atau Radio/Televisi Milik Pemerintah Daerah)	89.79	76.50
2	Media Cetak	87.36	76.83
3	Internet/situs web	85.78	74.00
4	Televisi	82.33	77.73
5	Media Daring	81.72	72.17
6	Media Sosial	81.11	69.67
7	Radio	81.00	73.33

Aspek utama yang diukur dalam variabel ini adalah kesadaran publik terhadap platform media sebagai sumber informasi program dan kebijakan pemerintah, yang disandingkan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas sumber tersebut. Berdasarkan hasil survei terbaru, terlihat bahwa lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, atau radio/televisi milik pemerintah daerah memimpin dalam kemampuan menyampaikan informasi kebijakan dengan skor tertinggi sebesar 89.79.

Dominasi ini diikuti secara ketat oleh media cetak dengan skor 87.36 dan platform internet/situs web pada angka 85.78. Tingginya angka pada aspek penyampaian informasi ini mengindikasikan bahwa publik masih melihat institusi media tradisional dan kanal resmi pemerintah sebagai sumber rujukan utama yang stabil, terverifikasi, dan memiliki standar editorial yang jelas. Hal ini kemungkinan besar berakar pada persepsi historis bahwa media konvensional memiliki mekanisme kontrol kualitas, regulasi yang ketat, serta identitas institusional yang kuat yang tidak dimiliki secara penuh oleh platform digital baru.

Meskipun masyarakat semakin terdigitalisasi, data menunjukkan adanya fenomena “paradoks informasi” di mana platform yang paling populer belum tentu menjadi yang paling dipercaya. Televisi konvensional mencatatkan tingkat kepercayaan tertinggi bagi publik dengan skor 77.73, disusul oleh media cetak sebesar 76.83 dan lembaga penyiaran publik sebesar 76.50. Sebaliknya, meskipun internet dan media daring sangat aktif digunakan, tingkat kepercayaan mereka berada pada posisi menengah, bahkan media sosial mencatatkan skor kepercayaan terendah sebesar 69.67.

Kesenjangan atau gap antara kemampuan memberikan informasi dan tingkat kepercayaan pada media sosial mencerminkan kekhawatiran publik yang nyata terhadap maraknya hoaks, bias algoritma, serta kurangnya verifikasi konten di ruang digital. Publik mungkin mengonsumsi informasi dari media sosial karena kecepatan dan kemudahannya, namun mereka tetap melakukan konfirmasi ulang kepada media tradisional atau situs web resmi untuk memastikan validitas informasi kebijakan tersebut.

## 2. Sumber Informasi tentang Program dan Kebijakan Pemerintah

Tabel 3.9. Indeks Sumber Informasi Program dan Kebijakan Pemerintah

NO	PERNYATAAN	SUMBER INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	SUMBER INFORMASI YANG DAPAT DIPERCAYA	SUMBER INFORMASI YANG KOMPETEN/ AHLI
1	Akademisi/Ahli	81.83	82.00	83.00
2	Tokoh Masyarakat	74.00	74.50	71.33
3	Tokoh Agama	71.83	69.83	67.83
4	Pelaku Usaha	67.50	66.00	64.67
5	Influencer	65.17	61.00	61.33
6	Netizen/warganet	62.00	55.50	54.50
7	Komunitas informasi masyarakat (KIM) atau komunitas/kelompok lainnya	59.00	58.17	57.83

Berdasarkan temuan data mengenai kredibilitas sumber informasi terkait program dan kebijakan publik, terlihat pola yang sangat jelas bahwa kelompok akademisi dan ahli menempati posisi puncak secara konsisten di atas angka 80 pada seluruh indikator utama. Dengan skor kemampuan memberikan informasi kebijakan sebesar 81.83, tingkat kepercayaan 82.00, dan skor kompetensi/keahlian mencapai 83.00, kelompok ini diakui publik sebagai rujukan paling otoritatif, saintifik, dan dapat diandalkan.

Dominasi angka ini menunjukkan bahwa di tengah arus informasi yang masif, masyarakat tetap menempatkan validitas berbasis data dan kepakaran di atas sekadar popularitas. Selain kelompok ahli, legitimasi sosial yang dimiliki oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menunjukkan pengaruh yang signifikan, di mana tokoh masyarakat mencatatkan skor kepercayaan sebesar 74.50 dan tokoh agama pada angka 69.83. Hal ini menegaskan bahwa figur-figur yang memiliki kedekatan kultural dan emosional dengan komunitas lokal tetap menjadi jangkar penting dalam memvalidasi kebijakan pemerintah bagi masyarakat di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan kredibilitas yang cukup tajam ketika melihat aktor-aktor digital seperti influencer, netizen (warganet), dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Meskipun influencer memiliki skor kemampuan memberikan informasi sebesar

65.17, tingkat kepercayaan mereka merosot ke angka 61.00, bahkan netizen hanya meraih skor kepercayaan sebesar 55.50 dengan tingkat kompetensi terendah di angka 54.50. Temuan ini mengindikasikan adanya “krisis otoritas” di ruang digital; meskipun aktor-aktor ini memiliki jangkauan (reach) yang luas dan frekuensi penyebaran informasi yang tinggi, publik tetap bersikap skeptis terhadap kedalaman pemahaman dan objektivitas mereka. Rendahnya skor pada Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang berada di kisaran 57.00 hingga 59.00 juga menjadi catatan penting, karena hal ini menunjukkan bahwa kelompok bentukan yang diharapkan menjadi jembatan informasi pemerintah belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan kompetensi yang setara dengan tokoh masyarakat formal maupun akademisi.

Sebagai langkah solutif dalam strategi komunikasi publik, pemerintah perlu mengadopsi model kolaborasi yang menjembatani antara “otoritas” dan “aksesibilitas”. Mengingat akademisi adalah pemegang kepercayaan tertinggi, keterlibatan mereka dalam menjelaskan substansi kebijakan harus lebih dikedepankan untuk membangun narasi yang berbasis bukti. Namun, untuk mengatasi keterbatasan jangkauan para ahli, pemerintah dapat mendorong aliansi strategis di mana para influencer dan aktor digital bertugas sebagai penguat gaung (amplifier) yang narasi dasarnya telah divalidasi oleh para ahli dan

tokoh masyarakat. Penguatan kapasitas bagi KIM dan aktor lokal juga mendesak dilakukan agar mereka tidak hanya sekadar menjadi penyalur informasi, tetapi juga memiliki kompetensi yang diakui publik. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya

sampai ke telinga masyarakat secara luas melalui media sosial, tetapi juga diterima sebagai informasi yang valid karena didukung oleh sumber-sumber yang kompeten dan terpercaya

### 3. Jenis/Bentuk Informasi Tentang Program Pemerintah

Tabel 3.10. Indeks Bentuk Informasi tentang Program Pemerintah

NO	PERNYATAAN	JENIS/BENTUK INFORMASI TENTANG PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	JENIS/BENTUK INFORMASI YANG DAPAT DIPERCAYA
1	Situs web resmi pemerintah	83,83	76.67
2	Siaran Berita	82,17	78.50
3	Artikel Berita	80,83	76.67
4	Aplikasi pemerintah	80,83	78.33
5	Media sosial pemerintah	80,33	77.00
6	Kolaborasi Pemerintah dan Influencer	72,83	68.33

Saluran komunikasi resmi yang dikelola langsung oleh institusi pemerintah memegang kendali utama dalam hal validitas dan kepercayaan publik. Situs web resmi pemerintah menempati posisi tertinggi dalam kemampuan memberikan informasi program dan kebijakan dengan skor 83,83, yang diikuti secara konsisten oleh siaran berita (82,17) dan artikel berita (80,83). Tingginya angka pada aspek ini menegaskan bahwa publik mengandalkan kanal yang memiliki struktur verifikasi formal dan otoritas kelembagaan sebagai rujukan utama.

Menariknya, instrumen digital resmi seperti aplikasi pemerintah dan media sosial pemerintah juga menunjukkan performa yang sangat solid, dengan tingkat kepercayaan publik yang masing-masing mencapai 78,33 dan 77,00. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi digital birokrasi telah berhasil membangun ekosistem informasi yang diakui validitasnya, di mana publik mulai menerima konten media sosial selama konten tersebut diproduksi dan dikelola langsung oleh akun resmi lembaga pemerintah.

Namun, temuan ini juga mengungkap adanya tantangan signifikan pada aspek kolaborasi

eksternal, khususnya yang melibatkan aktor digital. Data menunjukkan korelasi negatif yang konsisten antara keterlibatan pihak ketiga dengan tingkat kepercayaan publik; di mana jenis informasi yang berasal dari kolaborasi pemerintah dan influencer menempati posisi terendah dengan skor kemampuan informasi sebesar 72,83 dan tingkat kepercayaan hanya di angka 68,33. Angka ini secara eksplisit mencerminkan skeptisisme publik terhadap objektivitas dan keandalan informasi kebijakan jika disampaikan melalui perantara influencer. Temuan ini selaras dengan data pada bagian sebelumnya yang menunjukkan rendahnya persepsi kompetensi terhadap aktor digital sebagai individu. Dengan demikian, terdapat pesan yang kuat dari publik bahwa meskipun influencer memiliki jangkauan audiens yang luas, otoritas dan institusionalitas tetap menjadi variabel penentu utama dalam menilai kredibilitas sebuah kebijakan negara.

Secara solutif, temuan ini memberikan arah strategis bagi pemerintah untuk tetap memprioritaskan “kanal mandiri” (owned media) seperti situs web dan aplikasi resmi sebagai pusat informasi utama (single source of truth). Strategi penggunaan influencer

dalam komunikasi publik perlu ditinjau ulang atau direposisi bukan sebagai penyampai substansi kebijakan, melainkan hanya sebagai pemantik perhatian (*awareness trigger*) yang mengarahkan audiens kembali ke saluran resmi pemerintah. Untuk memperkecil gap kepercayaan pada kolaborasi digital, pemerintah harus memastikan bahwa setiap

konten kolaboratif tetap menonjolkan atribut kelembagaan dan akurasi data yang kuat. Dengan memperkuat integritas informasi pada siaran berita dan kanal digital resmi, pemerintah dapat memastikan bahwa pesan kebijakan tidak hanya tersebar secara masif, tetapi juga diterima dengan tingkat keyakinan yang tinggi oleh masyarakat.

## Pengantar Dimensi Output

Pengukuran dimensi output dalam Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) bertujuan untuk melihat sejauh manaproses komunikasi publik yang dilakukan pemerintah mampu menghasilkan luaran yang berkualitas, inklusif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dimensi ini tidak hanya menilai efektivitas penyampaian informasi, tetapi juga menilai bagaimana komunikasi tersebut memenuhi prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi dasar dalam praktik komunikasi pembangunan. Dengan demikian, dimensi output memberikan gambaran tentang kualitas nyata dari interaksi informasi antara pemerintah dan publik sebagai hasil dari berbagai strategi komunikasi yang dijalankan.

Pada aspek prinsip komunikasi publik, hasil pengukuran menunjukkan indeks sebesar 73,82, menandakan bahwa secara umum pemerintah telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, relevansi, serta keterbukaan informasi pada tingkat yang cukup baik. Sementara itu, variabel pelibatan pemangku kepentingan dan informasi terpercaya sama-sama mencatat indeks 74,10, mengindikasikan bahwa partisipasi aktor terkait dalam proses komunikasi serta kualitas dan kredibilitas informasi yang diterima masyarakat berada pada level yang relatif kuat. Keduanya mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membangun ekosistem komunikasi yang kolaboratif dan berbasis kepercayaan.

Secara geografis, capaian tertinggi dalam dimensi output ini ditemukan pada tiga provinsi, yaitu Maluku, Kalimantan Tengah, dan Riau, yang menunjukkan performa lebih unggul dalam penerapan prinsip komunikasi publik, keterlibatan pemangku kepentingan,

dan penyediaan informasi yang dipercaya masyarakat. Keberhasilan provinsi-provinsi ini dapat menjadi contoh praktik baik bagi wilayah lain dalam meningkatkan kualitas output komunikasi pembangunan. Temuan ini secara keseluruhan menegaskan bahwa meskipun masih terdapat ruang perbaikan, kinerja komunikasi publik di berbagai daerah menunjukkan arah yang positif menuju pengelolaan informasi publik yang lebih kredibel, partisipatif, dan sesuai prinsip tata kelola komunikasi yang baik.

## Capaian Indeks Dimensi Output Publik Kunci

### Prinsip Komunikasi Publik

Hasil pengukuran terhadap indikator prinsip komunikasi publik menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh skor tertinggi pada aspek memberikan informasi kepada publik dengan nilai 87,50. Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi dasar komunikasi publik, yakni menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan menjadi kekuatan utama dalam praktik komunikasi pembangunan. Tingginya skor pada indikator ini juga mencerminkan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik, yang menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dalam aspek penyampaian detail kebijakanskor berada pada kisaran 74–78, termasuk indikator

memberikan informasi yang jelas mengenai program, anggaran, hasil kampanye, dan dampak kampanye kepada publik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi pemerintah sudah berjalan cukup baik, masih terdapat ruang penguatan terutama dalam penyampaian informasi yang lebih komprehensif dan mudah dipahami publik. Keterbatasan penjelasan mengenai anggaran, hasil, dan dampak program berpotensi menciptakan kesenjangan informasi yang dapat menghambat masyarakat dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah.

Tabel 3.1. Indikator Prinsip Komunikasi Publik

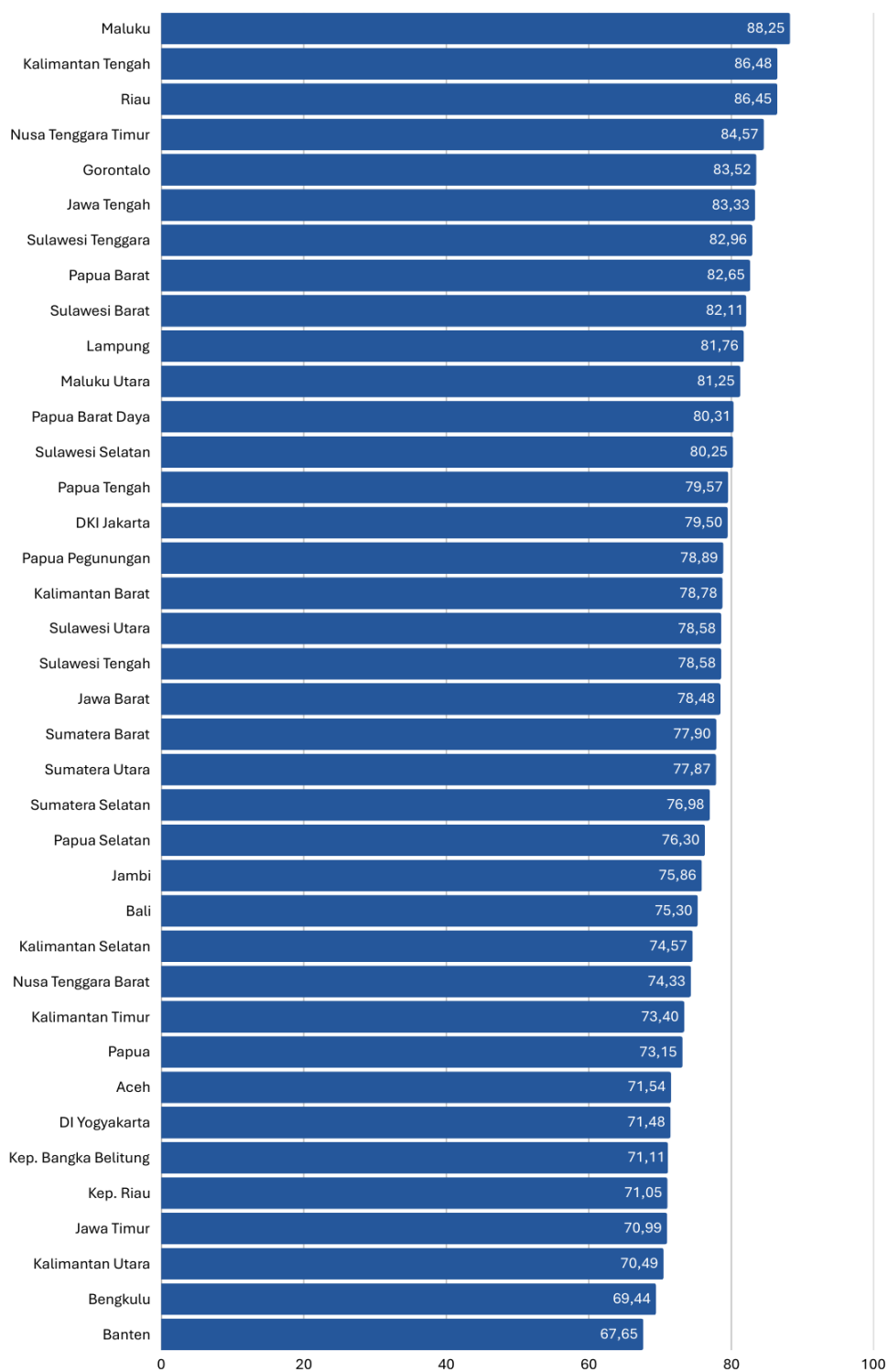
No	Indikator	Indeks
1	Memberikan informasi kepada publik	87,50
2	Memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi	82,17
3	Memberikan informasi yang jelas mengenai program dan kebijakan kepada publik	78,17
4	Memberikan informasi yang jelas mengenai anggaran program dan kebijakan kepada publik	77,17
5	Memberikan informasi yang jelas mengenai hasil yang diharapkan dari kampanye kepada publik	76,17
6	Memberikan informasi yang jelas mengenai dampak dari kampanye kepada publik	74,67
7	Memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok (contoh: partai politik, ormas, golongan, dan suku)	70,33
8	Mendengarkan masukan masyarakat ketika terjadi situasi darurat atau krisis	76,67
9	Memperbaiki kebijakan dan program mereka berdasarkan pengalaman atau hasil yang sudah terjadi sebelumnya	77,17
Indeks Nasional		77,78

Indikator dengan skor tinggi berikutnya adalah memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dengan nilai 82,17. Hal ini menunjukkan persepsi masyarakat bahwa pemerintah relatif konsisten menempatkan pelayanan publik sebagai fokus utama dalam komunikasi kebijakan. Namun, ketika indikator yang sama diterapkan pada konteks kepentingan kelompok seperti partai politik, ormas, atau golongan tertentu, nilainya turun cukup signifikan menjadi 70,33. Penurunan ini mengindikasikan adanya keraguan publik terhadap netralitas pemerintah dalam menavigasi kepentingan kelompok, sehingga menjadi area penting yang perlu diperbaiki untuk memperkuat kepercayaan publik.

Dalam aspek penyampaian detail kebijakan, skor berada pada kisaran 74–78, termasuk indikator memberikan informasi yang jelas mengenai program, anggaran, hasil kampanye, dan dampak kampanye kepada publik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi pemerintah sudah berjalan cukup baik, masih terdapat ruang penguatan terutama dalam penyampaian informasi yang lebih komprehensif dan mudah dipahami publik. Keterbatasan penjelasan mengenai anggaran, hasil, dan dampak program berpotensi menciptakan kesenjangan informasi yang dapat menghambat masyarakat dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah.

Terakhir, indikator mendengarkan masukan masyarakat ketika terjadi situasi darurat atau krisis serta memperbaiki kebijakan berdasarkan pengalaman sebelumnya masing-masing mencatat skor 76,67 dan 77,17. Angka ini menggambarkan bahwa kemampuan pemerintah untuk belajar dari pengalaman dan merespons kebutuhan masyarakat sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Respons krisis yang lebih cepat, adaptif, dan berbasis umpan balik publik masih perlu diperkuat agar komunikasi pemerintah tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif dan responsif. Secara keseluruhan, rata-rata indeks 73,82 menunjukkan bahwa prinsip komunikasi publik berada pada level yang solid, meski tetap membutuhkan peningkatan di sejumlah aspek strategis untuk mencapai kualitas komunikasi yang ideal.

Gambar 3.10 Tingkat Prinsip Komunikasi Publik Per Provinsi



**Indeks Nasional**

**77,78**

Temuan indeks partisipasi publik per provinsi menunjukkan adanya variasi tingkat keterlibatan masyarakat yang cukup signifikan di seluruh Indonesia. Provinsi Maluku, Kalimantan Tengah, dan Riau menempati posisi tiga teratas dengan skor sangat tinggi, yakni masing-masing 88,25, dan 86,45. Skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini memiliki tingkat partisipasi yang kuat dalam proses komunikasi pembangunan dan informasi publik. Tingginya indeks dapat mengindikasikan adanya saluran komunikasi yang efektif, kedekatan sosial antara pemerintah dan masyarakat, serta budaya partisipasi yang sudah terbangun dengan baik di tingkat lokal.

Provinsi-provinsi seperti Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat yang berada pada kisaran skor 80–84 juga menunjukkan performa partisipasi publik yang tinggi. Wilayah-wilayah ini tampaknya memiliki mekanisme yang cukup solid dalam mendorong masyarakat terlibat

dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian umpan balik terhadap program pemerintah. Tingginya skor pada provinsi di kawasan timur dan tengah Indonesia juga menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak selalu identik dengan daerah yang lebih maju secara ekonomi; faktor sosial-budaya, kedekatan komunitas, dan struktur pemerintahan lokal dapat menjadi pendorong kuat.

Kelompok provinsi dengan skor sekitar 78–80, seperti Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Hingga Papua Tengah, menunjukkan tingkat partisipasi publik yang baik namun masih berada sedikit di bawah provinsi-provinsi terbaik. Kategori ini mencerminkan keterlibatan masyarakat yang cukup stabil tetapi mungkin belum merata di seluruh wilayah atau belum ditopang oleh kebijakan komunikasi yang konsisten. Potensi perbaikan dapat diarahkan pada penguatan kanal komunikasi dua arah dan peningkatan literasi publik mengenai pentingnya partisipasi dalam kebijakan pembangunan.

## Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pengukuran variabel pelibatan pemangku kepentingan untuk melihat sejauh mana pemerintah melibatkan aktor-aktor berikut dalam proses perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Pemangku kepentingan yang dilibatkan diantaranya adalah akademis/peneliti, pelaku usaha, instansi pemerintah lainnya, KIM (komunitas Informasi Masyarakat) dan media massa.

Berdasarkan hasil survei akademisi dan instansi pemerintah lainnya mendapatkan skor tertinggi, baik dalam perancangan, pelaksanaan maupun evaluasi dengan skor indeks 86,50 dan 86,00. Selain itu KIM dan media massa yang dipersepsikan kurang keterlibatannya oleh pemerintah dengan skor 69,72 dan 73,06. Dengan skala indeks nasional adalah 70,85.

Tabel 3.2. Persepsi Publik Pelibatan Pemangku Kepentingan

INDIKATOR	PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN			SKOR
	Merancang	Melaksanakan	Mengevaluasi	INDEKS
Akademisi/Peneliti	87,33	86,00	86,17	86,50
Pelaku Usaha	75,5	76,00	73,17	74,89
Instansi Pemerintah Lainnya	86,17	86,00	85,93	86,00
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	73,5	68,83	66,83	69,72
Media Massa	73,17	72,33	73,67	73,06
Kelompok Perempuan	72,33	73,33	72,17	72,61
Kelompok Anak	64,33	64,33	63,17	63,94
Kelompok lanjut usia	64,33	65,00	64,00	64,44
Kelompok Disabilitas	65,00	65,5	65,17	65,22
Kelompok 3 T	51,33	53,67	51,33	52,11

Tabel 3.3. Pelibatan Pemangku Kepentingan Per Provinsi

NO	PROVINSI	SKOR
1	Maluku	89,09
2	Riau	85,45
3	Sulawesi Selatan	82,58
4	Kalimantan Tengah	82,54
5	Papua Pegunungan	80,82
6	Sulawesi Tenggara	79,58
7	Sulawesi Utara	78,77
8	Gorontalo	78,25
9	Sulawesi Tengah	77,85
10	Papua Tengah	76,78
11	Nusa Tenggara Timur	75,07
12	Papua Barat Daya	73,65
13	Papua Barat	73,5
14	Jawa Tengah	71,26
15	Jambi	71,25
16	Papua Selatan	70,32
17	Bali	70,25
18	Kalimantan Timur	70,25
19	Sumatera Selatan	69,85
20	Sumatera Utara	69,78
21	Sulawesi Barat	69,58
22	Sumatera Barat	69,25
23	Maluku Utara	68,58
24	Nusa Tenggara Barat	68,58
25	Kep. Bangka Belitung	68,52
26	Kalimantan Selatan	68,22
27	Kalimantan Barat	65,93
28	Kep. Riau	65,25
29	Lampung	64,58
30	Aceh	63,65
31	DI Yogyakarta	62,74
32	DKI Jakarta	62,58
33	Jawa Barat	62,58
34	Bengkulu	61,25
35	Jawa Timur	61,25
36	Kalimantan Utara	61,25
37	Papua	61,25
38	Banten	60,41
NASIONAL		70,85

Provinsi-provinsi dengan kategori Sangat Baik, seperti Maluku (89,09), Riau (85,45), Sulawesi Selatan (82,58), serta beberapa daerah di Papua dan Indonesia Timur, menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan kolaborasi yang kuat dan partisipatif. Capaian ini mengindikasikan adanya mekanisme konsultasi yang intensif, keterbukaan terhadap masukan publik, dan upaya nyata dalam melibatkan kelompok masyarakat yang beragam. Keberhasilan ini sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan pembangunan yang tinggi dan struktur sosial yang menempatkan komunikasi komunitas sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, kelompok provinsi dengan kategori Baik, seperti Jawa Tengah, Lampung, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta, menunjukkan konsistensi dalam praktik pelibatan pemangku kepentingan, meskipun masih memiliki ruang untuk meningkatkan kedalaman interaksi dan kualitas dialog publik. Banyak dari provinsi ini memiliki karakteristik keragaman penduduk yang tinggi dan struktur birokrasi yang kompleks, sehingga tantangan utama terletak pada penyelarasan kepentingan berbagai aktor serta memastikan bahwa setiap suara mendapat ruang yang proporsional. Meski demikian, performa mereka tetap kuat dan memberikan kontribusi penting terhadap skor nasional.

Di sisi lain, sejumlah daerah yang berada pada kategori Sedang seperti Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Aceh, hingga Papua, mengindikasikan adanya tantangan dalam mengoptimalkan keterlibatan pemangku kepentingan. Tantangan tersebut bisa berupa keterbatasan infrastruktur komunikasi, rendahnya literasi digital, kurangnya mekanisme dialog yang terstruktur, atau dinamika sosial-politik yang mempengaruhi keterbukaan partisipasi. Meskipun berada pada kategori sedang, provinsi-provinsi ini tetap memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik melalui penguatan forum konsultasi, pemanfaatan teknologi komunikasi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kolaborasi lintas-aktor secara lebih efektif.

## Informasi Terpercaya

Pengukuran variabel Informasi Terpercaya dalam penelitian ini mencerminkan sejauh mana publik menilai kualitas informasi yang disampaikan pemerintah melalui enam indikator utama, yaitu pemahaman terhadap informasi, kebenaran dan kesesuaian informasi dengan kondisi nyata, akurasi detail yang diberikan, ketidakmenyesatkan isi informasi, kemudahan informasi untuk dipahami, serta ketepatan waktu dalam penyampaiannya. Berdasarkan hasil analisis, variabel ini memperoleh indeks nasional sebesar 78,19, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai informasi pemerintah berada pada kategori baik, meskipun tetap terdapat ruang perbaikan untuk mencapai tingkat kepercayaan informasi yang lebih optimal.

*Tabel 3.4 Persepsi Publik Terhadap Informasi Terpercaya*

No	Indikator	Indeks
1	Saya memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah	86,50
2	Informasi yang diberikan pemerintah benar (sesuai dengan kondisi sebenarnya/yang nyata)	77,17
3	Informasi disampaikan dengan akurat (misalnya jumlah, tanggal dan rincian lainnya)	77,17
4	Informasi tidak menimbulkan tidak menyesatkan	75,83
5	Informasi mudah dipahami publik	79,33
6	Informasi disampaikan tepat waktu (pada saat yang diperlukan/ relevan)	73,17
<b>NASIONAL</b>		<b>78,19</b>

Hasil pengukuran terhadap variabel Informasi Terpercaya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah bervariasi pada setiap indikator. Indikator dengan capaian tertinggi adalah

“Saya memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah” dengan nilai 86,50, menandakan bahwa mayoritas masyarakat dapat menangkap pesan yang disampaikan pemerintah dengan jelas. Indikator “Informasi mudah dipahami publik” juga memperoleh skor cukup tinggi sebesar 79,33, yang mengonfirmasi bahwa gaya penyampaian pemerintah dinilai cukup komunikatif dan tidak terlalu kompleks bagi khalayak luas. Dua indikator ini menegaskan bahwa aspek keterpahaman merupakan kekuatan utama dalam kualitas informasi pemerintah. Sementara itu, beberapa indikator lain menunjukkan nilai yang lebih rendah sehingga membutuhkan perhatian khusus. Indikator terkait ketepatan waktu, yaitu “Informasi disampaikan tepat waktu”, memiliki skor terendah sebesar 73,17, yang mengindikasikan bahwa publik masih merasakan keterlambatan dalam menerima informasi yang relevan.

Selain itu, aspek kebenaran dan akurasi informasi masing-masing berada pada angka 77,17, serta indikator “Informasi tidak menyesatkan” dengan skor 75,83, menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan penyajian fakta yang lebih presisi dan bebas ambiguitas. Secara keseluruhan, dengan indeks nasional 78,19, kualitas informasi pemerintah dinilai baik, namun peningkatan pada ketepatan waktu dan akurasi dapat semakin memperkuat kepercayaan publik. Hasil pengukuran tingkat Informasi Terpercaya di berbagai provinsi menunjukkan adanya variasi yang cukup lebar antarwilayah, meskipun secara nasional indeks berada pada angka 78,19. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Maluku (92,04) dan Kalimantan Tengah (90,18), yang menempati posisi unggul dalam persepsi publik terhadap keandalan informasi yang diberikan pemerintah. Skor yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di wilayah tersebut berhasil membangun kredibilitas komunikasi publik melalui penyampaian informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami. Keberhasilan ini kemungkinan dipengaruhi oleh efektivitas saluran komunikasi lokal serta kedekatan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Provinsi-provinsi lain yang juga berada pada kategori tinggi, seperti Riau, Jawa Tengah, Papua Tengah, Papua Pegunungan, hingga Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap informasi pemerintah cukup positif di sebagian besar wilayah Indonesia. Skor yang berada pada rentang 80–83 menunjukkan konsistensi dalam kualitas penyampaian informasi, terutama dalam aspek keterpahaman dan kebenaran informasi. Daerah-daerah ini tampaknya mampu mempertahankan kualitas komunikasi publik secara stabil, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan aspek akurasi mendetail dan ketepatan waktu penyampaian informasi.

Namun, sejumlah provinsi berada pada kategori skor menengah hingga rendah, seperti Aceh (69,26), Banten (69,17), DIY (69,07), serta beberapa wilayah lain seperti Gorontalo, Banten, dan Jawa Barat, yang memiliki skor antara 66–68. Skor ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas informasi, baik dari segi akurasi data, kecepatan penyampaian, maupun kesesuaian informasi dengan kondisi nyata. Faktor-faktor yang mungkin berpengaruh meliputi kompleksitas struktural pemerintahan, tingginya jumlah penduduk yang dilayani, atau kurang optimalnya infrastruktur komunikasi di beberapa daerah.

Di sisi terbawah, Kalimantan Utara (66,67) menjadi provinsi dengan skor informasi terpercaya terendah, mengindikasikan perlunya peningkatan signifikan dalam penyampaian informasi publik. Rendahnya skor ini dapat mencerminkan isu ketertinggalan akses informasi, kurangnya literasi digital, atau lemahnya mekanisme verifikasi dan distribusi informasi di tingkat lokal. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa meskipun kinerja nasional berada pada kategori baik, kesenjangan antardaerah masih cukup mencolok. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih adaptif dan pemerataan penguatan kapasitas komunikasi di daerah agar kualitas informasi yang diterima masyarakat dapat lebih beragam di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 3.5 Persepsi Publik Terhadap Informasi Terpercaya Per Provinsi

NO	PROVINSI	SKOR
1	Maluku	92,04
2	Kalimantan Tengah	90,18
3	Riau	88,33
4	Jawa Tengah	85,93
5	Papua Tengah	85,65
6	Papua Pegunungan	85,65
7	Papua Selatan	85,46
8	Maluku Utara	85,09
9	Sulawesi Selatan	84,17
10	Nusa Tenggara Timur	83,70
11	Papua Barat	83,43
12	Sulawesi Barat	83,24
13	Papua	82,96
14	Sulawesi Utara	82,96
15	Lampung	81,48
16	Kep. Bangka Belitung	80,65
17	Sulawesi Tenggara	80,46
18	Sulawesi Tengah	78,33
19	Papua Barat Daya	78,15
20	Sumatera Utara	77,78
21	Sumatera Selatan	77,41
22	Kalimantan Timur	76,57
23	Nusa Tenggara Barat	76,39
24	Kalimantan Barat	76,20
25	Sumatera Barat	76,17
26	Jambi	73,70
27	Kalimantan Selatan	72,22
28	Jawa Timur	71,94
29	Kep. Riau	71,67
30	Gorontalo	71,11
31	Bali	70,74
32	Bengkulu	70,74
33	Aceh	69,26
34	Banten	69,17
35	DI Yogyakarta	69,07
36	Jawa Barat	68,98
37	DKI Jakarta	67,39
38	Kalimantan Utara	66,67
NASIONAL		78,19

Tabel 3.6 Dimensi Output Per Provinsi

NO	PROVINSI	DIMENSI OUTPUT			DIMENSI OUTPUT
		PRINSIP KOMUNIKASI PUBLIK	PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	INFORMASI TERPERCAYA	
1	Maluku	88,25	89,09	92,04	89,79
2	Riau	86,45	85,45	90,18	87,36
3	Kalimantan Tengah	86,48	82,54	88,33	85,78
4	Sulawesi Selatan	80,25	82,58	84,17	82,33
5	Papua Pegunungan	78,89	80,82	85,46	81,72
6	Nusa Tenggara Timur	84,57	75,07	83,7	81,11
7	Sulawesi Tenggara	82,96	79,58	80,46	81,00
8	Jawa Tengah	83,33	71,26	85,93	80,17
9	Sulawesi Utara	78,58	78,77	82,96	80,10
10	Papua Barat Daya	80,31	73,65	85,65	79,87
11	Papua Barat	82,65	73,5	83,43	79,86
12	Sulawesi Barat	82,11	69,58	83,24	78,31
13	Maluku Utara	81,25	68,58	85,09	78,31
14	Sulawesi Tengah	78,58	77,85	78,33	78,25
15	Papua Tengah	79,57	76,78	78,15	78,17
16	Gorontalo	83,52	78,25	71,11	77,63
17	Papua Selatan	76,3	70,32	85,65	77,42
18	Lampung	81,76	64,58	81,48	75,94
19	Sumatera Utara	77,87	69,78	77,78	75,14
20	Sumatera Selatan	76,98	69,85	77,41	74,75
21	Sumatera Barat	77,9	69,25	76,17	74,44
22	Kalimantan Barat	78,78	65,93	76,2	73,64
23	Jambi	75,86	71,25	73,7	73,60
24	Kep. Bangka Belitung	71,11	68,52	80,65	73,43
25	Kalimantan Timur	73,4	70,25	76,57	73,41
26	Nusa Tenggara Barat	74,33	68,58	76,39	73,10
27	Papua	73,15	61,25	82,96	72,45
28	Bali	75,3	70,25	70,74	72,10
29	Kalimantan Selatan	74,57	68,22	72,22	71,67
30	Jawa Barat	78,48	62,58	68,98	70,01
31	DKI Jakarta	79,5	62,58	67,39	69,82
32	Kep. Riau	71,05	65,25	71,67	69,32
33	Aceh	71,54	63,65	69,26	68,15
34	Jawa Timur	70,99	61,25	71,94	68,06
35	DI Yogyakarta	71,48	62,74	69,07	67,76
36	Bengkulu	69,44	61,25	70,74	67,14
37	Kalimantan Utara	70,49	61,25	66,67	66,14
38	Banten	67,65	60,41	69,17	65,74
	<b>NASIONAL</b>	<b>77,78</b>	<b>70,85</b>	<b>78,19</b>	<b>75,61</b>

# Pengantar Dimensi Outcome

Keberhasilan suatu pemerintahan dalam membangun komunikasi dengan warganya tidak hanya diukur dari intensitas dan kualitas pesan yang disampaikan, tetapi lebih jauh pada dampak yang dihasilkan dari proses komunikasi tersebut. Dimensi outcome dalam Indeks Komunitas Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) hadir untuk menjawab tantangan pengukuran ini, dengan fokus pada tiga variabel kunci yang merefleksikan keadaan akhir dari interaksi antara pemerintah dan publik. Ketiga variabel kepercayaan publik, partisipasi publik, dan pemenuhan hak publik menjadi barometer fundamental untuk menilai sejauh mana komunikasi pembangunan telah membuahkan hasil yang bermakna dan berkelanjutan.

Laporan ini memaparkan temuan utama dari pengukuran dimensi outcome KPIP, yang menunjukkan capaian yang cukup seimbang dan positif di ketiga variabel. Kepercayaan publik terhadap pemerintah tercatat pada indeks 73,77, sementara partisipasi publik mencapai 73,32 dan pemenuhan hak publik berada di angka 74,16. Secara keseluruhan, angka-angka ini tidak hanya mencerminkan tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat, tetapi juga mengindikasikan adanya ruang bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, mendorong partisipasi yang lebih substantif, serta memperkuat perlindungan hak-hak publik dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, laporan ini

disusun sebagai bahan evaluasi kritis. Dengan menganalisis capaian pada setiap variabel, diharapkan dapat diidentifikasi area-area yang sudah berjalan dengan baik serta aspek-aspek yang masih memerlukan intervensi dan perbaikan lebih lanjut. Pemahaman mendalam terhadap hasil pengukuran *outcome* ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perumusan strategi komunikasi pembangunan yang lebih efektif dan responsif di masa mendatang, guna memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan publik.

## Capaian Indeks Dimensi Outcome Publik Kunci

### Kepercayaan Publik

Pengukuran variabel kepercayaan publik memiliki dua indikator yaitu tingkat kepercayaan dan tingkat dukungan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Berdasarkan data yang tercantum, Indeks Kepercayaan Publik secara keseluruhan mencapai 77,91 yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup positif. Angka ini merupakan

rata-rata dari dua komponen utama: tingkat kepercayaan terhadap institusi dan tingkat dukungan terhadap program/kebijakan. Secara umum, skor ini mengindikasikan bahwa terdapat fondasi relasi yang baik antara publik dengan pemerintah, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

Tabel 3.7 Tingkat Kepercayaan dan Dukungan Publik Terhadap Pemerintah

Pemerintah	Kepercayaan Publik	Dukungan Publik
Pusat	82,79	80,72
Provinsi	77,19	76,32
Daerah	76,86	73,67
Indeks Kepercayaan Publik		77,92

Data menunjukkan pola yang jelas di setiap tingkat pemerintahan. Kepercayaan dan dukungan tertinggi selalu diberikan kepada Pemerintah Pusat (kepercayaan 82,79; dukungan 80,72). Kemudian diikuti oleh Pemerintah Provinsi (kepercayaan 77,19; dukungan 76,32), dan terakhir Pemerintah Daerah (kepercayaan 76,86; dukungan 73,67). Artinya, semakin dekat tingkat pemerintahan dengan masyarakat, tingkat dukungan terhadap kebijakannya justru cenderung lebih rendah.

Sebuah temuan penting terlihat pada level Pemerintah Daerah. Terdapat perbedaan antara kepercayaan pada institusinya dan dukungan terhadap kebijakannya. Masyarakat cukup percaya pada Pemerintah Daerah (76,86), tetapi dukungan mereka terhadap

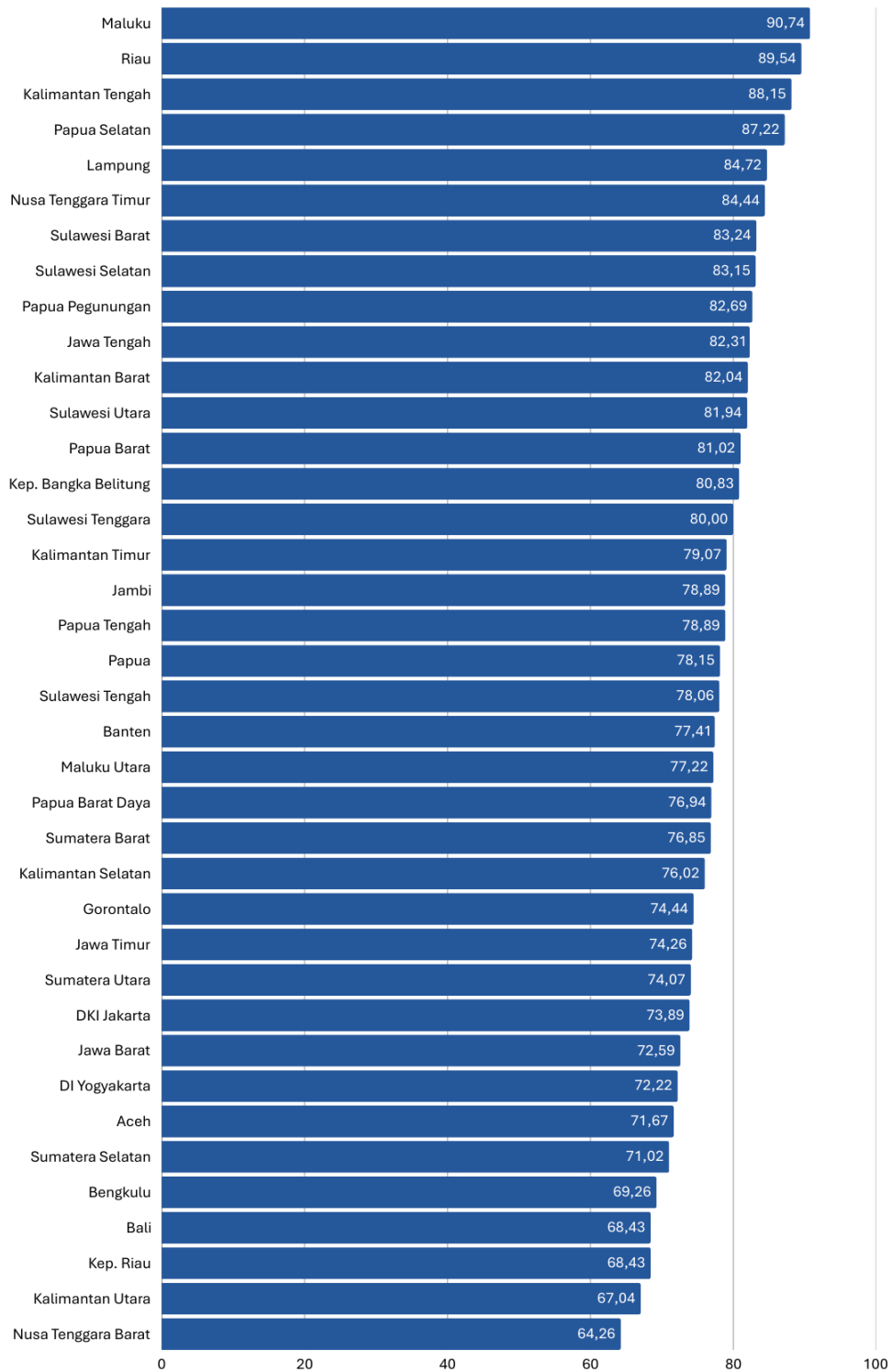
program yang dijalankan lebih rendah (73,67). Ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak langsung berarti dukungan penuh.

Rendahnya dukungan terhadap program Pemerintah Daerah dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin programnya dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan warga, sosialisasinya kurang jelas, atau pelaksanaannya di lapangan belum optimal. Publik menilai program konkret di daerah mereka dengan lebih kritis. Bagi Pemerintah Daerah, hasil ini menjadi masukan untuk perbaikan. Fokusnya perlu ditingkatkan pada perbaikan kualitas program, memastikan program tepat sasaran, dan meningkatkan komunikasi kepada masyarakat tentang manfaat kebijakan tersebut. Tujuannya untuk menaikkan tingkat dukungan agar sejalan dengan tingkat kepercayaan yang sudah ada.

Kesimpulannya, indeks 77,92 adalah dasar yang baik. Pemerintah Pusat dapat mempertahankan kinerjanya. Sementara Pemerintah Provinsi dan Daerah, khususnya Pemerintah Daerah, perlu lebih memperbaiki program dan komunikasi mereka untuk meningkatkan dukungan masyarakat di tingkat lokal.

Berdasarkan data persepsi publik terhadap tingkat kepercayaan pada pemerintah per provinsi, terlihat bahwa secara nasional kepercayaan publik berada dalam kategori Baik dengan skor 77,92. Skor ini mencerminkan bahwa secara umum masyarakat masih memiliki tingkat kepercayaan yang positif terhadap pemerintah. Namun, pencapaian nasional ini tersusun dari variasi kondisi yang cukup beragam di tingkat provinsi

Gambar 3.11 Kenceraaan Publik Per Provinsi



**Total**

**77,92**

## Partisipasi Publik

Pengukuran variabel partisipasi publik dilakukan dengan dua perspektif, yaitu menilai persepsi responden publik kunci terhadap keterlibatan masyarakat dan penilaian terhadap diri sendiri dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menilai masyarakat sudah dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kebijakan pemerintah. Hal ini terukur dengan indeks yang cukup tinggi di atas 70 dari 100. Indeks ini berada di kategori baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa indeks partisipasi publik berada pada angka 73,32 yang mencerminkan kategori sedang menuju tinggi dalam pelibatan masyarakat pada proses kebijakan pemerintah. Nilai ini dihitung dari tiga tahapan utama, yaitu penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kebijakan pemerintah yang dinilai melalui dua perspektif pertanyaan. Secara umum, masyarakat sudah mulai dilibatkan, tetapi tingkat partisipasinya belum merata dan masih menyisakan ruang yang cukup besar untuk peningkatan.

Sementara itu, ketika responden diminta menilai seberapa besar partisipasi masyarakat berdasarkan pengalaman langsung, nilai indeks sedikit lebih rendah. Penyusunan program dan kebijakan memperoleh skor 68,71, pelaksanaan 66,52, dan evaluasi 70,33 yang menunjukkan bahwa pengalaman faktual partisipasi publik dirasakan lebih rendah dibanding sekadar pengetahuan umum responden. Perbedaan pola ini mengisyaratkan adanya gap antara persepsi normatif bahwa masyarakat “dilibatkan” dengan pengalaman nyata keterlibatan yang dirasakan oleh responden. Secara substantif, temuan ini menegaskan bahwa partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah sudah berjalan tetapi masih cenderung prosedural dan belum

sepenuhnya bermakna di semua tahapan. Tahap evaluasi yang sedikit lebih tinggi dalam pengalaman responden dapat dibaca sebagai peluang untuk memperkuat mekanisme umpan balik publik terhadap program yang telah dijalankan. Untuk meningkatkan indeks partisipasi publik, pemerintah perlu memperluas akses dan kanal partisipasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, serta memastikan bahwa masukan masyarakat benar-benar memengaruhi keputusan kebijakan.

Tabel 3.8 Tingkat Partisipasi Publik Terhadap Pemerintah

INDIKATOR	PENGETAHUAN PELIBATAN MASYARAKAT	PELIBATAN RESPONDEN
Penyusunan program dan kebijakan pemerintah	78,17	68,71
Pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah	78,83	66,52
Evaluasi program dan kebijakan pemerintah	77,33	70,33
Indeks Partisipasi Publik	73,32	

Yang menarik, delapan provinsi dengan kategori Sangat Baik didominasi oleh wilayah di luar Jawa, dengan Maluku menempati posisi tertinggi (88,16). Provinsi-provinsi di kawasan Indonesia Timur seperti Kalimantan Tengah, NTT, dan beberapa provinsi di Papua juga menunjukkan kinerja partisipasi yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik partisipasi publik justru berkembang lebih baik di beberapa wilayah yang secara konvensional sering dianggap tertinggal.

NO	PROVINSI	SKOR
1	Maluku	88,16
2	Kalimantan Tengah	85,88
3	Papua Pegunungan	84,16
4	Lampung	83,5
5	Kep. Riau	80,2
6	Nusa Tenggara Timur	79,98
7	Papua Barat Daya	79,32
8	Riau	79,15
9	Sulawesi Selatan	78,88
10	Papua Selatan	78,81
11	Banten	78,66
12	Papua Tengah	78,56
13	Jawa Tengah	78,11
14	Bali	78,07
15	Papua Barat	76,68
16	Sulawesi Barat	76,46
17	Kep. Bangka Belitung	75,56
18	Kalimantan Utara	74,70
19	Jambi	73,82
20	Kalimantan Selatan	73,16
21	Sulawesi Utara	72,28
22	Bengkulu	72,06
23	DI Yogyakarta	71,62
24	Gorontalo	71,40
25	Kalimantan Timur	71,18
26	Maluku Utara	71,18
27	Sulawesi Tenggara	70,74
28	Aceh	70,12
29	Kalimantan Barat	69,42
30	Jawa Barat	68,12
31	DKI Jakarta	64,14
32	Nusa Tenggara Barat	63,92
33	Sulawesi Tengah	63,26
34	Sumatera Barat	62,82
35	Sumatera Selatan	61,06
36	Sumatera Utara	60,62
37	Jawa Timur	60,18
38	Papua	60,18
<b>NASIONAL</b>		<b>73,32</b>

Sebaliknya, provinsi-provinsi dengan ekonomi besar dan populasi padat justru menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Jawa Timur (60,18), Jawa Barat (68,12), dan DKI Jakarta (64,14) berada dalam kategori Sedang, bahkan berada di bawah rata-rata nasional. Fenomena ini mungkin mencerminkan tantangan yang lebih kompleks dalam membangun mekanisme partisipasi di wilayah dengan populasi besar dan heterogen.

## Hak Publik

Pengukuran variabel hak publik dengan dua dimensi utama, yaitu tingkat persetujuan dan tingkat kemudahan dalam mengakses, memperoleh, memiliki dll terkait informasi publik. Berdasarkan data kuantitatif dari Survei Indeks KPIP 2025, dimensi Hak Publik menunjukkan pola bertingkat di mana skor tertinggi terkonsentrasi pada aspek aksesibilitas dasar. Indikator “mencari informasi publik” mencatatkan angka paling dominan sebesar 83,83, diikuti oleh indikator “mengetahui tempat mencari informasi” dengan skor 83,67. Data ini secara empiris menunjukkan bahwa ketersediaan saluran informasi dan literasi dasar masyarakat mengenai lokasi sumber data pemerintah sudah berada pada kategori “Sangat Baik”. Mayoritas responden terbukti memiliki kemampuan memadai untuk menjangkau sumber informasi yang disediakan oleh badan publik.

Namun, data memperlihatkan penurunan skor yang signifikan ketika indikator beralih dari sekadar mengakses menjadi mengelola informasi. Indikator “mengolah informasi publik” tercatat lebih rendah di angka 74,67, yang masuk dalam kategori “Baik”. Penurunan statistik ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat berhasil memperoleh dan menyimpan data, terdapat keterbatasan dalam kapasitas atau fasilitas untuk menganalisis materi tersebut secara mendalam. Hal ini menyiratkan bahwa informasi yang diterima publik sering kali belum tersampaikan dalam format yang mendukung pemahaman substantif atau analisis lanjutan oleh publik.

Kesenjangan data juga terlihat pada aspek “mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik sebelum disahkan” dengan nilai

63,50. Serta “mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan publik oleh pemerintah dilakukan” dan “ Memberikan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan program pemerintah” dengan nilai 67,83 dan 65,17.

Tabel 3.10. Hak Publik Kunci

Indikator	Indeks
Saya mengetahui tempat untuk mencari informasi publik yang relevan dengan kebutuhan	83,67
Saya mengakses informasi publik yang disediakan oleh pemerintah dengan mudah	79,50
Mencari informasi publik	83,83
Memperoleh informasi publik	81,67
Memiliki informasi publik	77,67
Menyimpan informasi publik	76,83
Mengolah informasi publik	74,67
Menyampaikan informasi ke lembaga	71,50
Menyampaikan pendapat di depan umum secara bebas	74,17
Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik sebelum kebijakan tersebut disahkan	63,50
Mengetahui informasi mengenai program kebijakan publik yang sedang dijalankan	71,33
Mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan publik oleh pemerintah dilakukan	67,83
Mengetahui alasan di balik pengambilan keputusan publik oleh pemerintah	67,00
Memberikan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan program pemerintah	65,17
<b>NASIONAL</b>	<b>74,16</b>

Berdasarkan analisis geospasial terhadap Indeks Pemenuhan Hak Publik, teridentifikasi adanya disparitas capaian yang signifikan antarwilayah administratif di Indonesia. Data empiris menempatkan wilayah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Maluku dan Papua Barat, pada posisi superior dengan skor indeks masing-masing mencapai 89,53 dan 86,58. Capaian ini mengindikasikan bahwa

di wilayah dengan karakteristik demografis yang lebih renggang, penetrasi informasi publik berjalan lebih efektif. Tingginya skor di wilayah-wilayah tersebut merefleksikan keberhasilan mekanisme komunikasi lokal yang kemungkinan besar didukung oleh struktur sosial komunal yang inklusif, sehingga meminimalisir hambatan akses yang sering terjadi pada birokrasi yang lebih kompleks.

Sebaliknya, lanskap pemenuhan hak publik di Pulau Jawa menunjukkan divergensi yang tajam. DKI Jakarta menempati posisi di kuartil atas (Peringkat 5) dengan skor 82,54, yang merepresentasikan kematangan infrastruktur digital dan tingginya literasi akses masyarakat urban. Namun, kondisi ini tidak terakselerasi pada provinsi penyangga dan provinsi berpenduduk padat lainnya. Provinsi Jawa Timur dan Banten menempati peringkat bawah (36 dan 37) dengan kategori “Sedang”. Fenomena ini mengonfirmasi dugaan bahwa densitas populasi yang tinggi menghadirkan tantangan struktural dalam pemerataan distribusi informasi, di mana kapasitas birokrasi belum sepenuhnya mampu mengimbangi skala kebutuhan informasi publik yang masif.

Pada wilayah Papua terdapat kesenjangan internal yang signifikan antara wilayah pemekaran dengan provinsi induk. Provinsi Papua Barat dan Papua Pegunungan mampu mencatatkan kinerja “Sangat Baik”, kontras dengan Provinsi Papua yang menempati posisi terendah nasional dengan skor 62,26 (Sedang). Ketimpangan ini mengisyaratkan adanya inkonsistensi tata kelola informasi pasca-otonomi dan pemekaran, di mana provinsi baru cenderung lebih agresif dalam membangun legitimasi publik melalui keterbukaan informasi, sementara provinsi induk menghadapi kendala institusional yang berat. Secara agregat, meskipun rata-rata nasional berada pada kategori “Baik”, angka tersebut menyembunyikan realitas ketimpangan akses antara wilayah luar Jawa yang progresif dengan pusat-pusat populasi di Jawa yang mengalami stagnasi distribusi.

Tabel 3.11. Hak Publik Kunci Per Provinsi

NO	PROVINSI	SKOR
1	Maluku	89,53
2	Papua Barat	86,58
3	Kalimantan Tengah	84,49
4	Lampung	83,17
5	DKI Jakarta	82,54
6	Nusa Tenggara Timur	82,32
7	Jawa Tengah	80,53
8	Papua Pegunungan	80,11
9	Maluku Utara	79,75
10	Riau	79,26
11	Kalimantan Barat	78,55
12	Gorontalo	78,52
13	Sulawesi Selatan	77,74
14	Kep. Riau	77,55
15	Sulawesi Barat	76,54
16	Papua Selatan	75,78
17	Sulawesi Utara	75,28
18	Jambi	74,63
19	Jawa Barat	73,17
20	Kalimantan Selatan	72,86
21	Kalimantan Timur	72,5
22	Kalimantan Utara	72,45
23	Papua Barat Daya	71,52
24	Bali	71,45
25	Sulawesi Tengah	71,29
26	Sumatera Utara	71,23
27	DI Yogyakarta	70,87
28	Kep. Bangka Belitung	70,71
29	Sulawesi Tenggara	70,54
30	Papua Tengah	69,15
31	Bengkulu	68,55
32	Sumatera Barat	67,75
33	Aceh	67,33
34	Sumatera Selatan	66,01
35	Nusa Tenggara Barat	65,21
36	Jawa Timur	64,31
37	Banten	63,04
38	Papua	55,17
NASIONAL		74,16

Secara agregat, Indeks KPIP Nasional pada dimensi Outcome mencatatkan skor 75,13 dengan predikat “Baik”, namun angka rata-rata ini sesungguhnya menyembunyikan disparitas performa yang signifikan antarwilayah di mana pusat keunggulan kinerja komunikasi publik kini bergeser ke luar Pulau Jawa. Analisis mendalam terhadap data provinsi mengungkap bahwa wilayah di luar pulau jawa khususnya Provinsi Maluku, Kalimantan Tengah, dan Riau, secara konsisten menempati posisi teratas dengan skor agregat di atas 85.

Dominasi Maluku yang meraih skor 88,34 didorong oleh keseimbangan performa yang tinggi di seluruh pilar Kepercayaan, Partisipasi, dan Hak Publik yang mengindikasikan bahwa pada wilayah dengan struktur sosial yang lebih kohesif, komunikasi pemerintah dirasakan lebih personal, inklusif, dan berdampak langsung oleh warganya. Bahkan, tingginya partisipasi publik di Riau yang mencapai angka 81,10 menjadi bukti bahwa pelibatan warga di luar pusat ekonomi utama justru berjalan lebih substantif dibandingkan sekadar formalitas birokrasi.

Sebaliknya, wilayah Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi dan populasi justru menghadapi situasi yang berbeda, di mana provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur terdegradasi ke kategori “Sedang”. Kepadatan populasi di wilayah ini menjadi tantangan struktural yang menghambat distribusi pesan dan membatasi komunikasi langsung pemerintah, namun menariknya DKI Jakarta yang menampilkan anomali data unik. Ibu kota mencatatkan skor Hak Publik yang sangat tinggi di angka 82,54 yang mencerminkan kematangan infrastruktur dan literasi akses warganya, tetapi tingginya akses

ini gagal terkonversi menjadi kepercayaan maupun partisipasi yang setara. Fenomena ini menegaskan profil audiens Jakarta sebagai “warga kritis” yang memiliki akses informasi terbaik, namun justru menggunakan informasi tersebut untuk bersikap skeptis dan menuntut standar akuntabilitas yang jauh lebih tinggi daripada yang saat ini disajikan.

Dinamika ketimpangan juga terlihat jelas di Tanah Papua yang menyajikan studi komparatif menarik antara efektivitas birokrasi baru dan lama, di mana provinsi hasil pemekaran seperti Papua Pegunungan dan Papua Barat sukses menembus peringkat 10 besar nasional dengan kategori “Sangat Baik”. Kesuksesan ini kemungkinan didorong oleh pendekatan birokrasi baru yang lebih agresif merangkul publik untuk membangun legitimasi awal, sebuah kondisi yang berbanding terbalik dengan Provinsi Papua induk yang justru menempati posisi terbawah nasional dengan skor 64,50.

Sehingga strategi komunikasi “satu ukuran untuk semua” tidak lagi relevan untuk diterapkan secara nasional karena setiap wilayah membutuhkan pendekatan berbeda. Wilayah urban seperti Jakarta dan Jawa membutuhkan pergeseran fokus dari sekadar diseminasi informasi menjadi pembuktian akuntabilitas berbasis data untuk memulihkan kepercayaan, sementara wilayah luar Jawa sebaiknya mempertahankan pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal yang terbukti efektif. Khusus untuk Papua, diperlukan intervensi ganda untuk memperbaiki infrastruktur dasar informasi di provinsi induk sembari mereplikasi model pelibatan publik yang sukses diterapkan di provinsi-provinsi pemekaran sekitarnya.

Tabel 3.12. Dimensi Outcome Publik

NO	PROVINSI	DIMENSI OUTCOME			DIMENSI OUTCOME
		KEPERCAYAAN PUBLIK	PARTISIPASI PUBLIK	HAK PUBLIK	
1	Maluku	90,74	88,16	89,53	89,48
2	Kalimantan Tengah	88,15	85,88	84,49	86,17
3	Papua Pegunungan	87,22	84,16	80,11	83,83
4	Lampung	84,72	83,5	83,17	83,80
5	Riau	89,54	79,15	79,26	82,65
6	Nusa Tenggara Timur	84,44	79,98	82,32	82,25
7	Papua Barat	81,02	76,68	86,58	81,43
8	Jawa Tengah	82,31	78,11	80,53	80,32
9	Sulawesi Selatan	83,15	78,88	78,55	80,19
10	Sulawesi Barat	83,24	76,46	77,74	79,15
11	Papua Selatan	82,69	78,81	74,63	78,71
12	Sulawesi Utara	81,94	72,28	75,78	76,67
13	Kalimantan Barat	82,04	69,42	78,52	76,66
14	Papua Barat Daya	78,89	79,32	70,54	76,25
15	Maluku Utara	77,22	71,18	79,75	76,05
16	Jambi	78,89	73,82	75,28	76,00
17	Kep. Riau	68,43	80,2	76,54	75,06
18	Kep. Bangka Belitung	80,83	75,56	68,55	74,98
19	Gorontalo	74,44	71,4	77,55	74,46
20	Papua Tengah	76,94	78,56	67,75	74,42
21	Sulawesi Tenggara	80,00	70,74	71,45	74,06
22	Kalimantan Timur	79,07	71,18	71,29	73,85
23	Kalimantan Selatan	76,02	73,16	71,52	73,57
24	DKI Jakarta	73,89	64,14	82,54	73,52
25	Bali	68,43	78,07	73,17	73,22
26	Banten	77,41	78,66	63,04	73,04
27	Sulawesi Tengah	78,06	63,26	72,86	71,39
28	Jawa Barat	72,59	68,12	72,45	71,05
29	DI Yogyakarta	72,22	71,62	69,15	71,00
30	Kalimantan Utara	67,04	74,7	71,23	70,99
31	Sumatera Barat	76,85	62,82	70,87	70,18
32	Bengkulu	69,26	72,06	67,33	69,55
33	Aceh	71,67	70,12	66,01	69,27
34	Sumatera Utara	74,07	60,62	72,5	69,06
35	Sumatera Selatan	71,02	61,06	70,71	67,60
36	Jawa Timur	74,26	60,18	64,31	66,25
37	Papua	78,15	60,18	55,17	64,50
38	Nusa Tenggara Barat	64,26	63,92	65,21	64,46
	<b>NASIONAL</b>	<b>77,92</b>	<b>73,32</b>	<b>74,16</b>	<b>75,13</b>

# BAB IV

## PEMBAHASAN INDEKS KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media  
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

# Perbandingan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 2021-2025

Bagian ini membahas perbandingan hasil pengukuran indeks selama periode 2021–2024 yang menggunakan metodologi Indeks PIKP (Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik) dengan hasil tahun 2025 yang telah beralih ke metodologi baru, yaitu Indeks KPIP (Komunikasi Publik dan Informasi). Perubahan ini ditandai dengan penggunaan variabel dan subvariabel yang berbeda secara signifikan pada tahun 2025, sehingga perbandingan angka secara langsung antar-tahun tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika dibandingkan Indeks KPIP selama 5 tahun terus mengalami peningkatan. Nilai indeks 2025 menunjukkan peningkatan 3,8 poin dari tahun sebelumnya.

Gambar 4.1 Tren Indeks KPIP tahun 2021-2025



Indeks KPIP menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2025, berpindah dari kategori “Sedang” menjadi “Baik” pada tahun 2024. Pada tahun 2025 di bawah metodologi baru Indeks KPIP juga tergolong “Baik”. Dalam rentang tahun 2021-2024 dimensi *Input*, *Output*, dan *Outcome* konsisten mengalami peningkatan. Sedangkan, nilai dimensi Proses mengalami fluktuasi dan penurunan. Terdapat juga beberapa tantangan dalam rentang waktu tersebut terutama terkait manajemen komunikasi publik, ketersediaan data dan informasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak untuk tahu.

Tabel 4.1 Hasil Indeks KPIP tahun 2021-2025

Indeks KPIP	2021	2022	2023	2024	2025
Input	65,57	73,11	77,30	79,63	87,27
Proses	67,35	65,23	65,34	63,31	85,59
Output	61,20	66,62	73,00	73,06	75,61
Outcome	57,07	60,07	63,37	71,18	75,13
<b>Skor Gabungan Nasional</b>	<b>62,80</b>	<b>66,26</b>	<b>69,75</b>	<b>71,79</b>	<b>77,58</b>

Pada dimensi *Input*, nilai nasional menunjukkan tren yang konsisten meningkat dari 65,57 (2021) menjadi 79,63 (2024). Komponen seperti Anggaran, Media, dan Sarana-Prasarana umumnya mengalami peningkatan, menunjukkan perhatian yang semakin baik terhadap sumber daya. Nilai tahun 2025 (87,27) untuk variabel “Kapasitas Institusi” yang baru juga tergolong tinggi, mengindikasikan fondasi input yang kuat di bawah metodologi baru.

Berbeda dengan *Input*, kinerja dimensi *Proses* justru menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan mengalami tren penurunan secara nasional, dari 67,35 (2021) menjadi 63,31 (2024). Penurunan signifikan terlihat pada komponen “Pelaksanaan” dan “Perencanaan”. Namun, di tahun 2025, dengan variabel baru seperti Hak Publik (89,17) dan Prinsip Komunikasi Publik (88,7), nilai rata-rata proses melonjak menjadi setara dengan 85,72, menunjukkan fokus yang berbeda dalam pengukuran.

Dimensi *Output* mencatat perkembangan yang positif. Nilai nasionalnya meningkat dari 61,2 (2021) menjadi 73,06 (2024). Peningkatan ini terutama didorong oleh membaiknya komponen “Akses dan kualitas informasi” dan “Teknis dan pelayanan informasi publik”. Nilai tahun 2025 untuk tiga variabel barunya (Prinsip Komunikasi Publik, Pelibatan Stakeholder, dan Informasi Terpercaya) menghasilkan rata-rata 75,61, yang

melanjutkan tren positif tersebut. Dimensi *Outcome* merupakan dimensi dengan tren peningkatan yang paling konsisten dan stabil dari tahun ke tahun, naik dari 62,8 (2021) menjadi 71,79 (2024). Peningkatan ini didorong oleh komponen “Hak untuk tahu” dan “Partisipasi dalam proses kebijakan publik” yang nilainya melonjak pada tahun 2024. Pada tahun 2025, Dimensi *Outcome* diukur dengan tiga variabel baru yaitu, Kepercayaan Publik, Partisipasi Publik, dan Hak Publik berhasil mempertahankan capaian baik dengan rata-rata 75,13.

Perubahan variabel dari PIKP ke KPIP pada 2025 sangat mencolok. Variabel lama seperti “Pengumpulan data” dan “Monitoring dan Evaluasi” hilang, digantikan oleh variabel baru yang lebih substantif seperti “Komunikasi Strategis”, “Hak Publik”, dan “Informasi Terpercaya”. Hal ini membuat nilai tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya, karena mengukur aspek yang berbeda, meskipun dalam kerangka *Input, Proses, Output, dan Outcome* yang sama.

Selama periode pengukuran PIKP (2021-2024), beberapa titik lemah yang konsisten terlihat adalah pada komponen “Pelaksanaan” (dalam PROSES) yang nilainya terus berada di level rendah dan cenderung menurun. Selain itu, komponen “Bahan Informasi” (dalam *Input*) dan “Kepuasan Terhadap Layanan IKP” (dalam *Output*) juga menunjukkan nilai yang relatif rendah dan/atau fluktuatif, mengindikasikan area yang membutuhkan perbaikan serius.

Peralihan ke Indeks KPIP 2025 dengan variabel-variabel barunya merefleksikan evolusi dalam mendefinisikan dan mengukur kinerja komunikasi publik. Nilai-nilai tinggi pada hampir semua variabel baru di tahun 2025 memberikan landasan awal yang optimis. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa peningkatan ini bukan semata-mata akibat perubahan alat ukur, tetapi benar-benar

merepresentasikan kemajuan kinerja yang substantif. Ke depan, pemantauan tren dengan metodologi baru ini akan menjadi kunci untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan komunikasi publik.

Meskipun tidak dapat dibandingkan secara langsung, terdapat sinyal positif dari transisi metodologi ini. Nilai nasional untuk tahun 2025 pada semua dimensi (*Input: 87,27, Proses: 85,72, Output: 75,61, Outcome: 75,13*) secara konsisten lebih tinggi daripada capaian tahun-tahun sebelumnya di bawah indeks PIKP. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai dua hal: pertama, bahwa variabel baru dalam KPIP lebih mampu menangkap kinerja yang sudah baik; atau kedua, bahwa memang telah terjadi peningkatan kapabilitas institusi yang kemudian terpetakan lebih jelas dengan alat ukur yang lebih relevan.

Tabel 4.2 Perbandingan Indeks PIKP dengan KPIP

INDEKS PIKP	2021	2022	2023	2024	2025
INPUT					
Anggaran	60,63	71,71	82,44	87,98	-
Bahan Informasi	51,39	58,99	69,95	65,82	-
Media dan Saluran Komunikasi	74,83	81,77	82,42	80,47	-
Saranan dan Prasarana	75,43	80,56	78,4	84,25	-
Kapasitas Institusi***	-	-	-	-	87,27
<b>Nasional</b>	<b>65,57</b>	<b>73,11</b>	<b>77,3</b>	<b>79,63</b>	<b>87,27</b>
Pengumpulan data dan Informasi	50,18	60,46	65,00	61,13	-
Perencanaan	81,78	71,26	67,68	72,78	-
Pelaksanaan	71,75	59,92	61,81	53,99	-
Monitoring dan Evaluasi	65,68	69,29	66,89	65,35	-
Komunikasi Strategis***	-	-	-	-	85,72
Hak Publik***	-	-	-	-	89,17
Cakupan Kerja***	-	-	-	-	78,71
Prinsip Komunikasi Publik***	-	-	-	-	88,7
Pelibatan Stakeholder***	-	-	-	-	76,82
Informasi Terpercaya***	-	-	-	-	88,01
<b>Nasional</b>	<b>67,35</b>	<b>65,23</b>	<b>65,34</b>	<b>63,31</b>	<b>84,52</b>
Agenda Publik	70,50	50,82	55,9	57,38	-
Kepuasan Terhadap Layanan IKP	051,9	-	-	-	-
Akses dan kualitas informasi*	-	74,27	75,80	86,93	-
Teknis dan pelayanan informasi publik*	-	74,78	87,30	74,86	-
Prinsip Komunikasi Publik***	-	-	-	-	77,78

Pelibatan Stakeholder***	-	-	-	-	70,85
Informasi Terpercaya***	-	-	-	-	78,19
Nasional	61,2	66,62	73	73,06	75,61
Hak untuk tahu	55,5	52,45	62,78	78,7	
Partisipasi dalam proses kebijakan publik	49,3	54,39	53,57	63,34	
Keadilan Informasi**	66,4	-	-	-	
Pemerataan Informasi*	-	73,38	73,77	71,49	
Kepercayaan Publik***	-	-	-	-	77,92
Partisipasi Publik***	-	-	-	-	73,32
Hak Publik***	-	-	-	-	74,16
Nasional	62,8	66,26	69,75	71,79	75,13

\* Subvariabel tambahan 2022

\*\* Subvariabel tambahan 2021

\*\*\* Variabel indeks KPIP 2025

Analisis lebih lanjut menunjukkan pergeseran fokus pengukuran yang signifikan. Indeks PIKP (2021-2024) masih banyak menyentuh aspek administratif dan operasional, seperti “Pengumpulan Data” dan “Sarana-Prasarana”. Sementara itu, Indeks KPIP 2025 telah bergeser ke aspek yang lebih substansial dan

berdampak, seperti “Kepercayaan Publik”, “Informasi Terpercaya”, dan “Hak Publik”. Pergeseran ini sejalan dengan paradigma komunikasi publik modern yang menekankan pada hubungan timbal balik, kepercayaan, dan pemenuhan hak masyarakat, bukan sekadar penyediaan layanan.

## Analisis Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik untuk Daerah Otonom Baru (DOB)

### Pengantar

Pemekaran wilayah Papua merupakan bagian dari agenda reformasi tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan yang telah lama dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Sejak awal 2000-an, wacana pemekaran muncul untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah yang memiliki kondisi geografis menantang. Presiden melalui berbagai arahan strategis menekankan pentingnya kehadiran negara secara lebih dekat, terutama di wilayah-wilayah pedalaman yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan administrasi maupun infrastruktur dasar. Hal ini menjadi landasan

awal bagi pembahasan pemekaran wilayah Papua secara lebih terstruktur. Percepatan proses pemekaran mulai terlihat jelas pada tahun 2022 ketika Pemerintah dan DPR RI bersama-sama menyepakati rancangan undang-undang pemekaran provinsi baru. Pada bulan Juni 2022, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri secara resmi menyetujui pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Ketiga provinsi ini disahkan melalui Undang-Undang Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022. Pengesahan tersebut menandai fase penting karena untuk pertama kalinya sejak 2003, wilayah Papua kembali mengalami restrukturisasi administratif dengan tujuan

pemerataan pembangunan. Tidak lama berselang, proses pemekaran kembali berlanjut di wilayah Papua Barat. Pada Desember 2022, pemerintah menyetujui dan mengesahkan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri atas arahan Presiden dan diikuti pelantikan Penjabat Gubernur pada bulan yang sama. Dengan lahirnya Papua Barat Daya, wilayah Papua Barat yang sebelumnya terdiri dari satu provinsi kini terbagi menjadi dua: Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Dengan penambahan empat provinsi baru tersebut, maka jumlah provinsi di Tanah Papua menjadi enam provinsi: Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Pemerintah menegaskan bahwa pemekaran ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat keamanan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam beberapa pernyataan, Presiden dan Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa pemekaran bukan sekadar pemisahan administratif, tetapi strategi untuk menghadirkan percepatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Implementasi pemekaran kemudian diikuti dengan penyusunan struktur pemerintahan sementara, penunjukan Penjabat Gubernur di provinsi baru, dan pengalihan kewenangan administrasi secara bertahap. Pemerintah juga mulai menyiapkan alokasi anggaran, pembentukan perangkat daerah, serta integrasi pemerintahan pusat dan daerah untuk memastikan transisi berjalan lancar. Seiring berjalan waktu, pemekaran ini diharapkan menjadi titik awal pemerataan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat, melalui model pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Analisis Indeks KPIP di wilayah Papua memerlukan kehati-hatian karena konteks administratif, kelembagaan, dan kesiapan sistem pendukung komunikasi publik di wilayah ini sangat berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Pemekaran yang

berlangsung cepat, perubahan struktur pemerintahan, dan proses transisi birokrasi menyebabkan banyak indikator, seperti informasi terpercaya, pelibatan pemangku kepentingan, maupun cakupan pekerjaan komunikasi publik, belum dapat terukur dengan optimal. Beberapa DOB bahkan belum memiliki perangkat kelembagaan yang sepenuhnya terbentuk, baik dalam hal pejabat definitif, mekanisme SOP, maupun dokumentasi yang menjadi dasar penilaian indikator.

Selain itu, provinsi-provinsi baru di Papua masih berada dalam fase pembangunan institusi, termasuk penataan urusan pemerintahan, penyusunan dokumen perencanaan, serta penyiapan anggaran dan SDM komunikasi publik. Kondisi ini membuat banyak indikator cenderung menghasilkan nilai rendah atau bahkan nol bukan karena kinerja buruk, melainkan karena ketiadaan data, ketidaklengkapan infrastruktur komunikasi publik, atau belum beroperasinya fungsi-fungsi tertentu. Dalam indeks-infrastruktur seperti KPIP, ketiadaan bukti (*absence of evidence*) tidak dapat langsung disamakan dengan ketidakefektifan komunikasi publik.

Selain faktor kelembagaan, kondisi geografis provinsi-provinsi Papua seringkali menjadi faktor penghambat aktivitas pemerintahan, ditambah keterbatasan akses komunikasi, serta dinamika sosial yang kompleks turut memengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhi standar komunikasi publik nasional. Jangkauan layanan informasi, keterbatasan jaringan internet, hingga karakteristik sosial budaya masyarakat membuat praktik komunikasi publik memerlukan pendekatan yang jauh lebih adaptif dan tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Hal ini penting untuk dipahami agar interpretasi hasil indeks tidak bias dan tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, analisis KPIP untuk daerah DOB dilakukan dengan perspektif transisional bahwa wilayah-wilayah ini sedang berada dalam fase pembentukan kapasitas. Oleh karena itu, skor rendah atau ketidakterisian

data tidak dapat ditafsirkan sebagai kegagalan kinerja, tetapi sebagai potret awal yang akan berubah seiring penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan dukungan dari pemerintah pusat. Pendekatan kehati-hatian seperti ini membantu menjaga objektivitas evaluasi sekaligus memberikan

ruang untuk penguatan kapasitas sesuai kebutuhan lokal. Untuk data pembandingan, indeks Papua dan Papua Barat disertakan. Cukup disayangkan Dinas Kominfo Papua Tengah tidak berpartisipasi dalam survei persepsi KPIP ini, sehingga datanya tidak dapat disajikan.

## Variabel Agregat Indeks KPIP Untuk Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

Tabel 4.3 Indikator Indeks KPIP  
Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

PROVINSI	KAPASITAS INSTANSI	KOMUNIKASI STRATEGIS	HAK PUBLIK	CAKUPAN PEKERJAAN	PRINSIP KOMUNIKASI PUBLIK	PELIBATAN STAKEHOLDER	INFORMASI TERPERCAYA
Papua*	100	100	100	89,39	100	82,14	100
Papua Barat*	54,76	67,95	100	79,18	100	42,04	16,67
Papua Barat Daya	54,37	30,77	39,58	50,42	50,00	46,94	16,67
Papua Pegunungan	19,05	7,69	62,50	26,53	52,38	50,02	0
Papua Selatan	75,79	67,95	89,58	64,21	100	38,88	100

\* Papua dan Papua Barat disertakan dalam analisis sebagai pembandingan

Secara umum, Papua sebagai provinsi tertua menunjukkan persepsi kinerja KPIP yang tinggi dan stabil di hampir seluruh dimensi, dengan nilai 100 pada Kapasitas Institusi, Komunikasi Strategis, Hak Publik, Prinsip Komunikasi Publik, dan Informasi Terpercaya. Sementara itu, Papua Barat memperlihatkan kinerja lebih bervariasi, dengan skor tinggi pada Hak Publik (100) dan Prinsip Komunikasi Publik (100), namun jauh lebih rendah pada Kapasitas Institusi (54,76), Pelibatan Stakeholder (42,04), dan Informasi Terpercaya (16,67). Kondisi Papua Barat menunjukkan adanya disparitas antara dimensi yang bersifat normatif (misal: hak publik, prinsip komunikasi) dibanding dimensi yang memerlukan dukungan struktural dan operasional yang kuat (kapasitas kelembagaan, pelibatan pemangku kepentingan, dan verifikasi informasi). Dua provinsi ini menjadi pembandingan penting ketika menilai capaian DOB karena keduanya telah memiliki struktur pemerintahan yang lebih mapan sebelum pemekaran tahap terbaru. Provinsi DOB, yaitu Papua Barat

Daya, Provinsi DOB, yaitu Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, menunjukkan pola kelembagaan yang masih berkembang, tercermin dari indeks persepsi Kapasitas Institusi yang relatif rendah. Papua Pegunungan menjadi yang paling rendah (19,05), menunjukkan bahwa infrastruktur birokrasi, SDM, dan sistem administratif masih dalam tahap awal pembentukan. Papua Barat Daya (54,37) dan Papua Selatan (75,79) memiliki kinerja lebih baik, tetapi masih jauh di bawah Papua (100). Pada dimensi Komunikasi Strategis, Papua Pegunungan (7,69) dan Papua Barat Daya (30,77) menunjukkan tantangan sangat besar dalam perencanaan komunikasi, pengumpulan informasi, dan penyusunan pesan. Sementara itu, Papua Selatan (67,95) mulai menunjukkan stabilisasi, meski belum selevel Papua Barat (67,95) atau Papua (100). Capaian rendah pada dua indikator ini menggambarkan bahwa DOB berfokus pada pembangunan dasar pemerintahan, sehingga fungsi komunikasi publik belum beroperasi secara penuh.

Pada indikator Hak Publik, ketiga DOB menunjukkan persepsi capaian berbeda: Papua Pegunungan (62,50), Papua Barat Daya (39,58), dan Papua Selatan (89,58). Papua Selatan terlihat paling siap dalam memberikan akses informasi publik, kemungkinan karena dukungan administratif yang lebih kuat dari provinsi asal (Papua). Sementara itu, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan masih berada pada tahap awal penyediaan layanan dasar informasi publik. Pada dimensi Cakupan Pekerjaan, DOB juga mencerminkan tingkat kematangan administratif yang berbeda. Papua Selatan (64,21) lebih stabil dibanding Papua Barat Daya (50,42) dan Papua Pegunungan (26,53), menunjukkan bahwa mekanisme produksi konten, penyebarluasan informasi, dan pemanfaatan kanal komunikasi masih perlu diperkuat. Semua nilai ini kontras dengan capaian Papua (89,39) dan Papua Barat (79,18) yang telah lebih dahulu menata ekosistem manajemen komunikasi.

Untuk dimensi Prinsip Komunikasi Publik, Papua (100) dan Papua Barat (100) menunjukkan penerapan prinsip yang selaras dengan standar nasional dalam survei persepsinya. Namun untuk DOB, hasilnya sangat bervariasi: Papua Selatan (100), Papua Pegunungan (52,38), dan Papua Barat Daya (50,00). Papua Selatan terlihat mampu menjaga prinsip pelayanan publik secara normatif, tetapi Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan memerlukan pendampingan intensif untuk memastikan komunikasi publik tetap objektif, proaktif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Tantangan terbesar muncul pada dimensi Informasi Terpercaya, di mana Papua Pegunungan memperoleh skor 0, indikator bahwa provinsi ini belum mampu menyediakan bukti atau sistem pengelolaan informasi yang dapat diverifikasi. Papua Barat Daya dan Papua Barat juga memiliki nilai sangat rendah (16,67), menunjukkan kesenjangan sistem verifikasi data, ketersediaan dokumentasi, dan kapasitas SDM. Bandingkan dengan Papua (100) dan Papua Selatan (100) yang sudah dapat memberikan bukti informasi yang lengkap.

Untuk aspek Pelibatan Stakeholder, DOB kembali menunjukkan persepsi di bawah

nasional: Papua Selatan (38,88), Papua Barat Daya (46,94), dan Papua Pegunungan (50,02). Nilai ini jauh lebih rendah daripada Papua (82,14) dan Papua Barat (42,04), walaupun Papua Barat juga indeks perspsinya rendah. Hal ini menegaskan bahwa jejaring koordinasi, forum dialog, serta mekanisme kolaborasi lintas pihak masih belum terbentuk dengan optimal pada provinsi DOB. Kondisi ini mencerminkan fase transisional DOB, di mana instansi pemerintah daerah masih fokus membangun struktur dasar pemerintahan ketimbang melakukan kolaborasi intensif dengan akademisi, media, komunitas, atau sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Secara keseluruhan, analisis KPIP untuk DOB di daerah Papua menunjukkan bahwa kapasitas operasional mereka masih berkembang dan memerlukan dukungan afirmatif dari pemerintah pusat. Dua provinsi induk, yaitu Papua dan Papua Barat, berfungsi sebagai cerminan disparitas yang perlu dijumpatani, terutama dalam hal penyediaan informasi terpercaya, pembangunan kapasitas SDM, penguatan koordinasi, serta pembangunan sistem komunikasi publik yang standar dan berkelanjutan.

Tabel 4.4 Indeks KPIP  
Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan

Provinsi	INDEKS KPIP
Papua*	95,93
Papua Barat*	65,80
Papua Barat Daya	41,25
Papua Pegunungan	31,17
Papua Selatan	76,63

\*Papua dan Papua Barat disertakan dalam analisis sebagai pembanding

Persepsi Indeks KPIP menunjukkan variasi yang sangat mencolok antardaerah di Tanah Papua. Papua memiliki nilai tertinggi (95,93), menggambarkan kapasitas kelembagaan, proses komunikasi publik, dan layanan informasi yang jauh lebih matang. Papua Selatan juga mencatat kinerja tinggi (76,63), sementara Papua Barat berada pada posisi menengah (65,80). Dua daerah otonomi baru lainnya, Papua Barat Daya (41,25) dan Papua Pegunungan (31,17), menunjukkan

indeks yang rendah karena karakteristik DOB: struktur kelembagaan yang belum stabil, SDM yang terbatas, basis data dan sistem kerja yang baru dibangun, serta belum tersedianya bukti kegiatan secara lengkap.

Namun yang menarik, Papua Pegunungan meskipun sangat baru dan infrastrukturnya minimal, memiliki indeks lebih tinggi daripada Papua Barat Daya dan secara proporsional menunjukkan capaian yang tidak sepenuhnya linear dengan tingkat kesiapannya. Kondisi persepsi indeks Papua Pegunungan yang memiliki nilai lebih tinggi dari Papua Barat dapat dijelaskan melalui dua dugaan. Pertama, Papua Pegunungan relatif lebih homogen dalam jumlah dan cakupan satuan kerja dinas yang terlibat, sehingga persepsi kinerja KPIP dapat menjadi lebih konsisten meskipun secara absolut kapasitas masih rendah pada level nasional. Hal ini berbeda dengan Papua Barat yang memiliki lebih banyak unit satker pemerintahan lain dengan variasi tingkat kematangan birokrasi, yang mungkin menurunkan nilai agregat indeks. Lalu, Papua Pegunungan merupakan daerah yang secara administratif terbentuk dari wilayah pegunungan tengah, dengan wilayah yang selama ini memiliki hubungan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat karena faktor keamanan, pembangunan daerah tertinggal, serta kebutuhan pendampingan khusus. Intensitas komunikasi vertikal ini bisa saja meningkatkan penilaian persepsi atas kinerja komunikasi publik meskipun kapasitas teknis sebenarnya belum optimal.

## Analisis Gap Output dan Outcome Gap Dinas Kominfo dan Publik

### Dimensi Output

Berdasarkan data yang tercantum, terlihat bahwa secara keseluruhan, kinerja Dinas Provinsi (rata-rata 81,84) lebih unggul dibandingkan dengan persepsi Publik Kunci (rata-rata 74,33). Namun, jika dilihat per variabel, gap yang muncul cukup beragam. Untuk Prinsip Komunikasi Publik (PCP), Dinas Provinsi memiliki nilai rata-rata 87,17,

sementara Publik Kunci hanya 77,78. Hal ini menunjukkan bahwa dinas dinilai cukup baik dalam penerapan prinsip komunikasi, tetapi publik belum sepenuhnya merasakan hal yang sama. Gap yang lebih sempit terlihat pada variabel Pelibatan Stakeholder (SE), di mana Dinas Provinsi meraih 74,46 dan publik memberi nilai 70,85. Meski demikian, perbedaan ini tetap signifikan dan mengindikasikan bahwa upaya pelibatan yang dilakukan dinas belum sepenuhnya efektif atau berdampak pada persepsi stakeholder.

Jika ditelaah per provinsi, beberapa wilayah menunjukkan kesenjangan yang sangat mencolok. Sebagai contoh, Bengkulu dan Papua Tengah mencatat nilai nol untuk semua variabel di sisi Dinas Provinsi, sementara penilaian dari publik justru berada di kisaran 60–89. Kondisi ini terjadi karena Bengkulu dan Papua Tengah tidak memberikan data terkait survei KPIP 2025. Namun publik masih memberikan penilaian cukup baik karena harapan yang rendah atau faktor lain.

Di sisi lain, provinsi seperti Maluku justru menunjukkan pola sebaliknya: nilai Dinas Provinsi sangat rendah (25–83), sementara publik memberikan nilai sangat tinggi (89–92). Hal ini bisa disebabkan oleh kinerja dinas yang sebenarnya baik, tetapi tidak tercatat dengan benar, atau adanya faktor komunikasi dan ekspektasi yang berbeda di tingkat masyarakat. Temuan menarik lainnya adalah bahwa beberapa provinsi yang memiliki nilai tinggi di sisi Dinas Provinsi, seperti Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat (dengan nilai hampir sempurna di PCP dan TI), justru mendapat penilaian yang cukup rendah dari publik, khususnya untuk variabel SE (Pelibatan Stakeholder).

Ini mengisyaratkan bahwa meskipun dinas di daerah-daerah unggul dari sisi tata kelola informasi, mereka masih gagal dalam melibatkan publik secara memadai. Di lain pihak, provinsi seperti Gorontalo, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah justru relatif seimbang, dengan nilai publik yang bahkan mendekati atau melebihi nilai dinas, terutama pada variabel TI (Informasi Terpercaya). Hal ini mencerminkan bahwa kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan dinas di daerah-daerah tersebut tergolong tinggi.

Tabel 4.5 Indeks Analisis Gap Dinas Kominfo dan Publik Kunci

PROVINSI	DINAS PROVINSI			PUBLIK KUNCI		
	PCP	SE	TI	PCP	SE	TI
Aceh	80,95	62,44	88,89	71,54	63,65	69,26
Bali	90,48	76,64	94,44	75,3	70,25	70,74
Banten	100,00	88,10	100,00	67,65	60,41	69,17
Bengkulu	0,00	0,00	0,00	69,44	61,25	70,74
DI Yogyakarta	92,86	93,24	83,33	71,48	62,74	69,07
DKI Jakarta	100,00	56,85	100,00	79,5	62,58	67,39
Gorontalo	85,71	62,80	100,00	83,52	78,25	71,11
Jambi	64,29	79,76	100,00	75,86	71,25	73,7
Jawa Barat	100,00	100,00	100,00	78,48	62,58	68,98
Jawa Tengah	100,00	93,52	100,00	83,33	71,26	85,93
Jawa Timur	100,00	87,63	100,00	70,99	61,25	71,94
Kalimantan Barat	66,67	56,55	61,11	78,78	65,93	76,2
Kalimantan Selatan	100,00	93,39	100,00	74,57	68,22	72,22
Kalimantan Tengah	90,48	83,33	83,33	86,48	82,54	88,33
Kalimantan Timur	100,00	70,24	100,00	73,4	70,25	76,57
Kalimantan Utara	100,00	100,00	66,67	70,49	61,25	66,67
Kep. Bangka Belitung	83,33	80,95	83,33	71,11	68,52	80,65
Kep. Riau	78,57	72,62	100,00	71,05	65,25	71,67
Lampung	100,00	94,37	100,00	81,76	64,58	81,48
Maluku	45,24	25,43	89,09	88,25	89,09	92,04
Maluku Utara	64,29	36,87	66,67	81,25	68,58	85,09
Nusa Tenggara Barat	83,33	72,27	83,33	74,33	68,58	76,39
Nusa Tenggara Timur	100,00	81,48	100,00	84,57	75,07	83,7
Papua	100,00	82,14	100,00	73,15	61,25	82,96
Papua Barat	100,00	42,04	16,67	82,65	73,5	83,43
Papua Tengah	0,00	0,00	0,00	80,31	73,65	85,65
Papua Selatan	100,00	38,88	100,00	78,89	80,82	85,46
Papua Pegunungan	57,14	50,02	0,00	76,3	70,32	85,65
Papua Barat Daya	47,62	46,94	16,67	79,57	76,78	78,15
Riau	83,33	79,76	83,33	86,45	85,45	90,18
Sulawesi Barat	85,71	75,76	77,78	82,11	69,58	83,24
Sulawesi Selatan	100,00	100,00	100,00	80,25	82,58	84,17
Sulawesi Tengah	100,00	100,00	100,00	78,58	77,85	78,33
Sulawesi Tenggara	66,67	66,33	38,89	82,96	79,58	80,46
Sulawesi Utara	90,48	93,88	94,44	78,58	78,77	82,96
Sumatera Barat	88,10	86,76	100,00	77,9	69,25	76,17
Sumatera Selatan	92,86	47,72	100,00	76,98	69,85	77,41
Sumatera Utara	100,00	96,83	100,00	77,87	69,78	77,78
Rata-Rata	87,17	74,32	83,95	77,78	70,85	78,19

Dari sisi variabel TI, gap antara Dinas Provinsi dan Publik Kunci relatif lebih kecil (83,95 vs 78,26) dibandingkan dengan dua variabel lainnya. Artinya, meski ada perbedaan, dinas dinilai cukup berhasil dalam menyajikan informasi yang terpercaya. Namun, variabel SE justru menjadi titik lemah terbesar, dengan selisih hampir 5 poin. Ini adalah sinyal kuat bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan atau layanan masih sangat minim. Bahkan di provinsi dengan nilai dinas tinggi, seperti Sumatera Utara dan Jawa Timur, nilai SE dari publik tetap di bawah 65, mengindikasikan bahwa program pelibatan mungkin hanya bersifat formalitas atau tidak inklusif.

Secara keseluruhan, analisis gap ini tidak hanya mengungkap ketimpangan persepsi, tetapi juga menyoroti area prioritas perbaikan. Dinas Provinsi perlu lebih fokus pada pendekatan partisipatif dan transparan dalam melibatkan publik, tidak hanya sekadar memenuhi standar komunikasi teknis. Selain itu, perlunya evaluasi mendalam terhadap provinsi-provinsi dengan gap ekstrem seperti Bengkulu, Papua Tengah, dan Maluku untuk memastikan bahwa baik sistem pelaporan internal maupun persepsi eksternal dapat selaras, sehingga governance komunikasi publik benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pengalaman nyata masyarakat.

## Gap Dinas Kominfo dan Publik

### Dimensi Outcome

Analisis *gap research* antara persepsi Dinas Kominfo dan publik kunci mengenai pemenuhan hak publik penting untuk memahami sejauh mana kedua belah pihak memiliki persepsi yang selaras. Variabel *mirroring* digunakan untuk melihat kecocokan antara penilaian internal pemerintah dan pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan informasi. Ketika gap kecil, komunikasi publik berjalan efektif; sebaliknya, gap besar menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki dalam transparansi dan penyampaian informasi.

Dari data yang tersedia, beberapa provinsi seperti Aceh, Bali, dan Banten menunjukkan pola *overestimation*, yakni penilaian Dinas Kominfo lebih tinggi dibandingkan penilaian publik. Ini menunjukkan bahwa jajaran Dinas Kominfo merasa pemenuhan hak publik sudah optimal, namun publik merasakan sebaliknya. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan cara menilai layanan informasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama terkait aksesibilitas, kemudahan, dan kualitas informasi yang diterima.

Pada sejumlah provinsi lain yang memiliki gap lebih kecil, seperti DI Yogyakarta, terdapat kecenderungan bahwa persepsi kedua pihak lebih selaras. Gap yang kecil mencerminkan tingkat *mirroring* yang lebih tinggi, menandakan bahwa upaya komunikasi publik lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini bisa menjadi contoh praktik baik yang menunjukkan bagaimana mekanisme informasi yang jelas dan kanal komunikasi dua arah mampu menekan ketidaksesuaian persepsi.

Namun, data pada Papua Tengah dan Bengkulu menunjukkan nilai 0 pada indikator Dinas Kominfo. Penting untuk menegaskan bahwa nilai 0 ini bukan berarti Dinas Kominfo tidak memenuhi hak publik, melainkan karena kedua provinsi tersebut tidak mengumpulkan atau tidak mengirimkan data. Dengan demikian, gap besar yang muncul bukan merupakan cerminan kondisi kinerja, tetapi mencerminkan ketidaktuntutan pelaporan. Ini menegaskan perlunya standarisasi dan penguatan mekanisme pengumpulan data antarprovinsi.

Publik di Bengkulu dan Papua Tengah tetap memberikan penilaian terhadap pemenuhan hak publik, sehingga gap yang ekstrem muncul akibat ketidakhadiran skor Dinas Kominfo. Fenomena ini memberikan wawasan penting bahwa publik tetap memiliki persepsi terhadap layanan informasi, meskipun pemerintah daerah terkait tidak melakukan *self-assessment* formal. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman publik berjalan independen dari administrasi internal pemerintah. Indikator yang dinilai publik mencari informasi, memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan mengetahui

kebijakan adalah fungsi-fungsi utama Dinas Kominfo dalam konteks keterbukaan informasi sesuai dengan amanat UU KIP. Ketika publik memberikan skor pada indikator-indikator tersebut, ini menandakan bahwa mereka telah merasakan pelayanan tertentu, sekalipun pemerintah provinsi tidak mengirimkan data penilaiannya.

Di sisi lain, gap pada provinsi yang memiliki data lengkap memperlihatkan adanya tantangan komunikasi dua arah. Banyak Dinas Kominfo tampaknya lebih fokus pada aspek teknis, seperti menyediakan platform atau kanal informasi, namun kurang mengevaluasi sejauh mana publik benar-benar dapat mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut. Ketidaksesuaian ekspektasi inilah yang meningkatkan gap dan menurunkan tingkat *mirroring*. Ketidaksinkronan data juga mengungkap adanya masalah koordinasi antarprovinsi, terutama dalam

proses monitoring dan evaluasi. Komdigi membutuhkan data yang konsisten untuk menilai efektivitas keterbukaan informasi secara nasional, dan absennya data dari Papua Tengah serta Bengkulu menunjukkan adanya celah struktural. Celah ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan dan akurasi perumusan kebijakan publik.

Dalam konteks kepercayaan publik, gap baik yang terjadi karena *overestimation* maupun karena ketidaklengkapan data dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah. Publik melihat pengalaman mereka sebagai indikator utama, sementara pemerintah yang tidak melaporkan data atau menilai dirinya terlalu tinggi dapat dianggap tidak memahami kebutuhan masyarakat. Kondisi ini perlu diperbaiki agar komunikasi publik berjalan lebih kredibel dan efektif.

Tabel 4.6 Gap Dimensi Outcome

Provinsi	PR – Dinas Kominfo	PR Publik
Aceh	87,50	66,01
Bali	100,00	73,17
Banten	100,00	63,04
Bengkulu	0,00	67,33
DI Yogyakarta	83,33	69,15
DKI Jakarta	100,00	82,54
Gorontalo	100,00	77,55
Jambi	100,00	75,28
Jawa Barat	100,00	72,45
Jawa Tengah	100,00	80,53
Jawa Timur	100,00	64,31
Kalimantan Barat	100,00	78,52
Kalimantan Selatan	95,83	71,52
Kalimantan Tengah	83,33	84,49
Kalimantan Timur	100,00	71,29
Kalimantan Utara	83,33	71,23
Kep. Bangka Belitung	81,25	68,55
Kep. Riau	100,00	76,54
Lampung	100,00	83,17
Maluku	41,67	89,53
Maluku Utara	58,33	79,75

Nusa Tenggara Barat	87,50	65,21
Nusa Tenggara Timur	100,00	82,32
Papua	100,00	55,17
Papua Barat	100,00	86,58
Papua Tengah	39,58	70,54
Papua Selatan	62,50	80,11
Papua Pegunungan	89,58	74,63
Papua Barat Daya	0,00	67,75
Riau	83,33	79,26
Sulawesi Barat	85,42	77,74
Sulawesi Selatan	79,17	78,55
Sulawesi Tengah	100,00	72,86
Sulawesi Tenggara	85,42	71,45
Sulawesi Utara	77,08	75,78
Sumatera Barat	89,58	70,87
Sumatera Selatan	62,50	70,71
Sumatera Utara	100,00	72,50
Rata-Rata	87,67	74,16

Kesimpulannya, analisis gap ini memperlihatkan bahwa tingkat *mirroring* antara Kominfo dan publik masih bervariasi antarprovinsi, dengan kendala utama berupa perbedaan persepsi dan ketidaklengkapan data. Untuk meningkatkan keselarasan, Kominfo perlu memperbaiki mekanisme

pelaporan, memperkuat survei persepsi publik, dan memastikan layanan informasi dievaluasi dari sisi pengguna, bukan hanya penyedia. Dengan langkah-langkah tersebut, pemenuhan hak publik dapat berlangsung lebih akurat, inklusif, dan sesuai pengalaman masyarakat.



# BAB V

## PENUTUP

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media  
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

# Analisis Capaian dan Pembobotan Indeks KPIP 2025

Dimensi	Indeks Dimensi
Input (10%)	87,27
Proses (10%)	85,59
Output (40%)	75,61
Outcome (40%)	75,13
Indeks KPIP 2025	77,58

Tabel di atas memperlihatkan capaian indeks pada empat dimensi utama: Input, Proses, Output, dan Outcome yang masing-masing memiliki bobot tertentu dalam perhitungan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) 2025. Dimensi Input dan Proses, yang masing-masing berbobot 10%, menunjukkan nilai yang relatif tinggi, yaitu 87,27 untuk Input dan 85,59 untuk Proses. Hal ini menandakan bahwa kesiapan sumber daya, regulasi, serta tata kelola internal lembaga berada dalam kondisi sangat baik dan mendukung pelaksanaan fungsi komunikasi publik.

Pada dimensi yang berbobot lebih besar, yaitu Output dan Outcome (masing-masing 40%), nilai yang diperoleh sedikit lebih rendah dibanding dimensi Input dan Proses. Output memiliki indeks sebesar 75,61, sedangkan Outcome mencapai 75,13. Nilai ini menggambarkan bahwa kualitas produk komunikasi publik serta dampak yang dirasakan masyarakat sudah berada pada kategori baik, tetapi masih menyimpan ruang peningkatan, khususnya dalam memastikan bahwa informasi publik benar-benar tersampaikan, dipahami, dan digunakan secara optimal oleh publik.

Jika seluruh dimensi digabungkan sesuai bobotnya, diperoleh Indeks KPIP 2025 sebesar 77,58. Nilai ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja komunikasi publik Kementerian berada pada tingkat baik, dengan fondasi internal yang kuat namun masih perlu memperkuat efektivitas pesan dan dampak komunikasi kepada masyarakat. Indeks ini sekaligus memberikan gambaran prioritas

kebijakan ke depan, yaitu memperbesar perhatian pada peningkatan kualitas output dan outcome agar gap antara kapasitas internal dan hasil eksternal semakin kecil.

## Kesimpulan

1. Secara agregat nasional, kinerja pengelolaan informasi publik berhasil menempati kategori “Baik” dengan perolehan nilai indeks sebesar 77,58. Angka ini merefleksikan bahwa standar minimal tata kelola komunikasi dan informasi di sebagian besar instansi pemerintah telah terpenuhi dan berjalan pada koridor yang tepat. Meskipun demikian, capaian ini belum mencapai angka maksimal, yang mengindikasikan masih terbukanya ruang perbaikan (*room for improvement*) yang signifikan untuk meningkatkan kualitas layanan menuju kategori “Sangat Baik” di masa mendatang.

2. Jika dikomparasikan dengan periode-periode sebelumnya, indeks KPIP pada tahun 2025 ini mencatatkan tren positif berupa peningkatan nilai dibandingkan indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) tahun lalu. Kenaikan ini menandakan adanya progresivitas dan adaptabilitas instansi pemerintah dalam merespons dinamika kebutuhan informasi masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu, peningkatan ini juga membuktikan bahwa rekomendasi perbaikan dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif untuk mendongkrak performa komunikasi publik secara nasional.

3. Dimensi *outcome* (75,13) teridentifikasi sebagai dimensi dengan perolehan nilai terendah dalam pengukuran periode ini, yang di dalamnya mencakup indikator vital berupa kepercayaan publik, partisipasi publik, dan pemenuhan hak publik. Rendahnya capaian pada aspek dampak ini menyiratkan bahwa meskipun aktivitas komunikasi telah dilaksanakan, efektivitasnya dalam membangun kepercayaan dan menggerakkan keterlibatan masyarakat masih belum maksimal. Hal ini menjadi sinyal penting bagi penyelenggara negara untuk mengevaluasi kembali apakah informasi yang didiseminasikan benar-benar telah memenuhi hak masyarakat untuk tahu (*right to know*) dan mampu

menciptakan dampak sosial yang positif.

4. Terdapat kesenjangan (*gap*) capaian yang cukup nyata antara nilai Indeks Kementerian dan Lembaga yang mencapai 88,70 dibandingkan dengan Pemerintah Daerah yang berada pada angka 82,95. Selisih angka ini mengonfirmasi hipotesis bahwa konsistensi tata kelola, kapasitas sumber daya birokrasi, serta kesiapan infrastruktur komunikasi publik cenderung lebih mapan dan matang di tingkat pusat. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut adanya program afirmasi atau pendampingan yang lebih intensif bagi pemerintah daerah guna meminimalisasi ketimpangan kualitas layanan informasi secara nasional.

5. Pengikutsertaan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kominfo pada Daerah Otonomi Baru (DOB), dalam survei ini berfungsi sebagai instrumen peninjauan awal (*baseline*) untuk memetakan urgensi kebutuhan komunikasi pembangunan dan layanan informasi publik di wilayah pemekaran. Hasil pengukuran awal ini menunjukkan capaian yang masih belum optimal, di mana nilai indeks secara umum tertahan di bawah angka 80, bahkan teridentifikasi beberapa provinsi yang mencatatkan skor sangat rendah, yakni kurang dari 50. Rendahnya capaian ini merefleksikan tantangan fundamental yang dihadapi DOB dalam membangun infrastruktur dan kapasitas kelembagaan komunikasi dari nol, sehingga memerlukan intervensi kebijakan dan pendampingan intensif agar tidak tertinggal jauh dari daerah induknya.

## Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari pengukuran Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik yang telah dilakukan, berikut merupakan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah.

### 1. Penguatan Orientasi Dampak Komunikasi

Mengingat dimensi *outcome* (kepercayaan, partisipasi, dan hak publik) memiliki skor terendah, instansi pemerintah harus menggeser paradigma kinerjanya dari sekadar pemenuhan kewajiban penyebaran informasi (*output*) menjadi penciptaan dampak nyata bagi masyarakat. Strategi komunikasi perlu

dirancang secara lebih inklusif untuk membuka ruang partisipasi publik yang substantif, bukan sekadar simbolis, guna menjamin terpenuhinya hak publik dalam mengakses informasi. Langkah perbaikan ini sangat krusial untuk memulihkan dan meningkatkan indeks kepercayaan publik (*public trust*), yang merupakan fondasi utama legitimasi program-program pemerintah.

### 2. Akselerasi Pemerataan Kualitas Antara Pusat dan Daerah

Untuk mengatasi disparitas nilai yang cukup lebar antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, diperlukan program transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang terstruktur dari pusat ke daerah. Kementerian dan Lembaga yang memiliki nilai indeks tinggi disarankan untuk menjadi mentor atau *role model* bagi pemerintah daerah melalui skema asistensi teknis dan pembakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi publik yang terintegrasi. Langkah ini esensial untuk memastikan bahwa standar kualitas pengelolaan informasi di daerah setara dengan standar nasional yang telah mapan di tingkat pusat.

### 3. Audit Komunikasi Dinas Kominfo

Konsistensi kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi kinerja KPIP oleh dinas provinsi dan persepsi publik ditemukan pada survei ini. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa tata kelola komunikasi publik di daerah tidak berjalan secara simetris dengan persepsi publik. Ketidaksiharian ini dapat menandakan bahwa instansi pemerintah menilai dirinya sudah bekerja optimal, namun masyarakat tidak merasakan dampak maupun kualitas komunikasi yang sama. Dalam kondisi tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah audit komunikasi publik secara menyeluruh, terutama untuk menilai apakah pesan, kanal komunikasi, frekuensi penyampaian, dan kualitas konten benar-benar sampai kepada publik. Audit dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan penekanan pada mencari tahu bagaimana publik mengonsumsi informasi, tingkat literasi digitalnya, serta hambatan struktural yang menyebabkan informasi

pemerintah tidak diterima secara merata. Faktor seperti hambatan geografis, akses internet, atau rendahnya penetrasi platform resmi pemerintah serta variabel lain perlu menjadi kontrol penelitian.

#### **4. Standarisasi perangkat audit dan monitoring KPIP publik**

Standarisasi perangkat audit dan monitoring KPIP publik menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, menerapkan prinsip, prosedur, dan indikator pengukuran komunikasi publik yang seragam. Dengan adanya standarisasi, kualitas data dan hasil evaluasi menjadi lebih reliabel, dapat dibandingkan antarwilayah maupun antarperiode, serta memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi kesenjangan kinerja secara akurat. Standarisasi juga memungkinkan proses pembelajaran lintas instansi dan replikasi praktik baik, sehingga peningkatan kinerja komunikasi publik tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi menjadi agenda nasional yang terstruktur. Keberadaan perangkat audit dan monitoring yang distandarkan memperkuat akuntabilitas, memastikan penggunaan sumber daya komunikasi publik yang tepat sasaran, dan mendukung terciptanya komunikasi pemerintah yang lebih efektif, responsif, dan terpercaya di mata publik.

#### **5. Intervensi Kebijakan Khusus bagi Daerah Otonomi Baru (DOB)**

Rendahnya capaian indeks pada Daerah Otonomi Baru (DOB), dengan beberapa provinsi mencatat nilai di bawah 50, menuntut adanya kebijakan afirmasi berupa pendampingan intensif dan alokasi sumber daya khusus. Pemerintah pusat perlu memprioritaskan pembangunan fondasi infrastruktur komunikasi dan peningkatan kompetensi SDM Diskominfo di wilayah-wilayah pemekaran tersebut sebagai langkah awal yang krusial. Tanpa adanya percepatan pembangunan kapasitas (*capacity building*) sejak dini, dikhawatirkan kesenjangan informasi di wilayah DOB akan semakin melebar dan menghambat efektivitas komunikasi pembangunan di masa depan.

#### **6. Peningkatan Standar Menuju Kategori “Sangat Baik”**

Meskipun secara nasional indeks KPIP telah mencapai kategori “Baik” dan menunjukkan tren positif, instansi pemerintah tidak boleh terjebak dalam zona nyaman (*complacency*). Momentum peningkatan ini harus dijaga dengan terus melakukan inovasi berbasis teknologi digital dan analitik data untuk merespons kebutuhan publik yang dinamis. Target selanjutnya harus diarahkan pada pencapaian kategori “Sangat Baik” dengan menempatkan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pengelolaan informasi publik.



Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media  
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

# Daftar Pustaka

- Alemanno, A. (2015). Stakeholder Engagement in Regulatory Policy. OECD Regulatory Policy Outlook 2015.
- Boone, W. J., Staver, J. R., & Yale, M. S. (2014). Rasch Analysis in the Human Sciences. Springer.
- Canel, M.-J., & Luoma-aho, V. (2019). Public Sector Communication: Closing Gaps Between Citizens and Public Organizations. Wiley Blackwell.
- Holtzhausen, D., Fullerton, J., Lewis, B. K., & Shipka, D. (2021). Principles of Strategic Communication. Routledge.
- Husna, A., & Budiman, L. (2023). Connecting the Unconnected: Lessons for Enhancing Fast and Reliable Internet from Southwest Sumba District.
- Ibo, H., Augustinah, F., & Sunarya, A. (2025). Analysis of The Implementation of MSME Digital Transformation in The 3T Region : A Case Study on The Program of The Cooperative, MSMES, Industry, and Trade Office of Puncak Jaya Regency, Central Papua. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 2(3), 739–747.
- Ibuot, U. P., Majemu, S. A., & Nwantah, F. (2021). Participatory Development Communication : An Audience-Centered Initiative. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 9(6), 223–229.
- Kabir, A., & Beryl, M. (2021). Contemporary Paradigm of Development Communication : Gaps & Dogma Between 2008 – 2018. *Developing Country Studies*, 11(5), 66–79. <https://doi.org/10.7176/DCS/11-5-06>
- Lennie, J., & Tacchi, J. (2013). Evaluating Communication for Development: A Framework for Social Change. Routledge.
- Mappisabbi, F. (2024). Strengthening Transparency and Accountability in Bureaucracy to Enhance Public Trust. *International Journal of Entrepreneurship and Management*, 1(4), 101–112.
- OECD. (2021). OECD Report on Public Communication: The Global Context and the Way Forward. OECD Publishing.
- Pananrangi, A. R., Ismail, I., Hamid, W., Maidin, A. M. R., Mustapa, Z., & Rizal, A. (2025). The Impact of the Post-Truth Era on Transparency and Accountability in Public Administration : Systematic Literature Review. *Journal of Posthumanism*, 3576, 3767–3789.
- Shah, Z., & Wei, L. (2022). Source Credibility and the Information Quality Matter in Public Engagement on Social Networking Sites During the COVID-19 Crisis. *Frontiers in Psychology*, 13(June), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.882705>
- Stoker, G. (2002). Governance As Theory: Five Propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28.
- Susanti, D., Tua, H., As'Ar, H., & Yulia, D. (2025). Impacts of community participation , multi-actor collaboration , transparency , and accountability on village financial governance in Rokan Hulu , Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 234–250.
- Susanti, T., & Anom, E. (2023). Optimizing Public Communication in the Digital Era : A Case Study of the Ministry of Communication and Information Technology in Indonesia. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 11(2), 144–149.

# Lampiran

## Lampiran 1. Informasi Sumber Data Primer

Data untuk penyusunan Indeks KPIP dikumpulkan dari beberapa sumber dan melalui dua pendekatan sebagai berikut:

### a. Data untuk Dimensi INPUT dan PROSES

Data diperoleh dari 91 Biro Humas/Komunikasi Publik/Pusat Penerangan di Kementerian/Lembaga (K/L) dan 36 Dinas Kominfo Provinsi sebagai unit pelaksana fungsi pelayanan informasi dan kehumasan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu dan Papua Tengah tidak mengumpulkan data hingga survei berakhir, sehingga tidak dihitung dalam pengukuran indeks K/L/D. Setiap instansi mengisi Form Daftar Pertanyaan. Sebelum pengisian, mereka mengikuti sosialisasi dan/atau wawancara mendalam untuk memastikan kelengkapan data serta keakuratan jawaban atas seluruh pertanyaan yang tersedia.

### b. Data untuk Dimensi OUTPUT dan OUTCOME

Data diperoleh melalui survei kepada masyarakat di ibu kota provinsi (36 kota). Pemilihan lokasi dilakukan dengan stratified random sampling, dimulai dari pemilihan kriteria publik kunci, yaitu akademisi, pelaku usaha, anggota profesi, organisasi non pemerintah, media dan unsur masyarakat. Jumlah sampel tiap provinsi adalah 30 orang, sebagai berikut:

No	Kelompok Publik Kunci	Jumlah	Kriteria Umum	Kriteria Khusus
1	Peneliti/Akademisi	3 (tiga) orang	Dosen dan/atau peneliti dengan pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun; spesialisasi di bidang komunikasi dan kebijakan publik lebih diutamakan.	Jika akademisi, diutamakan dari PTN; Jika peneliti dari lembaga independen, lembaganya minimal masih aktif sejak 10 tahun lalu.
2	Pelaku Usaha	9 (sembilan) orang	Pemilik usaha berbadan hukum (persekutuan, yayasan, koperasi, CV, Firma, PT) yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM serta aktif menjalankan/mengontrol usahanya;  Sudah berusaha minimal 5 tahun. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pendiri dari perusahaan rintisan (startup) di bidang teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaha Kecil (tenaga kerja 20 - 49 orang): 1 responden</li> <li>Usaha Menengah (tenaga kerja 51 - 99 orang): 1 responden</li> <li>Usaha Besar (tenaga kerja &gt; 100 orang): 1 responden</li> </ul>
3	Organisasi Non Pemerintah (Ornop)	3 (tiga) orang	Ketua atau kepala divisi komunikasi/informasi minimal tingkat kabupaten/kota dan sudah menjabat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun pada posisi tersebut;  Ornop tersebut masih aktif berkegiatan minimal sejak 15 tahun lalu dan bukan jadi bagian atau terafiliasi dengan ormas/partai politik.	Diutamakan dari ornop yang fokus kegiatannya: pembelaan/pendampingan hukum, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, community development.

4	Media	3 (tiga) orang	Ketua atau kepala divisi komunikasi informasi asosiasi jurnalis (minimal tingkat kabupaten/kota dan sudah menduduki posisi tersebut selama 1 (satu) tahun atau influencer (pemerengaruh);	<p>Jika jurnalis, diutamakan dari organisasi media yang diakui: AJI, IJT atau Asosiasi Media Siber Indonesia</p> <p>Jika <i>influencer</i>, utamanya individu yang dikenal masyarakat setempat, punya kanal di media sosial dengan tema spesifik (enumerator menginformasikan channel yang dikelola influencer tersebut ke Tim Pelaksana Lapangan - TPL).</p>
5	Organisasi Profesi	3 (tiga) orang	Ketua atau kepala divisi komunikasi informasi (minimal tingkat kabupaten/kota) dan sudah menduduki jabatan tersebut selama 1 tahun;	Diutamakan dari organisasi profesi pengacara/konsultan hukum, kedokteran/keperawatan, keuangan, arsitektur.
6	Masyarakat	9 (sembilan) orang	Tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori di atas	<p><b>8 responden</b></p> <p>Dipilih dari 3 (tiga) segmen berikut di bawah ini. Responden diharapkan menjabat sebagai ketua atau kepala divisi komunikasi/humas dari organisasi tersebut.</p> <p><b>Segmen 1</b> Serikat pekerja/petani/paguyuban/perhimpunan. Organisasi ini minimal sudah aktif sejak 10 tahun yang lalu. Jika berasal paguyuban kedaerahan, bukan berasal dari paguyuban yang senioritas di provinsi tersebut. Contoh: Paguyuban Banten Kalimantan Timur. Tapi, PKSS dimungkinkan karena populasi asal Sulawesi Selatan cukup tinggi di Kalimantan Timur.</p> <p><b>Segmen 2</b> Organisasi keagamaan yang telah aktif minimal sejak 20 tahun lalu (NU, Muhammadiyah, Persis, Nahdatul Wathan, Mat'laul Anwar, PGI, KWI, Walubi, PHDI), tidak lain ormas yang bersifat lokal saja. Jika dipilih dari segmen ini, perhatikan kesesuaian dengan karakteristik populasi di provinsi tersebut. Contoh: Persis masih relevan untuk Jawa Barat, tapi tidak untuk Jawa Timur atau Jawa Tengah.</p> <p><b>Segmen 3</b> Organisasi kepemudaan seperti HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, IMM, PMII atau organisasi kepemudaan yang bersifat lokal (tidak berjejaring secara nasional).</p>
				<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika responden pertama berasal dari segmen 1, maka responden kedua harus berasal dari segmen 2 atau 3.</li> <li>• Salah satu responden dapat diganti dengan penyandang disabilitas fisik.</li> </ul> <p><b>1 responden</b> berasal dari perwakilan Ombudsman di provinsi tersebut.</p>

Sumber data utama proses Input dan Proses diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh masing-masing instansi Kementerian, Lembaga dan Dinas Kominfo Daerah. Tata cara pengumpulan instrumen dilakukan secara hybrid. Melalui pendampingan online kepada tiap kementerian dan lembaga. Serta pendampingan secara offline kepada perwakilan dinas kominfo provinsi. Adapun jumlah K/L yang berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan indeks KPIP ini ada 93 instansi dan 36 Dinas kominfo provinsi. Dengan daftar sebagai berikut:

**Tabel Nama Kementerian**

No	Nama Kementerian
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7	Kementerian Koordinator Bidang Pangan
8	Kementerian Sekretariat Negara
9	Kementerian Dalam Negeri
10	Kementerian Luar Negeri
11	Kementerian Pertahanan
12	Kementerian Agama
13	Kementerian Hukum
14	Kementerian HAM
15	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
16	Kementerian Keuangan
17	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
18	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
19	Kementerian Kebudayaan
20	Kementerian Kesehatan
21	Kementerian Perdagangan
22	Kementerian Ketenagakerjaan
23	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
24	Kementerian Sosial
25	Kementerian Perindustrian
26	Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral
27	Kementerian Pekerjaan Umum
28	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
29	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30	Kementerian Transmigrasi
31	Kementerian Perhubungan
32	Kementerian Komunikasi dan Digital
33	Kementerian Pertanian
34	Kementerian Kehutanan
35	Kementerian Kelautan dan Perikanan

36	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
38	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
40	Kementerian Lingkungan Hidup
41	Kementerian Investasi dan Hilirisasi
42	Kementerian Koperasi
43	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah
44	Kementerian Pariwisata
45	Kementerian Ekonomi Kreatif
46	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
47	Kementerian Pemuda dan Olahraga
48	Kementerian Haji dan Umroh

**Tabel Nama Lembaga**

No	Nama Lembaga
1	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*
3	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4	Badan Pemeriksa Keuangan
5	Mahkamah Agung
6	Mahkamah Konstitusi
7	Komisi Yudisial
8	Kejaksaan Agung
9	Komisi Pemberantasan Korupsi
10	Komisi Pemilihan Umum
11	Badan Pengawas Pemilu
12	Ombudsman RI
13	Badan Intelijen Negara (BIN)
14	Badan Siber dan Sandi Negara
15	Badan Gizi Nasional
16	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
17	Badan Pusat Statistik
18	Lembaga Ketahanan Nasional
19	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
20	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
21	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
22	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
23	Badan Pangan Nasional
24	Lembaga Administrasi Negara
25	Arsip Nasional RI

26	Badan Kepegawaian Negara
27	Perpustakaan Nasional
28	Badan Standardisasi Nasional
29	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
30	Badan Pengawas Obat dan Makanan
31	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
32	Badan Informasi Geospasial
33	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
34	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
35	Badan Keamanan Laut
36	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
37	Badan Karantina Indonesia
38	Badan Narkotika Nasional
39	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
40	Komnas HAM*
41	Komnas Perlindungan Anak Indonesia
42	Komnas Perempuan
43	Badan Amil Zakat Nasional
44	Tentara Nasional Indonesia
45	Kepolisian Republik Indonesia
<i>*Tidak Berpartisipasi dalam survei</i>	

Tabel Nama Dinas Kominfo Provinsi	
No	Dinas Kominfo Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Selatan
4	Sumatera Barat
5	Bengkulu*
6	Riau
7	Kepulauan Riau
8	Jambi
9	Lampung
10	Bangka Belitung
11	Kalimantan Barat
12	Kalimantan Timur
13	Kalimantan Selatan
14	Kalimantan Tengah
15	Kalimantan Utara
16	Banten

17	DKI Jakarta
18	Jawa Barat
19	Jawa Tengah
20	Daerah Istimewa Yogyakarta
21	Jawa Timur
22	Bali
23	Nusa Tenggara Timur
24	Nusa Tenggara Barat
25	Gorontalo
26	Sulawesi Barat
27	Sulawesi Tengah
28	Sulawesi Utara
29	Sulawesi Tenggara
30	Sulawesi Selatan
31	Maluku Utara
32	Maluku
33	Papua Barat
34	Papua
35	Papua Tengah*
36	Papua Pegunungan
37	Papua Selatan
38	Papua Barat Daya
<i>*Tidak Berpartisipasi dalam survey</i>	

## Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

### 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas K/L/D

#### LAPORAN UJI INSTRUMEN

Kriteria

Nilai MNSQ berada pada rentang 0,5 - 1,5 (Boone et. al, 2014)

A. Kapasitas Institusi  
 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Pengelolaan komunikasi publik di organisasi tempat saya bekerja memiliki...  
**Tabel 1 a. Kapasitas Institusi (IC\_01)**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Mandat Resmi	Separation = 5,00 Item Reliability = 0,96 Cronbach's Alpha = 0,88	0,84	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Kepastian Hukum		1,35	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Struktur Organisasi yang Mendukung Proses Kerja		0,87	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Sumber Daya Manusia yang Memadai		0,84	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Sumber Daya Manusia yang Kompeten		1,53	<b>Item tidak reliabel</b>	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
F	Anggaran yang Memadai		1,28	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Kemudahan berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Lainnya		1,00	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Integrasi dengan Instansi Pemerintah Lainnya		1,05	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

**Tabel 1b. Kapasitas Institusi (IC\_02)**

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai),  
Organisasi tempat saya bekerja sejauh ini memproduksi Iklan Layanan Masyarakat yang .....

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Memicu respon positif	Separation = 2,65 Item Reliability = 0,88	1,12	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Bebas dari kepentingan pribadi		0,68	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Bebas dari kepentingan golongan		1,07	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

B. Komunikasi Strategis

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai),

Berdasarkan pengalaman saya, organisasi tempat saya bekerja melakukan hal-hal di bawah ini dalam pengelolaan komunikasi publik:

Tabel 2. Komunikasi Strategis (SC\_01)

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Pengumpulan Data Pendukung	Separation = 4,31 Item Reliability = 0,95 Cronbach's Alpha = 0,92	1,92	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
B	Pengumpulan Informasi dari Pemangku Kepentingan		1,26	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Analisis terhadap Situasi Terkini		0,78	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Analisis Pemangku Kepentingan		0,67	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Identifikasi Masalah		0,65	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Penetapan Tujuan/Sasaran		0,62	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Penyusunan Linimasa (timeline)		0,89	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Penyusunan Anggaran		0,93	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I	Perancangan Pesan		0,98	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
J	Perencanaan media (baik media sosial maupun media daring) yang akan digunakan		0,68	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
K	Penugasan Staf/Orang		0,93	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
L	Koordinasi Internal		1,00	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
M	Monitoring (Sebelum Pelaksanaan Berakhir)		1,08	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
N	Evaluasi (Sesudah Pelaksanaan Berakhir)		1,11	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

C. Hak Publik

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak mudah s.d.6=sangat mudah), Berdasarkan pengalaman Organisasi Anda, sejauh mana organisasi Anda telah memastikan agar publik mudah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3. Hak Publik (PR\_01)

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Mencari informasi publik	Separation = 2,91 Item Reliability = 0,89 Cronbach's Alpha = 0,94	0,82	Item tidak reliabel	Item dapat digunakan
B	Memperoleh informasi publik		0,84	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Menyampaikan informasi kepada lembaga tempat saya bekerja		0,98	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Menyampaikan pendapat di depan umum secara bebas		1,85	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
E	Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik sebelum kebijakan tersebut disahkan		0,88	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Mengetahui informasi mengenai program kebijakan publik yang sedang dijalankan		0,91	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan publik oleh pemerintah dilakukan		1,02	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Mengetahui alasan di balik pengambilan keputusan publik oleh pemerintah		0,85	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I	Memberikan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan program pemerintah		0,73	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

D. Cakupan Kerja

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Se jauh mana organisasi/lembaga tempat anda bekerja melakukan hal-hal di bawah ini dengan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (sebelumnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik) Kementerian Komunikasi dan Digital

Tabel 4a. Cakupan Kerja (SOW\_01)

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Melakukan koordinasi	Separation = 1,77 Item Reliability = 0,76	0,63	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Mendapatkan bimbingan teknis		0,89	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Mendapatkan pemantauan		0,75	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Mendapatkan evaluasi		0,91	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Melaporkan data dan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah		0,61	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Memperoleh bahan informasi publik tentang kebijakan dan program pemerintah		0,86	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Menyebarkan informasi dari Ditjen KPM tentang kebijakan dan program pemerintah kepada publik.		2,37	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks

**Tabel 4b. Cakupan Kerja (SOW\_04)**

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah kepada pemangku kepentingan secara:

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Lintas Sektoral	Separation = 0,00	0,93	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Lintas Daerah	Item Reliability = 0,00	1,43	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Cepat	Cronbach's Alpha = 0,95	1,23	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Tepat		0,59	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Objektif		1,17	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Berkualitas baik		0,96	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Berwawasan nasional		0,66	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

**Tabel 4c. Cakupan Kerja (SOW\_05)**

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi saya terlibat dalam koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk hal-hal di bawah ini :

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Perencanaan Komunikasi Publik	Separation = 1,33	0,62	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Penyiapan Komunikasi Publik	Item Reliability = 0,64	0,47	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
C	Pelaksanaan Komunikasi Publik	Cronbach's Alpha = 0,98	1,45	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Pemantauan atau monitoring Komunikasi Publik		1,27	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Evaluasi Komunikasi Publik		1,00	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Perumusan materi informasi publik tentang kebijakan dan program pemerintah yang akan disebarluaskan ke pemangku kepentingan		1,10	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

**Tabel 4d. Cakupan Kerja (SOW\_06)**

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Penyusunan strategi komunikasi publik di organisasi tempat saya bekerja mencakup program...

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Komunikasi tematik daerah atau Kementerian/Lembaga	Separation = 0,71 Item Reliability = 0,33	0,97	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Prioritas daerah atau Kementerian/Lembaga		0,50	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Penanganan komunikasi krisis (mencakup penyiapan atau mitigasi, pengelolaan, dan evaluasi)		1,38	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

**Tabel 4e. Cakupan Kerja (SOW\_07)**

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Proses penyusunan konten yang diselenggarakan organisasi saya meliputi hal-hal sebagai berikut:

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Membentuk tim penyusun konten	Separation = 2,18 Item Reliability = 0,83	0,99	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Menyusun konten terkait kebijakan dan program pemerintah		0,61	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Mengemas ulang konten yang berasal dari Pemerintah Pusat		1,07	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

**Tabel 4f. Cakupan Kerja (SOW\_08)**

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi saya dalam hal Diseminasi informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik melakukan hal-hal di bawah ini.

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Mengelola media yang dimiliki instansi	Separation = 0,88	0,46	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
B	Menyelenggarakan diseminasi informasi melalui media yang dimiliki instansi	Item Reliability = 0,44	1,02	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Menyelenggarakan evaluasi pemanfaatan media yang dimiliki instansi		1,39	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

**Tabel 4g. Cakupan Kerja (SOW\_09)**

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Berikut ini adalah gambaran mengenai pelayanan informasi publik di organisasi tempat saya bekerja.

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Separation = 1,03	1,75	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
B	Memfaatkan teknologi informasi (Contoh: aplikasi berbagi pakai, situs web, aplikasi, dst)	Item Reliability = 0,52	2,55	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
C	Merencanakan prosedur pengaduan masyarakat (Contoh bukti: Prosedur Operasional Baku (POB) atau Standard Operating Procedure (SOP))		0,76	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Menyapkan sarana pengaduan masyarakat (Contoh kanal komunikasi yang digunakan)		0,71	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Menyapkan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat		1,54	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
F	Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat		0,20	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
G	Melaksanakan monitoring pengelolaan pengaduan masyarakat		0,31	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
H	Melaksanakan pelaporan pengelolaan pengaduan masyarakat.		0,39	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
I	Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat		0,67	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

**Tabel 4h. Cakupan Kerja (SOW\_10)**

Dari skala 1 –6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Berikut adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi saya demi menjalin hubungan/relasi dengan media

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Konferensi pers (press conference)	Separation = 2,24 Item Reliability = 0,83	1,03	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Kunjungan (oleh) pers (site visit)		0,80	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Kunjungan ke media (media visit)		1,10	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Pertemuan dengan pemimpin redaksi (editor's meeting)		0,69	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Liputan media		1,23	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Klarifikasi pemberitaan		1,69	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks

**Tabel 4i. Cakupan Kerja (SOW\_11)**

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi Saya dalam hal Kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau komunitas/kelompok lainnya melakukan hal-hal berikut:

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Melaksanakan pemetaan komunitas	Separation = 2,07	1,48	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Melaksanakan koordinasi antar instansi	Item Reliability = 0,81	0,84	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia		0,68	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Menyelenggarakan/memfasilitasi pengembangan kapasitas (bimbingan teknis/ workshop/lokakarya/sarasehan/forum/ kegiatan peningkatan literasi informasi)		0,55	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Menyediakan bahan informasi bersama			Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Merancang bahan informasi bersama		0,53	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
G	Melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki komunitas/kelompok lainnya		0,85	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Melaksanakan kompetisi atau pemberian penghargaan bagi komunitas/kelompok lainnya		1,62	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
I	Melaksanakan monitoring dan evaluasi		1,66	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks

**Tabel 4j. Cakupan Kerja (SOW\_12)**

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi Saya Melakukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik (SDMKP) dengan cara:

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Memetakan kebutuhan pengembangan kapasitas	Separation = 1,08 Item Reliability = 0,54	1,67	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
B	Melaksanakan workshop/lokakarya/bimbingan teknis		0,77	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Memfasilitasi pengembangan kapasitas		0,53	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Melakukan evaluasi hasil pengembangan kapasitas		0,92	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

**Tabel 4k. Cakupan Kerja (SOW\_13)**

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi saya Melakukan kegiatan Monitoring terkait hal-hal berikut:

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Informasi kebijakan	Separation = 0,00 Item Reliability = 0,00	1,80	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
B	Opini publik		0,47	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
C	Aspirasi Publik		0,64	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

E. Prinsip Komunikasi Publik  
 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak setuju s.d 6=sangat setuju), Berdasarkan pengalaman saya, organisasi tempat saya bekerja telah melakukan hal-hal di bawah ini terkait komunikasi program dan kebijakan pemerintah

**Tabel 5. Prinsip Komunikasi Publik**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Mendiseminasikan informasi publik secara proaktif	$\text{Separation} = \frac{2,50}{\text{Item Reliability}} = 0,86$	0,97	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi		0,79	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok		0,82	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Menyediakan informasi kampanye komunikasi publik		0,63	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Menyediakan informasi mengenai anggaran kampanye komunikasi publik		1,02	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Menyediakan informasi mengenai hasil yang diharapkan dari kampanye komunikasi publik		0,91	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Menyediakan informasi mengenai dampak dari kampanye komunikasi publik		0,96	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Mendengarkan masukan masyarakat ketika terjadi situasi darurat atau krisis		1,92	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks

F. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Dari skala 1 – 6 (1 =sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Se jauh mana Organisasi tempat Anda bekerja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan terkait kebijakan dan program pemerintah?

**Tabel 6a. Menyampaikan Informasi**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Akademisi/ahli	Separation = 4,67 Item Reliability = 0,96	1,14	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Pelaku usaha		0,95	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Instansi Pemerintah/OPD Lainnya		0,90	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D.	Media Massa		0,94	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E.	Platform Digital		0,65	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F.	Influencer		1,16	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G.	Tokoh Masyarakat		0,95	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H.	Tokoh Agama		1,19	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I.	Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok/komunitas lainnya		1,03	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Sejauh mana Organisasi tempat Anda bekerja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan terkait kebijakan dan program pemerintah?

**Tabel 6b. Menerima Informasi atau Umpan Balik**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Akademisi/ahli	Separation = 4,79 Item Reliability = 0,96	0,89	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Pelaku usaha		1,04	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Instansi Pemerintah/OPD Lainnya		0,94	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D.	Media Massa		0,90	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E.	Platform Digital		0,64	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F.	Influencer		1,14	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G.	Tokoh Masyarakat		0,92	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H.	Tokoh Agama		1,30	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I.	Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok/komunitas lainnya		1,00	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Se jauh mana Organisasi tempat Anda bekerja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan terkait kebijakan dan program pemerintah?

**Tabel 6c. Bertukar Informasi untuk Membangun Dialog**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Akademisi/ahli	Separation = 4,55 Item Reliability = 0,95	0,85	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Pelaku usaha		0,92	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Instansi Pemerintah/OPD Lainnya		0,96	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D.	Media Massa		1,01	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E.	Platform Digital		0,78	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F.	Influencer		1,16	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G.	Tokoh Masyarakat		0,92	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H.	Tokoh Agama		1,26	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I.	Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok/komunitas lainnya		0,89	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Se jauh mana Organisasi tempat Anda bekerja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan terkait kebijakan dan program pemerintah?

**Tabel 6d. Melibatkan dalam Perencanaan/Penyjapan**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Akademisi/ahli	Separation = 4,06 Item Reliability = 0,94	0,70	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Pelaku usaha		0,81	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Instansi Pemerintah/OPD Lainnya		0,79	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D.	Media Massa		1,33	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E.	Platform Digital		1,46	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F.	Influencer		1,04	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G.	Tokoh Masyarakat		0,84	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H.	Tokoh Agama		1,13	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I.	Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok/komunitas lainnya		1,02	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Sejauh mana Organisasi tempat Anda bekerja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan terkait kebijakan dan program pemerintah?

Tabel 6e. Melibatkan dalam Pelaksanaan

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Akademisi/ahli	Separation = 3,94 Item Reliability = 0,94	0,89	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Pelaku usaha		1,11	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Instansi Pemerintah/OPD Lainnya		0,86	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D.	Media Massa		0,98	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E.	Platform Digital		1,11	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F.	Influencer		1,41	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G.	Tokoh Masyarakat		0,80	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H.	Tokoh Agama		1,15	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I.	Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok/komunitas lainnya		0,88	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Sejahter mana Organisasi tempat Anda bekerja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan terkait kebijakan dan program pemerintah?

**Tabel 6f. Melibatkan dalam Pemantauan/ Monitoring**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Akademisi/ahli	Separation = 4,15 Item Reliability = 0,95	1,08	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Pelaku usaha		0,85	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Instansi Pemerintah/OPD Lainnya		0,83	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D.	Media Massa		1,26	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E.	Platform Digital		1,41	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F.	Influencer		0,99	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G.	Tokoh Masyarakat		0,80	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H.	Tokoh Agama		1,13	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I.	Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok/komunitas lainnya		1,02	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

Dari skala 1 – 6 (1 =sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Sejauh mana Organisasi tempat Anda bekerja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan terkait kebijakan dan program pemerintah?

**Tabel 6g. Melibatkan dalam Evaluasi**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Akademisi/ahli	Separation = 3,82 Item Reliability = 0,94	1,08	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Pelaku usaha		0,88	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Instansi Pemerintah/OPD Lainnya		0,78	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D.	Media Massa		1,24	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E.	Platform Digital		1,50	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F.	Influencer		0,97	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G.	Tokoh Masyarakat		0,78	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H.	Tokoh Agama		1,10	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I.	Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok/komunitas lainnya		1,01	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Se jauh mana Organisasi tempat Anda bekerja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan terkait kebijakan dan program pemerintah?

**Tabel 6h. Perencanaan**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Kelompok Perempuan	Separation = 2,94 Item Reliability = 0,90	1,08	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Kelompok Anak		1,12	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Kelompok Lanjut Usia		0,72	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D.	Kelompok Disabilitas		0,83	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E.	Masyarakat Wilayah 3T		1,52	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Se jauh mana Organisasi tempat Anda bekerja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan terkait kebijakan dan program pemerintah?

Tabel 6i. Pelaksanaan

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Kelompok Perempuan	Separation = 2,88 Item Reliability = 0,89	1,03	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Kelompok Anak		1,02	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Kelompok Lanjut Usia		0,89	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D.	Kelompok Disabilitas		0,91	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E.	Masyarakat Wilayah 3T		1,27	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Sejauh mana Organisasi tempat Anda bekerja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan terkait kebijakan dan program pemerintah?

Tabel 6j. Evaluasi

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Kelompok Perempuan	Separation = 2,97 Item Reliability = 0,90	1,14	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Kelompok Anak		1,16	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Kelompok Lanjut Usia		0,75	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D.	Kelompok Disabilitas		0,90	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E.	Masyarakat Wilayah 3T		1,12	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

G. Informasi Terpercaya

Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi saya Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah kepada pemangku kepentingan secara:

Tabel 7. Informasi Terpercaya

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Akurat	Separation = 0,00 Item Reliability = 0,00	1,29	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Benar		0,56	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Tidak menyesatkan		0,37	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks
D.	Mudah dipahami		0,90	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E.	Tepat waktu		1,61	Item tidak reliabel	Tidak dimasukkan ke dalam Indeks

## 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Publik Kunci

### LAPORAN UJI INSTRUMEN PUBLIK KUNCI

Kriteria

Nilai MNSQ berada pada rentang 0,5 - 1,5 (Boone et. al, 2014)

#### A. Kredibilitas Media

Dari skala 1 – 10 (1=sangat rendah s.d 10=sangat tinggi), menurut Anda, seberapa besar **tingkat kredibilitas** pada setiap **jenis media** berikut sebagai **sumber informasi tentang kebijakan dan program pemerintah?** (MC\_01) → **pertanyaan menumpuk**

**Tabel 1a. Kredibilitas Media (Memberikan Informasi)**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	<b>Iklan Layanan Masyarakat</b> Televisi	Separation = 2,36 Item Reliability = 0,85 Cronbach's Alpha = 0,81	0,89	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	<b>Iklan Layanan Masyarakat</b> Radio		0,89	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	<b>Iklan Layanan Masyarakat</b> Media Cetak		1,19	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	<b>Iklan Layanan Masyarakat</b> Media Daring		0,88	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	<b>Iklan Layanan Masyarakat</b> Media Sosial		0,84	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	<b>Iklan Layanan Masyarakat</b> Internet/situs web		0,80	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Influencer		1,21	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Kolaborasi Pemerintah dan Influencer		1,11	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I	Artikel Berita		0,76	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
J	Siaran Berita		0,96	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
K	Tokoh Masyarakat		1,42	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
L	Tokoh Agama		1,33	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
M	Netizen/warganet		0,92	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
N	Situs web resmi pemerintah		0,94	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
O	Aplikasi pemerintah		0,71	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
P	Media sosial pemerintah		1,01	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
Q	Lembaga Penyiaran Publik	1,13	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan	
R	Lainnya	1,48	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan	

**Tabel 1b. Kredibilitas Media (Jujur)**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Televisi	Separation = 2,32 Item Reliability = 0,84 Cronbach's Alpha = 0,80	1,01	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Radio		0,87	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Media Cetak		1,46	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Media Daring		0,76	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Media Sosial		0,53	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Internet/situs web		1,14	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Influencer		1,29	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Kolaborasi Pemerintah dan Influencer		1,32	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I	Artikel Berita		0,79	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
J	Siaran Berita		0,91	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
K	Tokoh Masyarakat		1,12	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
L	Tokoh Agama		1,47	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
M	Netizen/warganet		0,94	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
N	Situs web resmi pemerintah		0,85	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
O	Aplikasi pemerintah		0,85	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
P	Media sosial pemerintah		0,93	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
Q	Lembaga Penyiaran Publik		0,82	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
R	Lainnya		1,59	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki

Tabel 1c. Kredibilitas Media (Dapat Dipercaya)

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Televisi	Reliabilitas = Separation = 2,61 Item Reliability = 0,87 Cronbach's Alpha = 0,82	0,90	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Radio		0,83	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Media Cetak		1,47	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Media Daring		0,69	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Media Sosial		0,38	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
F	Internet/situs web		1,06	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Influencer		1,35	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Kolaborasi Pemerintah dan Influencer		1,18	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I	Artikel Berita		0,81	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
J	Siaran Berita		0,91	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
K	Tokoh Masyarakat		1,43	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
L	Tokoh Agama		1,68	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
M	Netizen/warganet		1,00	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
N	Situs web resmi pemerintah		0,89	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
O	Aplikasi pemerintah		0,78	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
P	Media sosial pemerintah		0,90	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
Q	Lembaga Penyiaran Publik	0,83	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan	
R	Lainnya	1,77	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki	

Tabel 1d. Kredibilitas Media (Ahli/Kompeten)

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Televisi	Separation = 3,05 Item Reliability = 0,90 Cronbach's Alpha = 0,82	1,01	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Radio		0,86	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Media Cetak		1,36	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Media Daring		0,80	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Media Sosial		0,34	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
F	Internet/situs web		1,07	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Influencer		1,29	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Kolaborasi Pemerintah dan Influencer		1,39	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I	Artikel Berita		0,81	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
J	Siaran Berita		0,92	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
K	Tokoh Masyarakat		1,56	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
L	Tokoh Agama		1,44	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
M	Netizen/warganet		0,31	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
N	Situs web resmi pemerintah		0,12	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
O	Aplikasi pemerintah		0,74	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
P	Media sosial pemerintah		0,82	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
Q	Lembaga Penyiaran Publik		0,83	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
R	Lainnya		1,55	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki

B. Hak Publik Terhadap Akses Informasi

Dari skala 1 – 10 (1=sangat tidak mudah s.d 10=sangat mudah), Berdasarkan pengalaman anda terkait informasi publik. **Sejauh mana anda menilai kemudahan terhadap hal-hal yang Anda butuhkan sebagai berikut: (PR\_01)**

**Tabel 2. Hak Publik**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Mencari informasi publik	Separation = 4,31 Item Reliability = 0,95 Cronbach's Alpha = 0,92	1,36	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Memperoleh informasi publik		1,46	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Memiliki informasi publik		0,84	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Menyimpan informasi publik		0,78	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Mengolah informasi publik		0,75	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Menyampaikan informasi publik		1,37	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Menyampaikan pendapat di depan umum secara bebas		1,40	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik sebelum kebijakan tersebut disahkan		0,60	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I	Mengetahui informasi mengenai program kebijakan publik yang sedang dijalankan		0,52	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
J	Mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan publik oleh pemerintah dilakukan		0,95	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
K	Mengetahui alasan di balik pengambilan keputusan publik oleh pemerintah		0,73	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
L	Memberikan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan program pemerintah		1,08	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

C. Prinsip Komunikasi Publik

Dari skala 1 – 10 (1=sangat tidak setuju s.d 10=sangat setuju), Berdasarkan pengalaman anda pemerintah telah: (PCP\_01)

Tabel 3a. Prinsip Komunikasi Publik

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Aktif memberikan informasi ke-pada publik	Reliabilitas Separation = 1,90 Item Reliability = 0,78 Cronbach's Alpha = 0,96	1,62	Item tidak reliabel	
B	Memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi		0,78	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok		0,52	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan Letak pertanyaan ini perlu dipindah dijauhkan dari item B. Kata "kelompok" dapat ditambahkan konteks yang lebih spesifik.
D	Memberikan informasi yang jelas mengenai program dan kebijakan kepada publik		0,67	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Memberikan informasi yang jelas mengenai anggaran program dan kebijakan kepada publik		0,70	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Memberikan informasi yang jelas mengenai hasil yang diharapkan dari kampanye kepada publik		1,09	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
G	Memberikan informasi yang jelas mengenai dampak dari kampanye kepada publik		0,86	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Mendengarkan masukan masyarakat ketika terjadi situasi darurat atau krisis		1,43	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I	Memperbaiki kebijakan dan program mereka berdasarkan pengalaman atau hasil yang sudah terjadi sebelumnya		0,95	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

Dari skala 1 – 10 (1=sangat tidak setuju s.d 10=sangat setuju), Menurut Anda, sejauh mana Anda setuju bahwa pemerintah melibatkan aktor-aktor berikut dalam proses perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik? (PCP\_02)

Tabel 3b. Prinsip Komunikasi Publik (Merancang)

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Akademisi/ahli	Separation = 3,89 Item Reliability = 0,94 Cronbach's Alpha = 0,89	1,38	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Pelaku Bisnis		1,15	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Instansi Pemerintah Lainnya		1,09	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Komunitas informasi masyarakat (KIM) atau komunitas/kelompok lainnya		1,05	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Media Massa		0,85	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Kelompok Perempuan		0,39	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
G	Kelompok Anak		0,75	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Kelompok Lanjut Usia		0,53	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I	Penyandang Disabilitas		0,58	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
J	Masyarakat 3 T		0,92	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
K	Lainnya		2,45	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki

Tabel 3c. Prinsip Komunikasi Publik (Melaksanakan)

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Akademisi/ahli	Separation = 4,26 Item Reliability = 0,95 Cronbach's Alpha = 0,86	0,99	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B	Pelaku Bisnis		1,35	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Instansi Pemerintah Lainnya		1,17	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Komunitas informasi masyarakat (KIM) atau komunitas/kelompok lainnya		0,91	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Media Massa		0,97	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Kelompok Perempuan		0,47	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
G	Kelompok Anak		0,47	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
H	Kelompok Lanjut Usia		0,40	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
I	Penyandang Disabilitas		0,55	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
J	Masyarakat 3 T		1,17	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
K	Lainnya		3,03	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki

Tabel 3c. Prinsip Komunikasi Publik (Mengevaluasi)

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Akademisi/ahli	Separation = 4,29 Item Reliability = 0,95 Cronbach's Alpha = 0,85	1,54	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
B	Pelaku Bisnis		0,96	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C	Instansi Pemerintah Lainnya		0,86	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D	Komunitas informasi masyarakat (KIM) atau komunitas/kelompok lainnya		0,98	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
E	Media Massa		1,10	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
F	Kelompok Perempuan		0,39	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
G	Kelompok Anak		0,64	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H	Kelompok Lanjut Usia		0,43	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
I	Penyandang Disabilitas		0,54	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
J	Masyarakat 3 T		1,05	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
K	Lainnya		2,82	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki

#### D. Pelibatan Pemangku Kebijakan

Dari skala 1 – 10 (1=sangat tidak setuju s.d 10=sangat setuju), Dalam hal kebijakan dan program pemerintah, pihak-pihak di bawah ini menurut pendapat saya... (SE\_01)

**Tabel 4a. Pelibatan Pemangku Kebijakan (Sumber Informasi)**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Akademisi/ahli	Separation = 3,46 Item Reliability = 0,92 Cronbach's Alpha = 0,83	1,46	Reliabilitas item baik	Variabel perlu ditinjau kembali
B	Pelaku Bisnis		0,61	Reliabilitas item baik	
C	Instansi Pemerintah		1,16	Reliabilitas item baik	
D	Media Massa		1,21	Reliabilitas item baik	
E	Platform Digital		0,62	Reliabilitas item baik	
F	Influencer		0,44	Item tidak reliabel	
G	Tokoh Agama		0,71	Reliabilitas item baik	
H	Tokoh Masyarakat		0,36	Item tidak reliabel	
I	Komunitas/ kelompok/ Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)		1,03	Reliabilitas item baik	
J	Lainnya		3,22	Item tidak reliabel	

**Tabel 4b. Pelibatan Pemangku Kebijakan (Jujur)**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Akademisi/ahli	Separation = 3,95 Item Reliability = 0,94 Cronbach's Alpha = 0,88	1,05	Reliabilitas item baik	Variabel perlu ditinjau kembali
B	Pelaku Bisnis		0,50	Reliabilitas item baik	
C	Instansi Pemerintah		0,59	Reliabilitas item baik	
D	Media Massa		0,60	Reliabilitas item baik	
E	Platform Digital		0,47	Item tidak reliabel	
F	Influencer		0,89	Reliabilitas item baik	
G	Tokoh Agama		0,66	Reliabilitas item baik	
H	Tokoh Masyarakat		0,52	Item tidak reliabel	
I	Komunitas/ kelompok/ Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)		1,57	Item tidak reliabel	
J	Lainnya		3,67	Item tidak reliabel	

Tabel 4c. Pelibatan Pemangku Kebijakan (Dapat Dipercaya)

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Akademisi/ahli	Separation = 4,17 Item Reliability = 0,85 Cronbach's Alpha = 0,87	1,65	Item tidak reliabel	Variabel perlu ditinjau kembali
B	Pelaku Bisnis		0,48	Item tidak reliabel	
C	Instansi Pemerintah		0,55	Reliabilitas item baik	
D	Media Massa		0,54	Reliabilitas item baik	
E	Platform Digital		0,38	Item tidak reliabel	
F	Influencer		0,50	Item tidak reliabel	
G	Tokoh Agama		0,78	Reliabilitas item baik	
H	Tokoh Masyarakat		0,64	Reliabilitas item baik	
I	Komunitas/ kelompok/ Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)		1,31	Reliabilitas item baik	
J	Lainnya		3,48	Item tidak reliabel	

Tabel 4d. Pelibatan Pemangku Kebijakan (Ahli/Kompeten)

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A	Akademisi/ahli	Separation = 4,40 Item Reliability = 0,95 Cronbach's Alpha = 0,84	1,39	Reliabilitas item baik	Variabel perlu ditinjau kembali
B	Pelaku Bisnis		0,44	Item tidak reliabel	
C	Instansi Pemerintah		0,70	Reliabilitas item baik	
D	Media Massa		0,55	Reliabilitas item baik	
E	Platform Digital		0,36	Item tidak reliabel	
F	Influencer		0,90	Reliabilitas item baik	
G	Tokoh Agama		0,79	Reliabilitas item baik	
H	Tokoh Masyarakat		0,54	Reliabilitas item baik	
I	Komunitas/ kelompok/ Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)		1,52	Item tidak reliabel	
J	Lainnya		3,20	Item tidak reliabel	

E. Informasi Terpercaya

Dari skala 1 – 10 (1=sangat tidak setuju s.d 10=sangat setuju), Menurut Anda, sejauh mana Anda menilai informasi tentang kebijakan dan program pemerintah sebagai berikut? (TI\_01)

Tabel 5. Informasi Terpercaya

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
1	Informasi yang diberikan pemerintah benar sesuai dengan kondisi sebenarnya	Separation = 2,04 Item Reliability = 0,81 Cronbach's Alpha = 0,94	0,94	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
2	Informasi disampaikan dengan detail dan presisi (misalnya jumlah, tanggal dan rincian lainnya)		0,50	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
3	Informasi tidak menimbulkan salah tafsir atau kebingungan		0,99	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
4	Informasi menggunakan bahasa dan format yang jelas sehingga mudah dipahami publik		1,52	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
5	Informasi disampaikan pada saat yang diperlukan/ relevan (tepat waktu)		0,69	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

F. Kepercayaan Publik

Dari skala 1 – 10 (1=sangat tidak percaya s.d 10=sangat percaya), seberapa percaya Anda terhadap instansi berikut:

**Tabel 6a. Kepercayaan Publik**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Pemerintah Pusat	$\text{Separation} = 2,04$ $\text{Item Reliability} = 0,0$ $\text{Cronbach's Alpha} = 0,0$	1,25	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Pemerintah Provinsi		1,09	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Pemerintah Kabupaten/Kota		1,20	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
D.	Pelayanan yang diberikan Pemerintah Pusat		0,33	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
E.	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Pusat		0,72	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan Letak pertanyaan ini perlu dipindah dijauhkan dari item D.
F.	Kerja sama Pemerintah Pusat dengan pihak swasta		1,51	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki
G.	Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah		0,57	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
H.	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah		0,57	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
I.	Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta		1,55	Item tidak reliabel	Item dapat dihapus atau dapat diperbaiki

Saya mendukung program dan kebijakan yang dijalankan dan dikeluarkan oleh...

Dari skala 1 – 10 (1=sangat tidak mendukung s.d 10=sangat mendukung), seberapa mendukung Anda dalam program dan kebijakan yang dijalankan dan dikeluarkan oleh instansi berikut:

**Tabel 6b. Kepercayaan Publik**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Pemerintah Pusat	Separation = 1,25 Item Reliability = 0,61 Cronbach's Alpha = 0,73	1,37	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Pemerintah Provinsi		0,58	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Pemerintah Kabupaten/Kota		0,93	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

**G. Partisipasi Publik**

Dari skala 1 – 10 (1=sangat tidak setuju s.d 10=sangat setuju), Berdasarkan pengetahuan saya, masyarakat telah dilibatkan dalam...

**Tabel 7. Partisipasi Publik**

Kode	Item	Reliabilitas	MNSQ	Interpretasi	Rekomendasi
A.	Penyusunan program dan kebijakan pemerintah	Separation = 2,17 Item Reliability = 0,83 Cronbach's Alpha = 0,73	0,80	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
B.	Pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah		0,85	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan
C.	Evaluasi program dan kebijakan pemerintah		1,10	Reliabilitas item baik	Item dapat digunakan

### Lampiran 3. Perhitungan Indeks KPIP Tahun 2025

#### Tahap 1: Perhitungan Skor Variabel (Level Mikro)

Pada tahap ini, kita menghitung rata-rata skor dari setiap item pertanyaan untuk mendapatkan nilai tunggal bagi setiap variabel.

$$V_j = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} x_{ji}$$

Keterangan:

$x_{ji}$  = skor item ke-i pada variabel j

$n_j$  = jumlah item dalam variabel j

$V_j$  = rata-rata nilai variabel j

#### Tahap 2: Pengukuran Per-Dimensi (Level Meso)

Pada tahap ini, nilai variabel-variabel dikelompokkan dan dirata-ratakan berdasarkan dimensinya.

- Input : 1 variabel (IC)
- Proses : 6 Variabel (SC, PR, SOW, PCP, TI, SE)
- Output : 3 Variabel (PCP, SE, TI)
- Outcome : 3 Variabel (PP, PT, PR)

Rumus umum untuk dimensi D dengan m variabel:

$$V_j = \frac{1}{m} \sum_{j=i}^m V_j$$

Jadi:

$$D_{input} = V_{input}$$

$$D_{Proses} = \frac{V_{P1} + V_{P2} + V_{P3} + V_{P4} + V_{P5} + V_{P6}}{6}$$

$$D_{output} = \frac{V_{O1} + V_{O2} + V_{O3}}{3}$$

$$D_{outcome} = \frac{V_{Oc1} + V_{Oc2} + V_{Oc3}}{3}$$

### Tahap 3: Konversi Skala Indeks (Normalisasi)

Agar Indeks KPIP mudah dibaca, nilai dimensi perlu dikonversi menjadi 1-100. Jika diawal menggunakan Skala Likert ( 1-6), maka perlu rumus konversi.

$$\text{Indeks\%} = \frac{D}{6} \times 100$$

### Tahap 4: Pembobotan & Indeks Akhir (Level Makro)

Tahap terakhir adalah menggabungkan keempat dimensi menggunakan bobot yang telah ditetapkan untuk mendapatkan nilai akhir Indeks KPIP.

Bobot yang diberikan:

- Input : 10 %
- Proses : 10 %
- Output : 40 %
- Outcome : 40 %

Sehingga Rumus Indeks:

$$\text{Indeks} = 10 \% (D_{\text{Input}}) + 10 \% (D_{\text{Proses}}) + 40 \% (D_{\text{Output}}) + 40 \% (D_{\text{Outcome}})$$

Struktur pembobotan Indeks KPIP mengadopsi pendekatan Results Based Management yang bersifat progresif. Kami menetapkan komposisi bobot: Input (10%), Proses (10%), Output (40%), dan Outcome (40%).

Secara metodologis, alokasi bobot ini didasarkan pada tiga argumen utama:

1. Pergeseran dari Sumber Daya ke Dampak: Merujuk pada Logic Model dan prinsip New Public Management, kinerja sektor publik tidak lagi cukup dinilai dari ketersediaan anggaran atau SDM (Input) serta kepatuhan prosedur (Proses). Richard & Langat (2019) serta Temitope (2023) menegaskan bahwa Input dan Proses hanyalah enabler variables (pendukung). Oleh karena itu, bobot 20% gabungan untuk kedua dimensi ini dianggap proporsional untuk mengakui keberadaannya sebagai prasyarat, tanpa mendominasi nilai kinerja.
2. Output sebagai Refleksi Efektivitas Komunikasi (40%): Sesuai model evaluasi Cutlip, Center & Broom (2012), output adalah bukti nyata berfungsinya organisasi komunikasi. Kualitas pesan, keterjangkauan kanal, dan produk informasi adalah indikator langsung apakah pemerintah bekerja. Gunawan & Dulwahab (2024) mendukung bahwa karena output merefleksikan seluruh upaya proses internal, ia layak mendapatkan bobot signifikan.
3. Outcome sebagai Nilai Substansial (40%): Mengacu pada Teori Excellence in Public Relations (Grunig & Grunig, 2008) dan kerangka kerja impact oriented, keberhasilan sejati komunikasi diukur dari perubahan pada audiens baik itu pemahaman, kepercayaan, maupun perilaku (Jo & Nabatchi, 2020). Pemberian

bobot terbesar (setara dengan output) menegaskan bahwa Indeks KPIP berorientasi pada kepuasan dan manfaat yang diterima masyarakat (Public Value), bukan sekadar aktivitas birokrasi..

Dengan demikian, bobot 10–10–40–40 mencerminkan model evaluasi modern yang lebih menekankan hasil dan dampak ketimbang sumber daya dan prosedur. Penekanan ini juga selaras dengan paradigma new public management dan public value, yang melihat kualitas layanan publik dari perspektif pengguna atau masyarakat, bukan hanya dari aktivitas internal birokrasi.

Penentuan skor indeks didasarkan pada skor rata-rata jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan. Skor diambil melalui perhitungan interval skor tertinggi dan skor terendah, yang dibagi oleh jumlah kategori indeks, meliputi: Sangat Buruk, Buruk, Cukup, Baik, Sangat Baik.

### **Pengukuran skor rata-rata tiap variabel**

Setiap variabel dihitung rata-ratanya, hal ini penting agar nilai indeks kembali ke skala asli dan bisa diperbandingkan, terlepas dari jumlah pertanyaan di setiap variabel. Rata-rata diambil melalui rumus:

$$\bar{x} = \frac{\sum \text{Nilai Jawaban Responden}}{N \text{ Pertanyaan}}$$

Contoh:

Jika pada variabel A terdapat total 30 pertanyaan dengan jumlah nilai keseluruhan jawaban responden adalah 225, maka rata-ratanya adalah 7,5.

### **Transformasi data**

Indeks biasanya ditransformasikan ke dalam skala 0–100 (puluhan) karena alasan komparabilitas, interpretasi, dan standarisasi. Skala ini memudahkan pembacaan hasil sebagai “persentase”, sehingga lebih intuitif dipahami publik maupun pembuat kebijakan dibandingkan angka mentah skala 1–10. Selain itu, transformasi ke skala 0–100 meningkatkan sensitivitas data untuk menangkap perbedaan kecil, memungkinkan benchmarking antar waktu atau antar wilayah, serta mengikuti praktik standar berbagai model indeks kepuasan internasional seperti American Customer Satisfaction Index (ACSI) yang memang dirancang dengan skala 0–100 (Morgeson et al., 2023). Transformasi data dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Indeks Variabel} = \frac{x}{5} \times 10$$

### Penentuan indeks berdasarkan kategori

Pada penentuan indeks, digunakan data interval yang didasarkan pada nilai maksimum dan minimum jawaban responden. Seperti yang sudah dibahas, kategori pada indeks ini berjumlah 6. Berikut merupakan perhitungan interval:

$$\text{Interval} = \frac{(\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum})}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Kemudian, rumus tersebut diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan indeks saat ini.

$$\text{Interval} = \frac{(100 - 10)}{5} = \frac{90}{5} = 18$$

Sehingga didapat nilai interval pada penelitian ini adalah 18. Berikut rentang interval pada setiap kategorinya.

Tabel 63 Rentang Skor Indeks

Rentang Indeks	Kategori
10-28	Sangat Buruk
29-46	Buruk
47-64	Sedang
65-82	Baik
83-100	Sangat Baik

Rentang indeks yang telah ditentukan memberikan kejelasan dalam mengelompokkan persepsi responden ke dalam kategori yang mudah dipahami. Rentang indeks ini dapat digunakan baik pada setiap variabel maupun dalam penyimpulan hasil penelitian secara umum.

## Lampiran 4. Item Pertanyaan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

### SURVEI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 KEMENTERIAN / LEMBAGA / DAERAH

#### GAMBARAN UMUM

Survei Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik tahun 2025 bertujuan untuk **mengukur pengelolaan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Negara/Daerah.**

Survei ini diselenggarakan oleh tim Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital tahun anggaran 2025. Mohon diisi oleh Satuan Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi komunikasi dan kehumasan di bawah Sekretariat Jenderal/ yang setingkat.

Tidak ada jawaban salah atau benar dalam menjawab kuesioner ini. Mohon diisi sesuai dengan pengalaman, data yang dimiliki, dan pendapat Bapak/Ibu. ~~Respon~~ ~~Bapak/Ibu~~ akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik ke depan.

Nama Kementerian/Lembaga/Daerah	Sesuai daftar K/L dengan urutan alfabetis + pemerintah provinsi (disebutkan nama provinsinya) 121 jumlahnya
Satuan Kerja	diisi sendiri

Keterangan:

Bukti boleh sama dengan item lain yang dianggap sesuai. Unggahan bukti harus terbaru maksimal satu tahun terakhir (2025).

#### I. KAPASITAS INSTITUSI

IC\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Pengelolaan komunikasi publik di organisasi tempat saya bekerja memiliki...

No	Indikator	IC_01 Skala 1-6	Bukti Dukung
A.	Mandat Resmi Contoh: Surat Keputusan (SK), Surat Tugas (ST)		Tidak Diperlukan

B.	<p>Kepastian Hukum</p> <p>Contoh bukti: Aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diacu seperti UU, Perpres, Inpres, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Perda dan lainnya. Jika bukti lebih dari 1 (satu), lampirkan bukti aturan dan ketentuan yang menjadi acuan utama</p>		Unggah Satu Bukti Terbaik
C.	<p>Struktur Organisasi yang Mendukung Proses Kerja</p> <p>Contoh bukti: Dokumen SOTK</p>		Unggah Satu Bukti Terbaik
D.	<p>Sumber Daya Manusia yang Memadai (Jumlah SDM yang terlibat dalam pengelolaan komunikasi publik)</p>		Tidak Diperlukan
E.	<p>Sumber Daya Manusia yang Kompeten</p> <p>Contoh bukti: Dokumen Sertifikasi dan/atau Pelatihan Pranata Humas dan tenaga pendukung lainnya</p>		Unggah Satu Bukti Terbaik
F.	<p>Anggaran yang Memadai</p>		Tidak Diperlukan
G.	<p>Kemudahan berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Lainnya (Koordinasi merupakan kerja sama secara sewaktu-waktu atau insidental. Misalnya, rapat bersama untuk isu tertentu)</p>		Tidak Diperlukan

H.	Integrasi dengan Instansi Pemerintah Lainnya (Integrasi merupakan kerja sama secara terus-menerus, kontinu atau berkelanjutan. Misalnya, integrasi kampanye untuk isu prioritas nasional)		Tidak Diperlukan
----	---	--	------------------

- I. Apakah ada anggaran komunikasi publik di satuan kerja/perangkat daerah lain di organisasi Anda? Ya/Tidak
- J. Berikan komentar Anda terkait tantangan dan dukungan yang diperlukan untuk pengelolaan komunikasi publik .....  
(open question)
- IC\_02 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi tempat saya bekerja sejauh ini memproduksi Iklan Layanan Masyarakat yang.....

No	Indikator	IC_02 Skala 1-6	Bukti Dukung
A.	Memicu Respon Positif		Unggah Satu Bukti Terbaik
B.	Bebas dari Kepentingan Pribadi		Unggah Satu Bukti Terbaik
C.	Bebas dari Kepentingan Golongan		Unggah Satu Bukti Terbaik

IC\_03 Apakah Satuan Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan di organisasi tempat saya bekerja selama Januari – September 2025

No	Indikator	Bukti Dukung
A	Membuat sendiri konten/bahan informasi tentang Program Prioritas Nasional  (Unggah satu contoh terbaik sebagai bukti, bukti didasarkan pada rencana kerja pemerintah tahun 2025)	1. Jumlah Konten 2. Unggah Bukti
B	Menyediakan konten/bahan informasi tentang Program Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis K/L/D  (Unggah satu contoh terbaik sebagai bukti, bukti didasarkan pada rencana kerja pemerintah tahun 2025)	1. Jumlah Konten 2. Unggah Bukti

## II. KOMUNIKASI STRATEGIS

SC\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Berdasarkan pengalaman saya, organisasi tempat saya bekerja melakukan hal-hal di bawah ini dalam pengelolaan komunikasi publik:

No	Indikator	SC_01 Skala 1-6	Bukti Dukung
A.	Pengumpulan Data Pendukung		Unggah Satu Bukti Terbaik (Dapat berupa dokumen strategi komunikasi, catatan rapat, laporan, nota dinas, atau lainnya)
B.	Pengumpulan Informasi dari Pemangku Kepentingan		Unggah Satu Bukti Terbaik (Dapat berupa catatan rapat, laporan, atau lainnya)
C.	Analisis terhadap Situasi Terkini		Unggah Satu Bukti Terbaik (Dapat berupa catatan rapat, laporan, atau lainnya)
D.	Analisis Pemangku Kepentingan		Unggah Satu Bukti Terbaik (Dapat berupa catatan rapat, laporan, atau lainnya)
E.	Identifikasi Masalah		Unggah Satu Bukti Terbaik

			(Dapat berupa catatan rapat, <del>laporan</del> , atau lainnya)
F.	Penetapan Tujuan/Sasaran		Unggah Satu Bukti Terbaik (Dapat berupa catatan rapat, <del>laporan</del> , atau lainnya)
G.	Penyusunan <del>Linimasa</del> (timeline)		Unggah Satu Bukti Terbaik (Dapat berupa catatan rapat, laporan, atau lainnya)
H.	Penyusunan Anggaran		Unggah Satu Bukti Terbaik (Dapat berupa catatan rapat, laporan, atau lainnya)
I.	Perancangan Pesan		Unggah Satu Bukti Terbaik (Dapat berupa catatan rapat, laporan, atau lainnya)
J.	Perencanaan media (baik media sosial maupun media daring) yang akan digunakan		Unggah Satu Bukti Terbaik (Dapat berupa catatan rapat, laporan, atau lainnya)
K.	Penugasan Staf/Orang		Tidak Diperlukan
L.	Koordinasi Internal		Tidak Diperlukan
M.	<del>Monitoring</del> (Sebelum Pelaksanaan Berakhir)		Unggah Satu Bukti Terbaik (Dapat berupa catatan rapat, laporan, atau lainnya)
N.	Evaluasi (Sesudah Pelaksanaan Berakhir)		Unggah Satu Bukti Terbaik (Dapat berupa catatan rapat, laporan, atau lainnya)

### III. HAK PUBLIK

PR\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak mudah ~~s.d~~ 6=sangat mudah), Berdasarkan pengalaman Organisasi Anda, sejauh mana organisasi Anda telah memastikan agar publik mudah melakukan hal-hal sebagai berikut:

N o	Indikator	PR_01 Skala 1-6
A.	Mencari <b>informasi publik</b>	
B.	Memperoleh <b>informasi publik</b>	

C.	Menyampaikan <b>informasi kepada lembaga tempat saya bekerja</b>	
D.	Menyampaikan pendapat di depan umum secara bebas	
E.	Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik <b>sebelum</b> kebijakan tersebut disahkan	
F.	Mengetahui informasi mengenai program kebijakan publik yang <b>sedang</b> dijalankan	
G.	Mengetahui bagaimana <b>proses pengambilan keputusan publik</b> oleh pemerintah dilakukan	
H.	Mengetahui <b>alasan di balik pengambilan keputusan publik</b> oleh pemerintah	
I.	Memberikan <b>masukan</b> dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan program pemerintah	

#### IV. CAKUPAN KERJA

SOW\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Sejauh mana organisasi/lembaga tempat anda bekerja melakukan hal-hal di bawah ini **dengan** Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (sebelumnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik) Kementerian Komunikasi dan Digital

N o	Indikator	SOW_01 Skala 1-6	Bukti Dukung
A.	Melakukan Koordinasi		Tidak Diperlukan
B.	Mendapatkan Bimbingan Teknis		Tidak Diperlukan
C.	Mendapatkan Pemantauan		Tidak Diperlukan
D.	Mendapatkan Evaluasi		Tidak Diperlukan
E.	Melaporkan data dan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah		Tidak Diperlukan
F.	Memperoleh bahan informasi publik tentang kebijakan dan program pemerintah		Tidak Diperlukan
G.	Menyebarkan informasi dari Ditjen KPM tentang kebijakan dan program pemerintah kepada publik		Unggah Satu Bukti Terbaik Bukti boleh sama dengan item lain yang dianggap sesuai.

SOW\_02 Jumlah kegiatan yang telah organisasi Anda lakukan selama Januari –  
 MI\_01 September 2025 terkait hal-hal berikut:

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Data Dukung</b>
A	Penyampaian Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
B	Penyampaian Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
C	Pembaruan atau <i>update</i> Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
D	Penyampaian Pengumuman tentang Layanan Informasi Publik	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
E	Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
F	Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi SDM Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
G	Sosialisasi tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
H	Bimbingan Teknis Bidang Komunikasi Publik	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik

SOW\_03 Jumlah penyampaian informasi yang telah organisasi Anda lakukan melalui berbagai saluran komunikasi selama Januari – September 2025, yaitu ...

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Data Dukung</b>
A	Iklan layanan masyarakat di media massa (media cetak, media daring, televisi, radio)	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
B	Iklan layanan masyarakat di media sosial (berbagai platform media sosial)	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
C	Iklan layanan masyarakat di internet atau situs web	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
D	Konten berbayar dari <i>influencer</i> (pemengaruh)	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
E	Berita media massa (media cetak, media daring, televisi, radio)	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
F	Tokoh masyarakat	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
G	Tokoh agama	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
H	Informasi dari sesama <i>warganet</i> atau pengguna media sosial	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
I	Situs web pemerintah	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik

J	Aplikasi pemerintah	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
K	Akun media sosial pemerintah (berbagai platform media sosial)	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
L	Lembaga penyiaran publik (TVRI, RRI)	1. Jumlah Total 2. Unggah Bukti Terbaik
M	Lainnya	Sebutkan

SOW\_04 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi saya Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah kepada pemangku kepentingan secara:

No	Indikator	SOW_04 Skala 1-6	Bukti Dukung
A.	Lintas sektoral		Unggah Satu Bukti Terbaik
B.	Lintas daerah		Unggah Satu Bukti Terbaik
C.	Cepat Mis. Informasi mendesak untuk disampaikan atau perubahan kebijakan		Unggah Satu Bukti Terbaik
D.	Tepat Mis. Informasi yang sesuai dengan kebijakannya		Unggah Satu Bukti Terbaik
E.	Objektif (tidak memihak atau dipengaruhi pendapat/kepentingan pihak tertentu)		Unggah Satu Bukti Terbaik
F.	Berkualitas baik		Unggah Satu Bukti Terbaik
G.	Berwawasan nasional (menjunjung persatuan, kesatuan dan kepentingan nasional)		Unggah Satu Bukti Terbaik
H.	Akurat (presisi dan terperinci) terkait detail data seperti jumlah, tanggal dan rincian lainnya		Unggah Satu Bukti Terbaik
I.	Benar (sesuai kondisi sebenarnya)		Unggah Satu Bukti Terbaik
J.	Tidak Menyesatkan		Tidak Diperlukan
K.	Mudah dipahami		Unggah Satu Bukti Terbaik
L.	Tepat waktu		Tidak Diperlukan

SOW\_05 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi saya terlibat dalam koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk hal-hal di bawah ini :

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>SOW_05 Skala 1-6</b>
A.	Perencanaan Komunikasi Publik	
B.	Penyiapan Komunikasi Publik	
C.	Pelaksanaan Komunikasi Publik	
D.	Pemantauan atau <u>monitoring</u> Komunikasi Publik	
E.	Evaluasi Komunikasi Publik	
F.	Perumusan materi informasi publik tentang kebijakan dan program pemerintah yang akan disebarkan ke pemangku kepentingan	

SOW\_06 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Penyusunan strategi komunikasi publik di organisasi tempat saya bekerja mencakup program...

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>SOW_06 Skala 1-6</b>
A.	Komunikasi tematik daerah atau Kementerian/Lembaga	
B.	Prioritas daerah atau Kementerian/Lembaga	
C.	Penanganan komunikasi krisis (mencakup penyiapan atau <u>mitigasi</u> , pengelolaan, dan evaluasi)	

SOW\_07 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Proses penyusunan konten yang diselenggarakan organisasi saya meliputi hal-hal sebagai berikut

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>SOW_07 Skala 1-6</b>	<b>Data Dukung</b>
A.	Membentuk tim penyusun konten		Tidak Diperlukan
B.	Menyusun konten terkait kebijakan dan program pemerintah		Tidak Diperlukan
C.	Mengemas ulang konten yang berasal dari Pemerintah Pusat		Unggah Satu Bukti Terbaik

SOW\_08 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi saya dalam hal Diseminasi informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik melakukan hal-hal di bawah ini.

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>SOW_08 Skala 1-6</b>
A.	<b>Mengelola media</b> yang dimiliki instansi	
B.	<b>Menyelenggarakan diseminasi informasi</b> melalui media yang dimiliki instansi	
C.	<b>Menyelenggarakan evaluasi pemanfaatan media</b> yang dimiliki instansi	

SOW\_09 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Berikut ini adalah gambaran mengenai pelayanan informasi publik di organisasi tempat saya bekerja.

No	Indikator	SOW_09 Skala 1-6	Bukti
A.	Ada <b>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</b>		Tidak Diperlukan
B.	Memanfaatkan <b>teknologi informasi</b> (Contoh: aplikasi berbagi pakai, situs web, aplikasi, dst)		Tidak Diperlukan
C.	Merencanakan <b>prosedur</b> pengaduan masyarakat (Contoh bukti: Prosedur Operasional Baku (POB) atau Standard Operating Procedure (SOP))		Unggah Satu Bukti Terbaik
D.	Menyiapkan <b>sarana</b> pengaduan masyarakat (Contoh kanal komunikasi yang digunakan)		Unggah Satu Bukti Terbaik
E.	Menyiapkan <b>sumber daya</b> pengelolaan pengaduan masyarakat		Tidak Diperlukan
F.	Melaksanakan <b>pengelolaan</b> pengaduan masyarakat		Tidak Diperlukan
G.	Melaksanakan <b>monitoring</b> pengelolaan pengaduan masyarakat		Unggah Satu Bukti Terbaik
H.	Melaksanakan <b>pelaporan</b> pengelolaan pengaduan masyarakat		Unggah Satu Bukti Terbaik
I.	Melakukan <b>evaluasi</b> pengelolaan pengaduan masyarakat		Unggah Satu Bukti Terbaik

SOW\_10 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Berikut adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi saya demi menjalin **hubungan/relasi dengan media**

No	Indikator	SOW_10 Skala 1-6
A.	Konferensi pers ( <i>press conference</i> )	
B.	Kunjungan (oleh) pers ( <i>site visit</i> )	
C.	Kunjungan ke media ( <i>media visit</i> )	
D.	Pertemuan dengan pemimpin redaksi ( <i>editor's meeting</i> )	
E.	Liputan media	
F.	Klarifikasi pemberitaan	

SOW\_11 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi Saya dalam hal Kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) atau komunitas/kelompok lainnya melakukan hal-hal berikut:

No	Indikator	SOW_11 Skala 1-6	Bukti Dukung
A.	Melaksanakan pemetaan komunitas		Tidak Diperlukan
B.	Melaksanakan koordinasi antar instansi		Tidak Diperlukan
C.	Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia		Tidak Diperlukan
D.	Menyelenggarakan/memfasilitasi pengembangan kapasitas (bimbingan teknis/ <del>workshop</del> / lokakarya/ sarasehan/ forum/ kegiatan peningkatan <del>literasi informasi</del> )		Tidak Diperlukan
E.	Menyediakan bahan informasi bersama		Unggah Satu Bukti Terbaik
F.	Merancang bahan informasi bersama		Tidak Diperlukan
G.	Melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki komunitas/kelompok lainnya		Unggah Satu Bukti Terbaik
H.	Melaksanakan kompetisi atau pemberian penghargaan bagi komunitas/kelompok lainnya		Unggah Satu Bukti Terbaik
I.	Melaksanakan <del>monitoring</del> dan evaluasi		Unggah Satu Bukti Terbaik

SOW\_12 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi Saya Melakukan penguatan kapasitas **Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik (SDMKP)** dengan cara:

No	Indikator	SOW_012 Skala 1-6	Bukti Dukung
A.	<b>Memetakan kebutuhan</b> pengembangan kapasitas		Unggah Satu Bukti Terbaik
B.	Melaksanakan <del>workshop</del> /lokakarya/bimbingan teknis		Unggah Satu Bukti Terbaik
C.	<b>Memfasilitasi</b> pengembangan kapasitas		Unggah Satu Bukti Terbaik
D.	Melakukan <b>evaluasi</b> hasil pengembangan kapasitas		Unggah Satu Bukti Terbaik

SOW\_13 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Organisasi saya Melakukan kegiatan Monitoring terkait hal-hal berikut:

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>SOW_13 Skala 1-6</b>	<b>Bukti</b>
A.	Informasi kebijakan		Unggah Satu Bukti Terbaik
B.	Opini publik		Unggah Satu Bukti Terbaik
C.	Aspirasi publik		Unggah Satu Bukti Terbaik

SOW_15 MI_02	Apakah organisasi Anda memiliki Prosedur Operasi Standar (SOP) dalam melakukan komunikasi krisis?	1. Ya 2. Tidak Unggah Bukti jika YA
SOW_18	Bagaimana organisasi Anda menangani situasi krisis yang pernah terjadi?	<i>Open Question</i>
SOW_19	Apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam melaksanakan lingkup kerja yang telah ditetapkan?	<i>Open Question</i>
SOW_20	Berikan masukan tentang hal-hal yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan dalam melaksanakan lingkup kerja yang telah berjalan selama ini.	<i>Open Question</i>

## V. PRINSIP KOMUNIKASI PUBLIK

PCP\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak setuju s.d 6=sangat setuju), Berdasarkan pengalaman saya, organisasi tempat saya bekerja telah melakukan hal-hal di bawah ini terkait komunikasi program dan kebijakan pemerintah

	<b>Indikator</b>	<b>Skala 1-6</b>
A	<u>Mendiseminasikan</u> informasi publik secara <b>proaktif</b>	
B	Mengutamakan kepentingan publik <b>di atas kepentingan pribadi</b>	
C	Mengutamakan kepentingan publik <b>di atas kepentingan kelompok</b>	
D	Menyediakan <b>informasi kampanye komunikasi publik</b>	

E	Menyediakan informasi mengenai anggaran kampanye komunikasi publik	
F	Menyediakan informasi mengenai hasil yang diharapkan dari kampanye komunikasi publik	
G	Menyediakan informasi mengenai dampak dari kampanye komunikasi publik	
H	Mendengarkan masukan masyarakat ketika terjadi situasi darurat atau krisis	

- I. Apa Hal-hal yang anda pelajari dalam melaksanakan komunikasi publik program dan kebijakan? ..... (open question)

## VI. PELIBATAN KOMUNIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN

SE\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak sesuai s.d 6=sangat sesuai), Sejauh mana Organisasi tempat Anda bekerja telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan terkait kebijakan dan program pemerintah?

A = Menyampaikan Informasi

B = Menerima informasi atau umpan balik

C = Bertukar informasi untuk membangun dialog

D = Melibatkan dalam perencanaan/penyiapan

E = Melibatkan dalam pelaksanaan

F = Melibatkan dalam pemantauan/ monitoring

G = Melibatkan dalam evaluasi

Pemangku Kepentingan	A	B	C	D	E	F	G
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan akademisi/ahli dalam hal:							
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Pelaku Usaha dalam hal:							
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Instansi Pemerintah/OPD Lainnya dalam hal:							
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Media Massa dalam hal:							
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Platform Digital dalam hal:							

Organisasi tempat saya bekerja melibatkan <u>Influencer</u> dalam hal:							
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Tokoh Masyarakat dalam hal:							
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Tokoh Agama dalam hal:							
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Komunitas informasi masyarakat (KIM) atau komunitas/kelompok lainnya dalam hal:							

<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Perencanaan (D)</b>	<b>Pelaksanaan (E)</b>	<b>Evaluasi (G)</b>
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Kelompok Perempuan dalam hal:			
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Kelompok Anak dalam hal:			
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Kelompok Lanjut Usia dalam hal:			
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Kelompok <u>Disabilitas</u> dalam hal:			
Organisasi tempat saya bekerja melibatkan Masyarakat Wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dalam hal:			

SE_02	Berikut adalah pertanyaan terkait <b>mitra (pihak di luar pemerintahan)</b> dalam pelaksanaan komunikasi publik:
MI_05	

A	Jumlah mitra yang dilibatkan	1. Isian jumlah 2. Unggah bukti
B	Jumlah kegiatan kolaborasi	1. Isian jumlah
		2. Unggah bukti

## Lampiran 5. Item Pertanyaan Publik Kunci

### INSTRUMEN PUBLIK KUNCI SURVEI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

**GAMBARAN UMUM:** Survei Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui pendapat dan aspirasi publik dari publik terkait pengelolaan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Survei ini dilaksanakan oleh tim Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital tahun anggaran 2025.

Mohon diisi sesuai dengan pengalaman dan perasaan Bapak/Ibu. Tidak ada jawaban salah atau benar dalam pengisian kuesioner ini. Data yang diisi oleh Bapak/Ibu akan dijaga dan hanya digunakan untuk peningkatan kualitas komunikasi publik.

Petunjuk untuk Enumerator:

1. Bagian ini wajib diisi sebelum melanjutkan ke kuesioner utama.
2. Ajukan empat pertanyaan berikut secara lisan kepada calon responden
3. Saat mengajukan Pertanyaan 1, jika diperlukan, jelaskan kepada responden bahwa “instansi pemerintah pusat” juga mencakup lembaga negara independen (state auxiliary body) seperti KPK, Komisi Yudisial, Komnas HAM, KPAI, KPPU, KPU, KPI dan Lainnya
4. Berikan skor yang sesuai dengan jawaban responden pada tabel di bawah ini.
5. Jumlahkan skor dari keempat jawaban. Jika total skor minimal 12, maka responden memenuhi syarat dan dapat melanjutkan ke kuesioner utama. Jika kurang dari 12, hentikan wawancara dengan sopan.
6. Proses penyaringan ini bukan hanya untuk seleksi, tetapi juga menjadi bagian dari proses re-konfirmasi laporan yang nantinya harus Anda serahkan terkait setiap responden. Oleh karena itu, pastikan pengisian bagian ini dilakukan dengan akurat dan cermat.

Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalaman Bapak/Ibu dalam mencari atau menerima informasi dari pemerintah dalam satu tahun terakhir.

No	Pertanyaan	0	1-5	6-10	>10	Ket
		1	2	3	4	
1	Mencari informasi Melalui saluran daring (penelusuran di website resmi instansi, akun resmi media sosial, whatsapp, email) maupun luring (mengirim surat permintaan informasi, mendatangi kantor) ke instansi pemerintah pusat Kementerian, lembaga, badan di tingkat pemerintah pusat <sup>1</sup>					
2	Mencari informasi Melalui saluran daring (penelusuran di website resmi instansi, akun resmi media sosial, whatsapp, email) maupun luring (mengirim surat permintaan informasi, mendatangi kantor) Dinas informasi dan komunikasi pemerintah provinsi/kabupaten/daerah dan perwakilan auxiliary body di tingkat daerah					
3	Memperoleh informasi yang disebarluaskan instansi pemerintah pusat Kementerian, lembaga, badan di tingkat pemerintah pusat <sup>2</sup> . melalui berbagai saluran komunikasi seperti dalam bentuk teks, infografis, iklan di online (website, whatsapp, email, akun resmi di media sosial); elektronik (televisi, radio), media cetak (koran, majalah, tabloid, brosur), media luar ruang (poster, baliho)					
4	Memperoleh informasi yang disebarluaskan instansi pemerintah daerah Dinas informasi dan komunikasi pemerintah provinsi/kabupaten/daerah dan perwakilan auxiliary body di tingkat daerah melalui berbagai saluran Komunikasi seperti dalam bentuk teks, infografis, iklan di online (website, whatsapp, email, akun resmi di media sosial); elektronik (televisi, radio), media cetak (koran, majalah, tabloid, brosur), media luar ruang (poster, baliho)					

Jika sudah memenuhi skor akhir 12 atau lebih, maka silahkan lanjutkan wawancara dengan responden, namun jika skor akhir diperoleh kurang dari 12. Silahkan cari responden lainnya.

<sup>1</sup> Termasuk termasuk lembaga yang dikategorikan sebagai state auxiliary body (KPK, Komisi Yudisial, Komnas HAM, KPAI, KPPU, KPU, KPI)

Nama Institusi/organisasi/lembaga :  
 Satuan Kerja/profesi :  
 Provinsi :

MI\_10 Apa Saja Program di bawah Ini yang paling anda ketahui?

No	Program	MI_10 (Tahu/Tidak tahu)
1.	Makan Bergizi Gratis (MBG)	
2.	Cek Kesehatan Gratis (CKG)	
3.	Sekolah Rakyat	
4.	Sekolah Garuda	
5.	Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Sosial (Bansos)	
6.	Koperasi Merah Putih	
7.	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	
8.	Danantara	
9.	Swasembada Pangan	
10.	Internet Aman	

I.	PENGGUNAAN MEDIA	
MU_01	Pilih media sosial utama yang Anda gunakan sehari hari (Pilih salah satu)	YouTube Instagram Facebook X/Twitter TikTok
MU_02	Pilih stasiun televisi utama yang Anda tonton sehari hari (Pilih salah satu)	TVRI RCTI MNCTV GTV iNews SCTV Indosiar ANTV TvOne Mentari TV MetroTV Trans TV Trans7 RTV Lainnya
MU_03	Sebutkan stasiun radio utama yang Anda dengar sehari hari	1. 2. 3.
MU_04	Sebutkan media cetak utama (surat kabar/ majalah/ tabloid dst) yang Anda baca dalam sehari hari	1. 2. 3.

MU_05	Dari jenis media yang Anda sebutkan di atas, mana saja yang menjadi sumber Anda untuk informasi tentang kebijakan dan program pemerintah?	1. 2. 3.
MU_06	Apakah Anda mengetahui tentang Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)?	1. Ya, Saya mengetahuinya 2. Tidak Tahu
MU_07	Bila ya, mohon berikan pendapat atau komentar Anda tentang Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	..... (jelaskan)

## II. KREDIBILITAS MEDIA

MC\_O1 Dari skala 1 – 6 (1=sangat rendah s.d 6=sangat tinggi), menurut Anda, seberapa besar persetujuan anda terhadap pernyataan terkait kualitas media di bawah ini ?

No	Jenis Media	Memberikan Informasi tentang kebijakan dan program pemerintah	Dapat Dipercaya
A	Televisi (MU_02)		
B	Radio (MU_03)		
C	Media Cetak (MU_04)		
D	Media Daring		
E	Media Sosial (MU_01)		
F	Internet/situs web		
G	Lembaga Penyiaran Publik (RRI, TVRI, atau Radio/Televisi Milik Pemerintah Daerah)		

MC\_O2 Dari skala 1 – 6 (1=sangat rendah s.d 6=sangat tinggi), menurut Anda, seberapa besar persetujuan anda terhadap pernyataan terkait sumber informasi di bawah ini ?

	SUMBER INFORMASI	Memberikan Informasi tentang kebijakan dan program pemerintah	Dapat Dipercaya	Ahli/Kompeten
A	Influencer			
B	Akademisi/Ahli			
C	Tokoh Masyarakat			
D	Tokoh Agama			
E	Netizen/warganet			
F	Pelaku Usaha			

G	Komunitas informasi masyarakat (KIM) atau komunitas/kelompok lainnya			
---	--	--	--	--

MC\_O3 Dari skala 1 – 6 (1=sangat rendah s.d 6=sangat tinggi), menurut Anda, seberapa besar persetujuan anda terhadap pernyataan terkait jenis/bentuk informasi di bawah ini ?

	JENIS/BENTUK INFORMASI	Memberikan Informasi tentang kebijakan dan program pemerintah	Dapat Dipercaya
A	Artikel Berita		
B	Siaran Berita		
C	Situs web resmi pemerintah		
D	Aplikasi pemerintah		
E	Kolaborasi Pemerintah dan Influencer		
F	Media sosial pemerintah		

### III. HAK PUBLIK

PR\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak setuju s.d 6=sangat setuju), Berdasarkan pengalaman anda terkait informasi publik: seberapa setuju anda dengan pernyataan di bawah ini.

	PERNYATAAN	Skala 1-6
A.	Saya mengetahui tempat untuk mencari informasi publik yang relevan dengan kebutuhan	
B.	Saya mengakses informasi publik yang disediakan oleh pemerintah dengan mudah	

PR\_02 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak mudah s.d 6=sangat mudah), Berdasarkan pengalaman anda terkait informasi publik. Sejauh mana anda menilai kemudahan terhadap hal-hal yang Anda butuhkan sebagai berikut:

	Indikator	Skala 1-6
A	Mencari informasi publik	
B	Memperoleh informasi publik	
C	Memiliki informasi publik	
D	Menyimpan informasi publik	
E	Mengolah informasi publik	
F	Menyampaikan informasi ke lembaga	
G	Menyampaikan pendapat di depan umum secara bebas	

H	Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik sebelum kebijakan tersebut disahkan	
I	Mengetahui informasi mengenai program kebijakan publik yang sedang dijalankan	
J	Mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan publik oleh pemerintah dilakukan	
K	Mengetahui alasan di balik pengambilan keputusan publik oleh pemerintah	
L	Memberikan masukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan program pemerintah	

#### IV. PRINSIP KOMUNIKASI PUBLIK

PCP\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak setuju s.d 6=sangat setuju), Berdasarkan pengalaman anda, pemerintah telah:

	Indikator	Skala 1-6
A	Memberikan informasi kepada publik	
B	Memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi	
C	Memberikan informasi yang jelas mengenai program dan kebijakan kepada publik	
D	Memberikan informasi yang jelas mengenai anggaran program dan kebijakan kepada publik	
E	Memberikan informasi yang jelas mengenai hasil yang diharapkan dari kampanye kepada publik	
F	Memberikan informasi yang jelas mengenai dampak dari kampanye kepada publik	
G	Memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok (contoh: partai politik, ormas, golongan, dan suku)	
H	Mendengarkan masukan masyarakat ketika terjadi situasi darurat atau krisis	
I	Memperbaiki kebijakan dan program mereka berdasarkan pengalaman atau hasil yang sudah terjadi sebelumnya	

#### V. PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

SE\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak melibatkan s.d 6=sangat melibatkan), Menurut Anda, sejauh mana Anda memandang bahwa pemerintah melibatkan aktor-aktor berikut dalam proses perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik?

	Aktor	SE_01a. Merancang	SE_01b. Melaksanakan	SE_01c. Mengevaluasi
A	Akademisi/ahli			
B	Pelaku Usaha			
C	Instansi Pemerintah Lainnya			
D	Komunitas informasi masyarakat (KIM) atau komunitas/kelompok lainnya			
E	Media Massa			
F	Kelompok Perempuan			
G	Kelompok Anak			
H	Kelompok Lanjut Usia			
I	Penyandang Disabilitas			
J	Masyarakat 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)			

## VI. INFORMASI TERPERCAYA

TI\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak setuju s.d 6=sangat setuju), Menurut Anda, sejauh mana Anda menilai informasi tentang kebijakan dan program pemerintah sebagai berikut?

	Informasi	Tingkat Kesetujuan (1-6)
A	Saya memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah	
B	Informasi yang diberikan pemerintah benar (sesuai dengan kondisi sebenarnya/yang nyata)	
C	Informasi disampaikan dengan akurat (misalnya jumlah, tanggal dan rincian lainnya)	
D	Informasi tidak menimbulkan tidak menyesatkan	
E	Informasi mudah dipahami publik	
F	Informasi disampaikan tepat waktu (pada saat yang diperlukan/ relevan)	

## VII. KEPERCAYAAN PUBLIK

PT\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak percaya s.d 6=sangat percaya), seberapa percaya Anda terhadap instansi berikut:

	Informasi	Tingkat Kesetujuan (1-6)
A.	Pemerintah Pusat	
B.	Pemerintah Provinsi	
C.	Pemerintah Kabupaten/Kota	

PT\_02 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak mendukung s.d 6=sangat mendukung), Saya mendukung program dan kebijakan yang dijalankan dan dikeluarkan oleh...

	Informasi	Mendukung (1-6)
A.	Pemerintah Pusat	
B.	Pemerintah Provinsi	
C.	Pemerintah Kabupaten/Kota	

PT_03	Dari skala 1-6, menurut Anda, layanan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah.....	Setuju (1-6)
A	Memberikan Informasi yang jelas	
B	Memberikan Informasi yang tepat waktu?	
C	Apakah Anda pernah mengakses laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)?	Ya / Tidak

## VIII. PARTISIPASI PUBLIK

PP\_01 Dari skala 1 – 6 (1=sangat tidak setuju s.d 6=sangat setuju), Berdasarkan pengetahuan saya, masyarakat telah dilibatkan dalam ...

PP\_02 Dari skala 1 - 6 (1=sangat tidak berpartisipasi s.d 6=sangat partisipasi) Seberapa besar partisipasi anda dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kebijakan pemerintah?

No	Partisipasi publik	PP_01 1-6	PP_02 1-6
A.	Penyusunan program dan kebijakan pemerintah		
B.	Pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah		
C.	Evaluasi program dan kebijakan pemerintah		





# Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik 2025

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media  
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

